



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KOTA PALOPO

2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik

- Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Palopo ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
2. Walikota adalah Walikota Palopo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2020;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat APBD Kota Palopo adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan PERDA.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Palopo Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Palopo pada Tahun Anggaran 2020;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan Visi, Misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Pasal 3

RKPD Kota Palopo Tahun 2020 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palopo.

Pasal 4

Uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam Naskah RKPD Kota Palopo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 1 Juli 2019

Pj. **SEKRETARIS DAERAH,**


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 20

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-1
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-6
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-25
	2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-25
	2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	II-25
	2.1.2.1.2. Laju Inflasi	II-27
	2.1.2.1.3. PDRB PerKapita	II-28
	2.1.2.1.4. Indeks Gini	II-28
	2.1.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin	II-29
	2.1.2.1.6. Persentase PAD Terhadap Pendapatan	II-30
	2.1.2.1.7. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	II-30
	2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-31
	2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-31
	2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)	II-31
	2.1.2.2.3. Rata – Rata Lama Sekolah	II-32
	2.1.2.2.4. Angka Harapan Hidup	II-32
	2.1.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk	II-33
	2.1.2.2.6. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	II-33
	2.1.2.2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-34
	2.1.2.2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-35
	2.1.2.2.9. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	II-36
	2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-37
	2.2.3.1. Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga	II-37
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-37
	2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-37
	2.1.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan	II-37
	2.1.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini	II-38
	2.1.3.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar	II-38
	2.1.3.1.1.3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan	II-39
	2.1.3.1.1.4. Angka Partisipasi Murni	II-40
	2.1.3.1.1.5. Angka Partisipasi Sekolah	II-41
	2.1.3.1.1.6. Angka Putus Sekolah	II-42

2.1.3.1.1.7. Angka Kelulusan	II-45
2.1.3.1.1.8. Angka Melanjutkan (AM)	II-47
2.1.3.1.1.9. Fasilitas Pendidikan	II-48
2.1.3.1.1.10 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	II-50
2.1.3.1.1.11 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah .	II-51
2.1.3.1.1.12 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	II-51
2.1.3.1.1.13 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah	II-51
2.1.3.1.1.14 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Dasar	II-53
2.1.3.1.1.15 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Menengah ..	II-55
2.1.3.1.1.16 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	II-56
2.1.3.1.1.17 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15–24 Tahun, Perempuan dan Laki–Laki	II-56
2.1.3.1.1.18 Penduduk Berusia ≥ 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	II-57
2.1.3.1.1.19 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II-58
2.1.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan	II-58
2.1.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 100 Kelahiran Hidup	II-58
2.1.3.1.2.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	II-59
2.1.3.1.2.3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	II-60
2.1.3.1.2.4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	II-61
2.1.3.1.2.5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	II-61
2.1.3.1.2.6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita ...	II-62
2.1.3.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	II-63
2.1.3.1.2.8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk.....	II-63
2.1.3.1.2.9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk .	II-64

2.1.3.1.2.10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	II-64
2.1.3.1.2.11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	II-65
2.1.3.1.2.12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	II-66
2.1.3.1.2.13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	II-66
2.1.3.1.2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	II-67
2.1.3.1.2.15. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Perkapita/Hari) ..	II-67
2.1.3.1.2.16. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	II-69
2.1.3.1.2.17. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	II-69
2.1.3.1.2.18. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	II-70
2.1.3.1.2.19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	II-71
2.1.3.1.2.20. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	II-72
2.1.3.1.2.21. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	II-72
2.1.3.1.2.22. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOT	II-73
2.1.3.1.2.23. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	II-74
2.1.3.1.2.24. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	II-74
2.1.3.1.2.25. Penderita Diare yang Ditangani	II-75
2.1.3.1.2.26. Angka Kejadian Malaria	II-75
2.1.3.1.2.27. Tingkat Kematian Akibat Malaria ..	II-76
2.1.3.1.2.28. Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida	II-76

2.1.3.1.2.29.	Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	II-77
2.1.3.1.2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi	II-77
2.1.3.1.2.31.	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	II-78
2.1.3.1.2.32.	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15–24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	II-78
2.1.3.1.2.33.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin .	II-79
2.1.3.1.2.34.	Cakupan Kunjungan Bayi	II-79
2.1.3.1.2.35.	Cakupan Puskesmas	II-80
2.1.3.1.2.36.	Cakupan Pembantu Puskesmas	II-80
2.1.3.1.2.37.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 ..	II-80
2.1.3.1.2.38.	Cakupan Pelayanan Nifas	II-81
2.1.3.1.2.39.	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	II-82
2.1.3.1.2.40.	Cakupan Pelayanan Anak Balita ...	II-82
2.1.3.1.2.41.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin	II-83
2.1.3.1.2.42.	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	II-83
2.1.3.1.2.43.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	II-84
2.1.3.1.2.44.	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyulidikan Epidemiologi < 24 Jam	II-84
2.1.3.1.3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	II-85
2.1.3.1.3.1.	Pekerjaan Umum	II-85
2.1.3.1.3.1.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	II-85
2.1.3.1.3.1.2.	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk.....	II-85
2.1.3.1.3.1.3.	Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	II-86

2.1.3.1.3.1.4. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) ..	II-86
2.1.3.1.3.1.5. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase /Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	II-86
2.1.3.1.3.1.6. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki lima atau Bangunan Rumah Liar ...	II-87
2.1.3.1.3.1.7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	II-87
2.1.3.1.3.1.8. Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar ..	II-88
2.1.3.1.3.1.9. . Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat ...	II-88
2.1.3.1.3.1.10. Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	II-89
2.1.3.1.3.1.11. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor .	II-89
2.1.3.1.3.1.12. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	II-90
2.1.3.1.3.1.13. Rasio Jaringan Irigasi	II-90
2.1.3.1.3.1.14. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	II-91
2.1.3.1.3.1.15. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	II-91
2.1.3.1.3.1.16. Persentase Areal Kawasan Kumuh	II-92
2.1.3.1.3.1.17. Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan.....	II-93
2.1.3.1.3.1.18. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk .	II-94
2.1.3.1.3.1.19. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	II-94
2.1.3.1.3.2. Penataan Ruang.....	II-95
2.1.3.1.3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	II-95

2.1.3.1.3.2.2. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.....	II-95
2.1.3.1.3.2.3. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	II-96
2.1.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-96
2.1.3.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni	II-96
2.1.3.1.4.2. Rasio Pemukiman Layak Huni	II-97
2.1.3.1.4.3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	II-98
2.1.3.1.4.4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	II-99
2.1.3.1.4.5. Persentase Pemukiman yang Tertata.	II-99
2.1.3.1.4.6. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	II-100
2.1.3.1.4.7. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	II-100
2.1.3.1.4.8. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	II-101
2.1.3.1.4.9. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU...	II-101
2.1.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-102
2.1.3.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	II-102
2.1.3.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	II-102
2.1.3.1.5.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	II-103
2.1.3.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	II-103
2.1.3.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA	II-104
2.1.3.1.6. Bidang Urusan Sosial	II-104
2.1.3.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	II-104
2.1.3.1.6.2. Persentase PMKS yang Tertangani ..	II-105
2.1.3.1.6.3. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	II-106

2.1.3.1.6.4.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	II-106
2.1.3.1.6.5.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	II-107
2.1.3.1.6.6.	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	II-107
2.1.3.1.6.7.	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	II-108
2.1.3.1.6.8.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	II-108
2.1.3.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-109
2.1.3.2.1.	Bidang Urusan Tenaga Kerja	II-109
2.1.3.2.1.1.	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun	II-109
2.1.3.2.1.2.	Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	II-109
2.1.3.2.1.3.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	II-110
2.1.3.2.1.4.	Keselamatan dan Perlindungan	II-110
2.1.3.2.1.5.	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	II-111
2.1.3.2.1.6.	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	II-111
2.1.3.2.1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	II-112
2.1.3.2.1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	II-112
2.1.3.2.1.9.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	II-112
2.1.3.2.1.10.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	II-113

2.1.3.2.1.11. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	II-113
2.1.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-114
2.1.3.2.2.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.....	II-114
2.1.3.2.2.2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	II-114
2.1.3.2.2.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	II-115
2.1.3.2.2.4. Rasio KDRT	II-115
2.1.3.2.2.5. Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	II-115
2.1.3.2.2.6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-116
2.1.3.2.2.7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	II-116
2.1.3.2.2.8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus – Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	II-116
2.1.3.2.2.9. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	II-117
2.1.3.2.2.10. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD	II-117
2.1.3.2.2.11. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP	II-117
2.1.3.2.2.12. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA	II-118
2.1.3.2.2.13. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi	II-118
2.1.3.2.3. Bidang Urusan Pangan	II-118
2.1.3.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama	II-118
2.1.3.2.3.2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	II-119
2.1.3.2.3.3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	II-119
2.1.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan	II-120
2.1.3.2.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat	II-120

2.1.3.2.4.2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	II-120
2.1.3.2.4.3.	Penyelesaian Izin Lokasi	II-121
2.1.3.2.5	Bidang Urusan Lingkungan Hidup.....	II-121
2.1.3.2.5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	II-121
2.1.3.2.5.2.	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	II-121
2.1.3.2.5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	II-122
2.1.3.2.5.4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	II-122
2.1.3.2.5.5.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	II-122
2.1.3.2.5.6.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	II-123
2.1.3.2.5.7.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	II-123
2.1.3.2.5.8.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	II-123
2.1.3.2.5.9.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota Palopo	II-124
2.1.3.2.5.10.	Timbulan Sampah yang Ditangani	II-124
2.1.3.2.5.11.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	II-125
2.1.3.2.5.12.	Persentase Cakupan Area Pelayanan	II-
2.1.3.2.5.13.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani.....	II-125
2.1.3.2.5.14.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Palopo	II-126
2.1.3.2.6.	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	II-126

2.1.3.2.6.1.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk.....	II-126
2.1.3.2.6.2.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	II-127
2.1.3.2.6.3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	II-127
2.1.3.2.6.4.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	II-127
2.1.3.2.6.5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK.....	II-128
2.1.3.2.6.6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	II-128
2.1.3.2.6.7.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran.....	II-128
2.1.3.2.7.	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.....	II-129
2.1.3.2.7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik	II-129
2.1.3.2.7.2.	Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	II-129
2.1.3.2.7.3.	Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	II-129
2.1.3.2.7.4.	Persentase LSM Aktif	II-130
2.1.3.2.7.5.	Persentase LPM Berprestasi..	II-130
2.1.3.2.7.6.	Persentase PKK Aktif	II-130
2.1.3.2.7.7.	Persentase Posyandu Aktif...	II-131
2.1.3.2.8.	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk & KB	II-131
2.1.3.2.8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	II-131
2.1.3.2.8.2.	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek.....	II-131
2.1.3.2.8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	II-132
2.1.3.2.8.4.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	II-132
2.1.3.2.8.5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	II-133

2.1.3.2.8.6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun	II-133
2.1.3.2.8.7. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	II-133
2.1.3.2.8.8. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).....	II-134
2.1.3.2.8.9. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	II-134
2.1.3.2.8.10. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB.....	II-135
2.1.3.2.8.11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB.....	II-135
2.1.3.2.8.12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	II-136
2.1.3.2.8.13. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan.	II-136
2.1.3.2.8.14. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	II-137
2.1.3.2.8.15. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk.....	II-137
2.1.3.2.8.16. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	II-138
2.1.3.2.8.17. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	II-138
2.1.3.2.8.18. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	II-139
2.1.3.2.8.19. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes.....	II-139
2.1.3.2.8.20. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR	

Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	II-139
2.1.3.2.8.21. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga..	II-139
2.1.3.2.8.22. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak ...	II-140
2.1.3.2.8.23. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes.....	II-141
2.1.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan	II-141
2.1.3.2.9.1. Arus Penumpang Angkutan Umum	II-141
2.1.3.2.9.2. Rasio Ijin Trayek	II-142
2.1.3.2.9.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	II-142
2.1.3.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	II-142
2.1.3.2.9.5. Persentase Layanan Angkutan Darat	II-143
2.1.3.2.9.6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	II-143
2.1.3.2.9.7. Pemasangan Rambu – Rambu	II-144
2.1.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi & Informatika.....	II-144
2.1.3.2.10.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	II-144
2.1.3.2.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi	II-144
2.1.3.2.10.3. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	II-145
2.1.3.2.10.4. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	II-145
2.1.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-146
2.1.3.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif ...	II-146
2.1.3.2.11.2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif.....	II-146
2.1.3.2.11.3. Persentase BPR/LKM Aktif ..	II-146
2.1.3.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	II-147
2.1.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal.....	II-147

2.1.3.2.12.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	II-147
2.1.3.2.12.2. Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	II-147
2.1.3.2.12.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	II-147
2.1.3.2.12.4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah).....	II-148
2.1.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-148
2.1.3.2.13.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	II-148
2.1.3.2.13.2. Persentase Wirausaha Muda	II-149
2.1.3.2.13.3. Cakupan Pembinaan Olahraga	II-149
2.1.3.2.13.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	II-149
2.1.3.2.13.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda	II-149
2.1.3.2.13.6. Jumlah Atlet Berprestasi.....	II-150
2.1.3.2.13.7. Jumlah Prestasi Olahraga ...	II-150
2.1.3.2.14. Bidang Urusan Statistik.....	II-150
2.1.3.2.14.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi...	II-150
2.1.3.2.14.2. Buku “Palopo Dalam Angka”	II-150
2.1.3.2.14.3. Buku “PDRB”	II-150
2.1.3.2.15. Bidang Urusan Persandian.....	II-151
2.1.3.2.15.1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	II-151
2.1.3.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan	II-151
2.1.3.2.16.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	II-151
2.1.3.2.16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan...	II-151
2.1.3.2.16.3. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi.....	II-152
2.1.3.2.16.4. Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu.....	II-152
2.1.3.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan	II-152
2.1.3.2.17.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	II-152
2.1.3.2.17.2. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	II-152
2.1.3.2.17.3. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk.....	II-153

2.1.3.2.17.4. Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun.....	II-153
2.1.3.2.17.5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan.....	II-153
2.1.3.2.17.6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat.....	II-153
2.1.3.2.18. Bidang Urusan Kearsipan	II-154
2.1.3.2.18.1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	II-154
2.1.3.2.18.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	II-154
2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan	
2.1.3.3.1. Bidang Urusan Pariwisata	II-154
2.1.3.3.1.1. Kunjungan Wisata	II-154
2.1.3.3.1.2. Lama Kunjungan Wisata	II-155
2.1.3.3.1.3. PAD Sektor Pariwisata	II-155
2.1.3.3.2. Bidang Urusan Pertanian	II-155
2.1.3.3.2.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar.....	II-155
2.1.3.3.2.2. Cakupan Bina Kelompok Petani	II-156
2.1.3.3.3. Bidang Urusan Kehutanan	II-157
2.1.3.3.3.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	II-157
2.1.3.3.3.2. Kerusakan Kawasan Hutan..	II-157
2.1.3.3.3.3. Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan..	II-157
2.1.3.3.4. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II-158
2.1.3.3.4.1. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	II-158
2.1.3.3.5. Bidang Urusan Perdagangan	II-158
2.1.3.3.5.1. Ekspor Bersih Perdagangan ..	II-158
2.1.3.3.5.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	II-158
2.1.3.3.6. Bidang Urusan Perindustrian	II-159
2.1.3.3.6.1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	II-159
2.1.3.3.7. Bidang Urusan Transmigrasi	II-160
2.1.3.3.7.1. Persentase Transmigran Swakarsa	II-160
2.1.3.3.8. Bidang Urusan Kelautan & Perikanan	II-160
2.1.3.3.8.1. Produksi Perikanan.....	II-160

2.1.3.3.8.2. Konsumsi Ikan	II-160
2.1.3.3.8.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan	II-161
2.1.3.3.8.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	II-161
2.1.3.3.8.5. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	II-162
2.1.3.3.8.6. Nilai Tukar Nelayan.....	II-162
2.1.3.4. Fokus Penunjang Urusan	II-162
2.1.3.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan.....	II-162
2.1.3.4.1.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA.....	II-162
2.1.3.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	II-162
2.1.3.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	II-163
2.1.3.4.1.4. Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	II-163
2.1.3.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	II-164
2.1.3.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD.....	II-164
2.1.3.4.1.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	II-164
2.1.3.4.2. Bidang Urusan Keuangan	II-165
2.1.3.4.2.1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	II-165
2.1.3.4.2.2. Persentase SILPA	II-165
2.1.3.4.2.3. Persentase SiLPA Terhadap APBD	II-165
2.1.3.4.2.4. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	II-166
2.1.3.4.2.5. Persentase Belanja Pendidikan (20%)	II-166
2.1.3.4.2.6. Persentase Belanja Kesehatan (10%)	II-167

2.1.3.4.2.7. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung.....	II-167
2.1.3.4.2.8. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	II-168
2.1.3.4.2.9. Penetapan APBD.....	II-168
2.1.3.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	II-169
2.1.3.4.3.1. Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	II-169
2.1.3.4.3.2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	II-169
2.1.3.4.3.3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	II-169
2.1.3.4.3.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	II-170
2.1.3.4.3.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah.....	II-170
2.1.3.4.3.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah.....	II-170
2.1.3.4.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-171
2.1.3.4.4.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	II-171
2.1.3.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	II-171
2.1.3.4.4.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	II-171
2.1.3.4.4.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	II-172
2.1.3.4.5. Bidang Urusan Pengawasan.....	II-172
2.1.3.4.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan	II-172
2.1.3.4.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai	II-172
2.1.3.4.5.3. Jumlah Temuan BPK.....	II-173
2.1.3.4.6. Bidang Urusan Sekretariat Dewan.....	II-173

2.1.3.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat – Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	II-173
2.1.3.4.6.2. Tersusun dan Terintegrasinya program – Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)...	II-173
2.1.3.4.6.3. Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	II-174
2.1.4. Aspek Daya Saing	II-174
2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	II-174
2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi RumahTangga Per Kapita	II-174
2.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani	II-175
2.1.4.1.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita....	II-176
2.1.4.2. Produktivitas Total Daerah	II-176
2.1.4.3. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB	II-177
2.1.4.4. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum.....	II-177
2.1.4.5. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-178
2.1.4.5.1 Rasio Panjang Jalan	II-178
2.1.4.5.2 Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	II-178
2.1.4.5.3 Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga ..	II-179
2.1.4.5.4 Ketaatan terhadap RTRW	II-179
2.1.4.5.5 Jenis dan Jumlah Bank.....	II-179
2.1.4.5.6 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	II-180
2.1.4.5.7 Jenis Kelas dan Jumlah Restoran	II-180
2.1.4.5.8 Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel..	II-180
2.1.4.5.9 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	II-181

2.1.4.5.10 Rasio Ketersediaan Daya Listrik	II-181
2.1.4.5.11 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik.	II-181
2.1.4.5.12 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	II-181
2.1.4.6. Fokus Iklim Berinvestasi	II-182
2.1.4.6.1 Angka Kriminalitas yang Tertangani	II-182
2.1.4.6.2 Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada terhadap Total Kelurahan	II-182
2.1.4.7. Fokus Sumber Daya Manusia	II-183
2.1.4.7.1 Rasio Ketergantungan.....	II-183
2.1.4.7.2 Rasio Kelulusan S1/S2/S3.....	II-184
2.2. Indikator Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-184
2.2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-184
2.2.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal	II-217
2.2.2.1. Bidang Urusan Pendidikan.....	II-217
2.2.3. Capaian Kinerja SDG's/TPB	II-224
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-234
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-238
2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-238
2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-241
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Pertumbuhan dan Komposisi Ekonomi	III-1
3.1.2. Inflasi	III-3
3.1.3. Gini Ratio	III-3
3.1.4. Ketenagakerjaan	III-4
3.1.5. Kemiskinan	III-4
3.1.6. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah	III-4
3.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III-6
3.2.1. Sasaran Ekonomi Makro	III-6
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
3.2.2.1 Pendapatan Daerah	III-6
3.2.2.2 Belanja Daerah	III-12
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-15
3.2.3.1. Belanja Tidak Langsung	III-16
3.2.3.2. Belanja Langsung	III-16
3.2.3.3. Pembiayaan Daerah	III-17
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-19

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-31
	4.2. Isu Strategis	IV-36
	4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2020	IV-38
	4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-46
	4.5. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)	IV-48
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	VI-1
	6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	VI-1
	6.2 Standar Pelayanan Minimal	VI-20
BABA VII	P E N U T U P	VII-1

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan Kota Palopo	II-2
2. Tabel 2.2. Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng Kota Palopo Menurut Kecamatan	II-4
3. Tabel 2.4. Penggunaan Lahan Kota Palopo	II-8
4. Tabel 2.5. Klasifikasi Zona dan Kelas Ancaman Longsor	II-19
5. Tabel 2.6. Kedalaman dan Kelas Ancaman Banjir	II-20
6. Tabel 2.7. Parameter Ancaman Kebakaran	II-21
7. Tabel 2.8. Parameter Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan	II-21
8. Tabel 2.9. Parameter Ancaman gelombang ekstrim dan abrasi	II-22
9. Tabel 2.11. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Palopo Menurut Lapangan Usaha	II-26
10. Tabel 2.12. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014—2018	II-27
11. Tabel 2.13. Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2016-2018	II-27
12. Tabel 2.14. PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2016-2018	II-28
13. Tabel 2.15. Gini Ratio Kota Palopo Tahun 2016-2018	II-28
14. Tabel 2.16. Kondisi Kemiskinan Kota Palopo tahun 2016-2018	II-29
15. Tabel 2.17. Persentase Pendapatan Penduduk Kurang dari USD 1,00 (PPP)	II-30
16. Tabel 2.18. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Palopo Tahun 2016-2018	II-30
17. Tabel 2.19. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016-2018	II-30
18. Tabel 2.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-31
19. Tabel 2.21. Angka Melek Huruf (AMH) Kota Palopo Tahun 2016-2018	II-32
20. Tabel 2.22. Rata-rata Lama sekolah Kota Palopo Tahun 2016-2018	II-32
21. Tabel 2.23. Angka Usia Harapan Hidup Kota Palopo Tahun 2016– 2018	II-33
22. Tabel 2.24. Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2016 –2018	II-33
23. Tabel 2.25. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-33
24. Tabel 2.26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2016 –2018	II-34
25. Tabel 2.27. Pengangguran Terbuka Kota Palopo Tahun 2016– 2018	II-36
26. Tabel 2.28. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Palopo Tahun 2016 - 2018	II-36
27. Tabel 2.29. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-37
28. Tabel 2.30. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-38
29. Tabel 2.31. Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2014 -2018	II-39
30. Tabel 2.32. Persentase Pendidikan yang Ditamatkan Kota Palopo Tahun 2016-2018	II-40
31. Tabel 2.33. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	II-40
32. Tabel 2.34. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	II-41
33. Tabel 2.35. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C	II-41

34. Tabel 2.37. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-42
35. Tabel 2.38. Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-42
36. Tabel 2.39. Persentase Partisipasi Sekolah Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-42
37. Tabel 2.40. Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-43
38. Tabel 2.41. Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-43
39. Tabel 2.42. Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-44
40. Tabel 2.43. Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-45
41. Tabel 2.44. Angka Kelulusan Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-45
42. Tabel 2.45. Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-46
43. Tabel 2.46. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-46
44. Tabel 2.47. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	II-47
45. Tabel 2.48. Persentase Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	II-47
46. Tabel 2.49. Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2013 -2018	II-48
47. Tabel 2.50. Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2013 -2018	II-49
48. Tabel 2.51. Persentase Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2013 -2018	II-49
49. Tabel 2.52. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-50
50. Tabel 2.53. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-51
51. Tabel 2.54. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-52
52. Tabel 2.55. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-53
53. Tabel 2.56. Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar Kota Palopo 2013 2018	II-54
54. Tabel 2.57. Persentase Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Menengah	II-55
55. Tabel 2.58. Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun Perempuan dan Laki – Laki Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-56
56. Tabel 2.59. Persentase Penduduk Berusia ≥ 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	II-57
57. Tabel 2.60. Persentase Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-58
58. Tabel 2.61. Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-59
59. Tabel 2.62. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-59

60. Tabel 2.63. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-60
61. Tabel 2.64. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup(AKABA) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-61
62. Tabel 2.65. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-62
63. Tabel 2.66. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-62
64. Tabel 2.67. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-63
65. Tabel 2.68. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-63
66. Tabel 2.69. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-64
67. Tabel 2.70. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-64
68. Tabel 2.71. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-65
69. Tabel 2.72. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-66
70. Tabel 2.73. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-67
71. Tabel 2.74. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-67
72. Tabel 2.75. Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-68
73. Tabel 2.76. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-69
74. Tabel 2.77. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-70
75. Tabel 2.78. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-70
76. Tabel 2.79. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-71
77. Tabel 2.80. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-72
78. Tabel 2.81. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-72
79. Tabel 2.82. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-73
80. Tabel 2.83. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-74
81. Tabel 2.84. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-75
82. Tabel 2.85. Penderita Diare Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-75
83. Tabel 2.86. Angka Kejadian Malaria Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-75
84. Tabel 2.87. Tingkat Kematian Akibat Malaria Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-76
85. Tabel 2.88. Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-76
86. Tabel 2.89. Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat	

Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-77
87. Tabel 2.90. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-77
88. Tabel 2.91. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-78
89. Tabel 2.92. Cakupan Kunjungan Bayi Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-79
90. Tabel 2.93. Cakupan Puskesmas Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-79
91. Tabel 2.94. Cakupan Pembantu Puskesmas Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-80
92. Tabel 2.95. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-80
93. Tabel 2.96. Cakupan Pelayanan Nifas Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-81
94. Tabel 2.97. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-81
95. Tabel 2.98. Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-82
96. Tabel 2.99. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-82
97. Tabel 2.100. Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-83
98. Tabel 2.101. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-84
99. Tabel 2.102. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kota Palopo Tahun 2013 –2018	II-84
100. Tabel 2.103. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik 2016-2018	II-85
101. Tabel 2.104. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2018	II-85
102. Tabel 2.105. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Kota Palopo Tahun 2016 – 2018	II-86
103. Tabel 2.106. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-86
104. Tabel 2.107. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-87
105. Tabel 2.108. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-87
106. Tabel 2.109. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-88
107. Tabel 2.110. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-88
108. Tabel 2.111. Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-89
109. Tabel 2.112. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-89
110. Tabel 2.113. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-90

111. Tabel 2.114. Persentase Rasio Jaringan Irigasi Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-90
112. Tabel 2.115. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-91
113. Tabel 2.116. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-92
114. Tabel 2.117. Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-93
115. Tabel 2.118. Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-93
116. Tabel 2.119. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-94
117. Tabel 2.120. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-94
118. Tabel 2.121. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-95
119. Tabel 2.122. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-96
120. Tabel 2.123. Rasio Bangunan Ber – IMB Per satuan Bangunan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-96
121. Tabel 2.124. Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-97
122. Tabel 2.125. Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-98
123. Tabel 2.126. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-98
124. Tabel 2.127. Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-99
125. Tabel 2.128. Persentase Pemukiman Yang Tertata Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-99
126. Tabel 2.129. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-100
127. Tabel 2.130. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-100
128. Tabel 2.131. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-101
129. Tabel 2.132. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-101
130. Tabel 2.133. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-102
131. Tabel 2.134. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Palopo Tahun 2014 - 2018	II-102
132. Tabel 2.135. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-103
133. Tabel 2.136. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-103
134. Tabel 2.137. Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-104
135. Tabel 2.138. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-105
136. Tabel 2.139. Persentase PMKS yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-105

137. Tabel 2.140. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-106
138. Tabel 2.141. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-106
139. Tabel 2.142. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-107
140. Tabel 2.143. Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-107
141. Tabel 2.144. Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-108
142. Tabel 2.145. Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-108
143. Tabel 2.146. Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun Di Kota Palopo 2013-2018	II-109
144. Tabel 2.147. Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-110
145. Tabel 2.148. Pencari Kerja yang Ditempatkan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-110
146. Tabel 2.149. Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2013 -2018	II-111
147. Tabel 2.150. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kota Palopo Tahun 2013 -2018	II-111
148. Tabel 2.151. Persentase Pemeriksaan Perusahaan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-112
149. Tabel 2.152. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-113
150. Tabel 2.153. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-113
151. Tabel 2.154. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-113
152. Tabel 2.155. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-114
153. Tabel 2.156. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-114
154. Tabel 2.157. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-115
155. Tabel 2.158. Rasio KDRT Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-115
156. Tabel 2.159. Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-116
157. Tabel 2.160. Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-116
158. Tabel 2.161. Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-117

159. Tabel 2.162. Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-117
160. Tabel 2.163. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-117
161. Tabel 2.164. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-118
162. Tabel 2.165. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-118
163. Tabel 2.166. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-118
164. Tabel 2.167. Persentase Ketersediaan Pangan Utama Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-118
165. Tabel 2.168. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-119
166. Tabel 2.169. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-120
167. Tabel 2.170. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-120
168. Tabel 2.171. Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-120
169. Tabel 2.172. Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-121
170. Tabel 2.173. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-121
171. Tabel 2.174. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-121
172. Tabel 2.175. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-122
173. Tabel 2.176. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-122
174. Tabel 2.177. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-122
175. Tabel 2.178. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-123
176. Tabel 2.179. Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-123
177. Tabel 2.180. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-124
178. Tabel 2.181. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-124
179. Tabel 2.182. Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-124
180. Tabel 2.183. Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-125
181. Tabel 2.184. Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-125
182. Tabel 2.185. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-126
183. Tabel 2.186. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-126

184. Tabel 2.187. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-126
185. Tabel 2.188. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-127
186. Tabel 2.189. Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-127
187. Tabel 2.190. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-127
188. Tabel 2.191. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-128
189. Tabel 2.192. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-128
190. Tabel 2.193. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-128
191. Tabel 2.194. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-129
192. Tabel 2.195. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-129
193. Tabel 2.196. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-129
194. Tabel 2.197. Persentase LSM Aktif Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-130
195. Tabel 2.198. Persentase LPM Berprestasi Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-130
196. Tabel 2.199. Persentase PKK Aktif Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-130
197. Tabel 2.200. Persentase Posyandu Aktif Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-131
198. Tabel 2.201. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-131
199. Tabel 2.202. Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-132
200. Tabel 2.203. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-132
201. Tabel 2.204. Rata-rata jumlah anak per keluarga Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-132
202. Tabel 2.205. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-133
203. Tabel 2.206. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-133
204. Tabel 2.207. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-134
205. Tabel 2.208. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-134
206. Tabel 2.209. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-135
207. Tabel 2.210. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-135
208. Tabel 2.211. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-136
209. Tabel 2.212. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-136
210. Tabel 2.213. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-137

211. Tabel 2.214. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-137
212. Tabel 2.215. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-138
213. Tabel 2.216. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-138
214. Tabel 2.217. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-139
215. Tabel 2.218. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-139
216. Tabel 2.219. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-139
217. Tabel 2.220. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-140
218. Tabel 2.221. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-140
219. Tabel 2.222. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-141
220. Tabel 2.223. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-141
221. Tabel 2.224. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-141
222. Tabel 2.225. Rasio Ijin Trayek Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-142
223. Tabel 2.226. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-142
224. Tabel 2.227. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-142
225. Tabel 2.228. Persentase Layanan Angkutan Darat Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-143
226. Tabel 2.229. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-143
227. Tabel 2.230. Persentase Pemasangan Rambu - Rambu Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-144
228. Tabel 2.231. Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-144
229. Tabel 2.232. Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-144
230. Tabel 2.233. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-145
231. Tabel 2.234. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-145
232. Tabel 2.235. Presentase Koperasi Aktif Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-146

233. Tabel 2.236. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-146
234. Tabel 2.237. Presentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-147
235. Tabel 2.238. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-147
236. Tabel 2.239. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-147
237. Tabel 2.240. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-148
238. Tabel 2.241. Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-148
239. Tabel 2.242. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-148
240. Tabel 2.243. Persentase Wirausaha Muda Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-149
241. Tabel 2.244. Persentase Pembinaan Olahraga Kota Palopo Tahun 2014– 2018	II-149
242. Tabel 2.245. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-149
243. Tabel 2.246. Persentase Pembinaan Atlet Muda Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-149
244. Tabel 2.247. PersentaseAtlet Berprestasi Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-150
245. Tabel 2.248. PersentasePrestasi Olahraga Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-150
246. Tabel 2.249. Ketersediaan Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-150
247. Tabel 2.250. Ketersediaan Buku “Palopo Dalam Angka” Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-150
248. Tabel 2.251. Ketersediaan Buku “PDRB” Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-150
249. Tabel 2.252. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-151
250. Tabel 2.253. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-151
251. Tabel 2.254. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-151
252. Tabel 2.255. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-152
253. Tabel 2.256. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-152
254. Tabel 2.257. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-152
255. Tabel 2.258. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-153
256. Tabel 2.259. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-153
257. Tabel 2.260. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-153
258. Tabel 2.261. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-153
259. Tabel 2.262. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-154

260. Tabel 2.263. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-154
261. Tabel 2.264. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipa Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-154
262. Tabel 2.265. Persentase Kunjungan Wisata Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-154
263. Tabel 2.266. Lama Kunjungan Wisata Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-155
264. Tabel 2.267. Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-155
265. Tabel 2.268. Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-156
266. Tabel 2.269. Persentase Pembinaan Kelompok Tani Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-156
267. Tabel 2.270. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-157
268. Tabel 2.271. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-157
269. Tabel 2.272. Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-157
270. Tabel 2.273. Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-158
271. Tabel 2.274. Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-159
272. Tabel 2.275. Persentase Produksi Perikanan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-160
273. Tabel 2.276. Persentase Konsumsi Perikanan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-160
274. Tabel 2.277. Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-161
275. Tabel 2.278. Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-161
276. Tabel 2.279. Ketersediaan Dokumen RPJPD Kota Palopo	II-162
277. Tabel 2.280. Ketersediaan Dokumen RPJMD Kota Palopo	II-163
278. Tabel 2.281. Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-163
279. Tabel 2.282. Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo	II-163
280. Tabel 2.283. Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-164
281. Tabel 2.284. Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-164
282. Tabel 2.285. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-165
283. Tabel 2.286. Persentase SILPA Kota Palopo Tahun 2016 - 2018	II-165
284. Tabel 2.287. Persentase SiLPA Terhadap APBD Kota Palopo Tahun 2016 - 2018	II-166
285. Tabel 2.288. Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-166
286. Tabel 2.289. Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kota Palopo Tahun 2016 - 2018	II-167
287. Tabel 2.290. Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kota Palopo Tahun 2016 - 2018	II-167

288. Tabel 2.291. Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-168
289. Tabel 2.292. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-168
290. Tabel 2.293. Ketepatan Waktu Penetapan APBD Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-168
291. Tabel 2.294. Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-169
292. Tabel 2.295. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-169
293. Tabel 2.296. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-169
294. Tabel 2.297. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-170
295. Tabel 2.298. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-170
296. Tabel 2.299. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-171
297. Tabel 2.300. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-171
298. Tabel 2.301. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-171
299. Tabel 2.302. Persentase Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-172
300. Tabel 2.303. Persentase Tindak Lanjut Temuan Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-172
301. Tabel 2.304. Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Palopo Tahun 2013 - 2018	II-172
302. Tabel 2.305. Jumlah Temuan BPK Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-173
303. Tabel 2.306. Tersedianya RKT Pada Alat – Alat Kelengkapan DPRD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-173
304. Tabel 2.307. Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-173
305. Tabel 2.308. Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-174
306. Tabel 2.309. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Palopo Tahun 2016 -2018	II-175
307. Tabel 2.310. Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita Kota Palopo Tahun 2016 -2018	II-176
308. Tabel 2.311. Produktivitas Total Daerah Kota Palopo Tahun 2016 –2018	II-177
309. Tabel 2.312. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2016 –2017	II-177
310. Tabel 2.313. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Kota Palopo Tahun 2013 -2017	II-178
311. Tabel 2.314. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-178
312. Tabel 2.315. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-179

313.	Tabel 2.316. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-179
314.	Tabel 2.317. Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo	II-180
315.	Tabel 2.318. Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Palopo dan Kabupaten Sekitar, 2016	II-180
316.	Tabel 2.319. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Palopo Tahun 2014– 2018	II-181
317.	Tabel 2.320. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-181
318.	Tabel 2.321. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Kota Palopo Tahun 2014 - 2018	II-182
319.	Tabel 2.322. Angka Kriminalitas Yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-182
320.	Tabel 2.323. Persentase Desa Berstatus Terhadap Total Kelurahan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-183
321.	Tabel 2.324. Rasio Ketergantungan Kota Palopo Tahun 2016-2018	II-183
322.	Tabel 2.325. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-184
323.	Tabel 2.326. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palopo	II-184
324.	Tabel 2.327. Capaian SPM Pendidikan Kota Palopo Tahun 2016-2018	II-218
325.	Tabel 2.328. Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo Tahun 2016-2017	II-224
326.	Tabel 2.329. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II 2019	II-235
327.	Tabel 2.330. Keterkaitan Sasaran dan Permasalahan Pembangunan	II-238
328.	Tabel 3.1. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo Tahun 2014-2018	III-1
329.	Tabel 3.2. Perbandingan PDRB Harga Berlaku dengan Harga Konstan Kota Palopo Tahun 2014-2018	III-1
330.	Tabel 3.3. PDRB Harga Berlaku Palopo Tahun 2014-2018	III-2
331.	Tabel 3.4. PDRB Harga Berlaku Konstan Palopo Tahun 2014-2018	III-3
332.	Tabel 3.5. Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2014-2018	III-3
333.	Tabel 3.6. Gini Ratio Kota Palopo Tahun 2014-2018	III-3
334.	Tabel 3.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palopo Tahun 2013-2018	III-4
335.	Tabel 3.8. Persentase penduduk miskin di Kota Palopo Tahun 2013-2018	III-4
336.	Tabel 3.9. Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kota Palopo Tahun 2020	III-6
337.	Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palopo Tahun 2018-2021	III-7
338.	Tabel 3.11. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021	III-13
339.	Tabel 3.12. Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021	III-18
340.	Tabel 4.1. Kerangka Pikir Konseptual Masalah, Prioritas Pembangunan dan Tema RKPD Kota Palopo 2020	IV-2
341.	Tabel 4.2. Sinkronisasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKPD Kota Palopo Tahun 2020	IV-5

342.	Tabel 4.3.	Matriks Keterkaitan/Konsistensi Sasaran, Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Palopo Tahun 2020	IV-6
343.	Tabel 4.4.	Kontribusi Program Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2020 Terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Sulsel	IV-14
344.	Tabel 4.5.	Penjelasan Misi dan Keterkaitan dengan Visi	IV-32
345.	Tabel 4.6.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2020	IV-34
346.	Tabel 4.7.	Tingkat Isu, Isu Daerah dan Faktor Penentu Keberhasilan	IV-36
347.	Tabel 4.8.	Matriks keterkaitan dan kerangka konseptual Arah kebijakan, Program Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2020	IV-39
348.	Tabel 4.9.	Penyelarasan Pokok Pikiran DPRD Terhadap Sasaran dan Prioritas Pembangunan 2020	IV-46
349.	Tabel 4.10.	Sinkronisasi Tujuan TPB dan Program Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2020	IV-48
350.	Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020	VI-1
351.	Tabel 6.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020	VI-2
352.	Tabel 6.3.	Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palopo Tahun 2020	VI-21

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1. Hubungan antara Dokumen Perencanaan	I-5
2. Gambar 2.1. Peta Letak dan Kondisi Geografis	II-3
3. Gambar 2.2. Topografi	II-3
4. Gambar 2.3. Peta Geologi	II-4
5. Gambar 2.4. Peta Hidrolik	II-6
6. Gambar 2.5. Peta DAS Kota Palopo	II-7
7. Gambar 2.6. Peta Rawan Banjir Kota Palopo	II-20
8. Gambar 2.7. Peta Rawan Kebakaran	II-21
9. Gambar 5.1. Log Frame Program RKPD 2020	V-1

BAB. I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah dan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun APBD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan melalui serangkaian tahapan dan tatacara yang antara lain meliputi:

- (a) Penyusunan rancangan awal RKPD,
- (b) Penyusunan rancangan RKPD,
- (c) Pelaksanaan Musrenbang RKPD,
- (d) Perumusan rancangan akhir, serta
- (e) Penetapan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan;

-
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;

-
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1)
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ;
 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032);
 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kota Palopo 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo.
 21. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palopo 2018-2023

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKP dan RKPD Kota Palopo Tahun 2020

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Penyusunan RKPD 2020 Kota Palopo memperhatikan isu strategis dalam RKP Nasional dan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah sehingga terjadi keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah. Pembangunan Daerah sendiri sejatinya merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten/Kota harus mengacu kepada RKP.

RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 Dengan RKPD Kota Palopo Tahun 2020

Penyusunan RKPD 2020 Kota Palopo diselaraskan dengan RPJMD Kota Palopo 2018-2023 sebab merupakan periode kedua dari RPJMD dimana konsistensi antara semua dokumen perencanaan harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD 2020.

RKPD Kota Palopo Tahun 2020, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

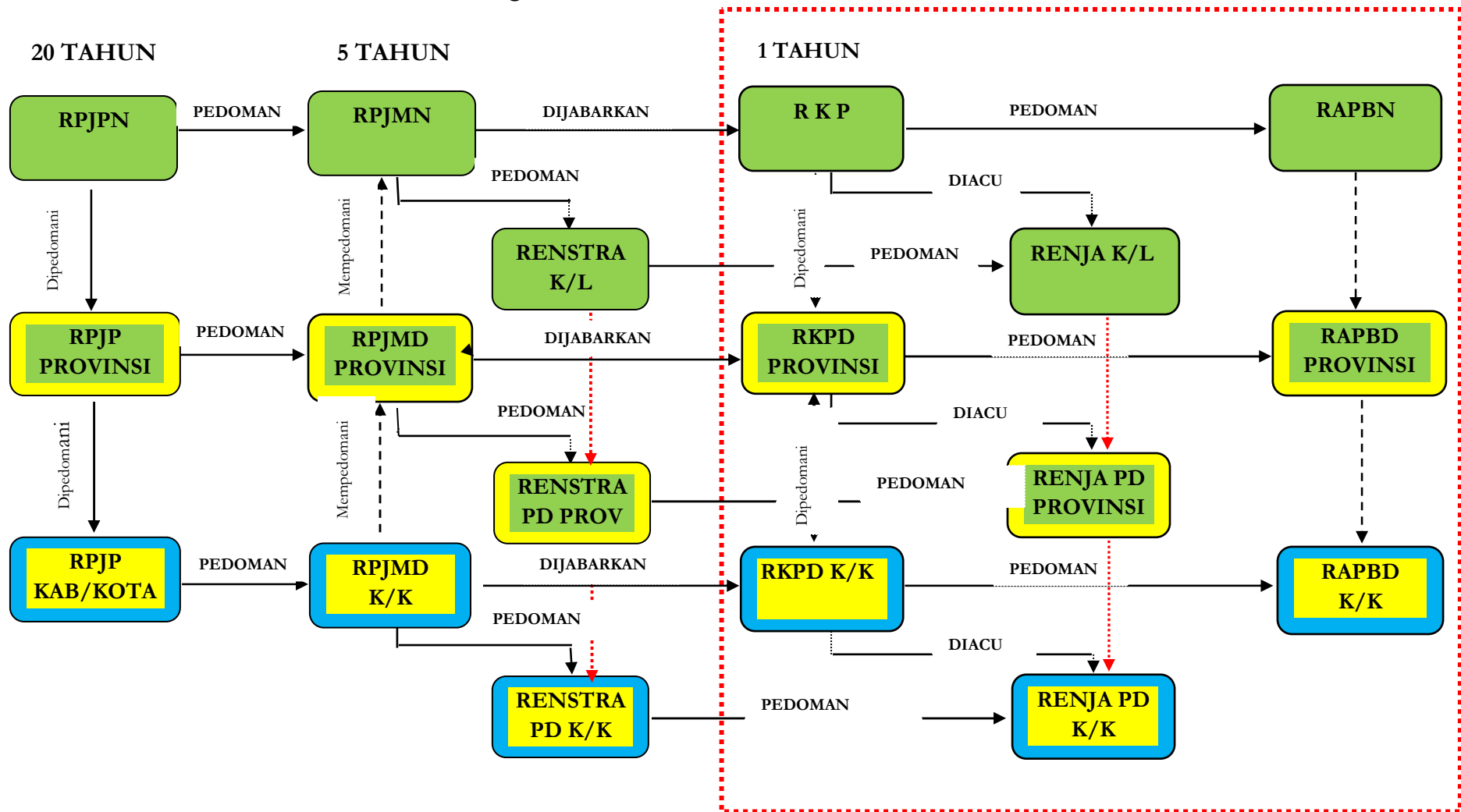
Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD lingkup Pemerintah Kota Palopo mengacu pada RKPD Kota Palopo Tahun 2020.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 selanjutnya, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tahapan Penyusunan RKPD

Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan hasil kinerja Tim melalui proses yang sistematis yaitu : pembentukan tim, pengumpulan data, identifikasi permasalahan, telaah dokumen, diskusi dan perumusan secara keseluruhan.

Gambar 1.1.
Hubungan antara Dokumen Perencanaan



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Palopo Tahun 2020 sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan di Kota Palopo.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2020 ini adalah :

1. Menyediakan pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020;
2. Menjaga sinergi perencanaan pembangunan tahunan antar Pusat, dan Daerah serta menjabarkan sasaran dalam RPJMD ke dalam rencana yang lebih operasional;
3. Menjaga keselarasan antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang daerah Kota Palopo dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menyediakan tolak ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
 - 1.3.1. RKP dan RKPD Kota Palopo Tahun 2020
 - 1.3.2. RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 dengan RKPD Kota Palopo Tahun 2020
 - 1.3.3. RKPD Kota Palopo Tahun 2020, Renja OPD Kota Palopo dan KUA-PPAS
 - 1.3.4. Tahapan Penyusunan RKPD
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2020

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

4.4. Pokok – Pokok Pikiran DPRD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

BAB VII PENUTUP

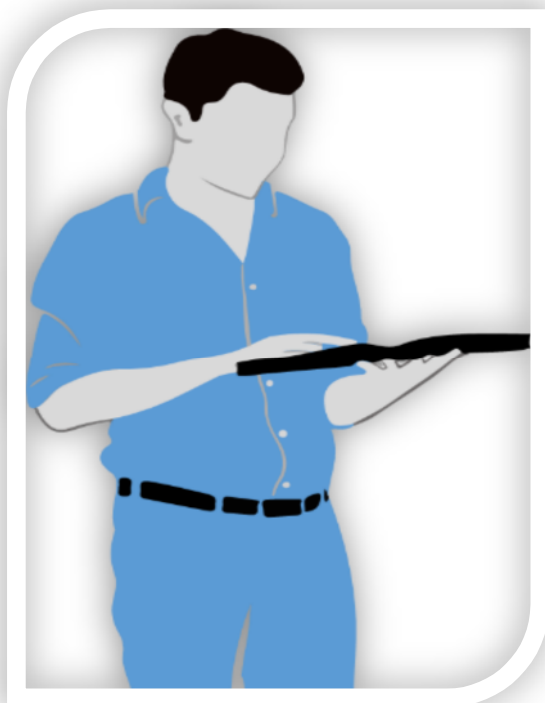
BAB. II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

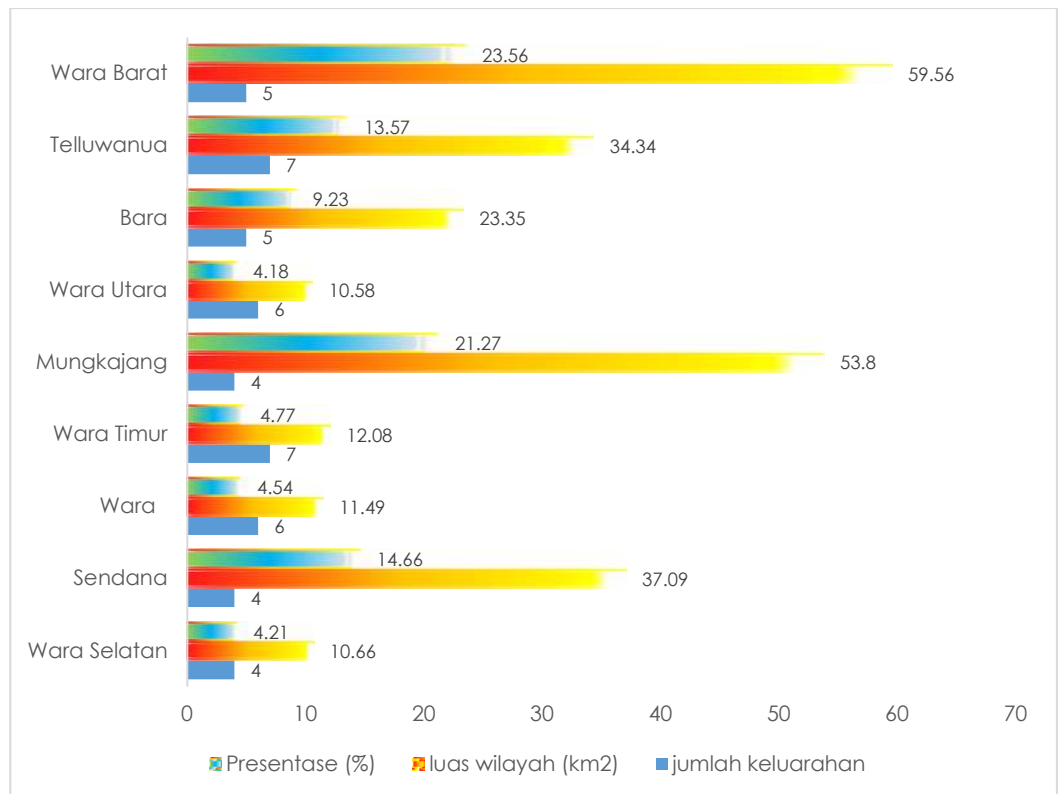
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini :

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kondisi Geografi



Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, Kota Palopo mempunyai luas wilayah **252,99** km², memiliki **9 Kecamatan**, dan **48 Kelurahan**. Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah Utara, Teluk Bone di sebelah Timur dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah Selatan serta Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara di sebelah Barat.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan
Kota Palopo



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kecamatan Wara Barat merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan yang terkecil adalah Wara Utara. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Wara Timur dan kelurahan yang paling sedikit adalah Wara Selatan, Sendana, Mungkajang.

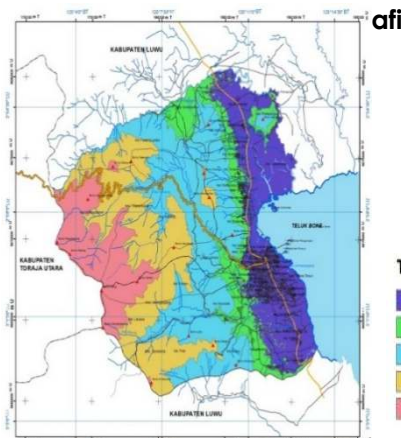
Gambar 2.1 Peta Letak dan Kondisi Geografis



Kota Palopo terletak antara **2°53'.15"** - **3°04'.08"** Lintang Selatan dan **120°03'.10"** - **120°14'.34"** Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir di bagian Timur dan pegunungan di bagian Barat, serta dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran sungai. Kemiringan

lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut antara 0 – 25, 26 – 100, 101 – 500, 501 – 1000, dan 1000+ dpl dengan klimatologi Kota Palopo dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

Topografi



afi

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km² sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km². Untuk lebih jelasnya, luas wilayah

berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 m, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 m, dan sekitar 12,39 % terletak di atas ketinggian

lebih dari 1.000 mdl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng Kota Palopo Menurut Kecamatan Tahun 2017

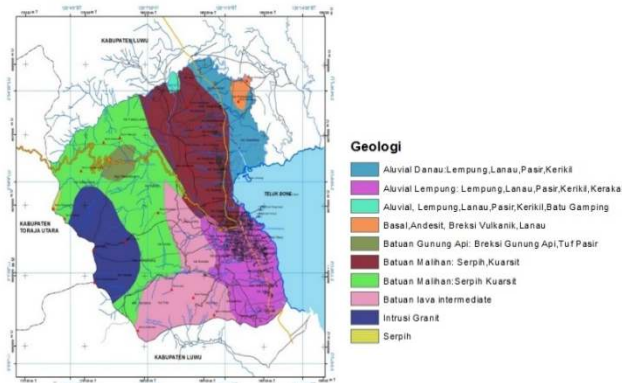
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km ²)			
			0-2 %	2-15 %	15-40 %	> 40 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	2,132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9,272
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	34,97
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	48,717
Jumlah		247,52	76,677	8,951	68,933	57,989

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara.

Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

Gambar: 2.3 Peta Geologi



Geologi

Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara

umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gebro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran larva yang telah membeku yang bersusunan balistik hingga andesitik. Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan batuan metamorf yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen. Batuan vulkanik yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan-endapan alluvial terdiri dari material-material bersusunan berangkal, kerakal, kerikil, pasir hingga lempung, kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo.

Di wilayah Kota Palopo mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut;

- Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata*, banyak diupayakan oleh masyarakat di areal sawah di Kecamatan Wara, dan Wara selatan.

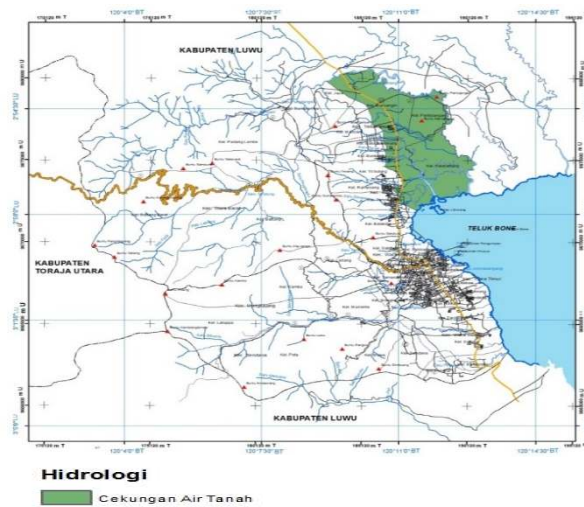
-
- b. *Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu)*, banyak terdapat di sungai latuppa didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.
 - c. *Bahan galian atau butiran emas*, terdapat di sungai Latuppa pada bagian hulu di atas bukit, merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat pada zaman Belanda. Dan pada saat ini masih diusahakan oleh masyarakat secara tradisional.
 - d. *Batuan sedimen*, menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
 - e. *Batuan terobosan*, yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan.
Jenis batuan lainnya yang merujuk pelapukan bahan pembentuk tanah, yang mempunyai kandungan potensial di Kota Palopo, adalah ;
 - a. *Batuan gamping dan marmer (limestone dan marble)*, dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Telluwana.
 - b. *Batuan Granit dan Granodiorit*, untuk bahan bangunan lantai rumah, batu hias dinding dan sebagainya serta untuk pengerasan jalan (agrogat) dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
 - c. *Batu sabak, filit, kuarsil, batu gamping, dan batu lamau*, terdapat di Kecamatan Wara, Wara Utara dan Bagian Barat Kota Palopo.

Jenis batuan ini dikelompokkan menurut umur pembentukannya yang diurut dari batuan yang termuda hingga yang tertua, maka batuan-batuan ini tersusun atas 5 (lima) kelompok, yaitu;

- a. *Kelompok endapan alluvial* (termasuk didalamnya endapan Qal atau terumbu lokal) yang termasuk didalamnya endapan alluvial berupa karakal, kerikil, pasir dan batu, serta terumbu koral yang tersebar disepanjang pantai dan alur aliran sungai Latuppa.
- b. *Batuan Tmb*; terdiri dari napal dan sisipan batu gamping setempat-tempat, mengandung batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat beberapa kelompok intrusi batuan beku yang terdiri dari batuan beku granit dan gabro. Batuan granit ini dijumpai pada Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwana.
- c. *Batu Tol*, yaitu kelompok batuan hasil pembukuan aliran larva yang bersusun balastik hingga *andesitic*, kemudian breksi vulkanik, batu pasir dan batu lamau, serta batuan setempat-tempat mengandung fieldsphatoid. Batuan ini tersusun di Bagian Selatan Kota Palopo dan banyak tersebar di daerah Kecamatan Wara Selatan.
- d. *Batuan Tet*, yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan sisipan konglomerat. Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwana.
- e. *Batuan TKI*, yaitu terdiri dari batuan-batuan yang mengalami metamorfisme, antara lain serpihan, filit, rijang, marmer, kuarsit dan

beberapa bagian di utara Kota Palopo masuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan.

Gambar 2.4 Peta Hidrolik



Hidrologi

Kondisi Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu/Sungai Battang, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat berpotensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata

permandian alam dan *rafting*. Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut;

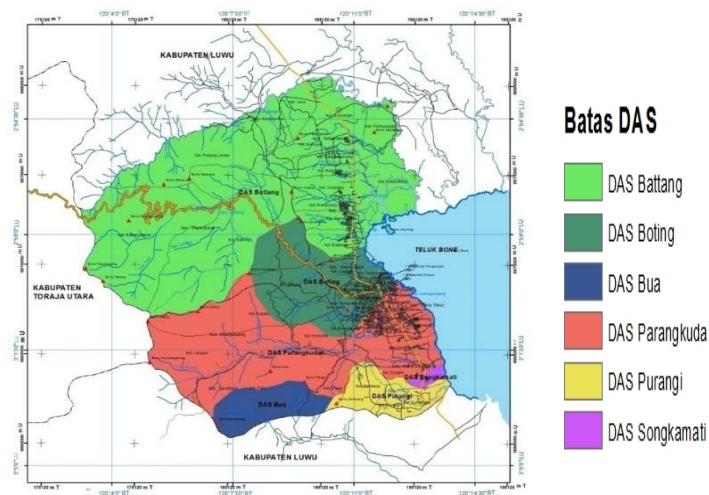
1. Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.
2. Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga. Potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah dimanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (*artesis*), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

Gambar 2.5 Peta DAS Kota Palopo



Wilayah Kota Palopo terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) baik yang melintas dalam pusat kota maupun dipinggiran Kota Palopo. Wilayah Kota Palopo terdiri dari 6 daerah terdiri dari :

1. DAS Purangi dengan luas cakupan area lebih kurang 1.037 hektar.
2. DAS Bua dengan luas cakupan area lebih kurang 1.168,04 hektar.
3. DAS Songkamati dengan luas cakupan area lebih kurang 136,20 hektar.
4. DAS Parangkuda dengan luas cakupan area lebih kurang 6.412,80 hektar.
5. DAS Boting dengan luas cakupan area lebih kurang 3.087,25 hektar.
6. DAS Salubattang dengan luas cakupan area lebih kurang 13.760,59 hektar.

Klimatologi

Curah hujan yang dicatat dari data Badan Meteorologi dan Geofisika di pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500-1000 mm/th, sedangkan untuk daerah hulu (pengunungan) berkisar antara 1000-2000 mm/tahun. Curah hujan dan hari hujan ini akan menentukan pula potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan air tanah (*ground water*) seperti dalam peta hidrogeologi Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu pada umumnya, yang dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika diperlukan untuk fasilitas pengairan menggunakan sistem pompa air tanah dalam untuk kebutuhan pertanian maupun perkebunan/peternakan.

Kondisi hari hujan harian di Kota Palopo tidak menentu karena udara dan butir air yang diupkan dari laut mengumpul menjadi awan dan mengenai pengunungan, akhirnya sewaktu-waktu menjadi hujan di Kota Palopo. Dalam hal ini dapat dirasakan, pada waktu musim kemarau masih dapat dirasakan hujan, sebaliknya pada musim hujan masih banyak didapatkan hari tanpa hujan, ini menjadi ciri khusus yang memungkinkan berbagai jenis tanaman buah bergantian berbuah sepanjang tahun. Demikian pula, panjang hari hujan lebih relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan wilayah lain di Luwu Raya, sehingga

lebih tepat untuk usaha pengeringan, baik untuk hasil laut maupun hasil pertanian.

Suhu udara rata-rata tahunan di dataran rendah Kota Palopo berkisar antara rata-rata 25,5° C – 27,9° C, angka ini berkurang 0,6° C setiap kenaikan 100 Meter, sehingga makin tinggi keadaan permukaan tanah disuatu wilayah udaranya semakin tinggi. Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah, suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban bervariasi antara 78,8 % sampai 85 % tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antar 5,2 sampai 8,5 jam/hari.

Kecepatan angin berkisar antara 41,9-72 km/jam dalam keadaan normal. Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari dan pada malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca Kota Palopo cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan, hal ini disebabkan uap air laut yang dihembuskan ke arah daratan sampai ke daerah pegunungan di wilayah bagian barat dan sebagian utara Kota Palopo, akan mengumpul menjadi butiran air hujan karena kelembaban udara di kawasan pegunungan, yang terbawa angin ke daerah dataran yang lebih rendah, sehingga terjadi curah hujan yang kebanyakan di wilayah pegunungan dan wilayah daratan sewaktu-waktu. Sehingga Kota Palopo seakan-akan tidak mengenal musim kering yang berkepanjangan karena keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula.

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimukimi oleh masyarakat. Secara umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi wilayah ini mempengaruhi aktifitas masing – masing masyarakat yang bermukim ditempat tersebut. Luas dari masing – masing jenis penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

⊕

Penggunaan Lahan Kota Palopo.d Tahun 2016

NO	PENGUNAAN LAHAN	
1.	Hutan	58,30
2.	Permukiman	4,79
3.	Sawah	10,42
4.	Tambak	4,88
5.	Padang Rumput	0,01
6.	Kebun/Tegalan	6,63
7.	Semak Belukar	14,43
8.	Sungai	0,39
9.	Rawa	0,01
10.	Tanah Kosong	0,05
JUMLAH		100%

Sumber Data : - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Badan Informasi Geospasial
2012, Hasil olahan GIS Data Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7
Tahun 2017

Berdasarkan informasi pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa 58,30% wilayah Kota Palopo masih berupa hutan dengan luas permukiman sebesar 4,79%. Sementara luas sawah sebesar 10,42% dari luas Kota Palopo.

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya :

- Perikanan budidaya tambak seluas lebih kurang 550 Ha di Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua;
- Budidaya air tawar seluas 355,8 Ha di Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Telluwanua;
- Kawasan meliputi tambak Perairan Teluk Bone seluas lebih kurang 150 Ha di wilayah Kecamatan Bara, Kecamatan Telluwanua;
- Balai Benih Ikan Salopao dengan luas 1,3 Ha di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.



KAWASAN LINDUNG

- Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung dengan luas $\pm 8.297,58$ hektar terletak di Kelurahan Latuppa, dan Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, dan Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat.

- Kawasan Pelestarian Alam

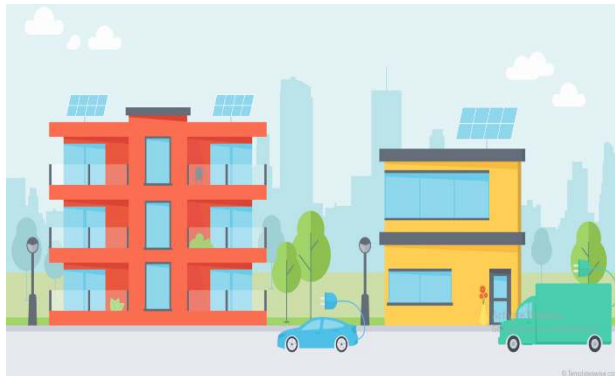
Kawasan Taman Wisata Alam Nanggala III seluas 891 hektar terletak di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

- Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya ± 12 hektar merupakan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang.

POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Kota Palopo diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang



Wilayah Nasional (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan. Posisi Kota Palopo untuk mendukung pengembangan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan

kualitas lingkungan.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Di Wilayah Kota Palopo

1. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Bara, dan sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua.
2. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Bone Utara..
3. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;
 - b. Kawasan Taman Hutan Raya Nanggala ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat.

KAWASAN STRATEGIS KOTA (KSK)

KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

1. Kawasan Reklamasi Salemo seluas $\pm$ 700 Ha di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara;
2. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha wilayah Kelurahan Mancani;
3. Kawasan Perumahan Terpadu seluas $\pm$ 100,0 Ha di wilayah Kelurahan Purangi;
4. Kawasan Pusat Kota Palopo meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe;
5. Kawasan Pusat Niaga Palopo di wilayah Kelurahan Dangerakko;
6. Kawasan Pusat Perbelanjaan di wilayah Kelurahan Salobulo;
7. Kawasan Peruntukan Industri seluas $\pm$ 360 Ha di wilayah Kelurahan Maroangin;
8. Kawasan Terminal tipe A seluas $\pm$ 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Songka;
9. Kawasan Koridor Jalan Andi Djemma;
10. Kawasan Koridor Jalan Andi Kambo;
11. Kawasan Koridor Jalan DR. Sam Ratulangi;
12. Kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit di wilayah Kelurahan Pontap;
13. Kawasan Hiburan Labombo di wilayah Kelurahan Salekoe;
14. Kawasan Transmigrasi seluas $\pm$ 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta;
15. Kawasan Resor Kambo seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Kambo.

KSK dari sudut kepentingan Sosial Budaya terdiri atas :

1. Kawasan Bersejarah Istana Datu Luwu dan Mesjid Djami Tua seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Ammassangan;
2. Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Boting;



-
3. Kawasan Menara Payung Luwu terintegrasi dengan Pusat Kuliner Tradisional seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Batupasi;
 4. Kawasan Islamic Centre Palopo seluas $\pm 2,0$ Ha di wilayah Kelurahan Takkalala;
 5. Kawasan Komunitas Adat Peta, Latuppa, Mungkajang dan Battang;
 6. Kawasan Desa Wisata Peta, Murante, dan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
 7. Kawasan Olah Raga Terpadu (kawasan stadion olah raga Lagaligo) seluas $\pm 2,0$ Ha di wilayah Kelurahan Lagaligo;
 8. Kawasan Sirkuit Road Race seluas $\pm 8,0$ Ha di wilayah Kelurahan Rampoang.

KSK dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung yang berada di wilayah Kecamatan Mungkajang, dan di wilayah Kecamatan Wara Barat dengan luas keseluruhan 8.666 Ha;
2. Kawasan DAS Pacangkuda (sumber utama air baku air minum kota) seluas $\pm 6.646,66$ di wilayah Kelurahan Latuppa dan Kelurahan Murante;
3. Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.

KSK dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi

- Kawasan Sagu Teknopark Palopo seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Salubattang.

KAWASAN PERUNTUKAN PERKANTORAN

❖ **Kawasan Perkantoran Pemerintah Skala Kota :**

Tersebar di beberapa sub wilayah sesuai dengan kondisi eksisting, yakni : Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, dan Kelurahan Boting (Kecamatan Wara), Kelurahan Salekoe, dan Kelurahan Pontap (Kecamatan Wara Timur), Kelurahan To'bulung (Kecamatan Bara), Kelurahan Tomarundung (Kecamatan Wara Barat), Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara), dan Kelurahan Mungkajang (Kecamatan Mungkajang).

❖ **Kawasan Perkantoran Pemerintah skala kecamatan dan kelurahan (skala lokal)**

Tersebar di masing sub-sub wilayah kota di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan, yang akan lebih mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

❖ **Kawasan peruntukan perkantoran swasta, direncanakan pada :**

- a. Kawasan pusat kota;
- b. Koridor jalan-jalan utama kota, yakni koridor jalan arteri primer, jalan kolektor primer, serta jalan lokal primer yang memiliki akses yang tinggi dengan kawasan lainnya;
- c. Kawasan reklamasi Salemo.

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN

❖ **Kawasan Peruntukan Industri:**

Di wilayah Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua direncanakan seluas 360Ha.

❖ **Kawasan industri kecil dan usaha mikro**

Tidak menimbulkan limbah berbahaya, peruntukannya tersebar di sub-sub wilayah KotaPalopo.

❖ **Kawasan peruntukan pergudangan**

a. Lokasinya berdekatan atau teraglomerasi dengan kawasan peruntukan IndustriKelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua seluas 25,0 Ha.

b. Kawasan Pergudangan lainnya (eksisting) berada di Kelurahan Batu Walenrang yang direncanakan seluas 25, 0 Ha.

KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

❖ **Kawasan pariwisata budaya meliputi:**

- a. Istana Keadatuan Luwu (Kawasan Lalebata) terletak di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara;
- b. Rumah adat Peta dan tempat tarian adat di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
- c. Rumah adat Mungkajang dan Latuppa dan tempat tarian adat di Kecamatan Mungkajang;
- d. Maccera Tasi (Pesta Laut) di Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara;
- e. Tempat pendaratan Belanda di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
- f. Tempat pementasan kesenian di Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara.

❖ **Kawasan pariwisata alam meliputi:**

- a. Kawasan Agrowisata Latuppa di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang dan Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.
- b. Kawasan Air Terjun Babak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
- c. Kawasan Air Terjun Siguntu di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
- d. Kawasan Air Terjun Rantenase di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
- e. Kawasan Kali Jodoh di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
- f. Pemandangan alam Kambo di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang;
- g. Kawasan Air Terjun Mawa di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana;
- h. Puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan;
- i. Kawasan wisata Pantai Labombo di Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur;

-
- j. Kawasan wisata Permandian alam Batupapan, Batiok dan Lumarrang (kurungan batu) di Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
 - k. Gua Kalo Dewata di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
 - l. Kawasan wisata Pantai Songka di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan;
 - m. Kawasan wisata Permandian alam Batutongkon di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
 - n. Kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur;
 - o. Kawasan wisata Pulau Libukang di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
 - p. Kawasan wisata Lembah Kattun di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Buat:

- a. Kawasan wisata seni kreatif di pedestrian jalan Jenderal Ahmad Yani di Kelurahan Amassangan;
- b. Kawasan wisata seni kreatif di koridor lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka;
- c. Rencana pengembangan kawasan Resor Kambo di Kelurahan Kambo;
- d. Rencana pengembangan kawasan wisata kuliner di Kawasan Menara Payung Luwu di Kelurahan Batupasi.

KAWASAN PERUNTUKAN RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)

❖ **Plaza**

Pelataran tempat berkumpulnya massa (*assembly point*) dengan berbagai jenis kegiatan seperti sosialisasi, duduk-duduk, aktivitas massa, dan lain-lain.

- Rencana pengembangannya berada di kawasan Menara Payung (*Landmark* Kota Palopo), serta di kawasan reklamasi Pantai Salemo berada di Kelurahan Sabbamparu (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Ponjale (Kecamatan Wara Timur), dan di Kelurahan Salekoe (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Takkalala (Kecamatan Wara Selatan).

❖ **Pelataran Parkir**

Pelataran parkir merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama meletakkan kendaraan bermotor seperti mobil atau motor; serta kendaraan lainnya seperti sepeda. Lahan parkir dikenal sebagai salah satu bentuk RTNH yang memiliki fungsi ekonomis.

- Rencana pengembangan lahan parkir umum di Kota Palopo direncanakan terintegrasi dengan Plaza, juga pada terminal tipe A Songka dan terminal C Dangerakko, fasilitas *park and ride* stasiun kereta api, serta di masing-masing kawasan pariwisata di beberapa sub wilayah.

❖ **Lapangan Olahraga**

Lapangan olah raga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya kegiatan olah raga..

- Berupa lapangan olah raga bulutangkis dan basket. Pengembangannya di beberapasub wilayah, termasuk di lahan kawasan reklamasi Salemo nantinya.

❖ **Tempat Bermain dan Rekreasi**

Tempat bermain dan rekreasi merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan berbagai kelengkapan tertentu untuk mewadahi kegiatan utama bermain atau rekreasi masyarakat.

- Direncanakan berada di kawasan reklamasi Salemo, di Kelurahan Salekoe (Kecamatan Wara), Kelurahan Songka (Kecamatan Wara Timur), dan di wilayah Kelurahan Sampoddo berupa Anjungan Cerdas.

❖ **Koridor**

Koridor merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai jalur dengan fungsi utama sebagai sarana aksesibilitas pejalan kaki yang bukan merupakan trotoar (jalur pejalan kaki yang berada di sisi jalan). Koridor sebagai ruang terbuka non hijau dibentuk diantara dua bangunan atau gedung, dimana dimanfaatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktivitas tertentu.

- Rencana pengembangan Koridor berada pada kawasan Reklamasi Salemo.
- Diprirotaskan pada kawasan Perdagangan dan Jasa sebagai pembatas antar blok-blok bangunan sehingga pengunjung lebih leluasa, nyaman, dan aman dalam beraktivitas berkeliling.
- Sementara untuk Koridor di kawasan pariwisata digunakan sebagai lintasan *jogging*, dan kegiatan sejenis lainnya.

❖ **Ruang Terbuka Biru (RTB)**

RTB tidak hanya sebagai penyimpan air, ruang terbuka biru (seperti kanal, danau, sungai, dll) juga memiliki fungsi sebagai tempat wisata, sarana transportasi air, dan fungsi lainnya.

- Badan air : Sungai Latuppa, Sungai Boting, Sungai Takkalala, Sungai Amassangan, Sungai Pikun, Sungai Salubattang, Sungai Batu, Sungai Songka Mati, Sungai Ponjalae, dan Sungai Andoli.
- Kanal Labombo di Kelurahan Salekoe dan Kanal Takkalala di Kelurahan Takkalala dalam kawasan reklamasi Salemo.

KAWASAN PERUNTUKAN RUANG KEGIATAN SEKTOR INFORMAL

Rencana pengembangan peruntukan ruang kegiatan sektor informal, meliputi :

1. Kawasan pelataran Lagota Pusat Niaga Palopo di Kelurahan Lagaligo;
2. Kawasan sekitar lapangan Kodim Kelurahan Salobulo;
3. Koridor jalan akses Pelabuhan – Lemo-Lemo di Kelurahan Sabbamparu dan Kelurahan Salobulo.

-
4. Koridor Jalan Guttu Patalo dan Jalan Wecudai sekitar stadion Lagaligo di Kelurahan Lagaligo
 5. Kawasan terminal Tipe A Songka di Kelurahan Songka;
 6. Kawasan terminal Tipe C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko;
 7. Kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Songka;
 8. Kawasan park and ride kereta api di Kelurahan Songka;
 9. Kawasan reklamasi Salemo;
 10. Kawasan puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo;
 11. Kawasan pelabuhan Tanjung Ringgit di Kelurahan Pontap;
 12. Koridor jalan poros Latuppa di Kelurahan Latuppa;
 13. Koridor jalan poros terminal tipe A Songka di Kelurahan Songka;
 14. Koridor jalan poros Battang di Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat.

KAWASAN PERUNTUKAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN

Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan:

- a. Rumah Sakit Umum Sawerigading kelas/tipe B dengan cakupan/skala pelayanan regional ditetapkan di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara;
- b. Rumah Sakit Umum At Medika di Kelurahan Tompotikka;
- c. Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Madyang di Kelurahan Salekoe;
- d. Rumah Sakit Tentara di Kelurahan Amassangan;
- e. Rumah Sakit Bintang Laut di Kelurahan Pattene;
- f. Rumah Sakit Mega Buana di Kelurahan Binturu;
- g. Rumah Sakit Mujaisyah di Kelurahan Balandai;
- h. Rencana pengembangan Rumah Sakit Jiwa Kalang-Kalang di Kelurahan To'bulung;
- i. Rencana pengembangan kawasan peruntukan sarana kesehatan skala regional dan skala kota di kawasan Reklamasi Salemo;
- j. Rencana pengembangan kawasan peruntukan sarana kesehatan skala regional dan skala kota di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Utara.
- k. Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan skala pelayanan lingkungan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar merata di setiap wilayah kecamatan, agar lebih mudah diakses oleh warga setempat.

KAWASAN PERUNTUKAN PELAYANAN PERIBADATAN

Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo di Kelurahan Boting Kecamatan Wara.

- a. Kawasan Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan.
- b. Sementara untuk pengembangan kawasan peruntukan peribadatan lainnya yang berskala lingkungan akan disesuaikan dengan kebutuhan umat masing-masing.

KAWASAN PERUNTUKAN PERTEMUAN, PAMERAN DAN SOSIAL BUDAYA

Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, insentif, konferensi, pameran, dan sosial budaya meliputi :

- a. Kompleks Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan;

-
- b. SaodenraE Convention Centre di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara;
 - c. Rencana peruntukan perhotelan kelas berbintang di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Mungkajang;
 - d. Pengembangan perhotelan kelas berbintang di kawasan reklamasi Salemo;
 - e. Pengembangan Plasa Menara Payung (landmark Kota Palopo) di Kelurahan Batupasi;
 - f. Gedung Kesenian di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
 - g. Gedung Pemuda di Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan;
 - h. Gedung Merdeka Convention Hall di Kelurahan SalekoE Kecamatan Wara Timur; dan
 - i. Gedung Rasdiana Convention Hall di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
 - j. Kawasan Perkemahan di Kelurahan Padang Lambe.

KAWASAN PERUNTUKAN OLAHRAGA

Kawasan Peruntukan Olah Raga :

- a. Kawasan olahraga terpadu Lagaligo di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- b. Kawasan Lapangan Gaspa di Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- c. Rencana pengembangan lapangan sepakbola di setiap wilayah kecamatan;
- d. Rencana pengembangan lapangan bulutangkis dan sepak takraw di setiap wilayah kelurahan;
- e. Rencana pengembangan kawasan sirkuit Road Race seluas 8,0 Ha di Kelurahan Rampoang Kecamatan Wara Selatan;
- f. Rencana pengembangan kawasan lapangan Golf seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana.

KAWASAN PERUNTUKAN TRANSMIGRASI

Rencana pengembangan kawasan peruntukan Transmigrasi di wilayah Kota Palopo seluas 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi :

- a. Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara;
- b. Rumah jabatan Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Wolter Mongsi di Kecamatan Wara;
- c. Kantor Polisi Militer (PM) di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara Utara;
- d. Kawasan Lapangan Tembak di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
- e. Lapangan Kodim di Jalan Dr. Samratulangi Kecamatan Wara Utara;
- f. Lapangan Asrama TNI AD 721 Makassar di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- g. Kantor Polisi Resort Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;

-
- h. Zibang Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
 - i. Tepbek Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
 - j. Koramil di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara dan Polsektersebar di masing-masing wilayah kecamatan.

KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Kawasan Hutan Produksi terletak di Kelurahan alubattang Kecamatan Telluwanua dengan luas 608 hektar (*Sumber : BPKH Wilayah VII Makassar*)

KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

➤ Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang direncanakan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di wilayah Kota Palopo seluas 1.100 Ha, yang tersebar di beberapa sub wilayah, meliputi :

1. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:
 - a. Wilayah Kecamatan Telluwanua :
 - 1) Di wilayah Kelurahan Jaya seluas 400 Ha;
 - 2) Di wilayah Kelurahan Salubattang seluas 180 Ha;
 - 3) Di wilayah Kelurahan Pentojangan seluas 150 Ha;
 - 4) Di wilayah Kelurahan Sumarambu seluas 130 Ha;
 - 5) Di wilayah Kelurahan Maroangin seluas 80 Ha.
 - b. Wilayah Kecamatan Sendana :
 - Di wilayah Kelurahan Sendana seluas 80 Ha.
 - c. Wilayah Kecamatan Wara Barat
 - Di wilayah Kelurahan Padang Lambe seluas 80 Ha.
2. Kawasan Sentra Pengolahan Hasil Pertanian masing-masing seluas 1,0 Ha di Kelurahan Songka dan Kelurahan Battang Barat.

➤ Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan berupa kawasan perkebunan rakyat seluas 2.724 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat, dan Kecamatan Telluwanua.

➤ Kawasan peruntukan pertanian Holtikultura

Kawasan peruntukan pertanian holtikultura seluas 2.083 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua.

KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN

Kawasan peruntukan Peternakan di wilayah Kota Palopo meliputi :

- a. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha di Kelurahan Mancani, dan seluas 1,0 Ha di Kelurahan Maroangin;
- b. Kawasan Rumah Tahanan Hewan seluas 2,0 Ha di Kelurahan Padang Lambe;

-
- c. Kawasan lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan ladang pembesaran kandang seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.
 - d. Kawasan pakan ternak seluas 1,0 Ha termasuk didalamnya gudang dan tempat mesin pakan di wilayah Kelurahan Padang Lambe;
 - e. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) seluas 1,5 hektar yang berlokasi di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana;
 - f. Ternak unggas di dikembangkan di daerah pinggiran kota di wilayah Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Sendana;
 - g. Kawasan penggembalaan ternak sapi seluas 100 Ha di wilayah Kelurahan Peta;
 - h. Kawasan Pusat Kesehatan Hewan seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Mancani.
 - i. Kawasan Penampungan Ternak seluas 4 Ha Lewadang Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana;

KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

Kawasan Peruntukan Perikanan tangkap, meliputi :

Perikanan tangkap berada di Perairan Teluk Bone dan didukung oleh ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PonjalaE/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

- 1. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas terletak di Blok Bone Utara.
- 2. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral terdiri atas :
 - a. Penambangan emas terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
 - b. Penambangan galena terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat;
 - c. Penambangan marmer terletak di Kelurahan Battang, Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
 - d. Penambangan granit terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua.Potensi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan rakyat berupa pertambangan **Golongan Batuan** yang terdapat di wilayah :
 - a. Kecamatan Mungkajang;
 - b. Kecamatan Wara Selatan;
 - c. Kecamatan Wara Barat;
 - d. Kecamatan Sendana;
 - e. Kecamatan Telluwanua;
 - f. Kecamatan Bara;
 - g. Kecamatan Wara Utara;
 - h. Kecamatan Wara.

Golongan Batuan ada 47 jenis, salah satunya adalah kerikil berpasir alami (Sirtu)

WILAYAH RAWAN BENCANA

Berikut adalah analisis kerentanan wilayah rawan bencana di Kota Palopo :

a. Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Berada di kawasan Battang Barat, dan Battang (Kecamatan Wara Barat), kawasan Latuppa, dan kawasan Kambo (Kecamatan Mungkajang), kawasan Peta (Kecamatan Sendana). Intensitas terjadinya bencana gerakan tanah dalam beberapa tahun terakhir di beberapa lokasi di wilayah Kota Palopo

Klasifikasi Zona dan Kelas Ancaman Longsor

Zona Ancaman	Kelas	Nilai	Bobot (%)	Skor
Gerakan Tanah Sangat Rendah, Rendah	Rendah	1		
Gerakan Tanah Menengah	Sedang	2		
Gerakan Tanah Tinggi	Tinggi	3		

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo (2017)

cenderung meningkat frekuensinya.

Bencana ini relatif sering terjadi di kawasan bagian barat Kota Palopo, khususnya di wilayah Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Battang.



Fenomena ini disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan di daerah rentan gerakan tanah. Kondisi ini diperparah saat intensitas hujan yang tinggi terjadi dalam durasi yang panjang. Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim Revisi RTRW Kota Palopo, skor/indeks ancaman

bencana tanah longsor di Kota Palopo secara umum masih pada posisi rendah.

Jalur evakuasi bencana tanah longsor :

- Ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- Ruas Jalan Poros Latuppa-Kantor Kecamatan Mungkajang;
- Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Kantor Kecamatan Wara Selatan.

b. Banjir

Kawasan rawan banjir berada di Berada di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Jaya, Kelurahan Mancani, (Kecamatan Telluwanua), Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, Kelurahan



Batupasi (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Pontap, Kelurahan PonjalaE, Kelurahan SalotelluE (Kecamatan Wara Timur), Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Tompotikka (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Padanglambe (Kecamatan Wara Barat)

Ancaman bencana banjir masih kerap melanda Kota Palopo. Pada tahun 2017 terjadi bencana alam banjir dengan arus deras di Kecamatan Mungkajang yang menyebabkan 1 jembatan utama rusak. Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Telluwanua yang menyebabkan beberapa rumah warga, sarana umum (masjid) dan fasilitas pemerintahan (Kantor Lurah) terendam dan mengharuskan 16 KK mengungsi.

Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya banjir di Kota Palopo adalah:

- Kondisi DAS dalam keadaan kritis yang berakibat resapan air hujan ke dalam sistim akuifer semakin berkurang dan erosi lahan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pula sedimentasi di alur dan muara sungai yang juga tinggi.
- Kapasitas sistem pengendali banjir yang ada seperti dimensi palung sungai, tampungan air, sistem drainase dan lainnya kurang memadai.

Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim Revisi RTRW Kota Palopo,

Kedalaman dan Kelas Ancaman Banjir

Kedalaman (m)	Kelas	Nilai	Bobot (%)	Skor
<0,76	Rendah	1		
0,76–1,5	Sedang	2		
>1,5	Tinggi	3		

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo (2017)

Palopo, skor/indeks ancaman bencana banjir di Kota Palopo secara umum masih pada posisi rendah.

Jalur evakuasi bencana banjir :

a. Ruas Jalan Jenderal

Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;

b. Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa;

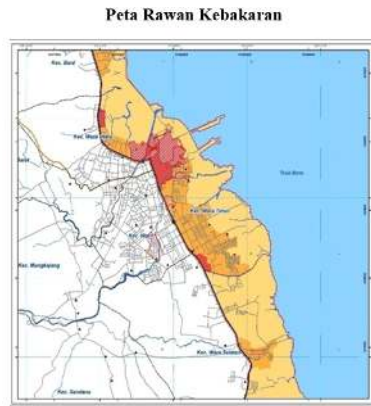
c. Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo;

d. Ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim;

e. Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

c. Kebakaran Gedung dan Permukiman

Kawasan rawannya berada di Berada di kawasan permukiman kepadatan tinggi pada wilayah Kelurahan Penggoli, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Boting, Kelurahan Tompotikka, dan Kelurahan Dangerakko.



Ancaman kebakaran gedung dan permukiman berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65 – 1,00. Sementara klasifikasi ancaman

Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32 – 1,66, dan 3,00 – 2,23.

Parameter Ancaman Kebakaran					
Paramater	Bobot (%)	Kelas			Skor
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Frekuensi kejadian kebakaran (%)	60	<2%	2-5%	>5%	0,60
Kerugian ekonomi (miliar rupiah)	6	<1 m	1-3 M	>3 M	0,06
Jumlah korban meninggal	28	-	1 orang	>1 orang	0,28
Jumlah korban luka berat	6	<5 orang	5-10 orang	>10 orang	0,06
Jumlah Skor					1,00

Keterangan: Hazard Kebakaran Gedung dan Permukiman = (0,6* skor frekuensi kejadian) + (0,06* skor kerugian ekonomi) + (0,28* skor jumlah meninggal) + (0,06* skor jumlah luka berat)

Jalur evakuasi kebakaran gedung dan permukiman :

- Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;
- Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa;
- Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo;
- Ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Gedung Saodenrae Convention Centre;
- Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre;
- Ruas Jalan Andi Tadda – Jalan Jenderal Ahmad Yani – Gedung Saodenrae Convention Centre;
- Ruas jalan Sungai Rongkong – Lapangan Kodim.

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Parameter Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan						
Paramater	Bobot (%)	Mudikawa	Sifat lokasi	Kelas		
				Rendah	Sedang	Tinggi
Jenis Hutan	40			Hutan sekunder	Hutan primer	Hutan mangrove
Luas Hutan	30	0-5000	5000-10000	10000-20000	20000-30000	30000-40000
Jenis Lahan	30	Perikanan	Pertanian	Pemukiman	Perdagangan	Industri

Keterangan: Hazard Kebakaran Hutan dan Lahan = (0,4* skor jenis hutan) + (0,3* skor luas hutan) + (0,3* skor jenis lahan)

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Telluwanua. Ancaman kebakaran hutan dan lahan berada pada

klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas

interval 1,65–1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23.

Jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan :

- Ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- Ruas Jalan Poros Latuppa-Lapangan Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang; dan
- Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Lapangan Kelurahan Purangi Kecamatan Wara Selatan.
- Ruas Jalan Poros Kambo – Lapangan Kelurahan Kambo Kecamatan Wara Barat.



e. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Parameter Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Paramater	Bobot (%)	Kelas			Skor
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Tinggi gelombang	30	<1 m	1-2,5 m	>2,5 m	0,30
Arus (<i>current</i>)	30	<0,2	0,2 – 0,4	>0,4	0,30
Tutupan vegetasi	15	>80%	40 – 80%	<40%	0,45
Bentuk garis pantai	15	Berteluk	Berteluk - lurus	lurus	0,15
Tipologi pantai	10	Berbatu karang	Berbatu pasir	berlumpur	0,30
Jumlah Skor					1,50

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo

Keterangan: Hazard Gelombang Ekstrim dan Abrasi =
 $(0,3 * \text{skor tinggi gelombang}) + (0,3 * \text{skor arus}) + (0,15 * \text{skor tutupan vegetasi}) + (0,15 * \text{skor bentuk garis pantai}) + (0,1 * \text{skor tipologi pantai})$.

interval 1,65–1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23. Indikator yang digunakan untuk bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi gelombang, arus wilayah perairan (*current*) tutupan vegetasi di wilayah pesisir, bentuk garis pantai dan tipologi pantai.

Jalur evakuasi gelombang ekstrim dan abrasi :

- Ruas Jalan A. Tendriajeng – Jalan Andi Tadda – Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa;
- Ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro – Lapangan Gaspa;



- Ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila;
- Ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

➤ Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi

Bencana :

1. Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana Banjir, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Gelombang Ekstrim dan Abrasi :

- Lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka;
- Stadion Lagaligo Kelurahan Lagaligo;
- Lapangan Gaspa Kelurahan Boting;

- d. Lapangan Kodim Kelurahan Salobulo;
- e. Lapangan Islamic Centre Kelurahan Takkalala;
- f. Lapangan Rampoang Kelurahan Rampoang.

2. Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana tanah longsor serta, kebakaran hutan dan lahan :

- Lapangan Kelurahan Battang (Kecamatan Wara Barat), Lapangan Kelurahan Peta (Kecamatan Sendana), Lapangan Kelurahan Murante (Kecamatan Mungkajang).

Demografi

Penduduk Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat sebanyak 180.678 jiwa (**BPS, Palopo Dalam Angka 2019**), secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,56, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 94 -95 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 2,13 persen. Dengan luas wilayah 247,52 Km maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 730 jiwa per Kilometer persegi.

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Per- tumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km	Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Wara Selatan	11 846	2,14	6,56	1 111,25	89,23
011 Sendana	6 685	2,12	3,70	180,24	100,39
020 Wara	39 101	2,13	21,64	3 403,05	91,56
021 Wara Timur	38 853	2,13	21,50	3 216,31	94,28
022 Mungkajang	8 102	2,13	4,48	151,59	95,13
030 Wara Utara	23 119	2,13	12,80	2 185,16	92,29
031 Bara	28 169	2,14	15,59	1 206,38	95,79
040 Telluwana	13 614	2,15	7,53	396,45	102,11
041 Wara Barat	11 189	2,12	6,19	206,71	101,17
PALOPO	180 678	2,13	100,00	729,95	94,56

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Wara dengan 3.403 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Mungkajang yaitu 151 per kilometer persegi. Jika diamati menurut kelompok umur, terlihat bahwa dari 180.678 jiwa penduduk tercatat sekitar 28,33 persen berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 4,19

persen pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), selebihnya sekitar 67,48 persen yang berada pada kelompok usia produktif (usia 15 – 64 tahun) atau dengan kata lain beban tanggungan (Dependency Ratio) Kota Palopo Tahun 2018 sebesar 48,20 persen.

Daya Tampung Penduduk

Diproyeksikan bahwa pada tahun 2032 nanti jumlah penduduk Kota Palopo akan berjumlah sebanyak 313.766 jiwa, sedangkan pada tahun 2037 nanti diperkirakan akan berjumlah sebanyak 358.985 jiwa. Selengkapanya mengenai proyeksi jumlah penduduk Kota Palopo periode tahun 2018 – 2037 seperti terlihat pada tabel diatas.

Secara makro, berikut adalah beberapa data kondisi makro demografi Kota Palopo sampai dengan tahun 2018 :

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk (Jiwa)	160,819	164,903	168,894	172,916	176,907	180,678
Laki-laki	78,509	80,410	82,301	84,192	85,967	87,812
Perempuan	82,310	84,493	86,593	88,724	90,940	92,866
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)	650	666	682	699	715	730
Laju Pertumbuhan Penduduk	2.88	2.54	2.42	2.38	2.31	2.13
Sex Ratio (L/P)	95.35	95.17	95.38	94.89	94.53	94.56
Jumlah Rumah Tangga	35,621	35,914	36,871	37,749	38,641	39,444
Rata-rata Anggota Rumah Tangga Per Ruta	4 s/d 5	4 s/d 5	4 s/d 5	4 s/d 5	4 s/d 5	5
Penduduk Menurut Kelompok Umur						
0 - 14	52,015	48,835	49,032	49,748	50,477	51,178
15 - 64	102,220	109,763	113,180	116,200	119,162	121,923
65 +	6,584	6,305	6,682	6,968	7,268	7,577

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

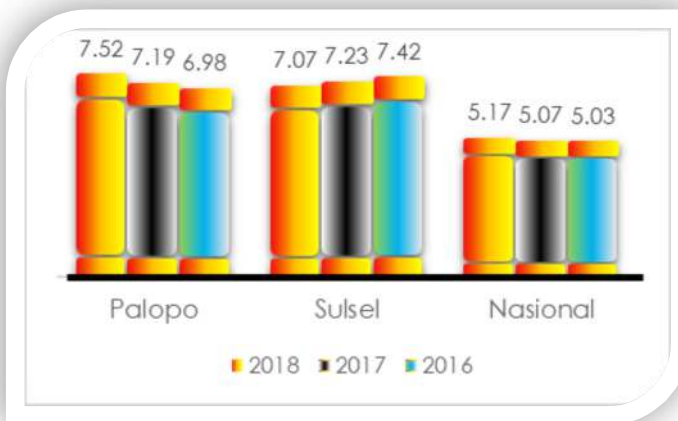
Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga diuraikan sebagai berikut :

2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo pada tahun 2018, berada pada angka 7.52% atau **meningkat** 0.54% dari pertumbuhan ekonomi Palopo tahun 2016.

Capaian ini **melebihi target** pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada angka 7%. Kondisi ini juga menempatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2018, **berada diatas** pertumbuhan ekonomi Sulsel (7.07%) dan pertumbuhan ekonomi nasional (5.17%).



Dalam tiga tahun terakhir, 2016-2018, ekonomi Kota Palopo selalu tumbuh **lebih baik** dari pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi baru pada tahun ini (2018) ekonomi Kota Palopo tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Jika dibandingkan secara regional dengan wilayah Luwu Raya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo), maka pertumbuhan ekonomi Kota Palopo **masih berada diatas** diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu (6,85 persen) dan Kabupaten Luwu Timur (tanpa migas : 3,44 persen), namun berada dibawah Kabupaten Luwu Utara (8,42%).

Nilai PDRB Kota Palopo **atas dasar harga berlaku** pada tahun 2018 mencapai 7,28 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini **mengalami kenaikan** sebesar 0,77 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 6,51 triliun rupiah.

Berdasarkan **harga konstan 2010**, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 4,75 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 5,10 triliun rupiah pada tahun 2018.

Beberapa lapangan usaha yang berperan besar dalam pembentukan PDRB Palopo pada tahun 2018 adalah Perdagangan Besar dan ceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (23,66%), Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan (16,91%) Konstruksi (16,40%) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (7,96%)

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Kota Palopo Menurut Lapangan Usaha (persen)
2014–2018

Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	8,26	0,34	0,45	5,82	3,42
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-1,12	4,66	5,54	4,26	2,55
C Industri Pengolahan/Manufacturing	5,73	5,22	5,10	3,57	2,95
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	25,80	-4,87	9,10	7,50	5,51
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	4,45	0,38	3,75	6,66	8,05
F Konstruksi/Construction	4,12	4,97	7,48	6,40	5,41
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	13,26	12,21	10,64	10,19	9,15
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	9,00	7,28	7,52	7,39	10,06
I Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	4,91	7,15	8,45	7,36	7,27
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	2,83	7,82	10,25	11,56	13,26
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	4,41	7,42	14,95	0,30	1,67
L Real Estat/Real Estate Activities	6,53	5,79	6,78	7,48	4,70
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	5,60	4,10	4,74	7,88	9,23
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,47	6,63	-0,69	5,36	16,75
P Jasa Pendidikan/Education	1,78	6,05	5,14	8,23	10,38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	7,81	10,39	9,59	9,94	9,68
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	2,47	3,35	5,88	9,69	12,22
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	7,05	6,47	6,95	7,17	7,52

* Angka sementara/Preliminary Figures
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 16,75 persen. Peningkatan realisasi APBN Kota Palopo tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya turut mempercepat tumbuhnya pertumbuhan pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Lima lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas sepuluh persen. Tujuh lapangan usaha memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen. Sedangkan lima lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Tabel 2.12
Distribusi PDRB ADHB
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014–2018

Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	19,08	18,96	17,85	17,74	16,91
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,18	0,19	0,19	0,18	0,17
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,02	2,96	2,92	2,84	2,70
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,20	0,18	0,17	0,17	0,17
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	15,94	15,45	15,86	16,12	16,40
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	21,16	21,91	22,63	23,18	23,66
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,22	6,24	6,21	5,97	5,94
I Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,19	1,18	1,22	1,21	1,18
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	4,10	3,72	3,87	4,02	4,14
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	8,16	8,12	8,66	8,21	7,78
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,24	5,10	5,05	5,06	4,92
M,N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
O Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,76	8,06	7,53	7,37	7,96
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	4,50	4,31	4,17	4,15	4,25
Q Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,22	2,24	2,30	2,36	2,35
R,S,T,U Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,24	1,23	1,22	1,24	1,29
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

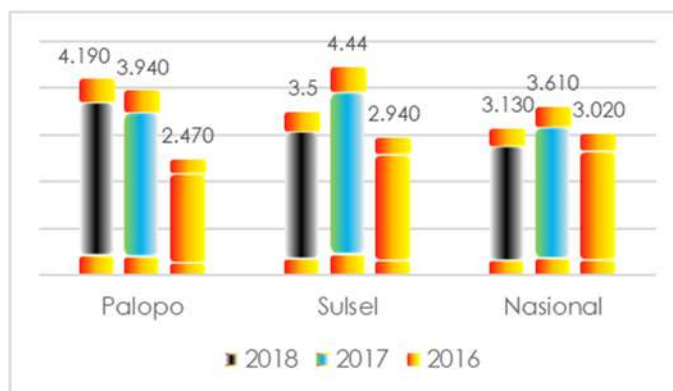
** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan Sangat besar. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan.

Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

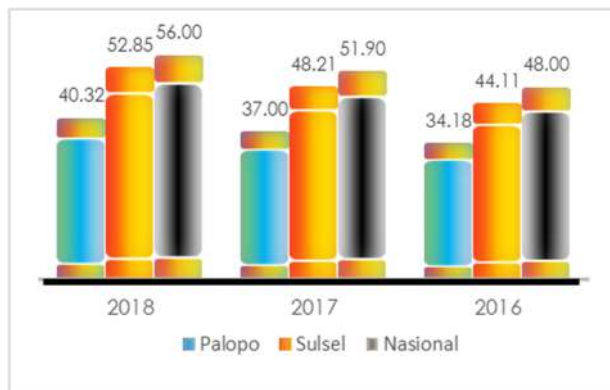
Laju inflasi Kota Palopo pada tahun 2018, berada pada angka 4.19%. Capaian ini **belum memenuhi target** tingkat inflasi Kota Palopo yang menargetkan pada angka 2.8%. Kondisi ini juga menempatkan tingkat inflasi Kota Palopo tahun 2018, **berada diatas** inflasi Sulsel (3.5%) dan inflasi nasional



(3.13%). Padahal dalam dua tahun terakhir, 2016-2017, inflasi Kota Palopo masih **selalu berada dibawah** inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan hanya terpaut tipis diatas tingkat inflasi nasional. Diatas adalah perbandingan tingkat inflasi pada tahun 2016-2018.

Pun demikian, Kota Palopo tetap berhasil meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat Kabupaten/Kota untuk Wilayah Sulawesi tahun 2019, Kota Palopo Tim Pengendalian Inflasi Daerah-nya (TPID) dinilai mampu menjaga kestabilan tingkat inflasi.

2.1.2.1.3. PDRB Perkapita



Angka pendapatan per Kapita Masyarakat Kota Palopo Tahun 2018 berada pada angka 40.32 Juta/Kapita/Tahun. Capaian ini **melampaui target** pendapatan per Kapita Kota Palopo tahun 2018 yang berada pada angka 38.183 Juta/Kapita/Tahun.

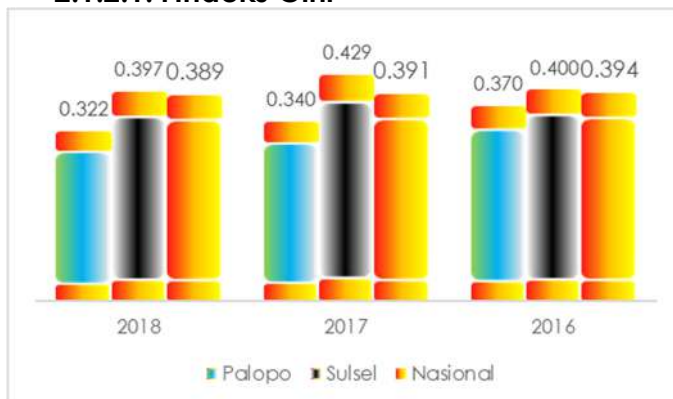
Rentan tahun 2016-2018, PDRB ADHB per Kapita Masyarakat Kota Palopo **tumbuh sebesar 15.23%**

atau meningkat senilai 6.14 Juta. Tahun 2016-2017, **naik sebesar 2.82 Juta/Kapita** kemudian 2017-2018 meningkat lagi sebesar **3.32 Juta/Kapita.**

Nilai PDRB (ADHB) per Kapita Kota Palopo juga **meningkat 19.20%** sejak tahun 2016 atau senilai 1,398,62 (milyar/Rp). Tahun 2016 nilai PDRB ADHB pada angka 5,886.518 (Milyar/Rp) menjadi 7,285.142 (Milyar/Rp). Sementara PDRB (ADHK) 2016-2018 **juga tumbuh 13.22%** atau senilai 674.49 (milyar/Rp), dimana 2016 pada angka 4,428.5 (Milyar/Rp) menjadi 5,102.987 (Milyar/Rp) pada tahun 2018.

Pun demikian, jika dibandingkan terhadap PDRB per Kapita Sulawesi Selatan dan Nasional, pendapatan per kapita masyarakat Kota Palopo tahun 2018 maupun tahun-tahun sebelumnya, **masih selalu berada dibawah capaian PDRB per kapita Sulsel maupun nasional.**

2.1.2.1.4 Indeks Gini



Capaian nilai indeks gini atau gini rasio Kota Palopo tahun 2018 pada angka 0.338. Kondisi ini **belum memenuhi target daerah 2018** yang berada pada angka 0.330. Namun jika diamati, gini rasio Kota Palopo tahun 2018 **adalah yang terbaik** sejak tahun 2014, yang semuanya masih menyentuh angka 0.4 point.

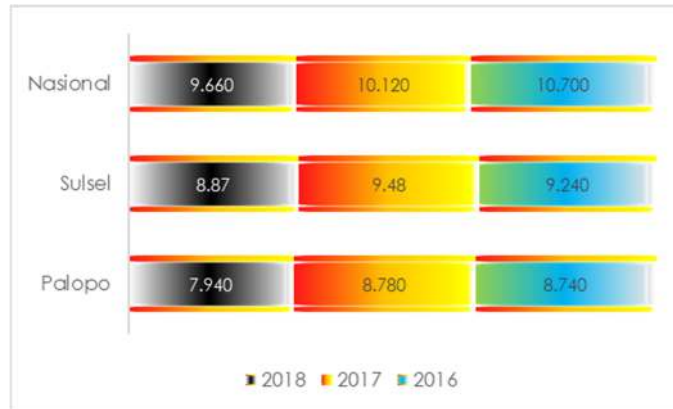
Jika dibandingkan dengan Sulsel tahun 2017, gini rasio Kota Palopo **tahun 2018, juga masih lebih baik** dan berada dibawah gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0.429 (2017), bahkan juga dibawah gini rasio nasional yang berada pada angka 0.391 (2017).

Sebelumnya, gini rasio Kota Palopo tahun 2015 **masih berada di atas gini rasio Sulsel** yang berada pada angka 0,430 dan nasional 0,41. Tahun 2016, gini rasio Palopo berhasil **berada dibawah** gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0,370 dan nasional pada angka 0,4. Kemudian pada tahun 2017, juga berhasil bertahan berada **dibawah gini rasio Sulsel** yang berada pada angka 0,340

dan nasional pada angka 0,39 dan tahun 2018, gini rasio Kota Palopo pada angka 0.322 (BPS Kota Palopo 2019)

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Palopo terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, yang artinya terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran masyarakat di Kota Palopo.

2.1.2.1.5 Persentase Penduduk Miskin



Persentase penduduk miskin Kota Palopo Tahun 2018, berada pada angka 7.94%, **lebih baik atau melampaui target** daerah yang berada pada angka 8.50%. Sejak 2016 s.d 2018, persentase penduduk miskin **menurun sebanyak** 0.8% atau 755 jiwa, dimana penduduk miskin pada tahun 2016 pada angka 15.020 jiwa menjadi

14.270 jiwa.



capaian persentase penduduk miskin sulse dan nasional. Bahkan di luwu raya (Luwu Utara, Luwu Timur dan Luwu), **jumlah penduduk miskin yang paling sedikit** adalah Kota Palopo.

Data menunjukan bahwa persentase penduduk miskin Kota Palopo dalam dua tahun terakhir (2016-2018) **berkurang sebanyak 0.8%**, dengan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 0.54%. Ini bermakna bahwa **untuk peningkatan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 1%**, Kota Palopo mampu menurunkan penduduk miskin **sebesar 1.48%**.

Capaian Kota Palopo ini **masih lebih baik atau berada diatas hasil kinerja** capaian peningkatan pertumbuhan ekonomi sulse terhadap pengurangan angka persentase penduduk miskin. Sebab rentan waktu 2016-2018, untuk **1%** peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulse, **hanya mampu mengurangi** persentase penduduk miskin sebesar **1.06%**. Ini terlihat dari data yang ada bahwa, angka peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulse sejak 2016-2018 sebesar 0.35% dengan tingkat pengurangan persentase penduduk miskin sulse sebesar 0.37% (2016-2018).

Tetapi sebaliknya, capaian pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan persentase penduduk miskin Kota Palopo ini **masih jauh dibawah capaian nasional**. Dimana untuk peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2016-2018, mampu menurunkan 7.43% penduduk miskin. Ini terlihat dari data tingkat nasional, yang menunjukkan bahwa 2016-2018 peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 0.14% (dari 5.03% di 2016 menjadi 5.17% di 2018). Tetapi persentase penduduk miskin berkurang sebesar 1.04%, sebab di 2016 berada pada angka 10.70% menjadi 9.66% pada tahun 2018.

Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari

Persentase Penduduk yang Pendapatannya Kurang dari USD 1,00 PPP

Uraian	Tahun		
	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin dengan Pendapatan Dibawah 1\$ PPP	15,020	15,440	14270
Jumlah Penduduk	172,920	176,910	180,678
Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1\$ PPP Per Kapita per Hari	8.69%	8.73%	7.90%

Indikator ini mengindikasikan bahwa persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah \$1 (PPP) per hari termasuk kategori miskin. Indikator ini disepakati menunjukkan status seseorang miskin dan

bermanfaat untuk memonitor kemajuan upaya pengetasan kemiskinan setiap negara termasuk Indonesia.

2.1.2.1.6 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah					
No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
A	Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	134,110,076,220,35	167,307,131,609,15	139,278,661,859,07
B	Total Pendapatan Daerah	Rupiah	1,004,346,574,517,06	934,121,533,937,22	964,835,870,580,73
C	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	13,35	17,91	14,44%

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah data perkembangan PAD Kota Palopo 2016-2018 :

2.1.2.1.7. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016 -2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
a.	Predikat Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo (Perda APBD TA 2018)

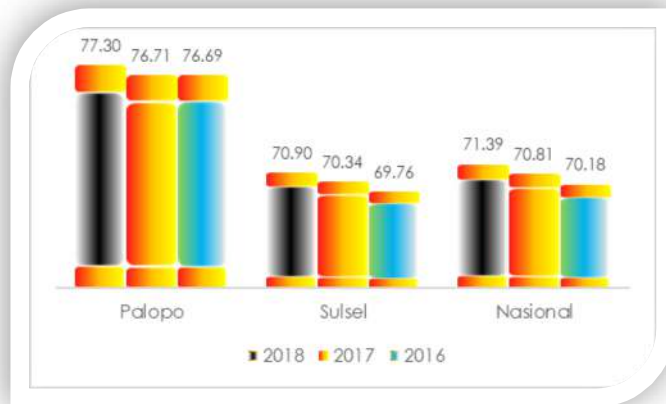
Pemerintah Kota Palopo selama 3 tahun berturut-turut sejak Tahun 2015 hingga 2018 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo

telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo tahun 2018 berada pada angka 77.30 point, atau



melebihi target daerah 2018 yang berada pada angka 76.82 point.

Jika dibandingkan dengan tingkat sulse dan nasional, IPM Kota Palopo **lebih baik dan berada diatas** IPM Provinsi dan Nasional yang masing-masing hanya berada pada angka 70.34 dan 70.81.

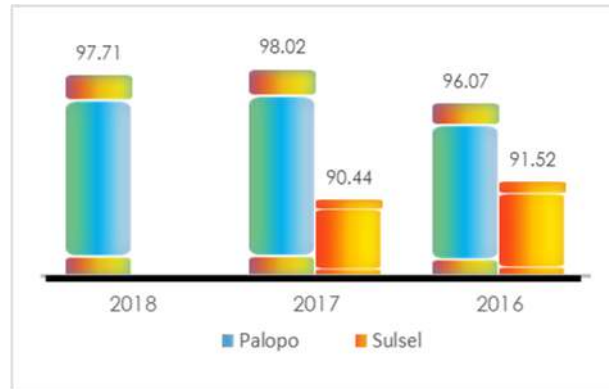
Meski demikian dari aspek persentase tingkat pertumbuhan, IPM Kota Palopo yang tumbuh sebesar 0.77%, ini **masih berada dibawah** angka persentase pertumbuhan IPM secara nasional pada tahun 2018 yang menyentuh angka 0.82% dan angka persentase pertumbuhan IPM sulse 2017 yang berada pada angka 0.82%.

Angka pertumbuhan IPM Kota Palopo pun 2017-2018 sebesar 0.59 poin, juga **masih berada dibawah angka** pertumbuhan IPM nasional yang berada pada angka 0.63 (2016-2017), namun **lebih baik/lebih tinggi** dari pertumbuhan IPM Sulse yang berada pada angka 0.58 (2016-2017).

Nilai IPM Kota Palopo sejak pada tahun 2017 dan 2018 ini berhasil menggeser Kota Pare-Pare sebagai daerah ber IPM tertinggi kedua di Sulawesi Selatan dan menempatkan palopo sebagai kota dengan IPM tertinggi setelah Kota Makassar. Pada tahun sebelumnya Palopo selalu berada dibawah nilai capaian IPM Kota Pare-Pare.

2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)

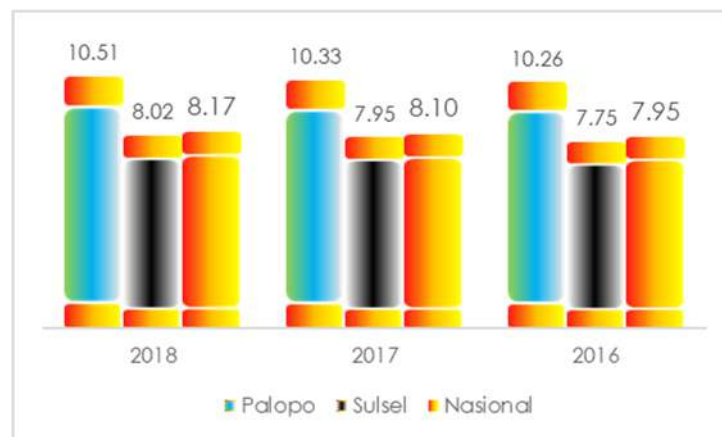
Angka Melek Huruf Kota Palopo pada tahun 2018 di Kota Palopo berada pada angka 97.71% yang menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk Kota Palopo yang berumur 15 tahun keatas, terdapat 97-98 orang yang sudah mampu membaca dan menulis. Capaian ini **masih berada dibawah target daerah 2018** yang menargetkan capaian angka indicator ini pada posisi 98.20%



Jika dibandingkan terhadap capaian provinsi sulsel tahun 2017, angka melek huruf Kota Palopo tahun 2018 ini **lebih baik**, dimana pada tahun 2017, angka melek huruf sulsel berada pada angka 90.44%. Di tahun yang

sama, angka melek huruf Kota Palopo 2017 juga **lebih baik** dari rata-rata angka melek huruf Sulsel.

2.1.2.2.3 Angka Rata – Rata Lama Sekolah



Angka rata-rata lama sekolah di Kota Palopo tahun 2018 berada pada posisi 10.51 Tahun, yang **masih berada dibawah target** daerah 2018 yang berada pada

angka 10.56 Tahun.

Meski demikian, capaian angka rata –rata lama sekolah Kota Palopo ini jauh diatas angka RLS Nasional pada tahun 2018 yang berada pada angka 8.17 Tahun dan RLS Sulawesi Selatan 2018 yang berada pada angka 8.02 Tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Palopo 2018 berada pada posisi 15.06 Tahun atau **belum memenuhi target daerah** yang berada pada angka 15.10 Tahun. Meski demikian capaian 2018, masih **lebih baik** dari angka HLS Sulawesi Selatan yang berada pada angka 13.34 Tahun dan Nasional 12.91 Tahun.

2.1.2.2.4 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Kota Palopo Tahun 2018, berada pada angka 70.49 Tahun, **atau lebih baik dibandingkan** target daerah 2018 yang berada posisi 70.35 Tahun. Jika dibandingkan dengan sulsel, AHH Kota Palopo 2018 **lebih baik** dimana AHH Sulsel (2018) hanya berada pada angka 70.08 Tahun, tapi **belum lebih baik** jika dibandingkan nasional yang mencapai 71.20 Tahun (2018).



Rentan waktu 2016-2018, AHH Kota Palopo hanya meningkat 0.24 Tahun, ini lebih rendah dari peningkatan AHH Sulsel yang berada pada angka 0.26 Tahun dan Nasional 0.30 Tahun.

2.1.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Tabel 2.24
Persentase Balita Gizi Buruk
Kota Palopo Tahun 2016 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
a.	Jml Balita Gizi Buruk	Jiwa	3	4	2
b.	Jumlah Balita	Jiwa	16,177	16,963	17,826
C	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,02	0,02	0.01
D	Balita Gizi Buruk per 10.000 balita	Rasio	2	2	1

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2019

2.1.2.2.6 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
a.	Jumlah Angkatan kerja 15 tahun ke atas	Orang	67,504	75,563	75,829

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
	Laki – Laki	Orang	40.975	47.057	45,831
	Perempuan	Orang	26.529	28.506	29,998
b.	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	123.168	134.147	129,460
	Laki – Laki	Orang	58.952	63.600	61,900
	Perempuan	Orang	64.216	70.547	67,560
c	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	54,81	56,33	58.57
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	69,51	73,99	74.04
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	41,31	40,41	44.40

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019 , Diolah dari Palopo Dalam Angka 2019,

Data di atas menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo sepanjang tahun 2016 – 2018 meningkat. Pada tahun 2016, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, mampu menyediakan 54-55 orang angkatan kerja berusia 15 tahun keatas yang aktif secara ekonomi bekerja, pada tahun 2018 angkanya meningkat menjadi 58-59 orang per 100 penduduk.

Dari aspek gender, tabel di atas juga menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2016 – 2018 di Kota Palopo masih terus berada dibawah angka partisipasi angkatan kerja laki. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo diharapkan agar ke depan angka partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat.

2.1.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi angkatan kerja Kota Palopo Tahun 2018 berada pada angka 58.31% atau **berada lebih rendah** daripada target daerah 2018 yang berada pada 59.86%. Capaian Pemerintah Kota ini juga **lebih rendah** dari angka TPAK Sulsel yang ada di posisi 63.02%

Tabel 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Palopo Tahun 2016 –2018

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	67.504	75.563	75,829
	- Laki – Laki	Orang	40.975	47.057	45,831
	- Perempuan	Orang	26.529	28.506	29,998
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Orang	116,200	126.879	121,883

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
	- Laki – Laki	Orang	56.109	60.63	58,794
	- Perempuan	Orang	60.091	66.249	63,089
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	58,09	59,56	58.31
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	73,03	77,61	77.95
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	44,15	43,03	47.55

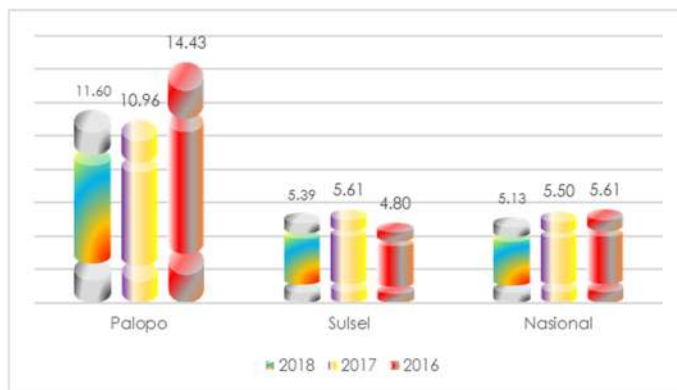
Sumber Data : Diolah dari Kota Palopo Angka 2019

Angka pada tabel diatas menunjukkan adanya kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo sepanjang 2016 – 2018. Jika pada tahun 2016, dari 100 orang penduduk usia 15 -64 tahun, ada 58 orang (pembulatan 61,72) yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa di Kota Palopo, pada tahun 2018 menjadi 58 orang yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa.

Artinya sepanjang 2016 – 2018, jumlah tenaga kerja di Kota Palopo yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa meningkat. Olehnya Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan ketenagakerjaan.

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2016 – 2018 di Kota Palopo masih jauh tertinggal dibawah TPAK laki. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo perlu agar ke depan TPAK perempuan terus meningkat.

2.1.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka



Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palopo tahun 2018 berada pada 11,60%. Ini menunjukan bahwa dalam hal penanganan persoalan TPT, Pemerintah Kota Palopo **belum mencapai/memenuhi target daerah** 2018 yang berada pada angka

10.34%. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2017, capaian angka TPT Kota Palopo 2018, **justu lebih tinggi atau meningkat sebesar 0.64%**. Hanya pada tahun 2016-2017, TPT Kota Palopo berhasil diturunkan dari 14.43% menjadi 10.96%. Capaian TPT 2018 Kota Palopo, bila dibandingkan dengan tingkat sulsei dan nasional, TPT Kota Palopo dalam dua tahun terakhir selalu berada **dibawah target**.

Tabel 2.27
Pengangguran Terbuka
Kota Palopo Tahun 2016– 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
a.	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	Orang	9.739	8.282	8795
B	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	67.504	75.563	75,829
c.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	14,43	10,96	11.60

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2019

Tingginya arus urbanisasi menjadi salah satu meningkatnya tingkat pengangguran di Kota Palopo. Kota Palopo menjadi salah satu kota tujuan pendidikan di wilayah utara Sulawesi Selatan dan mereka yang telah lulus dari perguruan tinggi masih tetap tinggal di Kota Palopo untuk mencari pekerjaan. Jika pada tahun 2017 tingkat pengangguran di Kota Palopo mencapai 10,96% di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 11.6%.

2.1.2.2.9 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.

Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya (*psychological needs*) seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin.

Berikut adalah data kondisi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kota Palopo 2016-2018 :

Tabel 2.28
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kota Palopo Tahun 2016 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
a.	Keluarga Pra Sejahtera	KK	3.500	3.134	2924
b.	Keluarga Sejahtera I	KK	7.304	10.804	5992
Jumlah			10.804	13.938	8916
c.	Jumlah Keluarga	KK	35.606	34.786	33246
Persentase			30,34	40,07	26.81

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, di Kota Palopo terdapat 30.34% kategori keluarga sejahtera I dan keluarga prasejahtera. Namun 2018, jumlah kemudian menurun menjadi 26.81%. Ini menunjukkan adanya pengurangan dari aspek persentase jumlah keluarga untuk kedua kategori ini.

2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

2.1.2.3.1 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga

Tabel 2.29
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Group Kesenian		7	12	14	16	18
Jumlah Group Kesenian per 10.000		0.0007	0.0012	0.0014	0.0016	0,0018
Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	1
Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0,0001
Jumlah Klub Olahraga	4	4	4	4	8	8
Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0008	0,0008
Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	1	1	1
Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0,0001

Sumber Data: Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018, Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2018

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

Layanan urusan wajib dasar diarahkan pada pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.1.3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Merupakan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak dibagi jumlah seluruh anak yang berusia 4-6 tahun yang dinyatakan dalam persentase.

Tabel 2.30
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Orang	4484	4681	4338	4110	46980
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Orang	7262	7411	6875	6511	67114
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		%	59,60	61,75	63,16	63,10	70

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa, meski pun meningkat, tingkat partisipasi anak berusia 4-6 tahun mengakses pendidikan anak usia dini relatif masih rendah dan belum mencapai angka 75%. Ini menunjukkan bahwa perlunya ada akselerasi program dan kegiatan sehingga lebih banyak anak usia 4-6 tahun yang mengakses lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Palopo.

Sampai dengan tahun 2018, jumlah lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Palopo, totalnya sebanyak 129 lembaga, termasuk yang berada dibawah Kementerian Agama. Jumlah ini terdiri dari Raudatul Afhal (RA) sebanyak 5, TPA sebanyak 3, Satuan Paud Sejenis (SPS) sebanyak 2, Kelompok Bermain (KB) sebanyak 30, TK sebanyak 89.

Beberapa aspek yang mesti menjadi perhatian dalam meningkatkan angka partisipasi ini adalah memastikan edukasi dan sosialisasi urgensi pendidikan anak usia dini terhadap orang tua dan memastikan bahwa biaya pendidikan pada level ini bisa dijangkau oleh semua kalangan.

2.1.3.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi Kasar adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angkanya menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau **lebih dari 100** persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu

menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2014 -2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	APK SD/MI/Paket A	109,55	101,81	111,66	106,00	112,89
2	APK SMP/MTs/Paket B	84,86	88,23	86,17	84,91	84,17
3	APK SMA/MA/SMK/Paket C	79,32	91,56	95,35	85,39	110,31

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka

Tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi kasar tingkat SD sederajat di Kota Palopo tahun 2013-2018 selalu melebihi 100%. Kondisi ini menggambarkan setiap tahunnya selalu ada penduduk yang sudah bersekolah di tingkat SD, meski umurnya belum mencukupi 7 tahun, atau melebihi umur yang seharusnya. Namun kondisi ini juga mencerminkan bahwa di Kota Palopo, untuk tingkat sekolah dasarnya, tetap mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya yakni penduduk berumur 7-12 tahun.

Pada tingkat pendidikan SMP/sederajat, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan ini menurun. Jika pada tahun 2013 dari 100 orang penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 86-87 orang, pada tahun 2018 meningkat menjadi 110-111 orang, per 100 penduduk umur 13-15 tahun.

Sementara pada jenjang SMA/sederajat partisipasi kasar pada jenjang pendidikan ini justru meningkat. Jika pada tahun 2013 dari 100 orang penduduk berumur 16-18, tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 75-76 orang, pada tahun 2018 meningkat menjadi 110 orang, per 100 penduduk umur 16-18 tahun.

Beberapa aspek yang sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan partisipasi kasar adalah aspek ketersediaan sekolah, guru dan keterjangkauan biaya pendidikan. Olehnya ke depan melalui pelaksanaan pendidikan paripurna, Kota Palopo berharap mampu meningkatkan angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP sederajat. Untuk menyikapi hal ini Pemerintah Kota Palopo melaksanakan program pendidikan gratis. Sehingga diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan partisipasi pada anak usia sekolah.

2.1.3.1.1.3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini menunjukkan besaran atau persentase komposisi penduduk usia menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki masing-masing tingkat pendidikan. Mulai dari SD, SMP dan SMA/sederajat. Ini untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu

sebagai batasan minimalnya atau sebagai bahan analisis pasar kerja.

Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Berikut adalah data penduduk usia 10 tahun keatas di Kota Palopo 2016-2017, sesuai tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan :

No	Uraian	2016	2017	2018
A	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)			
1	Tidak/Belum Bersekolah (%)	7.85	7.02	6.31
2	Tamat SD/ sederajat (%)	30.47	14.18	12.69
3	Tamat SMP/ sederajat (%)	11.82	23.63	24.71
4	Tamat SMA (%)	31.75	36.68	37.88
5	Tamat SMK (%)	4.06	2.81	2.39
6	Tamat Perguruan Tinggi (%)	14.08	15.67	16.00
A	Diploma I/II (%)	0.29	0.37	0.38
B	Diploma III (%)	1.82	1.39	1.12
C	Diploma IV/S1-S3 (%)	11.97	13.91	14.51

2.1.3.1.1.4. Angka Partisipasi Murni

Adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN						
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	96.54	97.53	94.11	95.37	99.32	99.78
Laki-laki	-	-	97.48	100.00	99.33	99.60
Perempuan	-	-	90.04	90.52	99.31	100.00

Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2013, terdapat 96,54% anak usia 7-12 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SD/MI sederajat. Dan pada tahun 2018 menjadi 99,78%. Namun pada tahun-tahun berikutnya, jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, yang menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini cukup baik, misalnya dengan jumlah ketersediaan sekolah yang tersedia.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN						
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SMP/MTs	73.57	78.15	75.43	76.61	77.89	78.39
Laki-laki	-	-	68.49	77.50	75.35	79.35
Perempuan	-	-	81.02	75.52	80.28	77.55

Tabel diatas menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2013, hanya 73,57 % anak usia 13-15 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMP/MTs sederajat, pada tahun 2018 sudah mencapai angka 78,39%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik. Meski pun angkanya jika dibandingkan dengan APM tingkat SD sederajat, APM pada tingkat SMP/ sederajat masih berada di bawah.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN						
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SMA/MA/SMK	49.25	60.49	68.29	65.72	66.42	67.99
Laki-laki	-	-	70.11	66.80	69.65	75.27
Perempuan	-	-	66.63	64.73	63.24	62.00

Tabel diatas menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2013, hanya 49,25 % anak usia 16-18 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMA/SMK sederajat, pada tahun 2018 sudah mencapai angka 67,99%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik.

2.1.3.1.1.5 Angka Partisipasi Sekolah

Adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Tabel 2.37

Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7 - 12	100	100	98.98	100	99.32	99.78
Laki-Laki	-	-	98.14	100	99.33	99.60
Perempuan	-	-	100	100	99.31	100

Sumber : BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka Diolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Tabel 2.38

Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 - 15	94.39	95.12	98.52	96.57	98.13	100
Laki-Laki	-	-	98.01	95.14	96.15	100
Perempuan	-	-	98.92	98.35	100	100

Sumber Data : BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka Diolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C

Tabel 2.39

Persentase Partisipasi Sekolah Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 - 18	100	100	98.98	100	99.32	99.78
Laki-Laki	-	-	78.74	85.33	84.71	88.56
Perempuan	-	-	84.76	91.24	91.92	81.62

Sumber Data : BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka Diolah

2.1.3.1.1.6. Angka Putus Sekolah

Adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang

pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun).

Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Contoh APTS7-12 = 10,11% berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 10 sampai 11 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 10 anak yang putus sekolah.

Tabel 2.40
Angka Putus Sekolah
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0	0	0.40	0	0.68	0,79
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	5.14	4.13	1.45	3.43	1.87	1,26
3.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	29.43	16.74	15.87	9,10	10.28	7,35

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2013-2018

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Tabel 2.41
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SD/MI Kota Palopo	Orang	0	0	74	0	153	179
2.	Jumlah Seluruh APS SD/MI Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	21,917	18,622	18,470	21,952	22,500	22.617
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	0.40	0	0.68	0,79

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2018

Data diatas menunjukkan bahwa angka putus sekolah Kota Palopo 2013-2017 pada tingkat SD cenderung meningkat. Angka putus sekolah Jika pada tahun 2013 sebesar 0% pada tahun 2017 sebesar 0,68%. Artinya pada tahun 2017, dari 100 siswa sekolah SD ada 1 orang siswa yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikannya pada jenjang SD/ sederajat. Ini mesti disikapi oleh Pemerintah sehingga angkanya tidak semakin meningkat.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Tabel 2.42
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMP/MTs Kota Palopo	Orang	556	432	153	385	214	146
2.	Jumlah Seluruh Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMP/MTs Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	10,817	10,465	10,567	11,213	11,465	11.595
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	5.14	4.13	1.45	3.43	1.87	1,26

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2018

Data di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah Kota Palopo 2013-2018 pada tingkat SMP justru menurun. Dari 556 kasus pada tahun 2013 menurun menjadi 146 kasus pada tahun 2018.

Pada tahun 2013, dari 100 siswa ada 5 (pembulatan 5.14%) yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikannya pada jenjang SMP/ sederajat namun pada tahun 2018 dari 100 siswa hanya ada 1-2 (1,26%) orang saja yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikannya pada jenjang SMP/ sederajat.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Tabel 2.43
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMA/SMK/ sederajat se Kota	Orang	2,611	1,963	1,869	962	1,147	854
2	Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/ sederajat se- Kota (Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang pernah/ sedang bersekolah)	Orang	8,873	11,728	11,776	10,573	11,162	11.620
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	29.43	16.74	15.87	9,10	10.28	7,35

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2018

Data diatas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada tingkat ini cukup tinggi di Kota Palopo pada tahun 2013. Meskipun trendnya semakin tahun terus menurun. Jika pada tahun 2013 terdapat 29 orang siswa putus sekolah per 100 siswa (29,43%), pada tahun 2018 hanya terdapat 7 orang (7,35%) siswa yang putus sekolah per 100 orang siswa.

2.1.3.1.1.7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan besar jumlah siswa yang tidak tinggal kelas atau berhasil menamatkan pendidikannya pada level yang sedang ia tempuh. Indikator ini menunjukkan keberhasilan para siswa dalam mengikuti ujian sekolahnya.

Tabel 2.44
Angka Kelulusan
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Kelulusan SD	95,72	96,63	97,48	98,87	100	100
2.	Angka Kelulusan SMP	97,34	98,74	99,05	99,62	99,30	99,38
3.	Angka Kelulusan SMA/SMK	102,60	102,32	102,82	102,44	99,75	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2019

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Tabel 2.45
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	-	-	2.936	2.830	3.038	3.072
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Orang	-	-	3.012	2.862	3.038	3.047
3.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	95,72	96,63	97,48	98,87	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun pada tingkat SD terus membaik. Jika pada tahun 2013 persentase angka kelulusan mencapai 95.72%, pada tahun 2018, semua siswa pada jenjang pendidikan SD/ sederajat lulus atau mencapai 100%.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Tabel 2.46
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	-	-	2.759	2.822	2.865	2.900
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Orang	-	-	2.785	2.833	2.885	2.918
3.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,34	98,74	99,05	99,62	99,30	99,38

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2019

Demikian halnya dengan kelulusan tingkat SMP sederajat. Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun pada tingkat ini terus membaik. Jika pada tahun 2013 persentase angka kelulusan masih pada posisi 97.34%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 99.38%.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Tabel 2.47
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	Orang					
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya	Orang					
3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	102,60	102,32	102,82	102,44	99,75

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa angka kelulusan SMA sederajat pada empat tahun awal 2013-2016 angkanya melebihi 100%. Ini disebabkan karena mereka yang sebelumnya tinggal kelas atau tidak lulus, baru berhasil menamatkan pendidikannya pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Kemudian pada tahun 2017 masih terdapat 0,25% siswa yang tidak berhasil menamatkan pendidikan SMA sederajatnya tepat waktu karena tidak berhasil lulus.

2.1.3.1.1.8. Angka Melanjutkan (AM)

Indikator ini menggambarkan persentase pelajar yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka ini diperoleh dengan membagi Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Tabel 2.48
Persentase Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	4233	4534	4420	4531	-	4.681
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3225	3210	3213	3228	3361	3.388
3.	Angka Melanjutkan (AM) dari	%	131.25	141.24	137.56	140.36	-	138,16

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA							

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP/Sederajat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/Sederajat meningkat setiap tahunnya. Jika pada tahun 2013 hanya pada angka 131.25%, pada tahun 2018 menjadi 138.16%. Angka melanjutkan yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa semua lulusan SMP/MTS yang ada di Kota Palopo, melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA/SMK/ sederajat.

Angka melanjutkan melebihi 100% ini, menurut data Dinas Pendidikan Kota Palopo, karena cukup banyak lulusan SMP/ sederajat yang berada di luar wilayah Kota Palopo, memilih untuk bersekolah di SMA/ sederajat yang berada di wilayah Kota Palopo. Terutama lulusan SMP/ sederajat yang menetap di perbatasan Kabupaten Luwu.

Beberapa alasannya adalah, sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah sekolah di Kota Palopo lebih kompetitif dibandingkan dengan sekolah SMA/ Sederajat yang berada di wilayah mereka tinggal. Faktor lainnya adalah karena orang tua mereka bekerja di wilayah Kota Palopo.

Kondisi ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap sistem zonasi pendidikan belum berjalan cukup baik. Sebab masih banyak lulusan sekolah yang memilih bersekolah diluar dari zona wilayahnya. Namun ini juga menunjukkan adanya ketimpangan kualitas sekolah maupun pendidikan sehingga para lulusan memilih bersekolah di wilayah Kota Palopo dengan alasan sarana dan prasarana sekolah serta kualitas pembelajaran yang lebih kompetitif. Meski demikian kondisi ini juga menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, daya serap pendidikan menengah baik SMA, SMK atau MA di Kota Palopo cukup baik, sehingga mampu menampung lulusan yang berasal dari luar Kota Palopo.

2.1.3.1.1.9. Fasilitas Pendidikan Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Indikator ini menggambarkan kondisi umum bangunan sekolah SD atau yang setingkat yang layak dipakai proses belajar mengajar. Semakin tinggi nilai persentasenya, menunjukkan bahwa tersedia ruang kelas yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar.

Tabel 2.49
Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2013 -2018

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Sekolah SD/MI berkondisi Baik	77	81	77	77	77	77

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah SD Negeri Berkondisi Baik	61	61	62	62	63	63
b	Jumlah SD Swasta Berkondisi Baik	12	10	11	11	11	11
c	Jumlah MI Negeri Berkondisi Baik	0	5	4	4	4	4
d	Jumlah MI Swasta Berkondisi Baik	4	5	-	-	-	-
2	Jumlah seluruh SD/MI di Kota Palopo (Negeri & Swasta)	79	83	79	79	80	80
e	Jumlah SD Negeri	63	63	64	64	65	65
f	Jumlah SD Swasta	12	10	11	11	11	11
g	Jumlah MI Negeri	0	5	4	4	4	4
h	Jumlah MI Swasta	4	5	-	-	-	-
3	Persentase Sekolah SD/MI Kondisi baik(%)	97.47	97.59	97.47	97.47	96.25	96.25

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Palopo Dalam Angka, Dinas Pendidikan Tahun 2019

Data menunjukkan bahwa masih ada dua sekolah dasar (SD) di Kota Palopo yang kondisinya belum baik dalam menunjang proses belajar mengajar. Yakni Sekolah Dasar yang terletak di Tandung dan di Pamenta. Keduanya merupakan daerah Kota Palopo yang aksesnya relatif jauh dan berada pada daerah terluar dari wilayah Kota Palopo.

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Tabel 2.50

Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2013 -2018

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jml SMP/MTs Kondisi Baik	27	34	28	29	30	31
a.	Jumlah SMP Negeri Berkondisi Baik	13	14	13	13	14	15
b	Jumlah SMP Swasta Berkondisi Baik	7	13	8	8	8	8
c	Jumlah MTs Negeri Berkondisi Baik	1	1	7	8	8	8
d	Jumlah MTs Swasta Berkondisi Baik	6	6	-	-	-	-
2.	Jml Seluruh SMP/MTs	27	34	28	29	30	31
e	Jumlah SMP Negeri	13	14	13	13	14	15
f	Jumlah SMP Swasta	7	13	8	8	8	8
g	Jumlah MTs Negeri	1	1	7	8	8	8
h	Jumlah MTs Swasta	6	6	-	-	-	-
3.	Persentase Sekolah SMP/MTs Kondisi baik (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Tahun 2019

Tabel 2.51

Persentase Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2013 -2018

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml SMA/SMK/MA Kondisi Baik	33	34	34	31	31	31
a.	Jumlah SMA Negeri Berkondisi Baik	6	7	6	6	6	6
b	Jumlah SMA Swasta Berkondisi Baik	7	7	6	6	6	6
c	Jumlah SMK Negeri Berkondisi Baik	4	4	7	7	7	7
d	Jumlah SMK Swasta Berkondisi Baik	15	15	14	11	11	11
e	Jumlah MA Berkondisi Baik	1	1	1	1	1	1

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Jml Seluruh SMA/SMK/MA	33	34	34	31	31	31
e	Jumlah SMA Negeri	6	7	6	6	6	6
f	Jumlah SMA Swasta	7	7	6	6	6	6
g	Jumlah SMK Negeri	4	4	7	7	7	7
h	Jumlah SMK Swasta	15	15	14	11	11	11
i	Jumlah MA Negeri	1	1	1	1	1	1
j	Jumlah MA Swasta	0	0	0	0	0	0
3	Persentase SekolahSMA/SMK/MA Kondisi baik (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Tahun 2019

2.1.3.1.10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Adalah gambaran ketersediaan atau daya tampung sekolah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Pendidikan dasar adalah tingkat SD/Mi dan SMP/MTs. Sehingga jumlah sekolah yang berada dalam tabel di bawah ini adalah jumlah SD dan Jumlah Sekolah madrasah Ibtidaiyah (MI) yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama dan Pihak Swasta lainnya, namun berlokasi di Kota Palopo.

Tabel 2.52

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI						
1.1	Jumlah gedung sekolah	79	83	79	79	80	80
	SD Negeri	63	63	64	64	65	65
	SD Swasta	12	10	11	11	11	11
	MI Negeri	0	5	4	4	4	4
	MI Swasta	4	5	-	-	-	-
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21,917	18,622	18,586	21,952	22,500	22.617
1.3.	Rasio SD/MI (per 10.000)	36	45	43	36	36	36
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah gedung sekolah	27	34	28	29	30	31
	SMP Negeri	13	14	13	13	14	14
	SMP Swasta	7	13	8	8	8	8
	MTs Negeri	1	1	7	8	8	8
	MTs Swasta	6	6	0	0	0	0
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10,899	10,566	10,572	11,226	11,469	11.583
2.3.	Rasio SMP/MTs (per 10.000)	25	32	26	26	26	26
3	Pendidikan Dasar (SD dan SMP)						
3.1	Total Jumlah gedung sekolah (SD + SMP sederajat)	106	117	107	108	110	112
3.2	Total jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun + jumlah penduduk usia 13-15 tahun	32,816	29,188	29,158	33,178	33,969	34.200
3.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Per 10.001	32	40	37	33	32	32

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2013-2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar yakni SD dan SMP atau yang sederajat di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 cenderung stagnan. Jika pada tahun 2013 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) tersedia sekolah sebanyak 32 unit, tahun 2018 juga tersedia sebanyak 32 unit.

Untuk umur 7-12 tahun atau tingkat SD/sederajat, pada tahun 2013 tersedia 36 sekolah untuk 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun, sementara pada tahun 2018 juga masih tersedia 36 sekolah untuk 10.000 penduduk usia SD/MI.

Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ketersediaan bangunan sekolah untuk umur 13-15 tahun, dimana pada tahun 2013 sampai dengan 2018, hanya tersedia masing-masing hanya 25 dan 26 sekolah untuk menampung 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun.

2.1.3.1.1.11. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK.

Tabel 2.53

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	SMA/MA/SMK						
1	Jumlah Sekolah	33	34	34	31	31	31
	SMA Negeri	6	7	6	6	6	6
	SMA Swasta	7	7	6	6	6	6
	SMK Negeri	4	4	7	7	7	7
	SMK Swasta	15	15	14	11	11	11
	Madrasah Aliyah	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk Usia 16-18 th	9.792	12.136	12.411	10.962	11.457	11.790
3	Rasio Ketersediaan Sekolah (per 10.000 penduduk)	34	28	27	28	27	28

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2013-2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan menengah di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 menurun. Jika pada tahun 2013 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan 16-18 tahun tersedia sekolah sebanyak 34 unit, tahun 2018 hanya tersedia sebanyak 28 unit.

2.1.3.1.1.12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru sekolah yang bersangkutan. Indikator ini untuk menggambarkan ketersediaan guru pada level pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada level pendidikan tersebut.

Indikator ini akan menunjukkan perkembangan beban kerja guru. Semakin rendah nilai rasio ini berarti semakin tinggi beban kerja guru yang bersangkutan, yang berdampak pada berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa untuk pendidikan dasar, rasio guru dan murid sepanjang tahun 2013-2018, untuk tingkat pendidikan dasar menurun. Artinya beban kerja yang dirasakan oleh guru pendidikan dasar pada tingkat SD dan SMP semakin tinggi, meskipun jika dilihat dari angka rasio masih dalam kondisi normal.

Jika pada tahun 2013, untuk 10.000 siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) dilayani 709 orang guru, pada tahun 2018 hanya dilayani oleh 621 orang guru. Artinya pada tahun 2013 rasio guru dan murid pada angka 1 : 14, sementara pada tahun 2018 berada pada angka 1 : 15 atau 16.

Pada jenjang SD/MI/ sederajat, data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2018, pada tingkat SD/MI, rasio guru dan murid stagnan berada pada angka 1 : 15, artinya satu orang guru harus mengajar sebanyak 15 orang.

Jenjang SMP/MTs/ Sederajat, pada tahun 2013, rasio guru murid berada pada angka 1 : 13, sementara pada tahun 2018 berada pada posisi 1 : 15. Rasio ini masih dalam batas normal dimana beban mengajar guru masih dalam tahap normal, sehingga menjamin kualitas belajar mengajar. Sehingga persoalan yang kemudian harus ditangani adalah soal distribusi atau penyebaran guru sekolah.

Tabel 2.54
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah Guru	1.174	1.292	1.833	1.208	1.136	1.128
	SD Negeri	980	980	1613	986	933	924
	SD Swasta	144	194	158	160	142	142
	MI Negeri	0	59	62	62	61	61
	MI Swasta	50	59	0	0	0	0
1.2.	Jumlah Murid	17.468	21.169	19.565	19.091	18.719	18.969
	SD Negeri	15.104	16.657	16.471	15.867	15.393	15.451
	SD Swasta	2.242	2.974	2.384	2.514	2.659	2.742
	MI Negeri	0	769	710	710	667	642
	MI Swasta	122	769	0	0	0	0
	Rasio Guru/Murid SD/MI (per 10.000)	672	610	937	633	607	595
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah Guru	770	905	827	764	697	682
	SMP Negeri	474	538	514	497	478	479
	SMP Swasta	151	232	153	101	86	73
	MTs Negeri	64	42	160	166	133	147
	MTs Swasta	81	93	0	0	0	0
2.2.	Jumlah Murid	9.958	10.355	10.338	10.167	10.137	10.173
	SMP Negeri	7324	7408	7.823	7.615	7.562	7.610
	SMP Swasta	1.195	1.475	1.105	1.135	1.289	1.308

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	MTs Negeri	1.159	1.127	1.410	1.417	1.286	1.311
	MTs Swasta	280	345	0	0	0	0
	Rasio Guru/Murid SMP/MTs (per 10.000)	773	874	800	751	688	670
3	Pendidikan Dasar (SD + SMP, Sederajat)						
3.1.	Jumlah Guru (SD dan SMP)	1.944	2.197	2.660	1.972	1.833	1.811
3.2.	Jumlah Murid (SD dan SMP)	27.426	31.524	29.903	29.258	28.856	29.142
3.3	Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar (per 10.000)	709	697	890	674	635	621

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.1.1.13. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Tabel 2.55

Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	SMA/MA/SMK						
1	Jumlah Guru	1.225	1.263	2.771	990	980	1.085
	SMA Negeri	319	361	1820	331	331	333
	SMA Swasta	153	153	114	87	87	74
	SMK Negeri	313	313	481	361	351	421
	SMK Swasta	398	398	301	169	169	215
	MA	42	38	55	42	42	42
2	Jumlah Murid	9.457	11.463	12.017	11.121	11.131	11.671
	SMA Negeri	4.169	4.567	5.059	5.005	5.005	5.172
	SMA Swasta	1.030	1.030	832	892	902	1.082
	SMK Negeri	3.609	3.619	4.455	3.496	3.496	3.473
	SMK Swasta	649	2.247	1.671	1.728	1.728	1.944
3	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah per 1000	130	110	231	89	88	93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2013-2018.

Tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2013, untuk mendidik 1000 siswa SMA/SMK/MA sederajat di Kota Palopo tersedia guru sebanyak 130 orang. Artinya rasio guru murid berada pada angka 1 guru : 8 murid. Sementara pada tahun 2018, hanya tersedia 93 orang guru untuk melayani 1000 orang siswa. Artinya rasio guru murid pada tahun 2018 adalah 1 guru : 11 murid.

2.1.3.1.1.14 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Dasar

Adalah rata-rata jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas dibagi jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru per kelas diperoleh dengan membagi jumlah ruang kelas tersedia dengan jumlah guru yang tersedia.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan **ketersediaan tenaga pengajar per kelas.**

Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.56
Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar
Kota Palopo 2013 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs, Swasta dan Negeri)						
1	Jumlah Guru Pendidikan Dasar (Orang)	1,944	2,138	2,660	1,972	1,833	1.811
2	Jumlah Kelas Pendidikan Dasar (Buah)	1,035	1,205	1,095	1,145	1,120	1.137
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (Guru/ Kelas)	1.88	1.77	2.43	1.72	1.64	1,59
4	Jumlah Murid Pendidikan Dasar (Orang)	27,426	30,755	29,903	29,258	28,856	29.142
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Dasar (Siswa/ Kelas)	25.50	25.52	27.31	25.55	25.76	25,81
6	Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar per 10.000 (Guru/Siswa/Kelas)	0.69	0.58	0.81	0.59	0.57	0,55

Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2013-2018 dan Buku Potensi Wilayah Kota Palopo

Data diatas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) di tahun 2013, tersedia 1-2 orang (pembulatan 1.88) guru untuk setiap kelas pendidikan dasar, di tahun 2018, kondisinya tidak jauh berbeda yakni terdapat 1-2 orang guru (pembulatan 1.59) untuk setiap ruang kelas pendidikan dasar.

Data diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah rata-rata murid untuk setiap kelasnya pada pendidikan dasar sebanyak 25-26 orang per kelas (pembulatan 25.50), di tahun 2018 kondisinya juga tidak jauh berbeda yakni 25-26 orang siswa per kelasnya (pembulatan 25.81).

Sehingga pada tahun 2013, kondisi pendidikan dasar di Kota Palopo digambarkan sebagai berikut : untuk satu ruang kelas pendidikan dasar rata-rata diisi oleh sebanyak 25-26 orang siswa dan tersedia 1-2 orang guru untuk mendampingi proses belajar mengajar di setiap kelasnya. Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi di tahun 2018 dimana untuk setiap ruang kelas pendidikan dasar diisi oleh sebanyak 25-26 orang siswa per kelas dan tersedia 1-2 orang guru untuk mendampingi proses belajar mengajar di setiap kelasnya.

Sementara untuk rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar yang dihitung per 10.000 jumlah siswa pendidikan dasar, diperoleh dengan membagi nilai rasio jumlah Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (rasionya) dengan jumlah siswa pendidikan dasar yang ada.

Rasio ideal untuk indikator ini adalah 1, yang menunjukkan bahwa untuk satu kelas tersedia guru sebanyak 1 orang, untuk satu kelas belajar. Namun data di atas menunjukkan bahwa nilai rasionya

cenderung menurun, sebab di tahun 2013 berada pada angka 0.69 tetapi pada tahun 2018 berada pada angka 0.55.

2.1.3.1.1.15. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Menengah

Tabel 2.57

Persentase Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Menengah

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) Swasta & Negeri						
1	Jumlah Guru Pendidikan Menengah (Orang)	1.225	1.263	2.771	990	980	931
2	Jumlah Kelas Pendidikan Menengah (Buah)	445	446	466	477	462	465
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Menengah (Orang/ Kelas)	2.75	2.83	5.95	2.08	2.12	2,00
4	Jumlah Murid Pendidikan Menengah (Orang)	10,095	11,861	12,472	11,732	11,785	12.123
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Menengah (Siswa/ Kelas)	22.7	26.6	26.8	24.6	25.5	26,06
6	Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Menengah per 10000 (Orang/Kelas)	2.73	2.39	4.77	1.77	1.80	1,61

Sumber : Diolah dari Data BPS Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2013-2018 dan Buku Potensi Wilayah Kota Palopo

Data diatas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK/Setara) di tahun 2013, tersedia 2-3 orang (pembulatan 2.75) guru untuk setiap kelas pendidikan dasar, di tahun 2018, tersedia 2 orang guru (pembulatan 2.00) untuk setiap ruang kelas pendidikan menengah.

Data diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah rata-rata murid untuk setiap kelasnya pada pendidikan menengah sebanyak 22-23 orang per kelas (pembulatan 22.7), di tahun 2018 kondisinya menjadi 26-27 orang siswa per kelasnya (pembulatan 26.0).

Sehingga pada tahun 2013, kondisi pendidikan menengah di Kota Palopo digambarkan sebagai berikut : untuk satu ruang kelas pendidikan menengah rata-rata diisi oleh sebanyak 22-23 orang siswa dan tersedia 2-3 orang guru untuk mendampingi proses belajar mengajar di setiap kelasnya. Namun di tahun 2018 untuk setiap ruang kelas pendidikan menengah diisi oleh sebanyak 26-27 orang siswa per kelas dan tersedia 2 orang guru untuk mendampingi proses belajar mengajar di setiap kelasnya.

Sementara untuk rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Menengah yang dihitung per 10.000 jumlah siswa pendidikan menengah, diperoleh dengan membagi nilai rasio jumlah Guru Per Kelas Pendidikan Menengah (rasionya) dengan jumlah siswa pendidikan menengah yang ada.

Rasio ideal untuk indikator ini adalah 1, yang menunjukkan bahwa untuk satu kelas tersedia guru sebanyak 1 orang, untuk satu kelas belajar. Data diatas telah menunjukkan bahwa nilai rasionya cenderung

menurun, sebab di tahun 2013 berada pada angka 2.73 tetapi pada tahun 2018 berada pada angka 1.61.

2.1.3.1.1.16. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan berapa besar penduduk usia 12 tahun pada tahun tertentu, yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasarnya yang dinyatakan dalam persentase. Ini menunjukkan berapa banyak penduduk Kota Palopo yang berhasil menamatkan pendidikan dasar tingkat SD/MI nya.

2.1.3.1.1.17. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki – Laki

Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun sampai 24 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100.

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Contoh: AMH Kota Palopo Tahun 2013 sebesar 92,93 persen, artinya sekitar 93 persen penduduk di Kota Palopo yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Tabel 2.58
Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun
Perempuan dan Laki – Laki Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang belum melek huruf	Orang	21	27	18	11	2	3
	<i>Laki</i>	<i>Orang</i>	9	13	8	6	0	2
	<i>Perempuan</i>	<i>Orang</i>	12	14	10	7	2	1
b	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn	Orang	31.960	29.506	39.414	40.279	41.073	50.903
	<i>Laki</i>	<i>Orang</i>	13.960	17.996	18.457	18.896	19.273	20.336
	<i>Perempuan</i>	<i>Orang</i>	18.000	11.510	20.957	21.383	21.800	30.567
c	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24	%	99.934	99.908	99.954	99.973	99.995	100,000

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tahun, Perempuan dan Laki-laki							
	Laki	%	99.94	99.93	99.96	99.97	100.00	100.00
	Perempuan	%	99.93	99.88	99.95	99.97	99.99	100.00

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2019, *Potensi Wilayah Palopo, Statistik Daerah Kota Palopo, Palopo Dalam Angka

Data diatas menunjukkan bahwa AMH penduduk usia 15-24 tahun Kota Palopo pada tahun 2013 sebesar 99.934%, artinya 99.93% penduduk usia tersebut di Kota Palopo sudah mampu membaca dan menulis.

Kondisi ini lebih membaik di tahun 2018 dimana AMH penduduk usia 15-24 tahun telah mencapai 100.000% yang menunjukkan bahwa 100 orang dari 100 penduduk Kota Palopo yang berumur 15-24 tahun pada tahun 2018 sudah mampu membaca dan menulis.

2.1.3.1.1.18. Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100.

Tabel 2.59
Persentase Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf
(Tidak Buta Aksara)

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se Kota Palopo	Orang	105,692	115,646	117,728	118,993	123,206	126.709
b	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun	Orang	108,804	116,579	119,862	123,168	126,430	129.955
c	Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	97.14	99.20	98.22	96.61	97.45	97.71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Statistik Daerah Kota Palopo, Buku Potensi Wilayah Kota Palopo tahun 2019

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 masih terdapat 2,86% penduduk Kota Palopo yang berusia diatas 15 yang masih buta aksara. Namun pada tahun 2018, angka ini menurun dimana hanya terdapat 2.50% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf di Kota Palopo.

2.1.3.1.1.19. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Adalah indikator yang menggambarkan kualitas dari tenaga guru yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kualitas tenaga guru yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2.60

**Persentase Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kota Palopo Tahun 2013 –2018**

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml guru beijazah S1-D4	2.921	3.179	3.343	3.657	3.861	4.049
2	Jml guru SD/Sederajat+SMP Sederajat +SMA Sederajat	3,169	3,401	5,431	2,962	2,813	2.742
3	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi s1/d4	92.17	93.47	61.55	123.46	137.26	147,26

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2019

Data diatas menunjukkan persentase guru yang berijazah S1-D4 di Kota Palopo meningkat tajam. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 92.17%, tahun 2018 berada pada angka 147.26%. Ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 semua guru yang berstatus ASN di Kota Palopo telah menyandang strata satu atau sarjana/diploma 4.

Kondisi pada tahun 2016, 2017 dan 2018 melebihi angka 100% sebab, terdapat guru yang menempuh strata satu kembali untuk menyesuaikan gelar pendidikan kesarjanaanya sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan para tenaga guru di Kota Palopo sudah sangat kompetitif.

2.1.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

2.1.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup



Adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

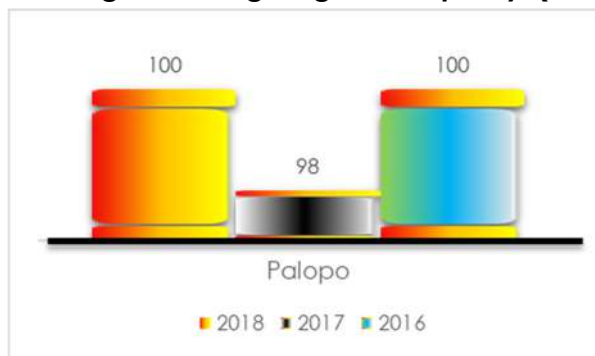
Tabel 2.61
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu)	16	4	1	6	6	4
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959	3.006
3	Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	6	2	0	2	2	1

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 1000 kelahiran hidup, ada 6 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun, kemudian 2014 turun menjadi 2 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun, 2015 turun menjadi 0 kematian dalam 1000 kelahiran hidup, 2016 naik menjadi 2 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Capaian yang sama juga terjadi pada tahun 2017, namun tahun 2018 turun menjadi 1 kasus.

2.1.3.1.2.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)



Adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (100-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

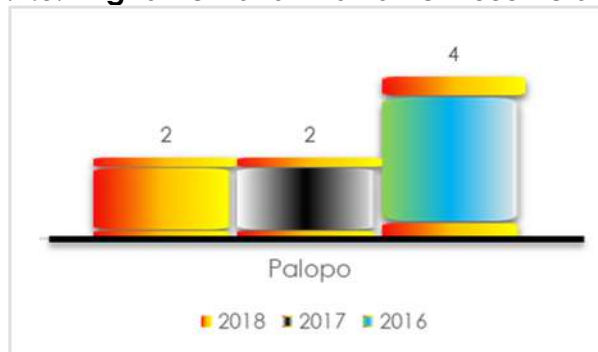
Tabel 2.62
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Per 1000 kelahiran	100	100	100	100	100	100
2.	AKB per 1000	6	2	0	2	2	2
3	AKHB	94	98	100	100	98	98

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 kelahiran hidup, ada 94 bayi yang tetap hidup sampai tepat usia 1 tahun, kemudian 2014 naik menjadi 98 bayi sebelum usia tepat 1 tahun, 2015 semua bayi hidup per 100 kelahiran hidup, 2016 pun demikian, dan di 2017 dan 2018 hanya ada 98 bayi hidup per 100 kelahiran.

2.1.3.1.2.3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup



Adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan

kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Misalkan perhitungan dari data Susenas 2004 mendapatkan perkiraan Angka Kematian Balita sebesar 74 per 1000 balita, dengan referensi waktu Mei 2002. Artinya, pada tahun 2002 setiap 1000 balita (umur 0 sampai 4 tahun 11 bulan 29 hari) pada tahun 2002, 74 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

Tabel 2.63
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	3	8	4	12	6	7
2.	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959	3.006
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	1	3	1	4	2	2

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan, pada tahun 2013, dari 1000 balita yang lahir, ada 1 balita yang meninggal dan tidak mencapai umur tepat lima tahun. Dan tahun 2018 terdapat 2 kematian balita per 1000 kelahiran. Sesuai data dalam tabel di atas, perlunya meningkatkan program kesehatan terutama ibu, bayi dan balita mengingat adanya trend kenaikan jumlah balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup.

2.1.3.1.2.4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup



atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Tabel 2.64

**Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup(AKABA)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	16	18	17	21	16	16
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada Satu Tahun Tententu	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959	3.006
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	6	7	6	8	5	5

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan, pada tahun 2013 dari 1000 kelahiran hidup, terdapat 6 kasus kematian neonatal pada bayi, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 5 kasus kematian neonatal pada bayi per 1000 kelahiran bayi hidup.

2.1.3.1.2.5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Atau Maternal Mortality Ratio (MMR) adalah Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena

kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Tabel 2.65
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	2	3	4	4	2	2
2.	Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959	3.006
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	73	115	146	145	68	66

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan, dari 100.000 ibu melahirkan, terdapat 73 kasus kematian ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di Kota Palopo. Dan pada tahun 2017, terjadi 68 kasus kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan. Angka ini menunjukkan bahwa kasus kematian ibu karena melahirkan adalah ancaman yang harus disikapi oleh pemerintah Kota Palopo melalui berbagai program dan kegiatan untuk mengatasi persoalan ini.

2.1.3.1.2.6 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Dari rasio ini dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yang diinginkan. Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standar ditentukan oleh masing-masing daerah.

Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancangan pemerataan sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.66
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Posyandu	147	147	147	147	149	149
2.	Jumlah Balita	13.851	15.774	15.275	16.178	16.963	17.585
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (1.000)	11	9	10	9	9	8

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani 1000 balita, tersedia sebanyak 11 posyandu. Namun pada tahun 2018, hanya tersedia 8 posyandu untuk melayani 1000 orang

balita. Ini menggambarkan adanya peningkatan beban kerja posyandu di Kota Palopo.

2.1.3.1.2.7 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu dan poliklinik yang bisa disediakan pemerintah dalam melayani masyarakat. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin banyak faskes yang disiapkan pemerintah untuk melayani masyarakatnya.

Tabel 2.67
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jml	33	33	34	48	48	48
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
c	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (10.000)	Rasio	2	2	2	3	3	3

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani 10.000 orang penduduk tersedia sebanyak 2 faskes (puskesmas, poliklinik dan pustu). Namun pada tahun 2018, sudah tersedia 3 fasilitas kesehatan. Ini menggambarkan adanya pengurangan beban kerja faskes di Kota Palopo.

2.1.3.1.2.8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Indikator ini memberikan gambaran perkembangan beban kerja dan daya tampung rumah sakit yang ada di Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.68
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Rumah Sakit	5	5	5	6	7	7
2.	Jumlah Penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
3	Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk (100.000)	3	3	3	4	4	4

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani penduduk sebanyak 100.000 orang hanya tersedia sebanyak 3 rumah sakit. Namun pada tahun 2017 menjadi 4 rumah sakit. Ini menggambarkan adanya pengurangan beban kerja yang ada di rumah sakit Kota Palopo.

2.1.3.1.2.9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menyusun rencana dalam penyediaan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, hingga pendidikan, latihan dan penyebaran tenaga kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari rasio ini dapat diketahui jumlah penduduk yang harus dilayani oleh seorang tenaga kesehatan tertentu, karena itu rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan tenaga kesehatan untuk suatu jenis pelayanan kesehatan.

Tabel 2.69
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah dokter	Org	71	75	81	82	89	93
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
c	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	Per 10.000	4	5	5	5	5	5

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 4 orang dokter atau 1 dokter harus melayani sebanyak 2500 penduduk. Namun pada tahun 2018, meningkat menjadi tersedia 5 orang dokter untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo atau 1 dokter harus melayani 2000 penduduk. Ini memberikan informasi bahwa beban kerja tenaga dokter di Kota Palopo sejak 2018 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Ini menunjukkan adanya potensi peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan di Kota Palopo.

1.2.3.1.2.10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang siap melayani per 1000 penduduk di Kota Palopo. Ini menggambarkan kondisi beban kerja yang dialami tenaga medis. Semakin tinggi nilai rasio indikator ini maka semakin ringan beban kerja para tenaga medis tersebut.

Tabel 2.70
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah Tenaga Medis	Org	71	75	81	82	89	93
	Dokter Umum	Org	38	38	39	40	41	42
	Dokter Gigi	Org	16	16	18	17	23	24
	Dokter Ahli (RS)	Org	17	21	24	25	25	25
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
c	Rasio tenaga Medis	Rasio	4	5	5	5	5	5

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Persatuan Penduduk (10.000)							

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 4 orang tenaga medis. Namun pada tahun 2018, tersedia 4 orang tenaga medis untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo. Ini memberikan informasi bahwa beban kerja tenaga medis di Kota Palopo sejak 2018 sama dengan tahun 2013. Ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Palopo, termasuk meningkatkan kualitas layanan di RS Rujukan Sawerigading Kota Palopo.

2.1.3.1.2.11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil ibu bersalin, dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/ atau bayi, Komplikasi dalam kehamilan, dsb. Semakin tinggi angka indikator ini, menggambarkan tingkat penanganan kesehatan ibu hamil dan bayi yang semakin baik.

Tabel 2.71
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jml	419	366	446	472	457	465
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Jml	615	601	601	617	647	653
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	68,13	60,89	74,20	76,49	70,63	71,21

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menggambarkan bahwa tingkat penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Palopo dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013, dari 100 kasus komplikasi kebidanan sebanyak 68 kasus berhasil ditangani. Dan pada tahun 2017 sebanyak 71 kasus berhasil ditangani per 100 kasus komplikasi kebidanan. Ini mengindikasikan membaiknya pelayanan

kesehatan bagi ibu hamil terutama cakupan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

2.1.3.1.2.12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Adalah Perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator yang digunakan adalah proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.. Semakin banyak persalinan yang ditolong dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu melahirkan.

Tabel 2.72

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.755	2.674	2.764	2.767	2.956	3.022
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Jml	2.755	2.871	2.870	2.944	3.086	3.152
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	93,14	96,31	93,99	95,79	95,88

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Palopo yaitu 100 persen pada tahun 2013 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.775 ibu bersalin (jiwa). Sedangkan pada tahun 2018, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 95,88 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 3.152 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kota Palopo sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

2.1.3.1.2.13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia

subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Semakin tinggi persentase indikator ini semakin baik kinerja UCI.

Tabel 2.73
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah desa/kelurahan UCI	Jml	46	47	46	47	46	47
2.	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Jml	48	48	48	48	48	48
3	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95,83	97,92	95,83	97,92	95,83	97,92

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 cakupan 95,83 persen kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memenuhi UCI dimana sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bayi, ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah pada tingkat dasar, dan tahun 2018 naik menjadi 97,92.

2.1.3.1.2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kota Palopo yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2013 hingga tahun 2018. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.74
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	5	7	11	3	4	4
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	5	7	11	3	4	4
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.1.2.15. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Perkapita/Hari)

Indikator ini memberikan gambaran proporsi dan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara cukup dan bergizi. Umumnya masyarakat miskin belum mampu memenuhi konsumsi pangan minimum baik dari aspek kuantitas maupun kualitas gizi. Indikator ini erat kaitannya dengan aspek kemiskinan. Semakin tinggi angka indikator ini, artinya semakin banyak penduduk yang kekurangan pangan karena kesulitan mengakses kebutuhan dasar akibat aspek ekonomi.

Tabel 2.75
Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah
dari 2.100 kkal/kapita/hari Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari (Jumlah Penduduk Miskin)							
		Orang	15,500	14,590	14,510	15,020	15,440	15,428
2	Jumlah Balita (Jumlah Penduduk Berumur di Bawah Lima Tahun) (*)							
		Orang	13,851	15,774	15,275	16,178	16,963	17,585
3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)							
		%	111.9	92.5	95.0	92.8	91.0	87,73

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 balita per 100 penduduk miskin, semuanya memiliki asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum. Artinya tidak ada satupun balita/penduduk miskin yang asupan kalornya berada di atas tingkat minimum. Namun sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, kondisi ini mulai berubah.

Pada tahun 2014, sudah ada sebanyak 7-8 per 100 penduduk miskin yang asupan kalornya berada di atas tingkat konsumsi minimum. Hanya terdapat 92-93 balita per 100 penduduk miskin yang asupan kalornya berada dibawah tingkat minimum. Tahun 2018 kondisi ini lebih membaik dimana terdapat 9 balita yang asupan kalornya berada di atas tingkat konsumsi minimum. Hanya tersisa 88 balita/100 penduduk miskin yang asupan kalornya berada dibawah tingkat minimum.

Ini menunjukkan bahwa kondisi tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2014, sebab sepanjang tahun 2013-2018, jumlah balita per 100 penduduk miskin yang asupan kalornya sudah berada di atas tingkat konsumsi minimum, berhasil dinaikkan, sementara dan jumlah balita per 100 penduduk miskin, yang asupan kalornya berada di bawah tingkat minimum berhasil diturunkan.

2.1.3.1.2.16. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Tabel 2.76

Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah anak yang usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	2.843	2.936	3.020	3.081	3.166	3.361
2.	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	Orang	2.724	2.614	2.747	2.755	3.700	3.895
3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	104,37	112,32	109,94	111,8₃	85,57	86,29

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan terjadinya penurunan persentase bayi berumur dibawah satu tahun yang memperoleh imunisasi campak di Kota Palopo sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 dari 100 balita rata-rata hanya 85-86 orang yang mendapatkan imuniasi campak. Ini menunjukkan bahwa kinerja imunsasi perlu ditingkatkan. Misalnya melalui media sosialisasi yang menegaskan keamanan, kehalalan dan arti pentingnya imuniasi bagi para balita.

2.1.3.1.2.17. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

AFP (Acute Flaccid bahwa kasus AFP bukanlah kasus polio, melainkan Paralysis) merupakan gejala kelumpuhan pada anak yang berumur < 15 tahun yang bersifat layuh/flaccid dan terjadi secara mendadak (akut) bukan karena rudapaksa/trauma/kecelakaan. Untuk membuktikan bahwa virus polio liar sudah tidak ada lagi di Kota Palopo, maka harus ditemukan gejala gejala yang menyerupai penyakit polio.

Dalam penilaian kinerja surveilans AFP, terdapat indikator NonPolio AFP rate > 2 per 100.000 anak usia kurang dari 15tahun per tahun dan spesimen adekuat > 80 %. Non PolioAFP rate merupakan target penemuan kasus per tahun. Jadi apabila suatu wilayahmemiliki jumlahpenduduk <15 tahun sebanyak 500.000, maka wilayahtersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFPdalam satu tahun. Jika target penemuan belum dapatdipenuhi, dapat dikatakan bahwa kinerja surveilans AFP belum baik, karena masih dimungkinkan adanya kasusyang belum terjaring.

Tabel 2.77
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan	Kasus	1	0	1	1	0	0
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	Orang	52.015	49.032	49.748	48.835	48.835	48.199
3	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rasio	2	0	2	2	0	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100.000 penduduk Kota Palopo survey AFP hanya menemukan 2 kasus non polio AFP Rate, bahkan 2018 sama sekali tak ada. Ini menunjukkan kinerja surveilance Non Polio AFP Rate di Kota Palopo cukup baik.

Ini jika merujuk pada indikator keberhasilan suverilance AFP yang menyebutkan bahwa daerah dengan jumlah penduduk <15 tahun sebanyak 500.000 orang, maka wilayah tersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFP dalam satu tahun. Dengan kondisi Kota Palopo yang hanya memiliki jumlah penduduk dibawah 15 tahun berkisar 48 ribu orang pada tahun 2018, target penemuan AFP sebanyak 0 kasus dan itu tercapai. Kondisi ini juga memberikan gambaran, bahwa kemungkinan penyebaran polio atau gejala lainnya yang mirip polio di Kota Palopo sangat kecil.

2.1.3.1.2.18. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru, sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru meradang dan membengkak. Kondisi kesehatan ini sering kali disebut dengan paru-paru basah, sebab paru bisa saja dipenuhi dengan air atau cairan lendir. Kondisi paru-paru basah ini dapat dialami oleh siapa pun. Namun pneumonia pada anak bisa sangat berbahaya dan menyebabkan kematian. Bahkan, badan kesehatan dunia (WHO) menyebutkan jika penyakit pneumonia adalah penyebab 16% kematian balita di dunia pada tahun 2015. Sementara, di Indonesia sendiri, dilansir dari CNN, penyakit pneumonia pada anak menyebabkan 2-3 balita yang meninggal setiap jamnya.

Tabel 2.78
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun	Orang	24	101	132	51	105	167

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	1.385	1.577	1.528	1.618	1.697	1.759
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	1,73	6,40	8,64	3,15	6,19	8,19

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Meskipun persentasenya meningkat dari tahun ke tahun, tabel di atas menunjukkan cakupan penanganan balita yang diperkirakan menderita penyakit berbahaya seperti pneumonia di Kota Palopo masih sangat rendah. Pada tahun 2013, kinerjanya hanya berada pada angka 1,73% meskipun meningkat pada tahun 2018 yang mencapai 8,19%. Artinya pada tahun 2018, dari 100 kasus pneumonia, rata-rata hanya ditangani hanya 8 kasus. Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas terkait bersama stake holder terkait perlu meningkatkan kinerja untuk menangani kasus pneumonia ini.

2.1.3.1.2.19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang sangat mudah sekali dalam penularannya. Seperti halnya penyakit flu biasa, dalam penyebarannya TBC juga melalui udara. Penyakit tuberkulosis sangat mematikan apabila tidak segera dilakukan penanganan. Di Indonesia, penanganan sejak dini sudah dilakukan dengan memberikan paket imunisasi BCG pada balita. Namun demikian, belum sepenuhnya Indonesia 100% terbebas dari penyakit ini.

Tabel 2.79

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 bulan	Orang	130	206	202	241	243	250
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Orang	139	202	242	222	176	183
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	93,53	101,98	83,47	108,56	138,07	136,61

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa meskipun jumlah penderita TBC BTA naik hampir setiap tahunnya, cakupan pelayanan dan pengobatan terhadap para penderita juga terus meningkat. Ini menunjukkan kinerja pelayanan untuk menangani kasus

atau penderita TBC BTA sudah cukup baik. Angkanya melebihi 100% sebab juga terdapat pengidap TBC BTA dari luar Kota Palopo namun mendapat penanganan medis di Kota Palopo, sebagai salah satu daerah yang memiliki pusat layanan rujukan.

2.1.3.1.2.20. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang menggambarkan tingkat penyebaran penyakit atau pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Indikator ini untuk mengetahui perkembangan jumlah pengidap penyakit TBC di Kota Palopo.

Tabel 2.80
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Orang	348	299	374	354	433	450
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
3	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Orang	216	181	221	205	245	249

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100.000 penduduk Kota Palopo, terdapat 216 orang yang terjangkit atau menjadi pengidap penyakit TBC, jumlah ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 249 orang per 100.000 penduduk. Olehnya program program baik yang sifatnya pencegahan maupun pengobatan, mestinya menjadi fokus penanganan pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Terkait pada tahun tahun mendatang.

2.1.3.1.2.21. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang menggambarkan kasus kematian pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Semakin tinggi angka kasus ini semakin tinggi tingkat kematian karena penyakit TBC.

Tabel 2.81
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pasien TB yang meninggal	Orang	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
3	Presentase tingkat kematian	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)							

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Meski secara jumlah, pengidap TBC di Kota Palopo meningkat setiap tahunnya, namun kematian yang disebabkan oleh karena penyakit ini sepanjang 2013-2018 sama sekali tidak ada. Ini menunjukkan bahwa tindakan pengobatan yang dilaksanakan cukup efektif dalam mengobati para pasien. Kondisi ini juga menunjukkan pengobatan bagi para pasiennya dilakukan dengan standar operasional yang baik, sehingga kematian yang disebabkan oleh penyakit ini di Kota Palopo nihil.

2.1.3.1.2.22. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberkulosis di Rumah Sakit melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTS adalah tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan Tuberkulosis merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh Unit Pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Sakit. Khusus bagi pelayanan pasien tuberkulosis di Rumah Sakit dilakukan dengan strategi DOTS.

Hal ini memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik, karena dibutuhkan kedisiplinan dalam penerapan semua standar prosedur operasional yang ditetapkan, disamping itu perlu adanya koordinasi antar unit pelayanan dalam bentuk jejaring serta penerapan standar diagnosa dan terapi yang benar, dan dukungan yang kuat dari jajaran direksi rumah sakit berupa komitmen dalam pengelolaan penanggulangan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2.82

Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	130	94	91	354	430	490
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diperkirakan ada dalam wilayah tertentu	Orang	139	202	242	338	538	618
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	93,53	46,53	37,60	104,73	79,93	79,29

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menggambarkan bahwa kinerja penanganan pasien TB dalam program DOTS sejak 2013 sampai dengan 2015 terus menurun. Tahun 2013, 93,53 % pasien TB BTA dalam program DOTS mendapatkan pengobatan dan berhasil sembuh. Tetapi di 2018 hanya

79,29% pasien TB BTA yang memperoleh pengobatan dan sembuh melalui program DOTS. Ini menandakan bahwa kinerja program dan kegiatan pelaksanaan DOTS di sejumlah Rumah Sakit Pemerintah Kota Palopo harus diperbaiki dan ditingkatkan.

2.1.3.1.2.23. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian menurunkan insiden TB di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2.83
Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	110	96	121	159	154	177
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	Orang	130	206	202	241	243	266
3	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	84,62	46,60	59,90	65,98	63,37	66,54

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menggambarkan bahwa kinerja program DOTS di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 mengalami fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan cukup banyaknya pasien TB yang tidak menjalankan prosedur pengobatan TB dalam program DOTS secara baik. Ini bisa dipengaruhi banyak faktor, terutama faktor internal pasien atau pengidap TB. Olehnya diperlukan advokasi dan sosialisasi serta edukasi yang lebih intensi dalam meningkatkan motivasi untuk sembuh serta mengikuti program pengobatan secara teratur bagi pasien atau pengidap TB.

2.1.3.1.2.24. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2013 yaitu 233 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 233 kasus. Pada tahun 2015, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP sebanyak 280 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2013 sampai tahun 2018 mencapai 100 persen.

Tabel 2.84
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang	233	159	280	366	74	42
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wikayah dalam kurun waktu yang sama	Orang	233	159	280	366	74	42
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.1.2.25 Penderita Diare yang Ditangani

Tabel 2.85
Penderita Diare Yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun *							
	Orang		5.750	5.764	4.069	3.684	3.287	2.794
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) (**)							
	Orang		92,470,925	95,050,089	68,722,969	63,702,254	58,149,331	51.285.012
3	Jumlah Penduduk (***)							
	Jiwa		160,819	164,903	168,894	172,916	176,907	180.678
4	Penderita diare yang ditangani							
	%		0.0062	0.0061	0.0059	0.0058	0.0057	0.0056
	Per 100.000		6	6	6	6	6	6

Sumber Data : (*)Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018, (**) Rumus Permendagri 86 Tahun 2017, (***) BPS Kota Palopo tahun 2019

Tabel diatas menggambarkan tingkat penanganan diare di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 cenderung stagnan. Jika pada tahun 2013, dari 100.000 penduduk Kota Palopo ditangani sebanyak 6 kasus diare, pada 2018, diare yang tertangani 6 kasus diare. Ke depan angka yang menjadi target persentase indikator ini harus ditekan.

2.1.3.1.2.26. Angka Kejadian Malaria

Tabel 2.86
Angka Kejadian Malaria
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penduduk yang menderita malaria pada	Orang	167	163	191	287	34	21

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	tahun tertentu							
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
3	Penderita malaria yang ditangani per 100.000	%	104	99	113	166	19	12

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2013, dari 100.000 penduduk Kota Palopo terdapat sebanyak 104 kejadian malaria, jumlah menurun sampai di tahun 2014 jumlahnya meningkat cukup besar menjadi 166 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2016. Namun ditahun 2018 jumlahnya hanya menjadi 12 kasus per 100.000 penduduk. Ini menunjukkan kinerja penanggulangan angka malaria di Kota Palopo mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik.

2.1.3.1.2.27. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tabel 2.87
Tingkat Kematian Akibat Malaria
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kematian tersangka malaria	Orang	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun	Orang	167	163	191	287	34	21
3	Tingkat kematian akibat malaria (1.000)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel menunjukkan bahwa angka kematian akibat kasus malaria di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 per 1000 penduduk nihil. Ini menggambarkan bahwa penanganan pasien kasus malaria di Kota Palopo berhasil.

2.1.3.1.2.28. Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida

Tabel 2.88
Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida	Orang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Jumlah balita	Orang	13.851	15.774	15.275	16.178	16.963	17.585

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.1.2.29. Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Tabel 2.89

Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun	Orang	167	14	5	24	19	9
2.	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	Orang	167	14	5	24	19	9
3	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.1.2.30. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

Prevalensi adalah seberapa sering suatu penyakit atau kondisi terjadi pada sekelompok orang, dalam hal ini adalah HIV AIDS. Atau dengan kata lain merupakan gambaran tentang frekwensi penderita lama dan baru yang ditemukan selama jangka waktu tertentu terhadap sekelompok populasi dalam waktu tertentu.

Tabel 2.90

Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	14	16	19	53	72	84
2.	Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04
4	Rasio per 100.000	per 100.000	9	10	12	32	42	41

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa periode 2013-2018 jumlah pengidap HIV AIDS di Kota Palopo meningkat. Jika 2013 hanya sebanyak 14 orang tahun 2018 jumlahnya mencapai 84 orang. Dalam rasio per 100.000 penduduk, pada tahun 2013 terdapat rata-rata 9 kasus HIV AIDS, dan meningkat menjadi rata-rata 41 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah sehingga jumlahnya setiap tahun seharusnya bisa ditekan.

2.1.3.1.2.31. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Indikator ini menggambarkan cakupan edukasi, sosialisasi tentang bahaya HIV/ AIDS di kalangan 15-24 tahun.

Tabel 2.91

Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu	Orang	0	0	0	548	0	0
2.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama (*)	Orang	31.960	38.433	39.414	40.279	40.279	41.943
3	Proporsi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019, (*) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Ini juga menunjukkan pelaksanaan program kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan edukasi publik terutama bagi usia 15-24 tahun oleh Pemerintah Kota Palopo belum secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini kadang dilaksanakan dan kadang pula tidak dilaksanakan. Pada tahun 2016, dari 10.000 penduduk usia 15-24 tahun hanya 136 orang yang mendapatkan sosialisasi HIV AIDS. Sementara disisi lain jumlah usia 15-24 tahun yang menjadi fokus sasaran edukasi, jumlahnya terus meningkat. Ini menjadi potensi meningkatnya ancaman bagi prevalensi HIV AIDS di Kota Palopo.

2.1.3.1.2.32. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palopo, menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari 100 persen pada tahun 2013 tetap menjadi 100 persen di tahun 2018. Hal ini diakibatkan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata I meningkat dari 51.080 pada tahun 2013 menjadi 130.531 pada tahun 2018.

Informasi dari Dinas Kesehatan Kota Palopo menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018, tidak ada pasien miskin yang ditolak oleh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palopo. Pasien miskin yang berobat di fasilitas kesehatan di Kota Palopo telah ditanggung oleh Pemerintah Kota Palopo. Sebab sejak tahun tersebut Pemerintah Kota Palopo membayar premi asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin Kota Palopo.

2.1.3.1.2.33. Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada terutama bagi bayi yang baru lahir. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan bayi yang ada.

Tabel 2.92
Cakupan Kunjungan Bayi
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah kunjungan	2.594	2.533	2.596	2.638	2.982	3.060
2.	Seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959	3.037
3	Cakupan kunjungan bayi	%	95,23	96,90	94,50	95,75	100,78	100,76

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menggambarkan rentang waktu 2013-2018, tingkat kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan standar kesehatan, semakin membaik. Ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memantau perkembangan kesehatan bayinya di sejumlah pusat kesehatan yang ada. Jumlah kunjungan bayi setiap tahunnya terus meningkat jika 2013 hanya sebanyak 2.594 tahun 2018 mencapai 3.060 kunjungan atau 100,76% dari jumlah bayi yang lahir.

2.1.3.1.2.34. Cakupan Puskesmas

Tabel 2.93
Cakupan Puskesmas
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah puskesmas	11	11	12	12	12	12
2.	Jumlah seluruh kecamatan	9	9	9	9	9	9
3	Cakupan puskesmas (%)	122,22	122,22	133,33	133,33	133,33	133,33

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kota Palopo memiliki minimal satu pusat kesehatan masyarakat. Bahkan sejak 2013-2018 ada kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Kondisi ini tentu diharapkan bisa meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Palopo.

2.1.3.1.2.35. Cakupan Pembantu Puskesmas

Tabel 2.94
Cakupan Pembantu Puskesmas
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pembantu puskesmas	22	22	22	36	36	36
2.	Jumlah seluruh kelurahan	48	48	48	48	48	48
3	Cakupan pembantu puskesmas (%)	46	46	46	75	75	75

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2013 hanya 46% di Kota Palopo yang memiliki puskesmas pembantu. kondisi ini berlangsung sampai pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016-2018, 75% kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memiliki puskesmas pembantu. Ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah puskesmas pembantu yang diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap sarana kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

2.1.3.1.2.36. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan dirinya dan calon bayinya pada sarana kesehatan yang ada.

Tabel 2.95
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan ante-natal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.852	2.804	2.774	2.796	3.001	3.031
2.	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	3.076	3.006	3.007	3.083	3.234	3.264
3	Cakupan kunjungan ibunhamil K4	%	92,72	93,28	92,25	90,69	92,80	93,56

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan kesadaran ibu hamil untuk memeriksa dirinya dan kesehatan bayinya semakin baik dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2013 sebesar 92,72% pada tahun 2018 meningkat menjadi 93,56%. Meski demikian dari data tersebut juga mengungkapkan bahwa masih ada sebagian ibu hamil yang belum memanfaatkan layanan kesehatan yang bisa diaksesnya. Ini tentu membutuhkan edukasi dan sosialisasi yang intensi agar seluruh ibu hamil rutin memeriksakan kesehatan dirinya dan bayinya di pusat kesehatan yang ada.

2.1.3.1.2.37. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh

tenaga kesehatan. Masa nifas merupakan masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandung kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 – 8 minggu atau dalam agama islam disebut 40 hari. Tujuan dari masa nifas yaitu untuk mengetahui kesejahteraan ibu dan bayi, baik dari kesehatan, kebersihan, nutrisi, pemberian ASI, tanda bahaya masa nifas, perdarahan, cara mencegah hipotermi pada bayi. Semakin tinggi nilai indikatornya semakin baik kesadaran ibu yang sudah melahirkan terhadap status kesehatan dirinya dan bayinya usai melahirkan.

Tabel 2.96
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.607	2.596	2.635	2.743	2.816	2.858
2.	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	2.607	2.871	2.870	2.944	3.087	3.129
3	Cakupan pelayanan nifas	%	100	90,42	91,81	93,17	91,22	91,34

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menggambarkan tingkat kesadaran ibu usai melahirkan sepanjang 2013-2018 sudah cukup baik. Meski demikian data ini juga mengungkapkan masih adanya ibu yang usai melahirkan namun tidak lagi memanfaatkan pelayanan kesehatan nifas. Olehnya masih dibutuhkan sosialisasi dan edukasi sehingga kesadaran ibu yang telah melahirkan untuk memantau perkembangan kesehatannya semakin baik di tahun mendatang

2.1.3.1.2.38. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Menurut World health Organization (WHO) Neonatus adalah bayi baru lahir hingga berumur 28 hari. Sementara menurut kemenkes 2015, adalah bayi yang baru lahir berusia 0-28 hari sejak dilahirkan. Umur ini sangat rentan terhadap berbagai macam gangguan kesehatan. Olehnya penanganan untuk mengatasi atau mencegah munculnya berbagai macam ancaman gangguan kesehatan sangat penting dilaksanakan.

Tabel 2.97
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	222	142	319	310	303	319
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	409	410	412	413	444	460
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	54,28	34,63	77,43	75,06	67,79	69,35

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa 2013-2018 jumlah bayi yang lahir di Kota Palopo dengan kondisi neonatus beragam semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2013 hanya 409, tahun 2018 sebanyak 460. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan yang serius terutama pada aspek pencegahan, dimana mengedukasi ibu hamil menjadi point penting dalam upaya tersebut. Melihat persentase penanganan, kinerja indikator ini cukup baik ditandai dengan meningkatnya angka kinerja penanganan bayi dengan komplikasi neonatus.

2.1.3.1.2.39. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2.98
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Orang	6.756	6.516	5.390	7.248	8.431	8.766
2.	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	13.851	15.774	12.543	12.861	13.487	13.822
3	Cakupan pelayanan anak balita	%	48,78	41,31	42,97	56,36	62,51	63,42

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa 2013-2018 cakupan pelayanan anak balita menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Per tahun terjadi peningkatan pelayanan terhadap anak balita. Ini menggambarkan semakin baiknya kesadaran para orang tua dalam memeriksakan kesehatan anak balitanya.

2.1.3.1.2.40. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin

Indikator ini hanya mengukur pada rumah tangga miskin. Kemiskinan umumnya menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab anak usia 6-12 tahun di keluarga miskin tidak pernah mendapatkan makanan pendamping ASI, sehingga terjadi kerawanan gizi. Olehnya pemerintah melaksanakan program pemberian makanan pendamping ASI bagi rumah tangga miskin.

Tabel 2.99
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan
Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP ASI	Orang	930	86	72	533	249	113

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.	Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	Orang	930	86	72	533	249	113
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa 2013-2018, semua anak berumur 6-12 tahun yang lahir dari keluarga miskin di Kota Palopo menerima makanan pendamping ASI. Ini membuktikan bahwa komitmen Pemkot Palopo untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat miskin cukup baik.

2.1.3.1.2.41. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Indikator ini menunjukkan langkah dan cakupan kemampuan pemerintah daerah dalam memeriksa status kesehatan seluruh siswa sekolah dasar pada tahun tertentu. Semakin tinggi angka indikator ini semakin baik cakupan pemeriksaan siswa sekolah yang ada setingkat sekolah dasar.

Tabel 2.100
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.646	3.646	3.188	2.660	2.790	2.619
2.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.691	3.691	3.368	2.692	2.861	2.690
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	98,78	98,78	94,66	98,81	97,52	97,36

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa 2013-2018, sebagian besar siswa sekolah dasar di Kota Palopo setiap tahunnya diperiksa status kesehatannya. Cakupan pemeriksaan mencakup 94-99% siswa sekolah dasar yang ada. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Palopo menciptakan generasi yang sehat sejak pendidikan dasar.

2.1.3.1.2.42. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pelayanan bagi masyarakat miskin di Kota Palopo 2013-2018 telah mencakup semua pasien dari golongan tidak mampu. Besarnya persentase yang melebihi angka 100% disebabkan sangat banyaknya pasien masyarakat miskin dari kabupaten di sekitar Kota Palopo yang memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang ada di Kota Palopo yakni RSUD Sawerigading Rampoang.

Jumlah masyarakat miskin ini merupakan 40% masyarakat miskin yang berada pada desil paling bawah. Sejak BPJS berlaku, Dinas

kesehatan tak bisa memisahkan data pasien miskin yang mengakses sarkes strata 1

2.1.3.1.2.43. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Tabel 2.101

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pelayanan gawat darurat level 1	5	5	6	6	7	8
2.	Jumlah RS	5	5	6	6	7	8
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.1.2.44. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Indikator ini menggambarkan kecepatan pemerintah kota palopo merespon terjadinya sebuah Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Kota Palopo. Kecepatan merespon sebuah KLB adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatasi KLB di sebuah daerah.

Kejadian Luar Biasa atau KLB merupakan suatu status yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan suatu peristiwa atau penyakit tertentu. Biasanya penyakit tersebut lebih berpengaruh pada penyakit yang biasanya terjadi. Sehingga KLB dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan kasus yang berhubungan dengan penyakit, yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi.

Tabel 2.102

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah KLB di desa/kelurahan ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	Kasus	1	2	2	4	0	0
2.	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Kasus	1	2	3	4	0	0
3	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo memberikan respon yang sangat baik terhadap adanya KLB di wilayah administrasi Kota Palopo. Namun yang mesti diwaspadai adalah terjadinya KLB hampir setiap tahun di Kota Palopo. Hanya pada tahun 2018, tidak terjadi KLB.

2.1.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

2.1.3.1.3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indicator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada

Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. Salah satunya adalah Jalan Kondisi Baik (B) yang didefinisikan sebagai semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

Tabel 2.103
Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Berkondisi Baik 2016-2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik (Km)	279.1	296.68	342.09
b.	Panjang Jalan Keseluruhan (Km)	502	503.16	503.16
c	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	55.60	58.96	67.99

Sumber data : Palopo Dalam Angka, 2019

2.1.3.1.3.1.2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indicator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada.

Jaringan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas pergerakan di dalam jaringan tersebut. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk perencanaan jaringan adalah pendekatan ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan nasional dan tidak boleh melupakan hambatan fisik yang mungkin ditemui.

Di dalam sektor transportasi aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dikatakan kalau aksesibilitas tinggi adalah bila alternatif rute menuju suatu tempat banyak sehingga dapat dicapai dengan gampang dari beberapa tujuan.

Tabel 2.104
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kota Palopo Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
a.	Jumlah panjang jalan (Jalan Negara + Jalan Propinsi + Jalan Kewenangan Pemkot)	502	503.16	503.16
b.	Jumlah penduduk	172.916	176.907	180,678

c	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (per 10.000)	29	28	28

Sumber Data : BPS Palopo Dalam Angka 2019

2.1.3.1.3.1.3. Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sementara pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU No 1 Tahun 2011).

Indikator ini menggambarkan kondisi jalan untuk mengakses pemukiman masyarakat yang memperlihatkan konektivitas dan aksesibilitas sebuah kawasan pemukiman penduduk. Semakin besar nilai indikator ini semakin sulit pula aksesibilitas wilayah maupun transportasi penduduk yang bermukim di daerah tersebut.

2.1.3.1.3.1.4. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Data panjang jalan dalam indikator ini dibatasi pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo, tidak termasuk jalan kewenangan Propinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara. Jalan berkondisi baik dikategorikan jika mampu dilewati kendaraan roda empat dengan kecepatan di atas 40 Km/Jam. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.105
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)
Kota Palopo Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	220.49	264.14	309.54
b.	Panjang Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	443.39	443.39	443.39
c	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan Pemerintah Kota Palopo yang dalam kondisi baik (%)	49.73	59.57	69.81

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2019

2.1.3.1.3.1.5. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Tabel 2.106

Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	0	0	0	0,875	5,663	8,06
b.	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	305,42	341,86	443,39	443,39	443,39	443,39
c	Persentase	0	0	0	0,20	1,28	1,82

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019

Data yang ditampilkan pada tabel diatas hanya data panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang lebarnya lebih dari 1,5 meter, sesuai indikator yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebab masih terdapat ruas jalan lain di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase namun ukurannya lebih kecil daripada 1,5 meter.

Data pada tabel menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2018, hanya 1,82% jalan di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase selebar minimal 1,5 meter. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada angka 0,20%. Ini juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil ruas jalan di Kota Palopo yang memiliki saluran pembuangan air/drainase yang memadai yang memiliki lebar minimal 1,5 meter.

2.1.3.1.3.1.6. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Tabel 2.107

Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	-	-	-	-	-	-
b.	Panjang seluruh sempadan jalan kabupaten (km)	610.84	683.72	835.18	886.78	886.78	886.78
c	Persentase	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.1.3.1.7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Sementara menurut UU No 1 Tahun 2011, rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya

Tabel 2.108

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Rumah Tinggal berakses sanitasi	21.987	23.840	26.651	37,457	39.183	42.622
2	Jumlah Rumah Tinggal	37.956	39.851	40.716	42.262	43.167	44.209
3	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	57,90	59,96	65,46	88.63	90.77	96,41

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2019.

Data diatas menunjukkan terdapat sebanyak 96.41% rumah tinggal di Kota Palopo telah bersanitasi pada tahun 2018. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013 yang berada pada angka 57,90%. Ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hunian masyarakat Kota Palopo sejak 2013-2018.

2.1.3.1.3.1.8. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Tabel 2.109

Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	7.200,23	7.389,71	7.673,93	8.090,78	8.735,01	9.041,97
b.	Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97
c.	Persentase (%)	38,00	39,00	40,50	42,70	46,10	47,72

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa sempadan sungai di Kota Palopo dari tahun ke tahun semakin banyak yang diakses oleh bangunan liar/tak berijin. Jika tahun 2013 hanya 38% sempadan sungai yang diakses bangunan liar atau sepanjang 7.200 Km, tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 47,72% atau 8.735 Km. Kondisi ini menunjukkan perlunya meningkatkan kinerja penataan ruang agar sempadan sungai yang dipakai oleh bangunan liar semakin menurun.

2.1.3.1.3.1.9. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Tabel 2.110

Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	96,6	84,65	73,39	64,23	55,47	47,24
b.	Panjang seluruh drainase di Kota Palopo (km)	475,47	487,7	498,73	507,90	516,65	524,89
	Persentase	20,32	17,36	14,71	12,64	10,73	8,99

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan kualitas dan fungsi drainase di Kota Palopo semakin menurun. Jika pada tahun 2013 terdapat 20,32% drainase Kota Palopo yang kondisinya baik dalam artian tidak tersumbat, pada tahun 2018 hanya ada 10,73% drainase Kota Palopo yang kondisinya baik atau tidak tersumbat. Ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan atau mengakselerasi program dan kegiatan penanganan drainase pada tahun mendatang.

2.1.3.1.3.1.10. Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Tabel 2.111
Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luasan daerah yang tergenang (Ha)	0,892	0,624	0,437	0,306	0,214	0,078
b.	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (Ha)	6,180	4,326	3,028	2,120	1,484	0,545
c	Persentase (a/b x 100%)	14,43	14,42	14,43	14,43	14,42	14,31

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa perkembangan luas daerah yang tidak terjadi genangan di Kota Palopo stagnan atau berjalan di tempat. Sampai tahun 2018, hanya 14,31% daerah di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali dalam setahun. Ini menunjukkan hanya sebagian kecil daerah rawan genangan di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan 2 kali dalam setahun.

Kemudian luas daerah yang tergenang lebih dari dua kali dalam setahun di Kota Palopo jauh berkurang pada tahun 2018 yang berada pada angka 0,078 Ha. Meski pada tahun 2013, luas daerah yang tergenang mencapai 0,892 Ha. Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota Palopo juga berkurang dari 6,18 Ha pada tahun 2013 menurun menjadi 0,47 Ha pada tahun 2018. Pemerintah Kota Palopo menginginkan tidak ada lagi daerah yang tergenang di Kota Palopo pada tahun-tahun mendatang.

2.1.3.1.3.1.11. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor.

Tabel 2.112
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan
Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (Km)	629,25	833,66	927,47	1.071,94	1.074,93	1.164,07
b.	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (Km)	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94
	Persentase (a/b x 100%)	1,99	2,64	2,94	3,39	3,40	3,69

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan pada tahun 2013 Pemerintah Kota Palopo baru mampu menangani 1,99% wilayah aliran sungai rawan longsor/jalan penghubung rawan longsor, dengan membangun turap. Namun pada tahun 2018, persentase luas wilayah yang mampu

ditangani meningkat menjadi 3,69%, namun masih menyisakan 96,31% wilayah rawan longsor baik aliran sungai maupun jalan penghubung yang belum tertangani atau memiliki turap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terjadinya musibah longsor pada daerah rawan termasuk pada lokasi jalan penghubung dan daerah aliran sungai di Kota Palopo potensinya masih sangat besar.

2.1.3.1.3.1.12. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Tabel 2.113
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	351,82	356,71	383,09	522,39	678,05	743,29
b.	Luas irigasi kabupaten (Ha)	800	800	800	800	950,45	980,54
	Persentase (a/b x 100%)	43,98	44,59	47,89	65,30	71,34	75,80

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa luas irigasi di Kota Palopo yang berkondisi baik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika pada tahun 2013 pada angka 43,98% pada tahun 2018 pada angka 75,80%. Meski demikian data ini juga menunjukkan bahwa masih ada irigasi Kota Palopo yang kondisinya tidak baik dimana pada tahun 2018, luasnya masih mencapai 256,71 Ha. Angka inilah yang mestinya menjadi target kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang ke depannya dalam melaksanakan program dan kegiatan keririgasan.

2.1.3.1.3.1.13. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2.114
Persentase Rasio Jaringan Irigasi
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Panjang Saluran Irigasi (Km)	25,191	25,820	27,473	41,760	50,627	55,714
b.	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Sawah) (Ha)	2678	2678	2687	2689	2685	2.686
c	Rasio Jaringan Irigasi (Per 1000 Ha)	9,41	9,64	10,22	15,53	18,86	20,74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2018, Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018, panjang irigasi untuk mengairi sawah seluas 1000 Ha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2013 untuk 1000 Ha sawah hanya dilayani irigasi sepanjang 9,41 Km, pada tahun 2018 untuk luasan yang sama telah mampu dilayani jaringan irigasi sepanjang 20,74 Km. Meningkatnya cakupan irigasi terhadap lahan persawahan ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas lahan pertanian dan pada akhirnya menjadi

salah satu faktor penghambat alih fungsi lahan pertanian terutama persawahan di Kota Palopo.

2.1.3.1.3.1.14. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Tabel 2.115
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa)	134,911	138,700	144,100	148,725	165,284	171.359
b.	Jumlah Penduduk (jiwa)	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
	Persentase (a/b x 100%)	83.89	84.11	85.32	86.01	93,00	94,84

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, besaran penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap air minum sebanyak 94,84%. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2013 yang hanya berada pada angka 83.89%. Meski demikian ini menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 7% penduduk Kota Palopo yang belum memiliki akses air minum.

2.1.3.1.3.1.15. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air yang tidak terlindung.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Palopo yang memiliki Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak sebanyak 134.911 jiwa atau sebesar 83,89% dari jumlah penduduk atau dalam satuan rumah tangga sebanyak 19.141 Rumah Tangga atau 54,65% dari total jumlah rumah tangga yang ada.

Kondisi ini kemudian jauh lebih membaik pada tahun 2018, dimana jumlah penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak 171.359 jiwa atau 94,84% dari jumlah penduduk yang ada atau dalam satuan rumah tangga sebanyak 39.444 Rumah Tangga atau 94,49% dari total jumlah rumah tangga yang ada.

Tabel 2.116

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Sumber Air Bersih	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan							
1	Leding (Perpipaan)	RT	14,958	17,958	21,958	30,929	32680	36.224
2	Keran Umum	RT	0	0	0	0	-	0
3	Hydrant Umum	RT	0	0	0	0	-	0
4	Terminal Air	RT	0	0	0	0	-	0
5	Air Hujan	RT	0	0	0	0	-	0
6	Mata air terlindungi	RT	3,327	3,377	3,427	1,080	1,158	744
7	Sumur Terlindungi	RT	856	906	956	455	410	321
8	Sumur (Bor/Pompa)	RT	0	0	0	0	-	0
B	Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan							
		RT	19,141	22,241	26,341	32,464	34,248	37.269
C	Jumlah Rumah Tangga							
		RT	35,025	35,914	36,871	37,749	38,641	39.444
D	Persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan							
		RT	54.65	61.93	71.44	86.00	88.63	94.49
E	Jumlah Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan							
		Jiwa	134,911	138,700	144,100	148,725	165,284	171.359
F	Jumlah Penduduk Kota Palopo							
		Jiwa	160,819	164,903	168,894	172,916	176,907	180.678
G	Persentase Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan							
		Persen	83.89	84.11	85.32	86.01	93.43	94.84

Sumber Data : Olahan dari Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, BPS 2019

2.1.3.1.3.1.16.Persentase Areal Kawasan Kumuh

Menurut UU No 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan,

tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Tabel 2.117
Persentase Areal Kawasan Kumuh
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a	Luas kawasan Kumuh (Ha)	0	89.33	85.23	42.58	32.08	20.85
b	Luas wilayah Kota Palopo (Ha)	2.529.90	2.529.90	2.529.90	2.529.90	2.529.90	2.529.90
c	Persentase luas areal kawasan kumuh	0,00	3.50	3.30	1.60	1.20	0.82

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018, total luas kawasan kumuh yangtelah ditangani sebanyak 57.25 Ha. Dari luas awal kawasan kumuh sebanyak 89.33 Ha pada tahun 2013, menjadi 38.00 Ha pada tahun 2018. Sehingga sampai pada tahun 2018 persentase luas areal kawasan kumuh Kota Palopo terhadap luas wilayah Kota Palopo, hanya tersisa 1.24%.

2.1.3.1.3.1.17.Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Tabel 2.118
Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (ton)	524	610	981	1.189	1.334	1.496
b	Total volume sampah (Ton)	22.291	23.962	26.928	26.381	29.405	30.828
c	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	2,30	2,50	3,64	4,50	4,53	4,85

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2019

Data diatas menunjukkan pada tahun 2013, volume sampah yang berhasil dikurangi sebelum sampai ke tempat Pembuangan Akhir Sampah hanya sebanyak 524 ton atau sekitar 2,30% dari produksi sampah yang ada. Tahun 2018, volume sampah yang berhasil dikurangi meningkat menjadi 1.496 Ton atau sebanyak 4,85%.

Ini menunjukkan adanya progress pengurangan sampah di Kota Palopo yang semakin tahun semakin membaik. Artinya proses reduce, recycle dan reuse sampah di Kota Palopo berjalan sesuai yang diharapkan. Dampaknya sampah yang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah bisa dikurangi sehingga masa pakai/oeprasinya juga diharapkan semakin bertambah.

2.1.3.1.3.1.18. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung tempat pemakaman umum yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2.119

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
a.	Total Luas Tempat Pemakaman Umum (ha)	27	30	28	28	28
b	Jumlah Lokasi Tempat Pemakaman Umum	14	17	15	15	15
c	Jumlah Penduduk	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
c	Rasio per 10.000 penduduk	1.64	1.78	1.62	1.58	1,55

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 untuk 10.000 penduduk Kota Palopo rata-rata hanya tersedia 1.55 Ha lahan pemakaman. Rasio ini menurun jika dibandingkan tahun 2014 dimana untuk 10.000 penduduk terdapat 1.64 Ha lahan pemakaman.

Pada tahun 2013 dan 2014, terdapat 14 titik lokasi pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palopo. Tahun 2015 terdapat 17 makam, namun tahun 2016, dua lokasi pemakaman ditutup karena dinyatakan sudah penuh. Sehingga sejak tahun 2016-2018 hanya terdapat 15 lokasi pemakaman umum di Kota Palopo yang bisa diakses masyarakat umum. Kapasitas makan per Ha, diperkirakan mampu menyediakan sebanyak 4000-5000 kuburan.

2.1.3.1.3.1.19. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung rumah ibadah yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo.

Tabel 2.120

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah Tempat Ibadah	286	295	312	312	316	322
	Mesjid	172	174	187	187	191	193
	Mushola	38	45	47	47	47	52
	Gereja Protestan	68	68	70	70	70	69
	Gereja Katolik	5	5	5	5	5	5
	Vihara	2	2	2	2	2	2
	Kuil	1	1	1	1	1	1
b.	Jumlah Penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
c	Rasio per 1000 penduduk	1,77	1,78	1,84	1,79	1,78	1,78

Sumber Data : SIPD Kota Palopo 2013-2018

Sesuai angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk 1000 penduduk Kota Palopo tersedia sebanyak 2 (pembulatan 1,77) tempat ibadah di Kota Palopo. Kondisi yang serupa

juga terjadi pada tahun 2018, dimana hanya terdapat 2 tempat ibadah per 1000 penduduk Kota Palopo.

2.1.3.1.3.2. Penataan Ruang

2.1.3.1.3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Hak Guna Bangunan atau HGB adalah hak untuk mengusahakan (mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah) tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu tertentu. Sementara Hak Pengelolaan atau HPL menurut Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Indikator ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam memanfaatkan tanah yang berada dalam penguasaannya menjadi ruang terbuka hijau. Nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan bahwa intensitas pemanfaatan tanah oleh pemerintah daerah untuk ruang terbuka hijau semakin baik.

Tabel 2.121

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luas ruang terbuka hijau (Ha)	1.165.29	1.167.36	1.168.21	1.169.23	1.170,72	1.171,81
b.	Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)						
c	Rasio Ruang Terbuka Hijau						

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Palopo meningkat tajam sejak tahun 2013. Jika pada tahun 2013 tersedianya ruang terbuka hijau sebanyak 2,759 Ha, pada tahun 2017 menjadi 3,978 Ha, atau bertambah sebanyak 1,219 Ha dalam lima tahun terakhir.

2.1.3.1.3.2.2. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan terdiri dari : Taman kota, Taman wisata alam, Taman rekreasi, Taman lingkungan perumahan dan permukiman, Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, Taman hutan raya, Hutan kota, dan hutan lindung.

Sesuai Revisi Rencana Tata Ruang Kota Palopo, Ruang Terbuka Hijau Kota Palopo akan dilaksanakan sebagai berikut :

- RTH Publik tersebar di wilayah Kota Palopo direncanakan seluas 5.269,55 hektar atau sebesar 20,41%.
- RTH Private seluas 2.601,7 hektar atau sebesar 10,08%.

Tabel 2.122

**Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luasan RTH publik yang tersedia (ha)	1.165.29	1.167.36	1.168.21	1.169.23	1.170.72	1.171,81
b.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan (Ha)	1.525.89	1.525.89	1.525.89	1.525.89	1.525.89	1.525,89
c	Persentase Luasan RTH dari Luas Wilayah Kota (%)	76.37	76.50	76.56	76.63	76.72	76,79

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019, Dok Rencana Tata Ruang Kota Palopo

Angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 76,79% target luasan RTH di Kota Palopo telah dicapai sampai dengan tahun 2018. Sisanya sebanyak 23,21% belum tercapai. Artinya pemerintah Kota Palopo masih harus membangun 355.17 Ha ruang terbuka hijau bagi publik untuk memenuhi target luasan RTH yang ada di dalam dokumen RT RW Kota Palopo.

2.1.3.1.3.2.3. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Tabel 2.123

**Rasio Bangunan Ber – IMB Per satuan Bangunan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah bangunan ber IMB (Buah)	-	621	-	-	-	
b.	Jumlah bangunan (Buah)	-	1.805	-	-	-	
c	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	-	0,34	-	-	-	
d	Per 100 (%)	-	34,40	-	-	-	

Sumber Data : SIPD Kota Palopo, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.1.3.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.124
Rasio Rumah Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah rumah layak huni	18.178	19.314	25.277	28.258	29.777	32.097
b	Jumlah penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
c	Rasio Rumah Layak Huni	0,113	0,117	0,149	0,163	0,168	0,178
d	Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulsel (*)	-	0,20	0,21	0,22	0,19	0,19

Sumber Data : Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2018, (*) RKPD Sulsel 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 meningkat. Jika pada tahun 2013 hanya terdapat sebanyak 18.178 unit rumah layak huni, pada tahun 2018 jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 32.097 unit.

Rasio rumah layak huni pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, per 1000 penduduk Kota Palopo hanya terdapat 113 unit rumah layak huni, kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2018 terdapat 178 unit rumah layak huni per 1000 penduduk Kota Palopo.

Jika satu rumah layak huni diasumsikan dihuni oleh lima orang penduduk, artinya pada tahun 2013 dari 1000 penduduk, hanya terdapat 565 orang penduduk yang tinggal di rumah layak huni, sisanya sebanyak 435 orang tinggal di rumah belum layak huni. Sementara di tahun 2018, untuk rasio 1000 penduduk, sebanyak 890 penduduk sudah tinggal di rumah layak huni, sisanya sebanyak 110 orang masih tinggal di rumah belum layak huni.

Meski demikian capaian rasio rumah layak huni ini masih berada dibawah angka rasio rumah layak huni Provinsi Sulawesi Selatan. Rasio rumah layak huni Sulsel yang pada tahun 2018 berada pada angka 0,19, tahun 2016 pada angka 0,22, tahun 2015 pada angka 0,21 dan 2014 sebesar 0,20. (Dok. RKPD Sulsel 2019). Salah satu upaya pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan indikator kinerja ini adalah melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2.1.3.1.4.2. Rasio Pemukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas permukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik.

Tabel 2.125
Rasio Permukiman Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2013 –2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a	Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	3.807	3.966	4.219	4.356	4.414	4.492
b	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	4.407	4.452	4.590	4.622	4.682	4.760
c	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	86,38	89,08	91,93	94,24	94,28	94,37
d	Rasio Pemukiman Layak Huni Sulsel (%)	86	87	89	89	97	97

Sumber Data : Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2018 dan Dok. RKPD Sulsel 2019

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2018 sebesar 94,37% hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas area permukiman dibarengi juga dengan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Angka pada tabel di atas juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 Ha areal pemukiman, terdapat 86,38 Ha areal pemukiman layak huni. Jumlah ini meningkat menjadi 94,37 Ha per 100 Ha areal pemukiman pada tahun 2018. Beberapa program yang dilaksanakan untuk meningkatkan angka indikator ini di Kota Palopo adalah program NUSP, dan Kotaku. Angka rasio pemukiman layak huni Kota Palopo pada tahun 2018 ini berada dibawah rasio pemukiman layak huni Sulsel.

2.1.3.1.4.3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Tabel 2.126
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	18.718	19.314	25.277	28.258	29.777	32.097
b.	Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	33.801	35.914	36.548	36.978	37.504	37.941
	Persentase	%	55,38	53,78	69,16	76,42	79,39	84,59

Sumber Data : Dinas Perumahan & Pemukiman Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 rumah yang ada, sebanyak 55 rumah merupakan rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2018 angkanya menjadi 80 rumah layak huni per 100 rumah. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2013-2018.

Keberadaan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan bagi MBR dan pemendagri 55 Tahun 2017 tentang kemudahan memperoleh perizinan bagi pembangunan perumahan MBR juga berkontribusi terhadap pencapaian ini.

2.1.3.1.4.4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Tabel 2.127

Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Unit	2.756	2.957	3.131	3.412	3.928	4.101
b.	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	3.400	3.600	3.693	4.012	4.265	4.438
	Persentase	%	81,06	82,14	84,78	85,04	92,10	92,41

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 rumah tangga MBR yang ada, sebanyak 81 rumah tangga MBR telah menempati rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2018 angkanya menjadi 92 rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni per 100 rumah tangga MBR. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2013-2018. Artinya semakin banyak rumah tangga MBR yang mampu mengakses rumah layak huni.

2.1.3.1.4.5. Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.128

Persentase Pemukiman Yang Tertata Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luas area permukiman tertata	Ha	4.313	4.361	4.501	4.535	4.647	4.703
b.	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	4.407	4.452	4.590	4.622	4.682	4.738
	Persentase	%	97,87	97,96	98,06	98,12	99,25	99,26

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, persentase luas pemukiman yang tertata di Kota Palopo meningkat dari 97,87% menjadi 99,26% pada tahun 2018. Selain persentase, luas area pemukiman yang tertata pun meningkat dari 4.313 Ha pada tahun 2013 menjadi 4.703 Ha pada tahun 2018. Angka dalam tabel juga menunjukkan dari 100 Ha area pemukiman yang ada, pada tahun 2013 terdapat 98 Ha (pembulatan 97,87) sudah tertata. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2018 angkanya menjadi 99 Ha area

pemukiman yang tertata dari 100 Ha area pemukiman yang ada. Ini menunjukkan luas area pemukiman yang tertata semakin meningkat, di Kota Palopo sepanjang 2013-2018.

2.1.3.1.4.6. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan pemukiman kumuh adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman yang mengalami kekumuhan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan atau lingkungan pemukiman yang tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat : Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada.

Tabel 2.129
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	0	0	85.23	42.58	32.08	18,75
b.	Luas wilayah Kota Palopo	Ha	2.529.9	2.529.9	2.529.9	2.529.90	2.529.90	2.529,90
	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0	0	3.36	1.68	1.26	0,74

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2019, Keterangan : 1 Km² = 100 Ha

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018 persentase luas lingkungan pemukiman kumuh terhadap total luas wilayah Kota Palopo sebanyak 0.74%, menurun dibandingkan kondisi tahun 2013 yang berada pada angka 3.36%.

2.1.3.1.4.7. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Tabel 2.130
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	0	0	4.10	46.75	57.25	67,88
b.	Luas pemukiman kumuh	Ha	0	89.33	85.23	42.58	32.08	21,45
c	Persentase luasan pemukiman kumuh	%	0	0	95.46	45.15	35.91	31,65

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2019

Pada tahun 2014 luas pemukiman kumuh Kota Palopo adalah 89.33 Ha sesuai Surat Keputusan Walikota Palopo. Pada tahun 2015 sebanyak 4.10 Ha ditangani, sehingga Desember 2015 hanya tersisa 85.23 Ha pemukiman kumuh di Kota Palopo.

Pada tahun 2016, akumulasi pemukiman kumuh yang tertangani 46.75, sehingga luas pemukiman kumuh pada tahun 2016 berkurang

menjadi 42.58 Ha. Di tahun 2018 kembali ditangani sebanyak 67.88 Ha, sehingga sampai Desember 2018, luas pemukiman kumuh di Kota Palopo hanya tersisa 21,45 Ha.

Angka dalam tabel diatas juga menunjukkan total luas pemukiman kumuh yang sudah ditangani Pemerintah Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 sebanyak 21.45 Ha dari kondisi awal 89.33 Ha dan tersisa 31.65 Ha pada tahun 2018.

2.1.3.1.4.8. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Tabel 2.131
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	KK	3.473	3.275	3.084	2.931	2.864	2.742
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	KK	35.026	35.914	36.871	37.749	38.641	39.364
	Persentase	%	9,92	9,12	8,36	7,76	7,41	6,97

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 rumah tangga di Kota Palopo, terdapat sebanyak 10 (pembulatan 9,92) rumah tangga kumuh perkotaan, kondisi ini semakin membaik di tahun 2018, dimana hanya terdapat 7 rumah tangga kumuh dari 100 rumah yang ada.

2.1.3.1.4.9. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Indikator ini menggambarkan keberadaan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) berupa kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik kualitas pemukiman masyarakat.

Tabel 2.132
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan
PSU Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Kawasan	18	21	24	27	30	33
b.	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Kawasan	48	120	129	135	143	162
	Persentase	%	37,50	17,50	18,60	20,00	20,98	20,37

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Utilitas Umum (PSU) di Kota Palopo semakin berkurang. Jika pada tahun 2013 terdapat 37,50%

lingkungan yang didukung PSU, pada tahun 2018 jumlah menurun menjadi 20,37%, yang artinya bahwa dari 100 lingkungan perumahan yang ada pada tahun 2018, hanya 20 (pembulatan 20,37) lingkungan perumahan yang memiliki PSU.

2.1.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat: untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat adalah rasio polisi pamong praja terhadap setiap 10.000 penduduk, jumlah Linmas setiap 10.000 penduduk serta tersedianya pos siskamling per desa/kelurahan atau sebutan lain.

2.1.3.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel 2.133

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	100 orang Petugas Linmas di kabupaten/kota daerah pemekaran baru	Orang	96	330	96	96	96	96
b.	1 wilayah kerja kabupaten/kota	Kelurahan	48	48	48	48	48	48
	Persentase	%	200	688	200	200	200	200

Sumber Data : Badan Kesbang Pol Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah petugas Linmas sebanyak 2 orang dalam 1 kelurahan. Kecuali pada tahun 2014 sebanyak 6 – 7 orang per kelurahan, hal ini terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif periode 2014 – 2019. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja indikator ini sesuai data Kesbang Pol Kota Palopo Tahun 2018, adalah anggota Linmas yang tidak terdaftar, dimana personilnya selalu berganti atau tidak permanen, belum adanya insentif bulanan bagi linmas dan kurangnya event pembinaan bagi mereka. Beberapa hal yang menjadi solusi atas kondisi ini adalah memperbaiki tata kelola Linmas dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang anggota Linmas sehingga lebih mengikat dan permanen, kemudian memberikan mereka insentif yang telah memiliki SK dan memberikan pelatihan dalam pelaksanaan tugas di masyarakat.

2.1.3.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tabel 2.134

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
a.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	312	225	215	186	169
b.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	316	232	233	208	184

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	97,90	98,80	96,60	92,20	91,80

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 – 2018, seluruh laporan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo semuanya diselesaikan. Namun sesuai data Pol PP Kota Palopo, jumlah pelanggaran K3 yang mereka selesaikan jauh lebih banyak dari yang dilaporkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meski pelanggaran K3 tersebut tidak dilaporkan, jika ditemukan oleh satuan Pol PP juga diselesaikan.

2.1.3.1.5.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Tabel 2.135

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Km ²	7,5	7,5	15	22,5	22,5	25,50
b.	Luas wilayah kabupaten/kota	Km ²	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	252,99
	Persentase	%	3,03	3,03	6,06	9,09	9,09	10,08

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2019

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2013, hanya 3,03%, tahun 2018 menjadi 10,08%. Artinya sampai dengan tahun 2018, dari 252,99 Km² luas Kota Palopo, yang masuk jangkauan manajemen kebakaran hanya 10 Km². Meski meningkat, kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo ini ke depan harus lebih ditingkatkan mengingat cukup banyak daerah rawan kebakaran terutama di daerah padat penduduk dan perumahan.

2.1.3.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator tingkat waktu tanggap atau *response time rate* adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesiapan petugas pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran yang terjadi. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.

Tabel 2.136

Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kasus	40	59	67	40	37	36

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
b.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	42	59	76	60	39	38
	Persentase	%	95,24	100	88,16	67,67	94,87	94,74

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus kebakaran yang ditangani kurang atau dalam waktu maksimal 15 menit, menurun. Pada tahun 2013, dari 42 kasus kebakaran, hanya 40 kasus yang ditangani kurang dalam waktu 15 menit, sementara di 2018, dari 38 kasus kebakaran, yang ditangani kurang atau maksimal 15 menit sebanyak 36 kasus. Ke depan angka yang menjadi target indikator ini harus lebih ditingkat.

2.1.3.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA

Tabel 2.137
Persentase Penegakan PERDA
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	312	225	215	186	169
b.	Jumlah pelanggaran PERDA	323	230	220	190	184
	Persentase penegakan PERDA (%)	96,60	97,80	97,70	97,90	91,80

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Perda di Kota Palopo semakin membaik. Jika tahun 2014 berada pada angka 96,60%, tahun 2018 menurun menjadi 91,80%. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketetapan Peraturan Daerah.

2.1.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial.

2.1.3.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Adalah indikator yang menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam menangani Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Palopo dengan memberikan bantuan sosial. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin baiknya penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2.138
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kota Palopo Tahun 2013– 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					2018
			2013	2014	2015	2016	2017	
a	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Jiwa	6786	6848	6813	6857	8777	9586
b	Jumlah PMKS yang menerima seharusnya menerima bantuan	Jiwa	18,586	18586	18573	18556	18388	18586
c	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	36.51	36.84	36.68	36.95	47.73	51.58

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2019

Pada tahun 2014 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 36,51 persen dari jumlah PMKS yang ada, dan pada tahun 2015 jumlah tersebut menurun menjadi 36,68 persen, tetapi tahun berikutnya terus meningkat hingga tahun 2018 persentase pada angka 51,58 %. Ini menunjukkan semakin tahun cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palopo semakin meningkat. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

2.1.3.1.6.2. Persentase PMKS yang Tertangani

Adalah indikator yang menggambarkan cakupan atau besaran penanganan PMKS yang ada di Kota Palopo. Penanganan PMKS bisa dalam bentuk kegiatan seperti langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2.139
Persentase PMKS yang Tertangani
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	6784	6858	6822	6875	9.598
b	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	18,608	18608	18597	18588	18.662
c	Persentase PMKS yang Tertangani	%	36.45	36.85	36.68	36.98	51,43

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan besaran PMKS yang tertangani di Kota Palopo sejak 2014 – 2018 meningkat. Jika 2014 sebanyak 36.45 % artinya

dari 100 orang PMKS, yang berhasil ditangani sebanyak 36 orang, namun 2018 berhasil ditangani 51 orang dari 100 orang PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

2.1.3.1.6.3. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan besaran PMKS yang diberikan bantuan sandang pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Semakin tinggi indikator ini, semakin banyak PMKS yang terancam kehidupannya akibat persoalan pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar.

Tabel 2.140
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	16537	6877	6827	7011	9.318
b	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Jiwa	25541	15881	15831	16015	15.778
c	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	64.74	43.30	43.12	43.77	59,06

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan besaran PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun di Kota Palopo sejak 2014 – 2018 menurun. Jika 2014 sebanyak 64.74% artinya dari 100 orang PMKS, sebanyak 64-65 orang telah diberikan bantuan sosial, tahun 2018 sebanyak 59 orang bisa diberikan bantuan sosial, dari 100 orang PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

2.1.3.1.6.4. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Tabel 2.141
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos						
		Unit	8	8	8	8	8
b	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos						
		Unit	8	8	8	8	8
c	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial						

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
		Unit	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2019

Target SPM untuk indikator ini sebesar 100%. Sejak tahun 2014 – 2018, target indikator ini telah dicapai. Ini menunjukkan bahwa semua panti sosial yang ada di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial bagi para penghuninya.

2.1.3.1.6.5. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.142
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos						
		Unit	48	48	48	48	48
b	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala						
		Unit	48	48	48	48	48
c	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial						
		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa semua WKSBM di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kota Palopo sejak tahun 2014 – 2018, setiap tahunnya memberikan bantuan kepada kelompok WKSBM. Setiap tahunnya sebanyak 4 kelompok..

2.1.3.1.6.6. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tabel 2.143
Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun						
		Jiwa	89	39	223	139	347
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun						
		Jiwa	89	39	223	139	347
c	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat						
		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2019

Target SPM untuk indikator ini adalah 80% artinya dari 100 orang korban bencana 80 orang harus mendapatkan bantuan sosial selama

masa tanggap darurat. Di Kota Palopo capaian indikator kinerja ini telah terpenuhi.

2.1.3.1.6.7. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tabel 2.144

**Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun						
		Jiwa	20	0	42	0	0
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala						
		Jiwa	20	0	42	0	0
c	Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap						
		%	100	0	100	0	0

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.1.6.8. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Tabel 2.145

**Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun						
		Orang	0	0	0	0	248
b	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun						
		Orang	953	962	964	971	1.260
c	Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial						
		%	3,05	0	3,93	11,88	19,68

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan pada tahun 2018, dari 100 penyandang cacat di Kota Palopo 20 orang penyandang yang menerima jaminan sosial. Capaian indikator ini di Kota palopo sepanjang 2014 – 2018 masih sangat perlu diakselerasi.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.1.3.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun

Tabel 2.146
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun
Di Kota Palopo 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	4	4	8	10	14	16
2	Jumlah Perusahaan	1.407	1.438	1.459	1.678	1.685	1.741
3	Jumlah Perusahaan ber TDP(*)	1048	770	961	829	774	719
4	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun (x 1000)	2,8	2,8	5,5	6,0	8,3	9,19
5	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja di Perusahaan ber TDP Per Tahun (x 100)	0.38	0.52	0.83	1.21	1.81	2,23

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018, (*) Palopo Dalam Angka 2019

Data di atas menunjukkan sepanjang 2013-2018, kasus sengketa pekerja dan pengusaha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2013, dari 1000 perusahaan yang ada, rata-rata jumlah kasus sengketa ketenagakerjaan antara pekerja dan perusahaan sebanyak 2-3 kasus, tahun 2015 menjadi 5-6 kasus, dan 2016 menjadi 6 kasus dan 2018 menjadi 9 kasus. Ini menunjukkan dinamisnya ketenagakerjaan di Kota Palopo.

Namun jika dibandingkan terhadap jumlah perusahaan dengan tanda daftar, angka sengketa pengusaha-pekerja ini jauh lebih rendah. Sebab pada tahun 2018 jumlah perusahaan ber TDP di Kota Palopo hanya 719 buah (*sumber : Palopo Dalam Angka*) , sehingga angka sengketa pengusaha pekerja hanya pada kisaran 2,23%. Artinya dari 100 perusahaan hanya terdapat 2 kasus sengketa pengusaha dan pekerja.

Tahun 2016, jumlah perusahaan ber TDP hanya 829 buah, sehingga angka sengketa pengusaha pekerja hanya pada kisaran 1,21%. Artinya dari 100 perusahaan hanya terdapat 1 kasus sengketa pengusaha dan pekerja. Kemudian tahun 2015 jumlah perusahaan ber TDP sebanyak 961 perusahaan, sehingga angka sengketa pengusaha pekerja hanya pada kisaran 0,83%. Artinya dari 100 perusahaan hanya terdapat 0-1 kasus sengketa pengusaha dan pekerja.

Tahun 2014 jumlah perusahaan ber TDP sebanyak 770, sehingga angka sengketa pengusaha pekerja hanya pada kisaran 0,52%. Artinya dari 100 perusahaan hanya terdapat 0- 1 kasus sengketa pengusaha dan pekerja dan tahun 2013 dimana jumlah perusahaan ber TDP sebanyak 1048 sehingga angka sengketa pengusaha pekerja hanya pada kisaran 0,38%. Artinya dari 100 perusahaan rata-rata tidak ada kasus sengketa pengusaha dan pekerja.

2.1.3.2.1.2. Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Indikator ini menggambarkan besaran sengketa antara pengusaha dan pekerja yang berhasil diselesaikan dengan perjanjian bersama. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak sengketa/perselisihan antara buruh/pekerja dan pengusaha yang diselesaikan melalui kesempatan dan musyawarah.

Tabel 2.147
Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	3	4	7	8	10	11
2	Kasus yang Dicatat/Dilaporkan	4	4	8	10	14	15
3	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	75	100	88	80	71	73

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018 semua kasus perselisihan ketenagakerjaan di Kota palopo diselesaikan dengan perjanjian bersama tanpa perlu dilanjutkan pada pengadilan hubungan industrial. Tahun 2013, 75% kasus sengketa diselesaikan dengan perjanjian bersama, 2014 jumlah menjadi 100%, 2015 menjadi 88% dan 2016 menjadi 80%. Di tahun 2017 jumlah kembali menurun menjadi 71%, namun tahun 2018 kembali naik menjadi 73%. Ini menunjukkan dinamika ketenagakerjaan di Kota palopo masih tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan kasus sengketa atau perselisihan tenaga kerja - pengusaha.

2.1.3.2.1.3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Tabel 2.148
Pencari Kerja yang Ditempatkan
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Org	266	66	78	121	718
b.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Org	5.601	4.179	2.491	2.664	2.740
Pencari Kerja yang ditempatkan (a/b)		%	4,75	1,58	3,13	4,54	26,20

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa, dari 100 orang pencari kerja yang mendaftar, pada tahun 2014 hanya 4-5 orang tenaga kerja yang ditempatkan. Kondisinya jauh berbeda terjadi pada tahun 2018, dimana 26 tenaga kerja yang ditempatkan.

2.1.3.2.1.4. Keselamatan dan Perlindungan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang memperhatikan dan menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi pekerjanya. Semakin tinggi angka indikator ini semakin banyak cakupan tenaga kerja yang dilindungi keselamatan dan keamanan kerjanya.

Tabel 2.149
Persentase Keselamatan dan Perlindungan
Kota Palopo Tahun 2013 -2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Buah	345	364	375	406	420	431
2	Jumlah Perusahaan	Buah	1.407	1.438	1.459	1.678	1.689	1.700
3	Persentase Keselamatan & Perlindungan (x 100)	%	25	25	26	24	25	25

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan pada tahun 2013, dari 100 perusahaan yang ada, hanya 25% perusahaan yang menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Kondisi ini berlangsung cukup stagnan sampai tahun 2018. Dimana rata-rata kinerja indikator ini hanya 24-26%. Jika dilihat dari jumlah, angka cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

2.1.3.2.1.5. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Indikator ini menggambarkan cakupan pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak jumlah pekerja/buruh yang dijamin jaminan sosial bidang ketenagakerjaannya.

Tabel 2. 150
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kota Palopo Tahun 2013 -2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	Orang	5.592	5.678	7.853	10.383	10.478	11.438
2	Jumlah Buruh/Pekerja	Orang	19.560	20.490	21.735	28.337	28.377	29.337
3	Besaran Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek	Persen	29	28	36	37	37	39

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan persentase buruh pekerja untuk menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Palopo dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Ini menggambarkan adanya kesadaran pekerja untuk menjadi bagian dalam program jaminan kesejahteraan sosial ketenagakerjaan ini. Meski demikian jika dilihat dari persentase, sampai dengan 2018, masih ada kurang lebih 61% buruh pekerja di Kota Palopo yang belum mengikuti program, ini. Angka ini masih cukup besar. Olehnya ke depan diperlukan upaya akselerasi agar lebih banyak buruh pekerja menjadi peserta dalam Jamsostek tersebut.

2.1.3.2.1.6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Indikator ini menggambarkan pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap angka perselisihan buruh dan pengusaha. Semakin

tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin dinamisnya kondisi ketenagakerjaan di daerah.

2.1.3.2.1.7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Indikator yang menunjukkan cakupan perusahaan yang diperiksa dalam menerapkan prinsip prinsip sesuai UU ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen pemerintah dan perusahaan memenuhi hak dan kewajibannya bagi para pekerja dan buruh.

Tabel 2.151
Persentase Pemeriksaan Perusahaan
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	Buah		8	8	6	8
2	Jumlah perusahaan terdaftar (ber TDP) (*)	Buah		770	961	829	825
3	Persentase Pemeriksaan Perusahaan	%		1,01	0,87	0,67	0,97

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019, BPS Kota Palopo (Palopo dalam Angka) yang menggunakan sumber Data dari DPMPTSP Kota Palopo

Data diatas menunjukkan bahwa besaran pemeriksaan perusahaan di Kota Palopo sepanjang 2014 – 2018 masih sangat rendah. Tahun 2014, rasio menunjukkan dari 100 perusahaan hanya 1-2 perusahaan yang diperiksa, sementara tahun 2018, hanya 1 perusahaan yang diperiksa. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan pada sejumlah perusahaan di Kota Palopo. Sehingga kinerja dan cakupan program pada dinas tenaga kerja harus diakselerasi.

2.1.3.2.1.8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang menggunakan peralatan di perusahaannya namun tetap memperhatikan prinsip prinsip keamanan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik bagi keamanan kerja bagi para karyawannya.

2.1.3.2.1.9. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator ini memberikan gambaran proporsi tenaga kerja di Kota Palopo yang memiliki keterampilan kompetensi kerja setelah mendapatkan pelatihan. Umumnya hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja (seperti memiliki lebih banyak tenaga kerja terampil) adalah rendahnya akses ke pendidikan menengah berbasis vokasi, apalagi dengan kondisi Kota Palopo dimana sebagian besar angkatan kerja merupakan lulusan SMA/SMK sederajat. Indikator ini akan berdampak pada tingkat produktifitas tenaga kerja yang ada dalam menghasilkan nilai tambah produk barang atau jasa.

Tabel 2.152
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	16	16	16	88	102
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	198	163	210	280	305	319
c.	Persentase	%	8.08	9.82	7.62	5.71	28.85	31.97

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan besaran tenaga kerja yang dilatih dengan berbasis kompetensi meningkat sepanjang tahun 2013. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 8.08% pada tahun 2018 sudah mencapai angka 31.97%.

2.1.3.2.1.10. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam skala komunitas dalam pelatihan ketenagakerjaan. Semakin nilai indikator ini, semakin banyak komunitas komunitas tenaga kerja yang siap kerja di sebuah daerah.

Tabel 2.153
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Masyarakat Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	0	16	16	32	35
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	175	288	288	270	286	289
	Persentase	%	9.14	0	5.56	5.92	11.2	12.10

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.1.11. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Tabel 2.154
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	32	90	16	64	20	18
b.	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	Orang	140	160	40	175	343	341
	Persentase	%	22.80	60.00	40.00	36.60	5.83	5.28

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan semakin menurun. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 22.8%, pada tahun 2018 menjadi 5.28%.

2.1.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.3.2.2.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tabel 2.155
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	3.058	3.036	3.293	2.933	2.902	2.811
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	20.100	21.825	22.726	25.711	26.563	26.532
c	Persentase	%	15,21	13,91	14,49	11,40	10,92	10,59

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sejak tahun 2013-2018 menurun. Pada tahun 2013 pada angka 15,21% sementara di 2018 hanya pada angka 10,59%. Pekerja perempuan, pada tahun 2018 lebih banyak mengakses lapangan kerja non pemerintahan seperti lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

2.1.3.2.2.2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Tabel 2.156
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah kursi DPR yang diduduki perempuan	Orang	5	5	5	5	5	5
b.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	25	25	25	25	25
c	Persentase	%	20	20	20	20	20	20

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif Kota Palopo sejak periode 2009-2013 dan periode 2014-2019. Dalam 2 periode pemilihan legislatif, jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD Kota Palopo hanya 5 orang dengan presentase 20% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Palopo.

Kondisi ini masih berada di atas capaian nasional dimana hanya 17,32% perempuan yang duduk di lembaga legislatif, termasuk provinsi yang hanya pada angka 17,6%. Jika dibandingkan dengan target pencapaian SDGs yang pada tahun 2030 menargetkan 30% perempuan duduk menjadi anggota lembaga legislatif, Kota Palopo ke depan, paling tidak harus memiliki 8 orang anggota legislatif dari kalangan perempuan.

2.1.3.2.2.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel 2.157
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	609	671	752	801	840	886
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	20.100	21.825	22.726	25.711	26.563	26.609
c	Persentase	%	3.03	3.07	3.31	3.12	3.16	3.33

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga swasta sejak tahun 2013-2018 meningkat. Pada tahun 2013 pada angka 3,03% sementara di 2018 pada angka 3,33%. Kondisi ini selaras dengan data partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, yang sejak tahun 2013-2018 menurun.

Artinya pekerja perempuan lebih banyak mengakses lapangan kerja di sektor swasta dari pada lembaga pemerintahan di Kota Palopo. Beberapa lapangan usaha swasta yang banyak diakses oleh pekerja perempuan adalah lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

2.1.3.2.2.4. Rasio KDRT

Tabel 2.158
Rasio KDRT
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah KDRT	Kasus	21	15	20	22	10	8
b.	Jumlah rumah tangga	KK	35.025	35.914	36.871	37.749	38.641	39.444
c	Rasio KDRT	Per 10.000	6	4	5	6	3	2

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo menurun. Jika pada tahun 2013, dari 10.000 rumah tangga terdapat sebanyak 6 kasus KDRT, sementara di 2018 jumlahnya menurun menjadi 2 kasus.

2.1.3.2.2.5. Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Semakin tinggi nilai indikator ini mengindikasikan masih lemahnya perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

2.1.3.2.2.6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2.159
Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	25.874	25.332	26.529	28.506	28.445
b.	Jumlah penduduk perempuan usia kerja	Orang	56.963	62.767	60.091	66.249	68.330
c.	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	45.42	40.36	44.15	43.03	41,63
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	%	79,16	69,43	73,03	77,61	69,50

Sumber Data : Data Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo 2019

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2014 – 2018 di Kota Palopo masih jauh tertinggal dibawah TPAK laki. Pada tahun 2018, selisih angkanya bahkan terpaut 27,87%. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo perlu agar ke depan TPAK perempuan terus meningkat.

2.1.3.2.2.7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.160
Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	12	0	56	18	32	36
b.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	12	0	56	254	145	149
	Persentase	%	100	100	100	7.09	22.07	24,16

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat penanganan pengaduan atau laporan kasus perempuan atau anak korban kekerasan di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2013, seluruh laporan ditindaklanjuti, tahun 2018 hanya 24,16% yang direspon. Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini jauh menurun.

2.1.3.2.2.8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus – Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 2.161
Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah perkara diputuskan pengadilan dengan dasar perundang – undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	78	68	48	74	87	96
b.	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	78	68	48	74	87	96
	Persentase	%	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.2.9. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tabel 2.162
Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Orang	7	7	-	49	31	36
b.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Orang	2	2	-	254	145	150
	Persentase	%	350	350	-	19.29	21.38	24.00

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.2.10. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD

Tabel 2.163
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN						
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	96.54	97.53	94.11	95.37	99.32	99.78
Laki-laki	-	-	97.48	100.00	99.33	99.60
Perempuan	-	-	90.04	90.52	99.31	100.00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

2.1.3.2.2.11. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP

Tabel 2.164
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN						
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SMP/MTs	73.57	78.15	75.43	76.61	77.89	78.39
Laki-laki	-	-	68.49	77.50	75.35	79.35
Perempuan	-	-	81.02	75.52	80.28	77.55

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

2.1.3.2.2.12. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA

Tabel 2.165
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN						
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SMA/MA/SMK	49.25	60.49	68.29	65.72	66.42	67.99
Laki-laki	-	-	70.11	66.80	69.65	75.27
Perempuan	-	-	66.63	64.73	63.24	62.00
PT	40.48	40.99	-	-	-	-

Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

2.1.3.2.2.13. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi

Tabel 2.166
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	APM perempuan yang masuk perguruan tinggi	Persen	40,48	40,99	41.25	41.76	42.27	42,63
b.	APM laki-laki yang masuk Perguruan Tinggi							

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

2.1.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

2.1.3.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Tabel 2.167
Persentase Ketersediaan Pangan Utama
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun						
		Kg	15,760.64	16,783.60	17,774.44	19,466.00	34,568.75
b.	Jumlah penduduk						
		Orang	164,903	168,894	172,916	176,907	176,907

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
c	Jumlah Konsumsi Rill						
		Kg	16,677.93	17,356.36	17,130.12	16,721.00	18,332.55
d	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Penduduk						
		%	9.56	9.94	10.28	11.00	19.54
e	<i>Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Konsumsi Rill</i>						
		%	94.50	96.70	103.76	116.42	188.56

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa angka ketersediaan bahan pangan utama di Kota Palopo meningkat sepanjang tahun 2014 – 2018. Pada tahun 2014, untuk 100 jiwa penduduk Kota Palopo, rata-rata tersedia 9,56 Kg pangan utama, sementara di 2018 tersedia sebanyak 19,54 Kg bahan pangan utama per 100 jiwa penduduk Kota Palopo. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi riil, angka ketersediaan pangan utama juga meningkat. Jika pada tahun 2014 pada angka 94,50 %, pada tahun 2018 berada pada angka 188,56 %.

2.1.3.2.3.2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Tabel 2.168

Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Kalori x BDD	Kkal/kapita/hari	20,497	22,034	21,301	20,128	38.650
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100
1	Ketersediaan energi	Kkal/kapita/hari	2.049,7	2.203,4	2.130,1	2.012,8	3.865
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Protein x BDD	Kkal/kapita/hari	816	692	689	691	1.019,6
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	81.60	69.23	68.9	69.1	101,96
3	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	(kkal/ka pita/hari)	2.131	2.273	2.199	2.082	3.966

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2019, RAD Pangan dan Gizi Kota Palopo 2016-2020

Food and Agriculture Organization atau FAO mensyaratkan untuk ketersediaan energi minimal adalah sebesar 2200 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 54 gram/kapita/hari. Sementara standar Indonesia 2000-2100 kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi dan protein Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 sudah berada diatas standar minimal FAO.

2.1.3.2.3.3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2.169
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu						
		Sampel	-	-	9	9	13
b.	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu						
		Sampel	-	-	12	11	18
	Persentase		-	-	75	82	72

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

2.1.3.2.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah.

Tabel 2.170
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah luas lahan bersertifikat	Km2	2,29	3,98	3,23	3,77	5,43
b.	Jumlah luas wilayah	Km2	247,52	247,52	247,52	247,52	249,18
	Persentase	%	0,92	1,61	1,31	1,52	2,17

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan sebagian besar lahan di wilayah Kota Palopo belum bersertifikat. Sampai tahun 2018 hanya 2,17 % wilayah Kota Palopo yang memiliki bukti kepemilikan. Meskipun jika dibandingkan tahun 2014, luas wilayah yang bersertifikat pada tahun 2018 luasnya meningkat.

Data dalam tabel juga menunjukkan bahwa dari 100 Km2 wilayah Kota Palopo, hanya 2,17 Km2 yang bersertifikat sampai pada tahun 2018. Penambahan luas lahan bersertifikat selama lima tahun sebesar 1,25 Km2. Olehnya Pemerintah Kota Palopo harus lebih memberikan akses dan melaksanakan advokasi masyarakat tentang pentingnya bukti legalisasi kepemilikan tanah.

2.1.3.2.4.2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel 2.171
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	0	0	0	0	1
b.	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	4	4	4	4	4
	Persentase	%	0,00	0,00	0,00	0,00	25

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus sengketa tanah negara di Kota Palopo sebanyak empat kasus. Yakni kasus tanah negara

dengan tipologi konflik satu konflik tanah ex HGU dan tiga kasus tentang ijin pemanfaatan tanah dan sampai tahun 2018, masih dalam tahap penyelesaian konflik.

Kasus konflik tanah ex HGU sampai tahun 2018 masih dalam tahap penyelesaian, sementara untuk tiga kasus ijin pemanfaatan tanah, satu kasus dalam proses pengadilan, satu kasus belum dilakukan pelaksanaan ganti rugi dan kasus lainnya dalam proses perampungan perda RT RW. Kasus terakhir ini terkait dengan pemanfaatan tanah HPL lokasi Jalan Lingkar di Kota Palopo.

2.1.3.2.4.3. Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel 2.172
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah ijin lokasi	Buah	1	0	1	1	0	0
b.	Permohonan ijin lokasi	Buah	2	0	1	1	1	1
c	Persentase	%	50	0	100	100	0	0

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian izin lokasi di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 masih fluktuatif. Pada tahun 2013 penyelesaian izin lokasi 50%, tahun 2015 menjadi 100% dan tahun 2018 0% atau belum ada satupun permohonan izin lokasi yang diterbitkan izin lokasinya.

2.1.3.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Tabel 2.173
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tersusunnya RPPLH kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.5.2. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Tabel 2.174
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.5.3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Tabel 2.175
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada (KLHS Kawasan Pesisir)	-	-	Ada (KLHS Revisi RTRW	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan untuk menjamin Kebijakan rencana Program (K/R/P) mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan. Sepanjang 2013-2018, Pemerintah Kota Palopo hanya 3 kali menyelenggarakan KLHS yang menghasilkan 3 dokumen yakni KLHS RTRW pada tahun 2013, KLHS Kawasan Pesisir dan KLHS revisi RT RW Kota Palopo 2012-2032.

2.1.3.2.5.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Tabel 2.176
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Hasil pengukuran indeks kualitas air	Cemaran ringan	Cemaran ringan	Cemaran ringan	Cemaran ringan	Cemaran ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kualitas air secara umum di wilayah Kota Palopo masih dalam batas kewajaran. Sepanjang 2014 – 2018, hasil pengukuran indeks kualitas air di Kota Palopo berada dalam kategori cemaran ringan. Data ini diperoleh dengan mengambil sampel air di beberapa sungai dan saluran air/drainase.

2.1.3.2.5.5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Tabel 2.177
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik	Sangat baik

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Palopo pada tahun 2017, kondisinya lebih baik dibandingkan tahun 2014 – 2016. Sesuai hasil uji di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, kualitas udara pada tahun 2014 – 2016 berkategori sangat baik, tahun

2017 berada pada kategori unggul. Namun tahun 2018 kembali berada pada kategori sangat baik.

2.1.3.2.5.6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 2.178
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Tidak Tersedi a	Tidak Tersedi a	Tidak Tersedi a	Tidak Tersedi a	Tidak Tersedi a

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.5.7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.179
Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditangani	Izin	736	885	1109	1161	1578
b.	Total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo	Pihak	288	288	432	432	653
	Persentase	%	39,13	32,54	38,95	37,20	24,16

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan sepanjang tahun 2014 – 2018, masih lebih banyak pelaku usaha di Kota Palopo yang belum taat terhadap kepemilikan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Sampai tahun 2018, masih terdapat 75,84% yang belum taat atas izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Data ini juga menunjukkan jumlah pelaku usaha yang taat, masih berfluktuatif, meski cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

2.1.3.2.5.8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel 2.180
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Pemerintah Kota Palopo sampai tahun 2018 belum pernah memberikan apresiasi apapun kepada lembaga atau pihak manapun, terkait pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.3.2.5.9. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota Palopo

Tabel 2.181
Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Pengaduan masyarakat yang ditangani	Buah	10	15	7	11	13
b.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Buah	10	15	7	11	13
	Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan di Kota Palopo sepanjang tahun 2014 – 2018, sangat baik. Semua pengaduan yang disampaikan atau dilaporkan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palopo. Ini mengindikasikan Pemerintah Kota Palopo sangat merespon isu-isu di masyarakat yang terkait dengan persoalan lingkungan.

2.1.3.2.5.10. Timbulan Sampah yang Ditangani

Tabel 2.182
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Volume timbulan sampah yang ditangani	(Ton)	31.180	33.033	31.047	33.040	30.409
b.	Jumlah total timbulan sampah	(Ton)	37.528	38.355	35.674	37.427	34.171
	Persentase	%	83,08	86,12	87,02	88,28	88,90

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Dari data di atas, menunjukkan bahwa persentase volume timbulan sampah yang ditangani dari tahun 2014 – 2018 semakin meningkat. Ini menunjukkan kinerja penanganan sampah di Kota Palopo, membaik. Jika pada tahun 2014 hanya mampu menangani 83,08% timbulan sampah. Tahun 2018, berada pada angka 88,90%. Data ini juga menampilkan bahwa total timbulan sampah juga semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

2.1.3.2.5.11. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Tabel 2.183

Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Jumlah Timbunan Sampah yang ditangani (Ton)	Ton	37.528	38.355	35.674	37.427	34.171
b	Jumlah yang tertangani di TPS 3R setara	Ton	610	981	1.189	1.334	1.376
c	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (b/a)	%	1,6	2,55	3,33	3,56	4,02

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Jumlah sampah yang tertangani di TPS 3 R adalah sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sampah seperti ini meningkat sejak 2014 ke 2018. Ini menunjukkan bahwa peran TPS 3 R di Kota Palopo berjalan cukup baik. Jika pada tahun 2014 TPS 3 R hanya mampu menangani sebanyak 610 Ton pada tahun 2014, tahun 2018 mampu menangani 1.376 Ton sampah. Ini menunjukkan bahwa beberapa strategi 3R dalam pengurangan sampah yang masuk TPA, seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, cukup baik.

Dampaknya jumlah sampah yang terangkut ke TPA dari tahun ke tahun di Kota Palopo semakin berkurang, sehingga masa pakai TPA bisa lebih panjang/lama. Sebab akan semakin menurunkan beban tamping yang akan diterima oleh TPAS Kota Palopo yang ada di Kelurahan Mancani.

2.1.3.2.5.12. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Tabel 2.184

Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km ² /ha	137,76	147,88	151,72	159,01	166,27
b.	Luas area Kota Palopo	km ² /ha	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52
	Persentase	%	55	59	61	64	67

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa luas area pelayanan sampah dari tahun ke tahun meningkat. Jika tahun 2014 hanya 55% wilayah Kota Palopo yang terlayani, tahun 2018 wilayah Kota Palopo sudah dijangkau pelayanan sampah sebanyak 67%.

2.1.3.2.5.13. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Tabel 2.185
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah sampah yang tertangani	Meter Kubik (ton)	23.962	26.928	26.381	29.405	30.601
b.	Total jumlah timbunan sampah di Kota Palopo	Meter Kubik (ton)	37.528	38.355	35.674	37.427	34.171
	Persentase	%	63,85	70,20	73,95	78,56	89,55

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Dari data di atas, menunjukkan bahwa persentase volume timbunan sampah yang ditangani dari tahun 2014 – 2018 semakin meningkat. Ini menunjukkan kinerja penanganan sampah di Kota Palopo, membaik. Jika pada tahun 2014 hanya mampu menangani 63,85% timbunan sampah. Tahun 2018, berada pada angka 89,55%. Data ini juga menampilkan bahwa total timbunan sampah juga semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

2.1.3.2.5.14. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Palopo

Tabel 2.186
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
a.	Nilai TPA (Program Adipura) $\geq$ 71	68,86	72,41	75,65	77,81	79,46

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa nilai predikat Tempat Pembuangan Sampah Kota Palopo semakin menunjukkan peningkatan ke arah lebih baik. Jika pada tahun 2013 hanya pada angka 69,57, pada tahun 2018 menjadi 79,46.

2.1.3.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.3.2.6.1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Tabel 2.187
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	Orang	87.542	96.727	108.634	114.080	122.053
b.	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang	144.477	148.783	138.174	145.476	130.842
c.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Orang	0,61	0,65	0,79	0,78	0,65
d.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk per 100	Orang	61	65	79	78	65

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa tahun 2014 dari 100 penduduk Kota Palopo, sebanyak 61 orang telah penduduk wajib KTP. Sedangkan tahun 2018 sebanyak 65 orang.

2.1.3.2.6.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Tabel 2.188

Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Bayi Berakte Kelahiran	Orang	2.778	2.750	2.609	1.397	1.323
b.	Jumlah bayi	Orang	3.223	3.199	2.977	2310	1.569
c	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0.86	0.86	0.88	0.605	0,84
d	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 100	Per 100	86.19	85.96	87.64	60.48	84,32

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 dari 100 balita yang lahir, sebanyak 86 bayi telah memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2017 dari 100 bayi lahir, hanya 60 yang memiliki akte kelahiran tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018. Menurunnya indikator rasio bayi berakte kelahiran di Kota Palopo sejak 2014 – 2018 akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.

2.1.3.2.6.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Tabel 2.189

Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasang	15.885	15.967	14.867	16.116	17.274
b.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasang	40.337	42.281	40.003	42.856	38.930
c.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	0,39	0,38	0,37	0,38	0,44
d	Rasio Pasangan Berakte Nikah per 100	Per 100	39	38	37	38	44

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 dari 100 penduduk yang menikah, hanya 39 pasangan yang memiliki akte nikah. Kondisi ini jauh lebih baik dari tahun 2018 dimana dari 100 pasangan nikah 44 pasangan yang resmi memiliki akte nikah.

2.1.3.2.6.4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Tabel 2.190

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Aada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.6.5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2.191
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.6.6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 2.192
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	Lembar	88.684	98.514	109.003	114.080	122.053
b.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	114.477	148.783	138.174	138.174	130.843
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	77,47	66,21	78,89	82,56	93,28

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan tahun 2018 sebanyak 93,28 % penduduk Kota palopo yang wajib memiliki KTP sudah ber KTP, sehingga tersisa 6,72 % penduduk wajib ber KTP namun belum memiliki KTP. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2014 dimana hanya 77,47 % penduduk wajib KTP yang memiliki KTP.

2.1.3.2.6.7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tabel 2.193
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (#)	Orang	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959	3.006
b.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (@)	Orang	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959	3.006
Persentase		%	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan 2018 (@) dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2019(#)

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018, cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Palopo sudah mencapai 100% ini menunjukkan bahwa semua bayi yang lahir pada tahun tersebut, pada tahun itu juga langsung memiliki akte kelahiran.

2.1.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

2.1.3.2.7.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Tabel 2.194
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah kantor pemerintahan kelurahan yang baik	Kantor	47	47	47	47	47	48
b.	Jumlah seluruh pemerintahan Kelurahan	Kelurahan	48	48	48	48	48	48
Persentase		Persen	97,92	97,92	97,92	97,92	97,92	100

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2018 tidak ada lagi kantor kelurahan di wilayah Kota Palopo yang kondisinya kurang baik.

2.1.3.2.7.2. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tabel 2.195
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	48	48	48	48	48	48
b.	Jumlah LPM	Kelompok	48	48	48	48	48	48
Rata-rata		Kelompok	1	1	1	1	1	1

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa tiap kelurahan di Kota Palopo rata-rata memiliki 1 lembaga pemberdayaan masyarakat. Jumlah LPM ini tidak mengalami penambahan selama 5 tahun.

2.1.3.2.7.3. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tabel 2.196
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	-	-	-	-	145	145
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58	58
Rata - rata							2,5	2,5

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 1 PKK di Kota Palopo membina sebanyak 2-3 kelompok binaan. Kelompok binaan PKK ini antara lain adalah Dasawisma dan BKMT di tingkat kelurahan.

2.1.3.2.7.4. Persentase LSM Aktif

Tabel 2.197
Persentase LSM Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah LSM aktif	Buah	-	2	4	2	-	2
b.	Jumlah LSM	Buah	37	37	37	37	37	37
Persentase		%	0	5,40	10,81	5,40	-	5,40

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda dan Badan kesbang Linmas Kota Palopo Tahun 2018, Potensi Wilayah Kota Palopo 2018

Sesuai data dari Bagian Pemerberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo, sebagian besar LSM di Kota Palopo sampai dengan tahun 2018, tidak aktif. Jumlah LSM yang aktif tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Badan Kesbang Linmas Kota Palopo.

2.1.3.2.7.5. Persentase LPM Berprestasi

Tabel 2.198
Persentase LPM Berprestasi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah LPM berprestasi	Buah	-	-	-	-	2	2
b.	Jumlah LPM	Buah	-	-	-	-	48	48
Persentase		%					4,17	4,17

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2019

Sesuai data dari Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo, pada tahun 2018 hanya 4,17% atau 2 LPM di Kota Palopo yang berprestasi. Jumlah relatif masih sedikit dibanding jumlah seluruh LPM yang ada di Kota Palopo.

2.1.3.2.7.6. Persentase PKK Aktif

Tabel 2.199
Persentase PKK Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah PKK aktif	Unit	58	58	58	58	58	58
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58	58
Persentase		%	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2019

Sesuai data Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palopo, dari 58 PKK yang ada di Kota Palopo terdiri dari 9 PKK Kecamatan dan 48 PKK Kelurahan

2.1.3.2.7.7. Persentase Posyandu Aktif

Tabel 2.200
Persentase Posyandu Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah posyandu aktif	Buah	147	147	147	147	149	149
b.	Total posyandu	Buah	147	147	147	147	149	149
Persentase		%	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda dan Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, Posyandu di Kota Palopo 100% berfungsi aktif melakukan pembinaan kesehatan masyarakat. Selain itu, data di atas juga menunjukkan bahwa terjadi penambahan 2 unit Posyandu dari 147 unit di tahun 2016 menjadi 149 di tahun 2017.

2.1.3.2.8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.3.2.8.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk tahun dasar.

Tabel 2.201
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,69	2,54	2,42	2,38	2,31	2,13

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

2.1.3.2.8.2. Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek

Adalah indikator yang menunjukkan adanya dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada pemerintah daerah. Indikator ini menunjukkan adanya garnd desain pada level pemerintah daerah dalam mengendalikan laju peetumbuhan penduduk dan scenario penanganannya.

Tabel 2.202
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.8.3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Tabel 2.203
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	-	-	-	16	16	16
Jumlah semua perangkat daerah	41	41	40	40	49	49
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	-	-	40,00	32,65	32,65

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Program Kampung KB baru terbentuk pada tahun 2016. Jumlah kampung KB yang berada di Kota Palopo pada tahun 2016 sebanyak 1 kampung KB, pada tahun 2018 sebanyak 10 kampung KB.

Perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB Kota Palopo sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perikanan, 9 Kantor Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

2.1.3.2.8.4. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Tabel 2.204
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah anak (Orang)	65.302	64.722	65.233	66.155	62.376	62.433
Jumlah keluarga	34.500	34.680	34.734	34.660	34.786	34.843
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana di Kota Palopo berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk. Data menunjukkan sepanjang tahun 2013-2018, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palopo hanya 2 orang. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengendalian penduduk terutama dalam ber KB berhasil.

2.1.3.2.8.5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Tabel 2.205
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah peserta KB aktif	13.918	15.022	15.255	16.873	17.774	18.226
Jumlah pasangan usia subur	21.540	21.754	21.980	23.181	23.802	24.254
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	64,61	69,05	69,40	72,79	74,67	75,15

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan angka pemakaian alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memakai alat kontrasepsi. Pada tahun 2018, dari 100 PUS sekitar 75 PUS telah menggunakan alat kontrasepsi. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun – tahun sebelumnya.

2.1.3.2.8.6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Tabel 2.206
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	320	309	471	222	239	223
Jumlah pasangan usia subur	21.540	21.754	21.980	23.181	23.802	24.254
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1.49	1.42	2.14	0.96	1.00	0.92
Per 1000 PUS	15	14	21	10	10	9

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2013 dari 1.000 Pasangan Usia Subur, terdapat 15 Pasangan Usia Subur yang memiliki istri berumur di bawah 20 tahun. Namun pada tahun 2018, hanya terdapat 9 pasangan PUS yang memiliki istri berumur dibawah 20 tahun. Ini menunjukkan semakin berkurangnya pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun sekaligus memberikan gambaran semakin membaiknya kesadaran masyarakat Kota Palopo untuk tidak menikah dalam usia dini.

2.1.3.2.8.7. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Tabel 2.207
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	6.702	6.680	6.654	5.468	5.350	5.802
Jumlah pasangan usia subur	21.540	21.754	21.980	23.181	23.802	24.254
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	31.11	30.71	30.27	23.59	22.48	23,92

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Dari tabel di atas bahwa pelayanan ber KB bagi PUS di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 semakin membaik. Tahun 2013 masih terdapat 31,11 % Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber KB, tapi tidak terpenuhi, artinya pada tahun ini hanya ada 68,89% PUS yang ingin ber KB dan sudah terpenuhi.

Sementara di tahun 2018, persentase PUS yang ingin berKB dan sudah terpenuhi telah berada pada angka 76,08%, karena hanya ada 23,92% PUS yang ingin ber KB dan belum terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin banyak PUS yang ingin ber KB dan telah mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya. Olehnya angka target indikator ini ke depannya harus lebih ditekan dari tahun 2018.

2.1.3.2.8.8. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Tabel 2.208
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	2.965	2.945	3.190	3.635	3.877	4.648
Jumlah akseptor KB	13.918	15.022	15.255	16.873	17.774	18.545
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21,30	19,60	20,91	21,54	21,81	25,06

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019,

Data diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018, jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kota Palopo semakin meningkat. Baik dalam skala jumlah, maupun dalam skala persentase. Jika pada tahun 2013 terdapat 2.965 akseptor KB menggunakan MKJP (21,30%), tahun 2018 akseptor KB menggunakan MKJP meningkat menjadi 4.648 atau 25,06%.

Data di atas juga memberikan informasi, bahwa dari 100 akseptor KB, pada tahun 2013, sebanyak 21 akseptor menggunakan MKJP, 79 akseptor lainnya menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Dan pada tahun 2018, jumlahnya menjadi 25 akseptor pengguna MKJP. Olehnya angka target indikator ini ke depannya harus lebih tinggi dari tahun 2018.

2.1.3.2.8.9. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tabel 2.209
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi	9.302	9.213	9.196	8.071	8.023	8.794
Jumlah akseptor KB	13.918	15.022	15.255	16.873	17.774	18.545
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	66,83	61,33	60,28	47,83	45,14	47,42

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 akseptor KB yang ada, ada 67 (pembulatan 66,83) pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsinya dan 33 pasangan masih menggunakan alat kontrasepsi.

Kemudian pada tahun 2018, ada 47 (pembulatan 47,42) pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsinya dan ada 53 pasangan masih yang menggunakan alat kontrasepsinya. Artinya sejak 2013-2018, jumlah PUS akseptor KB yang masih menggunakan alat kontrasepsi meningkat, dari 33 pasangan tahun 2013 menjadi 53 pasangan pada tahun 2018.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih diturunkan.

2.1.3.2.8.10. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Tabel 2.210
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	840	887	1.035	1.045	3.345	3.981
Jumlah anggota kelompok BKB	1.273	1.381	1.535	1.660	4.451	5.087
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB (%)	65,99	64,23	67,43	62,95	75,15	78,26

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 anggota kelompok BKB, terdapat 66 (pembulatan 65,99) anggota kelompok BKB yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 44 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2018, ada 78 (pembulatan 78,26) anggota kelompok BKB, yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 22 belum ber KB.

Artinya sejak 2013-2018, semakin banyak anggota Bina Keluarga Balita yang mengikuti program KB. Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.1.3.2.8.11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Tabel 2.211
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	161	151	169	536	2.007	2.632
Jumlah anggota kelompok BKR	300	319	331	1.011	3.427	4.052
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	53,67	47,34	51,06	53,02	58,56	64,96

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), terdapat 54 (pembulatan 53,67) anggota kelompok BKR yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 46 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2018, ada 65 (pembulatan 64,96) anggota kelompok BKR, yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 35 belum ber KB. Artinya sejak 2013-2018, semakin banyak anggota Bina Keluarga Remaja yang mengikuti program KB dan semakin sedikit anggota BKR yang tidak ber KB.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.1.3.2.8.12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Tabel 2.212
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	145	166	122	342	1.458	2.001
Jumlah anggota kelompok BKL	373	383	355	809	3.089	3.632
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	38,87	43,34	34,37	42,27	47,20	55,09

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), terdapat 39 (pembulatan 38,87) anggota kelompok BKL yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 61 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2018, ada 55 (pembulatan 55,09) anggota kelompok BKL yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 45 belum ber KB. Artinya sejak 2013-2018, semakin banyak anggota Bina Keluarga Lansia yang mengikuti program KB dan semakin sedikit anggota BKL yang tidak ber KB.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.1.3.2.8.13. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Tabel 2.213
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PPKS	-	-	1	1	1	1
Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9	9
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	0,11	0,11	0,11	0,11

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Palopo hanya memiliki satu Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera itupun harus melayani 9 kecamatan yang ada.

2.1.3.2.8.14. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Tabel 2.214
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PIK R/M (Buah)	23	46	22	66	81	93
Jumlah Kecamatan (Buah)	9	9	9	9	9	9
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (a/b)	2,56	5,11	2,44	7,33	9,00	10,33

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, Kota Palopo memiliki 23 Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa. Artinya pada tahun ini, untuk setiap kecamatan di Kota Palopo terdapat 2-3 (angka 2,56) wadah PIK Remaja dan Mahasiswa yang terbentuk. Pada tahun 2018, kondisinya jauh semakin baik. Sebab satu kecamatan, rata-rata memiliki 10 PIK R/M. Meningkatnya jumlah pusat informasi dan konseling di Kota Palopo diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan kepada remaja dan mahasiswa di Kota Palopo.

2.1.3.2.8.15. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Tabel 2.215
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	50	49	49	68	68	68
Jumlah PKB/PLKB	50	49	49	68	68	68
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.8.16. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Tabel 2.216
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	-	105	117	123	640	774
Jumlah anggota kelompok UPPKS	-	346	454	693	3102	3.791
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	-	30,35	25,77	17,75	20,63	20,42

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 anggota kelompok UPPKS, hanya ada 30 (pembulatan 30,35) anggota yang sudah ber KB Mandiri, sisanya sebanyak 70 anggota belum ber KB secara mandiri.

Kemudian pada tahun 2018, hanya ada 20 (pembulatan 20,42) anggota kelompok UPPKS yang sudah ber KB mandiri, sisanya sebanyak 80 anggota belum ber KB secara mandiri. Artinya sejak 2013-2018, kemandirian anggota kelompok UPPKS untuk ber KB menurun. Sebab dari 100 anggota UPPKS, jumlah anggota yang ber KB secara mandiri justru semakin menurun, dari 30 anggota pada tahun 2013 menjadi 20 anggota pada tahun 2018.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini pada tahun 2018, lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2013. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.1.3.2.8.17. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Tabel 2.217
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	48	48	48	48	48	48
Jumlah Kelurahan	48	48	48	48	48	48
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018, satu kelurahan di Kota Palopo telah dilayani satu orang petugas pembantu pembina KB Desa. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan KB dan keberhasilan program KB di setiap kelurahan di Kota Palopo.

2.1.3.2.8.18. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota

Tabel 2.218
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi
di gudang Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	-	-	1.121	5.330	9.688	11.830
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan tingkat Kota	-	-	260	551	1.331	1.599
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	-	-	4,31	9,67	7,28	7,39

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.8.19. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes

Tabel 2.219
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi
di Faskes Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	-	-	59.491	11.673	4.512	1.414
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan di Faskes	-	-	119,16	211,91	67,91	32,58
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	-	-	499.30	55.1	66.4	43,40

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.8.20. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Tabel 2.220
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	14	14	16	19	20	20
Jumlah Faskes dan jejaring	14	14	16	19	20	20
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018, semua fasilitas kesehatan dan jejaringnya seluruhnya telah bekerjasama dengan BPJS. Ini menunjukkan bahwa akses untuk mendapatkan pelayanan KBKR di Kota Palopo semakin terbuka.

2.1.3.2.8.21. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Tabel 2.221
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	9	48	48	145	427	465
Jumlah kelompok kegiatan	64	68	68	139	221	259
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	0,14	0,71	0,71	1,04	1,93	1,80

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.8.22. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Tabel 2.222
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	696	830	991	1.025	3.686	4.284
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	7.440	7.174	4.158	5.220	6.715	6.570
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	9,35	11,56	23,83	19,63	54,89	65,21

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.8.23. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.223

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	-	-	1.541.862.500	3.332.894.600	2.969.721.000	2.784.312.000
Jumlah APBD dan APBDes		--	4.098.597.000	5.112.260.200	3.542.370.000	3.356.961.000
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	-	-	37,62	65,19	83,83	82,94

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

2.1.3.2.9.1. Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan kapal laut (Orang)	2.057	769	122	445	314
Jumlah total arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.611.095	1.689.617	1.680.146	1.345.436	1.327.055

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

Data ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 – 2018, jumlah penumpang yang keluar masuk di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2014, ada sebanyak 1,611 juta orang, tahun 2018 hanya ada 1,327 juta penumpang angkutan umum. Salah satu faktor yang patut diduga menjadi penyebab penurunan ini, adalah cukup banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi udara.

2.1.3.2.9.2. Rasio Ijin Trayek

Tabel 2.225
Rasio Ijin Trayek
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Buah	3	3	3	3	3
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
c	Rasio	Per 100.000	2	2	2	2	2

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dalam mengakses wilayah di Kota Palopo, hanya tersedia 2 trayek angkutan umum bagi 100.000 penduduk Kota Palopo. Jumlah ini relative stagnan sampai dengan tahun 2018. Dari perspektif layanan angkutan umum, masyarakat akan semakin kesulitan mengakses beberapa spot wilayah di Kota Palopo jika ingin menggunakan angkutan umum massal. Sebab jumlah penduduk akan cenderung terus bertambah. Meski demikian saat ini, Kota Palopo memiliki alternative transportasi umum lainnya misalnya taksi, dan layanan transportasi daring/internet sepeda motor.

2.1.3.2.9.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Tabel 2.226
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	629	697	893	631	604

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Tabel 2.227
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.9.5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yang menunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan transportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencakup kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo.

Tabel 2.228
Persentase Layanan Angkutan Darat
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah angkutan darat	Unit	1.467	1.524	1.441	1.332	1.452
b.	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741
Persentase		%	0,091	0,090	0,085	0,099	0,109
Per 10.000 Penumpang			9,1	9,02	8,5	9,9	10,9

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014, untuk melayani 10.000 penumpang angkutan darat di Kota Palopo hanya tersedia 9 unit angkutan darat. Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi pada tahun 2018, dimana untuk 10.000 penumpang angkutan darat hanya tersedia 10-11 unit angkutan darat.

Artinya pada tahun 2014, 1 unit angkutan darat dalam setahun kurang lebih melayani 1.111 orang penumpang. Sementara di 2018, 1 angkutan darat hanya melayani kurang lebih 909-1000 orang penumpang per tahunnya.

2.1.3.2.9.6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2.229
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	Unit	160	170	140	180	41
b.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	1.468	1.524	1.441	1.332	1.452
Persentase		%	10,89	11,15	9,71	13,51	2,82

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dari 100 angkutan umum yang beroperasi di Kota Palopo hanya 10-11 kendaraan yang tidak memiliki KIR, artinya ada sebanyak 89-90 kendaraan yang sudah memiliki KIR. Pada tahun 2018, kondisi ini lebih baik, sebab hanya ada 2-3 kendaraan yang tidak memiliki KIR per 100 kendaraan. Meningkatnya kepemilikan KIR angkutan umum ini

mengindikasikan membaiknya tingkat kelayakan dan keamanan angkutan umum.

2.1.3.2.9.7. Pemasangan Rambu – Rambu

Tabel 2.230
Persentase Pemasangan Rambu - Rambu
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah pemasangan rambu – rambu pada tahun n	Buah	136	142	144	158	179
b.	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	Buah	165	205	220	250	254
Persentase		%	82,42	65,27	65,45	63,20	70,47

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014, pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas hanya 82,42%, kondisi ini masih jauh lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang hanya berada pada angka 63,20% tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2018 yang berada pada angka 70,47%. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan di Kota Palopo semakin menurun.

2.1.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.10.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Tabel 2.231
Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah KIM	Kelompok	0	0	0	30	30
b.	Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota Palopo	Kecamatan	9	9	9	9	9
Persentase		%	0	0	0	3,33	3,33

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa di Kota Palopo sampai dengan tahun 2018 KIM terbentuk sebanyak 30 lembaga. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi di Kota Palopo oleh masyarakat mulai melembaga dan dianggap penting.

2.1.3.2.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Tabel 2.232
Cakupan Layanan Telekomunikasi
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luas wilayah yang tercoverage	Km ²	198,02	205,44	212,87	212,87	222,47
b.	Luas wilayah keseluruhan	Km ²	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah (a/b)		0,75	0,80	0,83	0,86	0,90

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan cakupan wilayah Kota Palopo yang mampu diakses jaringan atau layanan telekomunikasi dari 75% menjadi 90%. Peningkatan luas coverage ini menunjukkan semakin besar wilayah Kota palopo termasuk penduduk Kota Palopo yang diakses oleh layanan telekomunikasi. Ini menunjukkan sebuah perkembangan yang cukup baik bagi keterbukaan informasi di sebuah daerah.

2.1.3.2.10.3. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Tabel 2.233

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah rumah tanggayang memiliki akses internet	KK	2.456	2.727	2.837	3.314	7.029
b.	Jumlah rumah tangga	KK	35.914	36.871	37.749	38.641	39.444
	Jumlah (a/b)		0,06	0,07	0,07	0,08	0,18

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan tahun 2018, dari 100 rumah tangga di Kota Palopo, rata-rata sebanyak 18 Rumah tangga telah mengakses internet. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya pada angka 6 Rumah Tangga saja. Ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan internet pada rumah tangga di Kota Palopo terus mengalami peningkatan, dan semamin mudahnya masyarakat mendapatkan berbagai sumber informasi.

2.1.3.2.10.4. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Tabel 2.234

Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	KK	11.349	12.167	13.967	15.456	16.383
b.	Jumlah rumah tangga	KK	35.914	36.871	37.749	38.641	39.444
	Jumlah (a/b)		0,32	0,33	0,37	0,40	0,42

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2019

Data diatas menunjukkan jumlah pengguna komputer pribadi per rumah tangga di Kota Palopo terus meningkat. Dari 100 rumah tangga yang ada pada tahun 2018 sebanyak 42 rumah tangga menggunakan komputer pribadi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2014 yang hanya pada angka 32 dari 100 rumah tangga yang

ada. Ini menunjukkan penggunaan komputer di masyarakat dan di Kota Palopo semakin memasyarakat.

2.1.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1.3.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2013, jumlah seluruh koperasi di Kota Palopo sebanyak 270 unit dan setiap tahun terus meningkat hingga mencapai 290 unit pada tahun 2018. Namun dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif terus mengalami penurunan. Permasalahan dari menurunnya persentase koperasi aktif, yakni adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT.

Tabel 2.235
Persentase Koperasi Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	196	197	201	204	204	206
b.	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	270	273	283	286	287	290
	Jumlah Koperasi Aktif	%	72,59	72,16	71,02	71,32	71,08	71,03

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.11.2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Tabel 2.236
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	1.351	1.375	1.398	1.923	1.978	2.103
b.	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	4.395	4.623	4.935	6.373	6.620	7.065
	Persentase	%	30,74	29,74	28,33	30,17	29,88	29,77

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.11.3. Persentase BPR/LKM Aktif

Yang dimaksud LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro, sementara BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM umumnya diakses oleh masyarakat di tingkat pedesaan atau wilayah yang selama ini sulit dijangkau atau menjangkau bank komersial. LKM biasanya berbentuk koperasi atau Perseroan terbatas.

2.1.3.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Tabel 2.237
Presentase Usaha Mikro dan Kecil
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	4.355	4.566	4.878	6.314	6.561	7.002
b.	Jumlah seluruh UKM	Unit	4.395	4.623	4.935	6.373	6.620	7.065
	Persentase	%	99,09	98,77	98,84	99,07	99,11	99,11

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sejak 2013, usaha mikro dan kecil mendominasi kondisi UMKM yang ada di Kota Palopo. Oleh karenanya program dan kegiatan UMKM akan lebih banyak dirasakan manfaatnya jika difokuskan pada Usaha Mikro dan Usaha kecil yang ada di Kota Palopo.

2.1.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

2.1.3.2.12.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Berikut adalah tabel jumlah investor berskala nasional di Kota Palopo 2013-2018. Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Tabel 2.238
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	107	95	122	147	129

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.12.2. Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.239
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Buah)	-	107	95	122	147	129
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (Juta)	0	141.276,30	96.603,15	268.331,63	382.322,26	220,859

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.12.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.240
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan (*)	Orang	19,560	20,490	21,735	28,337	28,377	30.140
b.	Jumlah seluruh PMDN (**)	Juta	164,222.85	141,276.30	96,603.15	268,331.63	382,322.26	220,859
c	Rasio per 100 Juta	Angka	11.91	14.50	22.50	10.56	7.42	13.65

Sumber Data : (**) Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2019, (*) Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2013 untuk 100 juta nilai PMDN, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 11-12 orang. Sementara pada tahun 2018 untuk nilai PMDN yang sama yakni 100 juta hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13-14 orang.

2.1.3.2.12.4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.241
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rupiah	54.763.412.380	(22.946.554.382)	(44.673.143.956)	1.717.284.282.177	113.990.629.638	220.859.000.000
b.	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rupiah	109.459.438.170	164.222.850.550	141.276.296.168	96.603.152.212	268.331.634.389	382.322.260.000
	Persentase	%	50	(16)	(32)	178	42,48	57.77

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2018 dan Data Potensi Kota Palopo Tahun 2014 & 2015

Berdasarkan tabel di atas, nilai realisasi PMDN mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni mencapai 178%.

2.1.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

2.1.3.2.13.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Tabel 2.242
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	OKP	148	148	151	151	151

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
b.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	OKP	218	218	218	218	218
	Persentase	%	67,9	67,9	69,3	69,3	69,3

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase organisasi Pemuda yang aktif mengalami stagnan.

2.1.3.2.13.2. Persentase Wirausaha Muda

Tabel 2.243

Persentase Wirausaha Muda Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah wirausaha muda	Kelompok	120	120	134	134	134
b.	Jumlah seluruh wirausaha	Kelompok	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	Persentase	%	1,56	1,56	1,75	1,75	1,75

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 1.000 kelompok wirausaha, terdapat 175 wirausaha muda.

2.1.3.2.13.3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Tabel 2.244

Persentase Pembinaan Olahraga Kota Palopo Tahun 2014– 2108

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	0	0	10	10	12
b.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	26	26	26	26	26
	Persentase	%	0	0	38,46	38,46	46,15

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.13.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Tabel 2.245

Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	27	27	27	27	27
b.	Jumlah seluruh pelatih	Orang	83	83	83	83	83
	Persentase	%	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.13.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Tabel 2.246

Persentase Pembinaan Atlet Muda Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018

a.	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	0	0	30	30	36
b.	Jumlah seluruh atlet pelajar	Orang	170	170	170	170	170
	Persentase	%	0	0	17,6	17,6	21,2

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.13.6. Jumlah Atlet Berprestasi

Tabel 2.247

**Persentase Atlet Berprestasi
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	7	10	36	7	7

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.13.7. Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2.248

**Persentase Prestasi Olahraga
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	7	10	36	7	7

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.14. Bidang Urusan Statistik

2.1.3.2.14.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi

Tabel 2.249

**Ketersediaan Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.14.2. Buku “Palopo Dalam Angka”

Tabel 2.250

**Ketersediaan Buku “Palopo Dalam Angka”
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Buku Palopo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.14.3. Buku “PDRB”

Tabel 2.251

**Ketersediaan Buku “PDRB”
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada`	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.15. Bidang Urusan Persandian

2.1.3.2.15.1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan informasi pada tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat daerah Kota Palopo. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan bahwa pengamanan informasi dari aspek jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan informasi pada pemerintah Kota Palopo, lebih baik.

Tabel 2.252

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	-	22	22	30	35	38
b.	Jumlah total perangkat daerah	OPD	41	41	40	40	49	49
	Persentase	%	-	55	55	75	71,42	77,55

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan

2.1.3.2.16.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel 2.253

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	10	12	15	18

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2019

Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan dan pengakuan suatu identitas budaya. Festival seni dan budaya juga merupakan upaya untuk mempertahankan nilai – nilai seni budaya dan nilai tradisional.

2.1.3.2.16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Tabel 2.254

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	21	21	148	148	148
b.	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	Buah	22	21	149	149	149
	Persentase	%	95,45	100	99,32	99,32	99,32

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.16.3. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Tabel 2.255

Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	3	1	1	0	0

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.16.4. Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Tabel 2.256

Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	23	37	51	51	51

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan

2.1.3.2.17.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.257

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	10.567	10.833	13.274	13.650	14.456
b.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	138.172	141.282	144.650	147.955	147.300
	Persentase	%	7,65	7,67	9,18	9,23	9,81

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2014, hanya 7,65 % masyarakat yang wajib baca yang pernah memanfaatkan jasa layanan perpustakaan daerah Kota Palopo. Namun persentasenya terus meningkat sampai pada tahun 2018 persentasenya berada pada angka 9,81 % atau tumbuh kurang lebih dua persen periode 2014 – 2018

2.1.3.2.17.2. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Tabel 2.258

**Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	394	624	308	1.232	1.191
b.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	1.087	1.776	895	2.632	2.360
	Persentase	%	36,25	35,14	34,41	46,81	50,46

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.17.3. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Tabel 2.259

**Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah perpustakaan	Jiwa	205	205	205	208	208
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
c	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Per 1000	1.24	1.21	1.19	1.18	1,16

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sejak 2014 – 2018, rasio jumlah perpustakaan yang di Kota Palopo terhadap jumlah penduduk relative stagnan. Jika tahun 2014, untuk 1000 penduduk tersedia 1 unit perpustakaan, kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2018.

2.1.3.2.17.4. Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.260

**Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018**

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan per tahun	880	902	1106	1137	1204

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.17.5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Tabel 2.261

**Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	394	624	308	1232	1191

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.17.6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Tabel 2.262
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki
Sertifikat Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	3	3	3	3	3
b.	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	3	3	3	3	3
	Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.2.18. Bidang Urusan Kearsipan

2.1.3.2.18.1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Tabel 2.263
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip
Secara Baku Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	OPD	1	1	1	1	8
b.	Jumlah perangkat daerah	OPD	41	40	40	49	49
	Persentase	%	2,43	2,5	2,5	2,04	16,33

Sumber Data : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2019

Sampai dengan tahun 2018, sudah 8 Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku. Hal ini disebabkan oleh tenaga fungsional di perangkat daerah belum ada dan kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang berada di perangkat daerah.

2.1.3.2.18.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Tabel 2.264
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	6	7	6	7	6

Sumber Data : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Bidang Urusan Pariwisata

2.1.3.3.1.1. Kunjungan Wisata

Tabel 2.265
Persentase Kunjungan Wisata
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se – Kota Palopo	Orang	86.955	110.078	95.918	99.481	106.211

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
b.	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se – Kota Palopo	Orang	80.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	Persentase	%	108,69	122,31	100,97	99,48	101,15

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.3.1.2. Lama Kunjungan Wisata

Tabel 2.266

Lama Kunjungan Wisata Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rata – rata kunjungan wisata dalam satu tahun	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama kunjungan per orang wisatawan di Kota Palopo adalah selama dua hari. Jika dibandingkan terhadap data jumlah kunjungan wisata di Kota Palopo, pada tahun 2018 dimana terdapat 106.211 orang wisatawan di Kota Palopo. Artinya rata-rata dalam sehari selama tahun 2018, terdapat 290 orang yang menjadi wisatawan di Kota Palopo.

2.1.3.3.1.3. PAD Sektor Pariwisata

Tabel 2.267

Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	PAD sektor pariwisata	Rupiah	3,162,646,826	3,832,058,249	4,622,441,398	5,879,898,891	7,027,772,114
b.	Total PAD	Rupiah	81.646.676.135,53	92.277.283.805,00	134.110.076.220,35	167.310.913.609,15	139.278.661.859,07
c	Persentase	%	3.87	4.15	3.45	3.51	5,05

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan kontribusi PAD sektor Pariwisata Kota Palopo cenderung meningkat. Jika pada tahun 2014 sebesar 3,87%, pada tahun 2018 hanya sebesar 5.05%.

Tahun 2018, untuk 1 (satu) milyar PAD, rata-rata berkontribusi sebesar 50,45 Juta dari sektor pariwisata, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun 2014, dimana untuk 1 (satu) milyar PAD, sebanyak 38.73 Juta merupakan kontribusi PAD sektor Pariwisata. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Kota Palopo cukup menggeliat untuk diakselerasi dalam mendongkrak PAD Kota Palopo di tahun berikutnya.

2.1.3.3.2. Bidang Urusan Pertanian

2.1.3.3.2.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Tabel 2.268
Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)						
	Padi	28,367	18,895	28,630	30167	32,444	33,259
	Jagung	5,575	5,857	4,737	6,303	5086	4,988
	Ubi Kayu	224	281	177	70.4	70	39,20
	Ubi jalar	112.88	101	13	18.94	4.55	1,12
	Sagu	85.2	70.61	51.33	33.04	15.59	1,67
b.	Luas panen tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)						
	Padi	5,034	3,481	5,098	5,128	5172	5,200
	Jagung	1,100	1,161	713	928	753	684
	Ubi Kayu	10	14	8	7	1	1
	Ubi Jalar	9	8	1	1	0	0
	Sagu	244.31	154.81	110.5	112.83	289.75	298,84
c	Produktifitas (Ton/Ha)						
	Padi	5.64	5.43	5.62	5.88	6.27	6,40
	Jagung	5.07	5.04	6.64	6.79	6.75	7,09
	Ubi Kayu	22.40	20.07	22.13	10.06	70	79,52
	Ubi jalar	12.54	12.63	13.00	18.94	4.55	2,95
	Sagu	0.35	0.46	0.46	0.29	0.05	0,01

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa produktifitas tanaman padi dan jagung sebagai komoditas utama di Kota Palopo menunjukkan produktifitas yang meningkat. Pada tahun 2013, hanya dihasilkan 5,64 Ton padi per ha, tahun 2018, produktifitas padi menjadi 6.40 Ton/Ha, jagung 7,09 Ton/Ha, ubi kayu 79,52 Ton/Ha, Ubi Jalar 2.95 Ton/Ha dan Sagu sebanyak 0.01 Ton/Ha.

2.1.3.3.2.2. Cakupan Bina Kelompok Petani

Tabel 2.269
Persentase Pembinaan Kelompok Tani
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	Klpk	176	384	364	319	222
b.	Jumlah kelompok tani	Klpk	407	407	407	407	438
	Persentase	%	43,24	94,35	89,43	78,38	50,68

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan cakupan bina kelompok tani periode 2013-2018, terbesar pada tahun 2014. Namun setelah itu cenderung menurun dan mengalami titik terendah pada tahun 2013 dan 2017. Ini seiring dengan semakin banyak jumlah kelompok tani yang ada,

sementara kemampuan anggaran pemerintah Kota Palopo yang makin terbatas.

2.1.3.3.3. Bidang Urusan Kehutanan

2.1.3.3.3.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Tabel 2.270

**Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018**

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	140	3,547.14	-	-	-	
b.	Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	13.135,79	9.885,79	8.931,77	8.931,77	-	
	Persentase	%	1.07	35.88				

Sumber Data : Dinas Kehutanan Kota Palopo, Data SIPD Kota Palopo 2019

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, luas hutan dan lahan yang direhabilitasi sebanyak 140 Ha, atau sekitar 1.07% dari total luas wilayah hutan dan lahan kritis yang ada. Kemudian pada tahun 2014, luas lahan yang direhabilitasi sebanyak 3547,14 Ha atau sekitar 35.88% dari total luas hutan dan lahan kritis yang ada.

2.1.3.3.3.2. Kerusakan Kawasan Hutan

Tabel 2.271

**Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018**

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luas kerusakan kawasan hutan	Ha						
b.	Luas kawasan hutan (*)	Ha	13.135,79	9.885,79	8.931,77	8.931,77	-	
	Persentase	%						

Sumber Data : (*) Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

2.1.3.3.3.3. Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Tabel 2.272

**Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian
Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018**

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Luas kawasan hutan lindung	Ha	8.297,58	8.297,58	7.328,76	7.328,76	-	-

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
b.	Total luas kawasan hutan	Ha	13.135,79	9.885,79	8.931,77	8.931,77	-	-
C	Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung	%	63.17	83.93	82.05	82.05	-	-

Sumber Data : Palopo Dalam Angka, BPS Kota Palopo 2019

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2016, 82,05% luas kawasan hutan yang ada di Kota Palopo merupakan hutan lindung. Persentasenya sejak 2013 meningkat disebabkan adanya pengurangan luas kawasan hutan berdasarkan fungsi yang lain. Kawasan hutan yang luasnya berkurang adalah hutan konversi dimana pada tahun 2013 terdapat 3250 Ha, namun sejak 2014, hutan sesuai fungsi ini, sudah tidak ada lagi di Kota Palopo.

2.1.3.3.4. Bidang Urusan Energi dan Sumber daya Mineral

2.1.3.3.4.1. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin

Adalah indikator yang menggambarkan cakupan wilayah penambangan liar yang tertibkan. Semakin tinggi persentase indikator ini, semakin luas wilayah penambangan liar yang tertibkan. Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pertambangan telah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulsel.

2.1.3.3.5. Bidang Urusan Perdagangan

2.1.3.3.5.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Tabel 2.273
Nilai Ekspor Bersih
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Nilai ekspor	Juta	1.268.962	1.368.817	1.549.986	1.746.139	2.112.272	2.357.785.97
b.	Nilai impor	Juta	1.784.173	2.061.442	2.342.937	2.580.805	2.914.631	3.033.366.30
C	Nilai ekspor bersih (a-b)	Juta	(515.211)	(692.625)	(792.951)	(834.666)	(802.359)	(945.580)

Sumber Data : Dinas Perdagangan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa ekspor kota Palopo lebih kecil dibandingkan dengan impor yang masuk ke Kota Palopo. Ini menunjukkan bahwa Kota Palopo menjadi market yang cukup potensial bagi sejumlah komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palopo. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan dan potensi bagi para pelaku usaha di Kota Palopo untuk memenuhi aneka kebutuhan masyarakat Kota Palopo yang selama ini masih diimpor dari luar Kota Palopo.

2.1.3.3.5.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok pedagang/usaha informal di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas usahanya. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan pedagang/usaha informal yang ada.

Pedagang besar adalah pedagang yang kegiatannya membeli barang dalam jumlah yang besar dan menjualnya kembali dengan jumlah yang besar. Pedagang Menengah adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada para pedagang kecil dalam jumlah sedang atau kecil. Pedagang Kecil adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah sedang dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Termasuk didalamnya pedagang mikro (BPS).

Data menunjukkan bahwa jumlah pedagang sepanjang tahun 2015-2017 di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2015 sebanyak 6.853 pada tahun 2017 sebanyak 7.756 pedagang. Jumlah ini merupakan akumulasi pedagang besar kecil maupun menengah.

Sesuai klasifikasi usahanya, jumlah pedagang kecil juga meningkat. Jika pada tahun 2015 hanya terdapat 5.930 pedagang kecil pada tahun 2017 menjadi sebanyak 6.886 pedagang. Jumlah pedagang menengah berkurang dari 680 usaha pada tahun 2015 menjadi 538 pedagang pada tahun 2017.

2.1.3.3.6. Bidang Urusan Perindustrian

2.1.3.3.6.1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tabel 2.274

**Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018**

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok	-	-	71	11	0	0
b.	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok	53	58	81	83	117	130
c	Persentase	%	-	-	87,65	13,25	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun 2018

Angka dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa cakupan binaan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2017 menurun. Jika 2015 ada sebanyak 87,65% kelompok yang menerima bantuan, tahun 2016 hanya sebanyak 13,25% dan tahun 2017 dan 2018 tak ada bantuan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo.

Bantuan bagi kelompok binaan pada tahun 2015 dan 2016 diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

2.1.3.3.7. Bidang Urusan Transmigrasi

2.1.3.3.7.1. Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya. Indikator ini untuk mengetahui tingkat partisipasi dan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk melaksanakan transmigrasi.

Suatu penyelenggaraan transmigrasi dapat dikatakan berhasil jika memenuhi syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk yang ditransmigrasikan ke daerah lain, tiap tahun lebih banyak daripada pertambahan penduduk daerah yang ditinggalkan. Jika di daerah yang ditinggalkan itu tekanan penduduk sudah berangsur-angsur berkurang dan orang-orang yang ditransmigrasikan itu memperoleh tingkat hidup yang lebih baik. Jika antara pendatang baru (transmigran) dan penduduk yang didatangi dapat hidup berdampingan, dapat terjadi perpaduan kebudayaan, sehingga terhindar dan perasaan kesukuan di antara mereka.

2.1.3.3.8. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

2.1.3.3.8.1. Produksi Perikanan

Tabel 2.275
Persentase Produksi Perikanan
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah produksi ikan	Ton	10.821,50	13.767,20	14.861,76	16.951,90	18.387,50
b.	Target daerah	Ton	12.566,00	13.822,00	15.205,00	16.347,76	18.397,00
C	Persentase	%	86,12	99,60	97,74	103,70	99,95

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perikanan Tahun 2014 -2018 mampu memenuhi target produksi perikanan daerah. Ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah tersebut sangat baik. Produksi perikanan Kota Palopo cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun dan tahun 2017 menempati angka produksi tertinggi sepanjang periode 2014 – 2018.

2.1.3.3.8.2. Konsumsi Ikan

Tabel 2.276
Persentase Konsumsi Perikanan
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah konsumsi ikan	Kg	35	57	49,83	53,54	58,34
b.	Target daerah	Kg	43,64	46,7	50	53,47	56,01

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
c	Persentase	%	80,20	122,06	99,66	100,13	104,16

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.3.8.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Tabel 2.277

Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	Klpk	28	35	7	4	15
b.	Jumlah kelompok nelayan	Klpk	145	162	123	127	134
	Persentase	%	19,31	21,60	5,69	3,15	11,19

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan bina kelompok nelayan oleh Pemerintah Kota Palopo dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan. Jika tahun 2014 pada angka 19,31%, pada tahun 2018 pada angka 11,19%. Yang menarik, kondisi ini berbanding terbalik dengan angka produksi perikanan yang justru jauh meningkat sejak 2014 sampai dengan 2018. Ini menggambarkan kemungkinan mulai menguatnya sikap kemandirian para pelaku usaha budidaya perikanan yang tidak terlalu berharap bantuan pemerintah, tetapi tetap mampu menunjukkan kinerja produksi yang menggembirakan.

2.1.3.3.8.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Tabel 2.278

Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	8.116,12	9.514,20	11.146,20	12.713,92	13.338,29
b.	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	10.821,50	13.767,20	14.861,76	16.951,90	18.397,50
	Persentase		75,00%	69,11%	75,00%	75,00%	72,54%

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi perikanan kelompok nelayan di Kota Palopo sejak 2014 – 2018 relatif stabil dan stagnan.. Sehingga tetap ada peluang masuknya komoditas perikanan lainnya dari luar Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan perikanan yang fokus pada peningkatan kontribusi perikanan kelompok nelayan terhadap produksi ikan daerah.

2.1.3.3.8.5. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator ini untuk mengetahui luas kawasan lindung perairan terhadap seluas seluruh wilayah perairan yang menjadi wilayah sebuah daerah. Semakin tinggi rasio luas kawasan lindung perairan sebuah daerah, semakin tingginya aspek kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan tersebut. Sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan wilayah kelautan menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

2.1.3.3.8.6. Nilai Tukar Nelayan

Adalah Perbandingan antara indeks harga yang diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan > 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami surplus. b. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan $= 100$: berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami impas/break even. c. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan < 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada periode sebelumnya.

2.1.3.4. Fokus Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

2.1.3.4.1.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD Kota Palopo diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek.

Tabel 2.279
Ketersediaan Dokumen RPJPD
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Palopo Tahun 2005 – 2025

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah lima tahunan secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RPJMD berlaku selama lima tahunan. Daerah yang memiliki dokumen RPJMD yang telah perdakan, menunjukkan

keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas.

Tabel 2.280
Ketersediaan Dokumen RPJMD
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 - 2018
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RKPd belaku satu tahun. Daerah yang memiliki dokumen RKPd yang telah perwalkan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas.

Tabel 2.281
Ketersediaan Dokumen RKPd
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Ada/Tidak	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Perwal No. 15 Tahun 2013	Perwal No. 12 Tahun 2014	Perwal No. 22 Tahun 2015	Perwal No. 12 Tahun 2016	Perwal No. 35 Tahun 2017

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.1.4. Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Adalah indikator yang mengindikasikan tersedianya tujuan dan sasaran serta strategis pembangunan kewilayahan sebuah daerah. Daerah yang memiliki dokumen RT RW yang telah diperdakan, dianggap telah memiliki komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan peduli pada isu isu lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 2.282
Ketersediaan Dokumen RTRW
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Palopo Tahun 2012 – 2032

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah pada perencanaan strategis (lima tahunan) dan perencanaan operasional (tahunan). Angka 100 persen menunjukkan tingkat kesesuaian dan keselarasan dokumen RPJMD dan RKPD sangat baik, yang mencerminkan adanya komitmen dan konsistensi pada apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu.

Tabel 2.283
Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	190	214	222	192	213
b.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	222	237	235	243	231
	Persentase	Persen	86,36	90,29	94,46	79,01	92,20

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah menganggarkan apa yang direncanakan dan merencanakan apa yang dianggarkan. Indikator ini juga menggambarkan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja daerah. Semakin tinggi kesesuaian RKPD dengan APBD semakin baik perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.284
Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah program APBD tahun berkenaan	Buah	189	188	182	182	158
b.	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	190	214	222	192	213
	Persentase	%	99,47	87,85	81,98	94,79	74,17

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.1.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah untuk menselaraskan rencana penggunaan tata ruang termasuk tujuan, sasaran dan program penataan ruang dengan rencana pembangunan strategis yang ada. Semakin besar tingkat kesesuaian perencanaan

strategis dengan tujuan, sasaran dan program di RT RW semakin baik pengelolaan tata ruang di sebuah daerah.

2.1.3.4.2. Bidang Urusan Keuangan

2.1.3.4.2.1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Adalah indikator yang mengindikasikan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi yang ada. Clean and clear adalah predikat pengelolaan keuangan daerah tertinggi, disusul Wajar Tanpa Pegecualian, Wajar dengan Pengecualian dan terendah dalam Disclaimer.

Tabel 2.285
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
a.	Hasil opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.2.2. Persentase SILPA

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

SILPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Tabel 2.286
Persentase SILPA
Kota Palopo Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
a.	Total SILPA	59.142.126.892,80	22.836.223.879,74	1,151,996,965.34
b.	Total APBD	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89
Persentase		5,15	2,25	0.12

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2019, audited

2.1.3.4.2.3. Persentase SILPA Terhadap APBD

SILPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Biasanya, nilai SILPA lebih besar atau sama dengan Nol. Hal ini disebabkan karena Pemerintah memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk mengalami kebangkrutan. Nilai SILPA dapat juga menunjukkan uang yang tersisa

pada Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Nilai Investasi Jangka Pendek pada saat akhir tahun anggaran.

Nilai SiLPA yang baik, tergeantung dari sumber atau penyebab terjadinya SiLPA tersebut. SiLPA yang baik bersumber dari pelampauan target pendapatan dan efesiensi atas belanja daerah, sedangkan SiLPA yang kurang baik bersumber dari kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana atau kegiatan yang telah terlaksana namun belum sempat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Untuk lebih jelasnya, perkembangan SiLPA Kota Palopo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.287
Persentase SiLPA Terhadap APBD
Kota Palopo Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
a.	Total SiLPA	59.142.126.892,80	22.836.223.879,74	19,273,203,750.50
b.	Total APBD	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89
Persentase		5,15	2,25	1.96

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.2.4. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang tertuang dalam APBD daerah. Semakin tinggi atau banyak program APBD yang tidak dilaksanakan, menunjukan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang belum baik.

Tabel 2.288
Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan		4	2	1	1	2	2
b.	Total program dalam APBD		332	355	349	346	359	321
Persentase			1,2	0,6	0,3	0,3	0,6	0,62
a.	Jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan		17	16	13	10	15	15
b.	Total kegiatan dalam APBD		1298	1436	1429	1361	1414	1.437
Persentase			1,31	1,1	3,7	0,7	1,06	1,04

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.2.5. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang pendidikan yang semakin mendekati angka 20% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU

mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor pendidikan.

Tabel 2.289
Persentase Belanja Pendidikan (20%)
Kota Palopo Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
a.	Jumlah belanja bidang urusan pendidikan (Rp.)	255.348.088.498	181.192.586.801	179,786,127,789.00
b.	Total APBD ((Rp.)	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89
	Persentase	22.22	17.84	18.29%

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang Pendidikan di Kota Palopo cenderung menurun. Jika pada tahun 2016 berada pada angka 22,22%, tahun 2018 hanya pada angka 18,29%.

2.1.3.4.2.6. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang kesehatan yang semakin mendekati angka 10% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor kesehatan.

Tabel 2.290
Persentase Belanja Kesehatan (10%)
Kota Palopo Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
a.	Jumlah belanja bidang urusan kesehatan(Rupiah)	214.226.652.392	248.704.751.533	258,102,101,672.28
b.	Total APBD (Rupiah)	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89
	Persentase	18.64	24.48	26.26%

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang kesehatan di Kota Palopo pada tahun 2018 telah melebihi angka 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo sangat komitmen terhadap pembangunan bidang kesehatan di Kota Palopo.

2.1.3.4.2.7. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah mewujudkan APBD yang lebih pro rakyat dan berorientasi pada pembangunan daerah dan masyarakat. Persentase belanja langsung yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa belanja lebih banyak diarahkan pada pembangunan daerah bukan pada pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah saja.

Tabel 2.291
Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung
Dengan Belanja Tidak Langsung
Kota Palopo Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
a.	Jumlah belanja langsung (Rupiah)	719.186.393.030	651.615.212.524	565.990.971.307.28
b.	Total APBD	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982.957.077.365.89
	Persentase	62.59	64.15	57.6%
a.	Jumlah belanja tidak langsung (Rupiah)	429.944.381.674	364.178.985.490	416.966.106.058.61
b.	Total APBD (Rupiah)	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982.957.077.365.89
	Persentase	37.41	35.85	42.42%

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan Pemerintah Kota Palopo setiap tahunnya mampu mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk belanja program dan kegiatan perangkat daerah.

2.1.3.4.2.8. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Tabel 2.292
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa
Kota Palopo Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
a.	Jumlah belanja bagi hasil Kab/Kota/Desa	Rupiah	23.386.791.194	18.220.349.272	56.476.634.835.00
b.	Total APBD	Rupiah	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982.957.077.365.89
	Persentase		2,04	1,79	5.75%

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2019

Data dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase dana bagi hasil yang diterima pemerintah Kota Palopo sepanjang 2016-2018 meningkat. Jika tahun 2016 sebesar 2.04% tahun 2018 hanya pada angka 5,75%.

2.1.3.4.2.9. Penetapan APBD

Tabel 2.293
Ketepatan Waktu Penetapan APBD
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
2.1.3.4.3.1. Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Tabel 2.294

**Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari/JamPelajaran	39 Hari/ 384 JP	97 Hari/ 867 JP	97 Hari/ 867 JP	103 Hari/ 893 JP	103 Hari/ 893 JP	103 Hari/ 893 JP

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.3.2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat formal. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama aparatur sipili negara di daerah.

Tabel 2.295
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	71	108	31	34	42	36
2.	Jumlah total ASN	Orang	5.268	5.233	5.660	4.794	4.672	4.553
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,3	2,1	0,5	0,7	0,9	0,79

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Palopo dalam upaya meningkatkan kapasitas aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan sejak 2013-2018 mengalami fluktuatif. Jika pada tahun 2013 ada sebanyak 1,3% aparatur yang didiklat, pada tahun 2018 hanya ada sekitar 0,79%.

2.1.3.4.3.3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Tabel 2.296
Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Bidang/Urutan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Orang	231	245	291	281	286	297
2.	Jumlah total jabatan	Orang	969	944	961	927	977	979
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	23,8	26,0	30,3	30,3	29,30	30,34

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan sampai tahun 2018, masih ada 69,66% pejabat struktural Kota Palopo yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Olehnya Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dengan lembaga penyelenggara.

2.1.3.4.3.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang menunjukan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan roda pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sekaligus mengukur komitmen daerah dalam menegakan perda tentang susunan organisasi dan perangkat daerah Kota Palopo yang berlaku pada masanya.

Tabel 2.297

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Bidang/Urutan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah		35	32	36	34	33	35

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.3.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.298

Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Bidang/Urutan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah		947	919	938	900	949	951

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah jabatan administrasi pada pemerintah Kota Palopo sejak 2013-2018 bertambah sebanyak 2 jabatan dari 947 jabatan pada tahun 2013 menjadi 951 jabatan administrasi pada tahun 2018.

2.1.3.4.3.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.299
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi
Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Bidang/Urutan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah		3.012	2.951	3.021	2.261	2.217	2.210

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada lingkup Pemerintah Kota Palopo sejak 2013-2018 terus berkurang. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh perpindahan kewenangan tenaga fungsional guru terutama pada tingkat pendidikan menengah pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pendidikan Menengah dikelola oleh Pemerintah provinsi. Sehingga tenaga guru pada pendidikan menengah juga beralih ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jika dibandingkan terhadap seluruh pegawai Kota Palopo, proporsi tenaga fungsional tertentu Kota Palopo juga terus menurun. Pada tahun 2018, Kota Palopo hanya memiliki 47,45% pemangku jabatan fungsional tertentu. Sementara di 2013 yang berada pada angka 56,71%, 2014 56,67%, 2015 53,57%, dan 2016 sebanyak 47,16%.

2.1.3.4.4. Bidang Urutan Penelitian dan Pengembangan

2.1.3.4.4.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Tabel 2.300
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Bidang/Urutan	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Prog	20	20	11	11	11
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Prog	22	22	11	11	11
	Persentase	%	90,9	90,9	100	100	100

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.301
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Bidang/Urutan	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti		16	15	17	4	4
2.	Jumlah kelitbangan dalam Renja perangkat daerah		20	20	20	11	11
	Persentase	%	80	75	85	36,36	36,36

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.4.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam menerapkan inovasi secara terus menerus dalam rangka peningkatan kinerja. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin besarnya komitmen perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.4.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Tabel 2.302
Persentase Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan		-	6	8	6	12	14
2.	Jumlah inovasi yang diusulkan		-	23	23	23	23	23
	Persentase	%	-	26,08	34,78	26,08	52,10	60,87

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.5. Bidang Urusan Pengawasan

2.1.3.4.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Tabel 2.303
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Kasus	548	374	326	166	260	202
2.	Jumlah total temuan	Kasus	568	421	461	399	456	434
3	Persentase	%	96,48	88,4	70,72	41,60	57,02	46,54

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti temuan di lingkup Pemerintah Kota Palopo justru semakin menurun. Jika pada tahun 2013, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada angka 96,48%, pada tahun 2018, temuan yang ditindaklanjuti hanya 46,54%. Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo ke depannya.

2.1.3.4.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Tabel 2.304
Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	14	21	5	3	2	0
2.	Jumlah total ASN	Orang	5.311	5.207	5.639	4.794	4.672	4.544
3	Persentase	%	0,26	0,40	0,09	0,06	0,04	0,00

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan dilihat dari jumlah kasus dan persentase, tingkat pelanggaran pegawai di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 menurun. Jika pada tahun 2013 sebanyak 14 orang pegawai (0,26%) dikenai sanksi, pada tahun 2017, hanya 2 orang yang

dikenai sanksi atau sebesar 0,04% dari total jumlah pegawai Kota Palopo. Ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pegawai Kota Palopo dari tahun ke tahun semakin membaik.

2.1.3.4.5.3. Jumlah Temuan BPK

Tabel 2.305
Jumlah Temuan BPK
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Temuan BPK	22	18	15	9	19	16

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2013, jumlah temuan kasus di Kota Palopo oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menurun sampai tahun 2016, namun tahun 2017 mengalami peningkatan dan tahun 2018 kembali menurun. Kondisi ini mencerminkan bahwa salah satu fungsi Inspektorat Kota Palopo yakni melaksanakan supervisi, berjalan semakin baik sehingga perangkat daerah lebih baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan asetnya.

2.1.3.4.6. Bidang Urusan Sekretariat Dewan

2.1.3.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat – Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Tabel 2.306
Tersedianya RKT Pada Alat – Alat Kelengkapan DPRD
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.6.2. Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tabel 2.307
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD
dan RKPD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja dprd untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (3)	Ada (3)

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2019

2.1.3.4.6.3. Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel 2.308
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam
Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2018

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah.

2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah total biaya pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang ada.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.309
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Kota Palopo Tahun 2016 -2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
a	Total Pengeluaran Rumah Tangga*	Juta	3.388.893.32	3.721.826.97	4,116,117.10
b	Jumlah Rumah Tangga (*)	RT	37,749	38,641	39444
c	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta	89.774	96.318	104.353

Sumber Data : Diolah BPS Kota Palopo 2019

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah konsumsi rumah tangga di Kota Palopo sejak 2013-2018 meningkat. Jika pada tahun 2013 hanya berada pada angka 67,66 juta per tahun per rumah tangga, tahun 2018 meningkat menjadi 104,35 juta per tahun per rumah tangga.

2.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga.

Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

2.1.4.1.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya (pangan dan non pangan) dalam periode waktu tertentu. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar belanja dan konsumsi non pangan, semakin besar tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.310
Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita
Kota Palopo Tahun 2016 -2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
a.	Pengeluaran Makanan	Juta	428.06	529.701	623,607
b.	Pengeluaran Non Makanan	Juta	448.87	570.813	662,289
c	Total Pengeluaran Konsumsi	Juta	876.93	1.100.514	1,285,896
d	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	%	51,19%	51,87%	51.50%

Sumber Data : BPS Palopo, Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat dan Palopo Dalam Angka 2019

Data diatas menunjukkan bahwa konsumsi non pangan per kapita masyarakat Kota Palopo sepanjang tahun 2014-2018 selalu berada di atas angka konsumsi pangannya. Artinya sebagian besar pendapatan masyarakat di Kota Palopo sepanjang kurun waktu tersebut di atas dipakai lebih banyak untuk belanja non pangan. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palopo sudah relatif cukup baik.

2.1.4.2. Produktivitas Total Daerah

Produktifitas total daerah diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor lapangan usaha dengan jumlah angkatan kerja yang ada dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Tabel 2.311
Produktivitas Total Daerah
Kota Palopo Tahun 2016 –2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
a.	Jumlah Nilai Tambah Sektor (= Jumlah PDRB (Hb/Juta)	Juta	5.906.480.42	6,550,688.67	7,285,142,35
B	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	67,504	75,563	75,829
C	Produktifitas Total Daerah	Juta/Thn	87.5	86.69	96.67

Sumber Data : Diolah dari Buku PDRB Kota Palopo 2019, diolah

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, seorang tenaga kerja yang bekerja hanya menghasilkan nilai tambah produk sebesar 63,44 juta/tahun atau setara dengan 5,28 juta/bulan, namun pada tahun 2018, nilainya menjadi 96,67 juta/tahun/tenaga kerja atau setara dengan 8,01 juta/bulan/tenaga kerja.

Ini menunjukkan adanya peningkatan produktifitas tenaga kerja untuk menghasilkan nilai tambah produk yang ada di Kota Palopo. Produktifitas tenaga kerja tertinggi di Kota Palopo terjadi pada tahun 2016, dimana dihasilkan nilai tambah produk senilai 87.50 juta/tahun/tenaga kerja. Peningkatan kompetensi dan skil tenaga kerja diperlukan untuk meningkatkan produktifitas daerah.

2.1.4.3. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Tabel 2.312
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2016 –2017

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017*	2018(**)
1	Jumlah Ekspor (Juta)	1.746.139	2.112.272	2,357,785.97
2	Jumlah Impor (Juta)	2.580.805	2.914.631	3,303,366.30
3	Jumlah Ekspor + Impor (Juta)	4.326.944	5.026.904	5,661,152.27
4	Jumlah PDRB (Juta)	5.906.480,42	6.550.688,67	7,285,142.35
5	Rasio Ekspor + Impor (%)	73,26%	76,74%	77.71%

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo 2018, (*) Sementara, (**) Sangat Sementara

Angka dalam tabel juga menunjukkan bahwa setiap tahun ekonomi di Kota Palopo semakin terbuka yang ditandai dengan semakin meningkatnya nilai rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Palopo.

2.1.4.4. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank umum menurut

Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

Tabel 2.313
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pinjaman di bank umum	Juta	14.113.075	26.236.425	24.882.444	26.934.511	-
b.	Dana pihak ketiga di bank umum	Juta	14.851.967	16.220.629	22.276.855	20.014.741	-
C	Rasio	Juta	0.95	1.62	1.12	1.35	-

Sumber Data : Buku Indikator Ekonomi Kota Palopo 2017

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah pinjaman umum di bank (dari bank swasta maupun BUMN) di Kota Palopo meningkat sejak tahun 2013 sampai dengan 2016. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 14,11 Trilyun Rupiah, tahun 2017 meningkat menjadi 26,93 Trilyun Rupiah atau meningkat sebanyak 12,82 Trilyun. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan jumlah uang yang akan beredar di Kota Palopo sejak empat tahun terakhir.

2.1.4.5. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.5.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 2.314
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Panjang jalan	Km	395.860	502	502	503.16	503,16
b.	Jumlah kendaraan	Unit	24.643	25.743	26.846	27.998	29.150
Rasio		Angka	0.016	0.020	0.019	0.018	0,017
Rasio		Per 1000	16	20	19	18	17

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014, tingkat kepadatan jalan per Km terdapat 16 kendaraan, sementara di 2018, terdapat 17 kendaraan. Artinya kondisi jalan di Kota Palopo pada tahun 2018, lebih padat dibandingkan tahun 2013.

2.1.4.5.2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.315
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (m3)	575.995	601.337	605.649	600.911	603.524

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.4.5.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Tabel 2.316
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah barang melalui dermaga per tahun (m³)	575.995	601.337	605.649	600.911	603.524
Jumlah orang melalui dermaga per tahun (orang)	2.057	769	122	445	314
Jumlah barang melalui terminal per tahun (kg)	3.218	3.733	3.360	2.689	3.176
Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

2.1.4.5.4. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Makin tinggi nilai indikator ini menunjukkan makin taatnya pembangunan terhadap rencana RT RW yang ada.

2.1.4.5.5. Jenis dan Jumlah Bank

Aktifitas Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara pada umumnya dan Palopo pada khususnya. Aktifitas sektor keuangan, atau yang lebih umum dikenal sebagai jasa keuangan, meliputi beberapa sub sektor diantaranya Perbankan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya serta Jasa Penunjang Keuangan. Untuk Palopo, peningkatan kinerja sektor keuangan lebih dipengaruhi oleh kinerja positif perbankan. Sektor perbankan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui kredit. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi

Tabel 2.317
Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo

Jenis Bank	2014	2015	2016
Bank umum (Konvensional & Syariah)	12	12	20

Sumber: Potensi Ekonomi Kota Palopo (BPS, 2017)

2.1.4.5.6. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi

Di lihat dari unit usaha dan tenaga kerja, data BPS menunjukkan bahwa terdapat 0,98 persen total usaha yang bergerak di sektor Keuangan dan mampu menyerap 10,59 persen total tenaga kerja usaha. Fenomena inilah yang menjadikan sektor keuangan termasuk sektor unggulan. Jika dibanding kabupaten sekitar, walaupun jumlah usaha/perusahaan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi bukan yang tertinggi, tetapi dalam penyerapan tenaga kerjanya memiliki nilai yang tertinggi dibanding daerah sekitar.

Tabel 2.318
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Palopo dan Kabupaten Sekitar, 2016

Wilayah	Jumlah Usaha/ Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
Kab. Luwu	198	1127
Kab. Tana Toraja	102	751
Kab. Luwu Utara	106	820
Kab. Luwu Timur	131	1167
Kab. Toraja Utara	70	806
Kota Palopo	154	4621

Sumber : BPS, 2017

2.1.4.5.7. Jenis Kelas dan Jumlah Restoran

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor unggulan penggerak ekonomi Palopo. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meliputi usaha perhotelan, restoran dan rumah makan. Berdasarkan analisis economic based approach kategori ini terpilih sebagai sektor unggulan di Palopo. Kontribusi kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Palopo pada Tahun 2016 masih terbilang kecil yaitu sebesar 1,21 persen dan mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 8,45 persen.

2.1.4.5.8. Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel

Berdasarkan data BPS, jumlah hotel, jumlah kamar, jumlah tempat tidur dan jumlah tamu hotel menunjukkan tren meningkat. Jumlah hotel/penginapan/wisma dan sejenisnya di Kota Palopo sampai dengan tahun 2015 sebanyak 38 unit. Dua unit diantaranya merupakan bintang dua dan sisanya 36 unit adalah non bintang. Penyebaran penginapan tersebut hanya berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Wara sebanyak 16 unit, Wara Timur sebanyak 12 unit dan Mungkajang 2 unit serta Wara Utara 4 unit.

2.1.4.5.9. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Tabel 2.319

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Palopo Tahun 2014– 2018

No	Sumber Air Bersih	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Leding (Perpipaan)	14.958	17.958	21.958	23.467	25.594
2	Sumur Lindung	856	906	956	1.006	1.044
3	Sumur Tidak Terlindung	6.117	6.167	6.217	6.222	6.248
4	Mata Air Terlindung	3.327	3.377	3.427	3.477	3.515
5	Air Kemasan	2.649	2.699	2.749	2.799	2.837
6	Lainnya	617	667	717	767	805
Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih						
		28.524	31.774	36.423	37.738	38.422
Jumlah Rumah Tangga						
		35.025	35.914	36.871	37.749	39.444
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih						
		81,44%	88,47%	98,87%	99,97%	97,41

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo Tahun 2019

2.1.4.5.10. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Adalah indikator yang menggambarkan kondisi energi listrik yang telah dikonsumsi oleh masyarakat Kota Palopo, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan listrik yang ada.

2.1.4.5.11. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator ini menunjukkan seberapa besar masyarakat Kota Palopo yang mampu menikmati akses listrik. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyak masyarakat Kota Palopo yang mengakses listrik, sehingga lebih mudah dalam mengakses pelayanan lain dan menikmati berbagai hasil pembangunan lainnya.

Tabel 2.320

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	
a.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	Rumah Tangga	58,618	62,613	67,228	-	70,172
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	Rumah Tangga	35.914	36.871	37.749	38.641	39,444
	Persentase						

Sumber Data : Statistik Daerah Kota Palopo, Dinas Pertambangan & ESDM Kota Palopo 2018

2.1.4.5.12. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Indikator ini menggambarkan seberapa besar penetrasi alat komunikasi berupa ponsel diakses dan digunakan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak masyarakat yang memiliki akses informasi dan komunikasi melalui telephone yang menunjukkan semakin mudah dan terbukanya informasi yang ada.

Tabel 2.321
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon	Jiwa	103.757	112.703	122.321	140.181	153.493
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
Persentase		%	62,92	66,73	70,74	79,24	84,95

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan peningkatan yang cukup besar atas akses penduduk terhadap telepon atau handphone di Kota Palopo. Tahun 2014 hanya 62,92% masyarakat yang menggunakan atau bisa mengakses layanan ini. Namun pada 2018 jumlahnya meningkat menjadi 84,95% sudah mengaksesnya. Ini menunjukkan semakin mudahnya komunikasi informasi di tingkat masyarakat.

2.1.4.6. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.6.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tabel 2.322
Angka Kriminalitas Yang Tertangani
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun	12	13	13	20	-	102
b.	Jumlah penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907	180.678
Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)		7	8	8	12	-	-

Sumber data : SIPD Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan bahwa dari 100.000 penduduk rata-rata terjadi kasus kejahatan sebanyak 7 kasus yang tertangani pada tahun 2013, sementara pada tahun 2016 angka menjadi 12 kasus tertangani per 100.000 penduduk.

Data ini juga menunjukkan peningkatan jumlah kasus kejahatan yang dialami penduduk di Kota Palopo. Olehnya faktor ketertiban dan kenyamanan wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah mesti menjadi perhatian termasuk bekerja sama dengan stake holder terkait seperti TNI dan Polri.

2.1.4.6.2. Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu Desa/Kelurahan Swadaya, Desa/Kelurahan Swakarsa dan Desa/Kelurahan Swasembada. Desa/Kelurahan Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal.

Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Tabel 2.323
Persentase Desa Berstatus Terhadap Total Kelurahan
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Persentase kelurahan berswasembada	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa semua kelurahan yang ada di Kota Palopo sejak 2014 sampai dengan 2018, Kota Palopo dengan 48 kelurahan yang ada dinilai telah berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupannya masyarakatnya mirip dengan kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat yang maju.

2.1.4.7. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.7.1. Rasio Ketergantungan

Adalah Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.324
Rasio Ketergantungan
Kota Palopo Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Rasio ketergantungan	48,81	48,46	48.19

Sumber Data : Diolah dari Palopo Dalam Angka 2019

Data di atas menunjukkan bahwa untuk 100 orang penduduk usia produktif di Kota palopo pada tahun 2017 mempunyai tanggungan sebanyak 48-49 orang usia non produktif. Beban ini tak jauh berbeda

dengan tahun 2018 dimana untuk 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 48 orang usia non produktif.

2.1.4.7.2. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2.325
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	Orang	11848	14220	15.833	15.599	16.490	12,452
b.	Jumlah penduduk	Orang	160.819	164.903	168.894	172.916	176.374	180.678
c	Rasio	Per 100	7.37	8.62	9.4	9.0	9.3	14.51

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2013-2018

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2013 dari 100 orang penduduk Kota Palopo terdapat 7 orang yang merupakan lulusan perguruan tinggi baik yang berpredikat sarjana, master/magister ataupun doctor. Kondisi tahun 2018 menurun menjadi 14 orang berpendidikan strata 1 keatas dari 100 penduduk Kota Palopo.

2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.326
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Palopo

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	7.52	≥7	Melampaui Target
2	Laju inflasi (%/Tahun)	4.19	2.8	Dibawah Target
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	40.32	38.183	Melampaui Target
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,662	12,500	Melampaui Target
5	Indeks Gini (Angka)	0.338	0.330	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	92.06	91.11	Melampaui Target
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.94	8.5	Melampaui Target
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	292,602	247,109	Melampaui Target
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,270	15,012	Melampaui Target
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	7.94	8.5	Melampaui Target
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.14	-	
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.26	-	
	Indeks Kesehatan	77.44	-	
	Indeks Pendidikan	76.81	-	
	Indeks Pengeluaran	76.88	-	
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	77.3	76.82	Melampaui Target
12	Angka melek huruf (%)	97.71	98.2	Dibawah Target
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10.51	10.56	Dibawah Target
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.06	15.1	Dibawah Target
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.49	70.35	Melampaui Target
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0.011	0	Melampaui Target
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	1.91	1.50	Dibawah Target
17	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	Sama dengan Target
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	58.57	65	Dibawah Target
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	74.04	75	Dibawah Target
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	44.4	50	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	58.31	59.86	Dibawah Target
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	77.95	85	Dibawah Target
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	47.55	50	Dibawah Target
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	11.60	10.34	Dibawah Target
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	88.4	95	Dibawah Target
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	76.13	75	Melampaui Target
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	51.78	55	Dibawah Target
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	30.96	26	Melampaui Target
	<i>Laki – Laki</i>	29.26	24	Melampaui Target
	<i>Perempuan</i>	33.52	11.50	Melampaui Target
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	26.82	38	Melampaui Target
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.34	81	Dibawah Target
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	14.44	20	Dibawah Target
28	Opini BPK	WTP	WTP	Sama dengan Target
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92.05	90	Melampaui Target
30	Penguatan cadangan pangan (%)	76.14	90	Dibawah Target
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)	n/a	n/a	Belum Diketahui Kinerjanya
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	17.39	17	Melampaui Target
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-	4	Belum Diketahui Kinerjanya

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)	46,557	43,027	Melampaui Target
	Padi	32,664	27,701	Melampaui Target
	Jagung	3,722	5,511	Dibawah Target
	Ubi Kayu	141	164	Dibawah Target
	Ubi Jalar		50	Belum Diketahui Kinerjanya
	Sagu		51	Belum Diketahui Kinerjanya
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	3365.50	2451	Melampaui Target
	Daging (Ruminansia) Ton	249.50	261	Dibawah Target
	Daging Sapi (Ton)	222.80	225	Dibawah Target
	Daging Kerbau (Ton)	0.10	35	Dibawah Target
	Daging Kambing (Ton)	-	-	Belum Diketahui Kinerjanya
	Daging Unggas (Ton)	3968.92	2191	Melampaui Target
	Daging Ayam Kampung (Ton)	148.40	136	Melampaui Target
	Daging Ayam Pedaging (Ton)		2046	Belum Diketahui Kinerjanya
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	8.70	8	Melampaui Target
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	2065.87	1097	Melampaui Target
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)		997	Belum Diketahui Kinerjanya
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)		18	Belum Diketahui Kinerjanya
	Itik/Angsa/Entog (Ton)		85	Belum Diketahui Kinerjanya
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	Belum Diketahui Kinerjanya
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	1101.64	2049.82	Dibawah Target
	Kelapa Dalam	25.80	53.47	Dibawah Target
	Kopi	64.50	68.94	Dibawah Target
	Kopi Robusta	64.80	68.38	Dibawah Target
	Kopi Arabika		0.55	Belum Diketahui Kinerjanya
	Cengkeh'	125.70	105.8	Melampaui Target
	Kakao	820.84	1753	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	Belum Diketahui Kinerjanya
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)		n/a	Belum Diketahui Kinerjanya
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)		0.18	Belum Diketahui Kinerjanya
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		1.5	Belum Diketahui Kinerjanya
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	Belum Diketahui Kinerjanya
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24.10	24	Melampaui Target
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.77	2.76	Melampaui Target
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	n/a	Belum Diketahui Kinerjanya
45	Pertumbuhan Industri (%)		20.02	Belum Diketahui Kinerjanya
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	Belum Diketahui Kinerjanya
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	104.35	98,000	Melampaui Target
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a	Belum Diketahui Kinerjanya
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	51.50	51	Melampaui Target
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	96.67	87.12	Melampaui Target
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100	Sama dengan Target
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator	77.71	75	Melampaui Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	keterbukaan ekonomi) (%)			
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	1.19	1.5	Melampaui Target
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a	n/a	Belum Diketahui Kinerjanya
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	13	15	Dibawah Target
10	Rasio ketergantungan	48.19	47.34	Dibawah Target
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR			
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1.	Pendidikan			
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	70	75	Dibawah Target
2	Angka Partisipasi Kasar	102.46		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	112.89	100	Melampaui Target
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	84.17	100	Dibawah Target
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	110.31	100	Melampaui Target
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)	12.89	11.77	Melampaui Target
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	0.84	7	Dibawah Target
	Tamat SD/ sederajat (%)	12.69	15	Dibawah Target
	Tamat SMP/ sederajat (%)	24.71	20	Melampaui Target
	Tamat SMA (%)	37.88	30.3	Melampaui Target
	Tamat SMK (%)	2.39	4	Dibawah Target
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	9.15	14.8	Dibawah Target
	Diploma I/II/III (%)	0.64	0.8	Dibawah Target
	Diploma IV/S1-S3 (%)	14.51	12	Dibawah Target
4	Angka Partisipasi Murni	82.05	81.43	Melampaui Target
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99.78	100	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	78.39	73.57	Melampaui Target
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	67.99	70.71	Dibawah Target
5	Angka partisipasi sekolah (%)	1945.3	2910.8	Dibawah Target
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	997.8	1000	Dibawah Target
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	1000	990.7	Melampaui Target
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (Per 1000)	847.5	920.1	Dibawah Target
6	Angka Putus Sekolah:	0.05	6.92	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0.03	0	Melampaui Target
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0.02	0.98	Melampaui Target
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	-	5.94	Belum Diketahui Kinerjanya
7	Angka Kelulusan:	66.2	99.61	Dibawah Target
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99.14	100	Dibawah Target
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99.46	99.79	Dibawah Target
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	-	99.04	Belum Diketahui Kinerjanya
8	Angka Melanjutkan (AM):			Belum Diketahui Kinerjanya
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	100	Sama dengan Target
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100	100	Sama dengan Target
9	Fasilitas Pendidikan:	100	100	Sama dengan Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100	100	Sama dengan Target
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	Sama dengan Target
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	100	100	Sama dengan Target
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	33	33	Sama dengan Target
	SD/MI (per 10,000)	37	37	Sama dengan Target
	SMP/ MTS (per 10,000)	26	26	Sama dengan Target
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10,000)	27	35	Dibawah Target
	SMA/MA/SMK	27	35	Dibawah Target
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	620	750	Dibawah Target
	SD/MI (per 10,000)	654	700	Dibawah Target
	SMP/ MTS (per 10,000)	671	780	Dibawah Target
	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas /MA/SMK (per 1000)	80	130	Dibawah Target
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.55	0.65	Dibawah Target
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pendidikan menengah (per 10.000)	1.61	2.69	Dibawah Target
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	n/a	n/a	Belum Diketahui Kinerjanya
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24	100	100	Sama dengan Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	tahun, perempuan dan laki-laki (%)			
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97.71	98.24	Dibawah Target
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	99.53	100	Dibawah Target
2.	Kesehatan			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1	1	Sama dengan Target
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	98	99	Dibawah Target
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2	2	Sama dengan Target
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5	4	Dibawah Target
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	66	66.75	Dibawah Target
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	8	9	Dibawah Target
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	3	Sama dengan Target
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	4	4	Sama dengan Target
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	5	5	Sama dengan Target
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	5	5	Sama dengan Target
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	71.21	73,1	Dibawah Target
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	95.88	94.74	Melampaui Target
13	Cakupan Desa/kelurahan	97.92	95.79	Melampaui Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	<i>Universal Child Immunization (UCI) (%)</i>			
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	Sama dengan Target
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	87.73	85.19	Melampaui Target
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	86.29	90	Dibawah Target
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	0	0	Sama dengan Target
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	8.19	6.8	Melampaui Target
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	136.61	100	Melampaui Target
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	249	250.43	Melampaui Target
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	Sama dengan Target
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	79.29	77.21	Melampaui Target
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	66.54	59.12	Melampaui Target
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	Sama dengan Target
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	6	8	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
26	Angka kejadian Malaria (per 100.000)	12	20	Dibawah Target
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0	0	Sama dengan Target
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a	n/a	Belum diketahui kinerjanya
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100	Sama dengan Target
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (per 100.000)	41	21	Dibawah Target
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a		Belum diketahui kinerjanya
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)		2	Belum diketahui kinerjanya
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	Sama dengan Target
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	100.76	100	Melampaui Target
35	Cakupan puskesmas (%)	133.33	100	Melampaui Target
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	75	75	Sama dengan Target
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	93.56	92.82	Melampaui Target
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	91.34	89.03	Melampaui Target
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	69.35	70.49	Dibawah Target
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	63.42	65.26	Dibawah Target
41	Cakupan pemberian makanan pendamping	100	100	Sama dengan Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)			
42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	97.36	97.21	Melampaui Target
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	Sama dengan Target
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	Sama dengan Target
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	Sama dengan Target
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pekerjaan Umum:			
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	67.99	65	Melampaui Target
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	28	30	Dibawah Target
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a	-	Belum diketahui Kinerjanya
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	69.81	65	Melampaui Target
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	1.82	1.5	Melampaui Target
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima	n/a	-	Belum diketahui Kinerjanya

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	atau bangunan rumah liar			
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	96.41	72.21	Melampaui Target
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	47.72	45	Melampaui Target
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	8.99	50	Dibawah Target
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	14.31	20	Dibawah Target
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	3.69	5	Dibawah Target
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	75.8	75	Melampaui Target
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	20.74	20	Melampaui Target
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	94.84	100	Dibawah Target
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	95.43	85	Melampaui Target
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0.49	0	Dibawah Target
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	4.98	5	Dibawah Target
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.56	1.8	Dibawah Target
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.78	2	Dibawah Target
3	Penataan Ruang:			
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	Belum diketahui Kinerjanya

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	4,222	3003	Melampaui Target
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	80.12	80	Melampaui Target
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	-	50	Belum diketahui Kinerjanya
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
7	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	Belum diketahui Kinerjanya
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Rasio rumah layak huni	0.17	0.25	Dibawah Target
2	Rasio permukiman layak huni (%)	95.86	98.96	Dibawah Target
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	84.19	80	Melampaui Target
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	94.31	90	Melampaui Target
5	Persentase permukiman yang tertata (%)	99.53	90	Melampaui Target
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)		0	Belum diketahui kinerjanya
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	31.65	25	Dibawah Target
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	6.97	6.91	Melampaui Target
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	20.37	22.68	Dibawah Target
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	100	100	Sama dengan Target
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	91.85	100	Dibawah Target
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	10.30	10	Melampaui Target
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	94.80	100	Dibawah Target
5	Persentase Penegakan PERDA	97.96	100	Dibawah Target
6.	Sosial			
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	51.58	58	Dibawah Target
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	51.43	58	Dibawah Target
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	59.06	58	Dibawah Target
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	10	Dibawah Target
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	Sama dengan Target
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang	100	100	Sama dengan Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)			
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	Sama dengan Target
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	Sama dengan Target
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	19.68	14.08	Melampaui Target
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	9,19	5	Dibawah Target
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	2,23	15	Dibawah Target
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	73	85	Dibawah Target
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	26.2	5	Melampaui Target
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	25	25	Sama dengan Target
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	39	35	Melampaui Target
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0.97	0	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	0,97	2	Dibawah Target
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	0.97	0.5	Dibawah Target
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	31.97	30	Melampaui Target
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	12.1	12	Melampaui Target
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	5.28	20	Dibawah Target
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	8.51	10	Dibawah Target
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	10.59	15	Dibawah Target
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20	20	Sama dengan Target
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	3.3	4	Dibawah Target
4	Rasio KDRT (per 10.000)	2	3	Melampaui Target
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	41.63	50	Dibawah Target
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	24.16	100	Dibawah Target
8	Cakupan perempuan dan anak korban	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)			
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	Sama dengan Target
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	24	22	Melampaui Target
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		100	Belum diketahui Kinerjanya
	APM Perempuan pada Tingkat SD	100	100	Sama dengan Target
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	99.6	100	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		82.5	Belum diketahui Kinerjanya
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	77.55	85	Dibawah Target
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	79.35	80	Dibawah Target
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		69	Belum diketahui Kinerjanya
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	62	68	Dibawah Target
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	75.27	70	Melampaui Target
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	42.63	42.72	Dibawah Target
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
3	Pangan			
1	Ketersediaan pangan utama (%)	19.54	11	Melampaui Target
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	3966	2,329	Melampaui Target
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	3865	2100	Melampaui Target
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	101.96	54	Melampaui Target
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	72	85	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
4	Pertanahan			
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	2.17	2	Melampaui Target
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	25	20	Melampaui Target
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	Sama dengan Target
5	Lingkungan Hidup			
	Kabupaten/Kota			
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Tidak Ada	Sama dengan Target
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Belum Tersedia	Tidak Ada	Sama dengan Target
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Belum Tersedia	Ada	Sama dengan Target
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Cemar Ringan	Baik	Dibawah Target
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	Sangat Baik	Sama dengan Target
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	24.16	40	Dibawah Target
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota			Belum diketahui Kinerjanya
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)		1	Belum diketahui Kinerjanya
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang		1	Belum diketahui Kinerjanya

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	<i>memenuhi standar minimum (Orang)</i>			
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		0	Belum diketahui Kinerjanya
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		0	Belum diketahui Kinerjanya
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional		0	Belum diketahui Kinerjanya
12	Penetapan hak MHA		0	Belum diketahui Kinerjanya
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)		0	Belum diketahui Kinerjanya
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)		0	Belum diketahui Kinerjanya
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		0	Belum diketahui Kinerjanya
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)		Tidak Ada	Belum diketahui Kinerjanya
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	Sama dengan Target
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	88.9	85	Melampaui Target
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	4.02	4	Melampaui Target
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	67	67	Sama dengan Target
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	89.55	82.4	Sama dengan Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	79.46	75	Sama dengan Target
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	0	100	Dibawah Target
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	100	Dibawah Target
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.65	0.81	Dibawah Target
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.84	0.8	Melampaui Target
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.44	0.7	Dibawah Target
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	Sama dengan Target
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	Sama dengan Target
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	93.28	87.03	Melampaui Target
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100	Sama dengan Target
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	100	Sama dengan target
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	Sama dengan target
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	2.5	-	Belum diketahui Kinerjanya

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
4	Persentase LSM aktif (%)		5	Belum diketahui Kinerjanya
5	Persentase LPM Berprestasi (%)		5	Belum diketahui Kinerjanya
6	Persentase PKK aktif	100	100	Sama dengan target
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	Sama dengan target
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.13	2.22	Melampaui Target
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)		n/a	Belum diketahui Kinerjanya
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak Ada	Tidak Ada	Sama dengan Target
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)		-	Belum diketahui Kinerjanya
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	32.65	50	Dibawah Target
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		-	Belum diketahui Kinerjanya

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		-	Belum diketahui Kinerjanya
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		-	Belum diketahui Kinerjanya
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		-	Belum diketahui Kinerjanya
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	Sama dengan Target
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	75.15	77.19	Dibawah Target
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		n/a	Belum diketahui Kinerjanya
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	9	14	Dibawah Target
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	23.92	20.32	Melampaui Target
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	25.06	23	Melampaui Target
16	Persentase tingkat keberlangsungan	47.42	43	Melampaui Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	pemakaian kontrasepsi (%)			
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	78.26	75	Melampaui Target
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	64.96	60	Melampaui Target
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	55.09	45	Melampaui Target
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0.11	0.11	Sama dengan Target
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	10.33	8	Melampaui Target
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	Sama dengan Target
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	20.42	30	Dibawah Target
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	Sama dengan Target
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	7.39	10	Dibawah Target
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan	43.4	75	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	obat kontrasepsi di Faskes (%)			
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	Sama dengan Target
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	1.8	2.38	Dibawah Target
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	65.21	60	Melampaui Target
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	-	20	Belum diketahui Kinerjanya
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	82.94	80	Melampaui Target
9	Perhubungan			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1,327,055	1,285,538	Melampaui Target
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2	Sama dengan Target
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	604	750	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	Sama dengan Target
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	10,9	9.18	Melampaui Target
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	2,82	25	Dibawah Target
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	70.47	80	Dibawah Target
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	17	20	Dibawah Target
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1.326.741	1,581,141	Dibawah Target
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	603.524	605,250	Dibawah Target
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	1,837,678	1,823,758	Melampaui Target
10	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	3.33	3	Melampaui Target
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.9	1	Dibawah Target
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	84.95	85	Dibawah Target
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.18	0.09	Melampaui Target
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.42	0.42	Sama dengan Target
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1	Persentase koperasi aktif (%)	71.03	70.7	Melampaui Target
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	29.77	29.67	Melampaui Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	100	100	Sama dengan Target
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99.11	100	Dibawah Target
12	Penanaman Modal			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	129	157	Dibawah Target
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0	0	Sama dengan Target
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	220,859	184,830	Melampaui Target
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	13.65	8	Melampaui Target
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	57.77	40.6	Melampaui Target
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	69.3	70	Dibawah Target
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.75	2	Dibawah Target
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	46.15	40	Melampaui Target
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	32.53	70	Dibawah Target
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	21.2	50	Dibawah Target
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	7	50	Dibawah Target
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	7	50	Dibawah Target
14	Statistik			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Sama dengan Target
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Sama dengan Target
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Sama dengan Target
15	Persandian			
1	Persentase Perangkat daerah yang telah	77.6	75	Melamapuai Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)			
16	Kebudayaan			
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	18	18	Sama dengan Target
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	99.32	100	Dibawah target
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	0	5	Dibawah target
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	51	50	Melampaui Target
17	Perpustakaan			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	9.21	10	Dibawah Target
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	50.46	50	Melampaui Target
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.16	1.2	Melampaui Target
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1204	1,000	Melampaui Target
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1191	1,393	Dibawah Target
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100	100	Sama dengan Target
18	Kearsipan			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	16.33	19.6	Dibawah Target
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	6	8	Dibawah Target
Layanan Urusan Pilihan				
1.	Pariwisata			
1	Kunjungan wisata (%)	101.15	94.25	Melampaui Target
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan	2	2	Sama dengan Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	Wisata Dalam Satu Tahun)			
3	PAD sektor pariwisata (%)	5.05	4	Melampaui Target
2.	Pertanian			
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	17.39	18	Dibawah Target
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	Belum diketahui kinerjanya
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	Belum diketahui kinerjanya
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	Belum diketahui kinerjanya
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	7305.4	6695.4	Melampaui Target
	Padi	33259	27,701	Melampaui Target
	Jagung	4988	5,511	Dibawah Target
	Ubi Kayu	39.2	164	Dibawah Target
	Ubi Jalar	1.12	50	Belum diketahui kinerjanya
	Sagu	1.67	51	Belum diketahui kinerjanya
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)	15.86	17.10	Dibawah Target
	Padi	6.40	5	Melampaui Target
	Jagung	7.09	6	Melampaui Target
	Ubi Kayu	29.52	28.93	Melampaui Target
	Ubi jalar		12.33	Belum diketahui kinerjanya
	Sagu		0.32	Belum diketahui kinerjanya
7	Cakupan bina kelompok petani	52.17	50	Melampaui Target
3	Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik		100	Belum Diketahui Kinerjanya

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
2	Rasio ketersediaan daya listrik		100	Belum Diketahui Kinerjanya
4	Perdagangan			
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-945,580	-600,000	Dibawah Target
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	n/a		Belum diketahui kinerjanya
5	Perindustrian			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)		50	Belum diketahui kinerjanya
6	Transmigrasi			
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	Sama dengan target
7	Perikanan			
1	Produksi perikanan (%)	99.95	104.63	Dibawah Target
2	Konsumsi ikan (%)	104.16	100	Melampaui Target
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	11.19	4.5	Melampaui Target
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	72.54	75	Dibawah Target
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
7	Nilai tukar nelayan	n/a	n/a	Belum diketahui Kinerjanya
Penunjang Urusan				
1.	Perencanaan Pembangunan			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Sama dengan target
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	Sama dengan target
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD	ada	ada	Sama dengan target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
	yang telah ditetapkan dengan PERKADA			
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Sama dengan target
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	Sama dengan target
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	Sama dengan target
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	n/a	Sama dengan target
2.	Keuangan			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	Sama dengan Target
2	Persentase SILPA	0.12	0	Melampaui Target
3	Persentase SILPA terhadap APBD	1.96	2	Melampaui Target
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)			
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0.62	0	Dibawah Target
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	1.04	0	Dibawah Target
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	18.29	20	Dibawah Target
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	26.26	10	Melampaui Target
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)			
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	57.6	50	Melampaui Target
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	42.42	50	Dibawah Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	5.75	2	Melampaui Target
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sama dengan Target
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	103/894	-	Belum diketahui kinerjanya
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0.79	2	Dibawah target kinerjanya
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	30.34	50	Dibawah target kinerjanya
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	-	Belum diketahui kinerjanya
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	951	-	Belum diketahui kinerjanya
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2210	-	Belum diketahui kinerjanya
4.	Penelitian dan pengembangan			
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	100	100	Sama dengan Target
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	36,36	85	Dibawah Target
	Penerapan SIDA:			
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)		0	Belum diketahui kinerjanya
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	60.87	34.76	Melampaui Target Kinerjanya
5.	Pengawasan			

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2018	Target 2018	Interpretasi Capaian 2018
1	Persentase tindak lanjut temuan	46.54	49.13	Dibawah Target Kinerja
2	Persentase pelanggaran pegawai	0	0.01	Melampaui Target Kinerja
3	Jumlah temuan BPK	16	18	Melampaui Target Kinerja
6.	Sekretariat Dewan			
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada.A	Ada	Sama dengan Target
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada.A	Ada	Sama dengan Target
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada.A	Ada	Sama dengan Target

2.2.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal :

2.2.2.1. Bidang Urusan Pendidikan :

Berikut adalah Capaian SPM Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Kota Palopo Tahun 2016-2018 :

Tabel 2.327
Capaian SPM Pendidikan
Kota Palopo Tahun 2016-2018

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
A.	PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN/ KOTA				
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil				
	PEMBILANG : Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/ MI dalam jarak kurang dari 3 km dan 6 km untuk SMP/MTs	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT :Jumlah kelompok permukiman permanen di kab/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
2.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis				
	PEMBILANG : Jumlah SD/ MI yang semua rombel-nya tidak melebihi 32 orang	SD	90.24	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	90.24	100.00	100.00
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	SD	100.00	93.90	93.90
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	93.90	93.90
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang	SMP	83.33	96.67	96.67
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wilayah kabupaten/ kota	MTs	83.33	96.67	96.67
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wilayah kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs memiliki ruang lab. IPA yang dilengkapi meja kursi untuk 36 peserta didik	SMP	64.29	129.41	43.33
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts di Kab./ kota	MTs	64.29	129.41	43.33
	PEMBILANG : Jumlah SMP/ MTs memiliki satu set alat praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen	SMP	70.59	123.53	40.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts di Kab./ kota	Mts	70.59	123.53	40.00
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs memiliki satu ruang guru dilengkapi meja dan kursi untuk setiap guru, kep-sek/ madrasah dan staf kependidikan lainnya; serta Jumlah SMP/ MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang guru	SD	81.48	80.49	84.15
		MI	81.48	80.49	84.15
		SMP	72.41	80.00	80.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	MTs	72.41	80.00	80.00
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	100.00	100.00
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus]	SD	95.12	0.00	0.00
		MI	95.12	0.00	0.00
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;n				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]	SMP	70.00	70.00	70.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts di wil. Kab./ kota	MTs	70.00	70.00	70.00
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	100.00	100.00
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	100.00	100.00
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs memiliki guru kualifikasi S1 atau D-IV $\geq 70\%$ [daerah khusus $\geq 40\%$]	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs memiliki guru kualifikasi S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik $\geq 35\%$ [daerah khusus $\geq 20\%$]	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs tersedia guru kualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing2 satu orang untuk Matematika, IPA, Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris, dan PKn	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah Kepala SD/MI berkualifikasi S-1 atau D-IV dan bersertifikat pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota	MI	100.00	100.00	100.00
11.	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs memiliki Kepala SMP/Mts kualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
12.	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat Pendidik	SD	15.85	15.85	15.85
	PENYEBUT: Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota	MI	15.85	15.85	15.85
13.	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif				
	100 = bila kab/ kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, 50 = bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan, 0 = bila tidak memiliki rencana			100	100
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs mendapat kunjungan pengawas satu kali tiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	96.67	96.67	96.67
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs Di Kab./ kota	MTs	96.67	96.67	96.67
B. PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN					
15.	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah set buku teks mata pelajaran (B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah	SD	96.63	97.03	97.03
	PENYEBUT: Jumlah peserta didik	MI	96.63	97.03	97.03

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	PEMBILANG: Jumlah SD/MI yang memenuhi IP-15.1 di atas	SD	59.76	62.20	62.20
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	59.76	62.20	62.20
16.	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah set buku teks mapel yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan sekolah	SMP	94.52	94.52	94.52
	PENYEBUT: Jumlah peserta didik	MTs	94.52	94.52	94.52
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi IP-16.1 di atas	SMP	86.67	86.67	86.67
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	MTs	86.67	86.67	86.67
17.	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA				
	PEMBILANG: Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap	SD	97.56	97.56	97.56
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	97.56	97.56	97.56
18.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi				
	PEMBILANG: Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	SD	87.80	87.80	87.80
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	87.80	87.80	87.80
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	SMP	80.00	80.00	80.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	MTs	80.00	80.00	80.00
19.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan				
	PEMBILANG: Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu = 37.5 jam		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah seluruh guru tetap di satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs yang memenuhi IP 19.1 di atas.	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
20.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu				
20	PEMBILANG: Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar		99.60	99.60	99.60
	PENYEBUT: Jumlah seluruh rombongan belajar di satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu pertahun	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	dengan kegiatan pembelajaran kelas seperti di atas				
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
21.	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
22.	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampuhnya				
	PEMBILANG: Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs yang telah memenuhi IP 22.1	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
23.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs yang telah memenuhi IP 23.1	SD	57.32	58.54	58.54
		MI	57.32	58.54	58.54
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	58.62	62.07	62.07
		MTs	58.62	62.07	62.07
24.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
25.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah guru menyampaikan lap. hasil evaluasi mapel dan hasil penilaian peserta didik kepada KepSek pada akhir semester		100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	PENYEBUT: Jumlah seluruh guru di satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 25.1	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
26.	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan menyampaikan lap. hasil UAS dan UKK serta US/UN kepada orang tua peserta didik		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				
	PEMBILANG: JumlahSD/ MI atau SMP/ MTs yang menyampaikan rekap hasil tes tengah tahunan kepada Dis Dik kab./kota/Kantor Agama kab./kota pada akhir semester	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
27.	Manajemen Sekolah: Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan yang memiliki Komite Sekolah yang berfungsi baik		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				

2.2.3. Capaian Kinerja SDG's/TPB

Tabel. 2.328
Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo
Tahun 2016-2017

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.74	8.78
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95.16	103.95
3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37	37
4	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	3.09	1.58
5	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3104	3769
6	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	93.99	100.41
7	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	108.6	106.81
8	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	72.79	74.67
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	N/A	93.43
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	91.24	99.58
11	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	11.36%	7.10%
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	95.37	99.23
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	76.61	77.89
14	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	N/A	93.57
15	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	15005	N/A
16	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal 0; Hilang 0; Mengungsi 121,4	Mengungsi 45,22
17	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	0	0
18	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100	100
19	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	100	100

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
20	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	0
21	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	N/A	N/A
22	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	N/A	N/A
23	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0
24	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	44.32%	58.07%
25	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pend 22,22; Kes 18,64	Pend. 17,84 ; Kes. 24,48
26	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	10	8.4
27	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2.14	2.37
28	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sedang 19,37; Berat 27,97	Sedang 14,42; Berat 30,6
29	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	90	91.02
30	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	28.8	26.21
31	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	N/A	N/A
32	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.6	1.71
33	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0.15	0.18
34	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	N/A	N/A
35	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	PPH 90, KI 50,82	PPH 92,5
36	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	135,16 jt	168,4 jt
37	Angka Kematian Ibu (AKI).	4 Jiwa	2 jiwa (67,59)
38	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	94.29	94.29
39	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	93.99	100.41
40	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	4.36	2.03
41	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	7.62	5.41

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
42	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	2.18	2.03
43	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	97.92	95.83
44	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.08	0.04%
45	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	204.72	250.41
46	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1.7	0.2
47	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	0	0
48	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	0	0
49	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0	0
50	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	0	0
51	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	0	0
52	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	N/A	N/A
53	Prevalensi tekanan darah tinggi.	41.88	11.05
54	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	34.41	37.8
55	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	N/A	N/A
56	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	N/A	N/A
57	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	N/A	N/A
58	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	N/A	N/A
59	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	66.42	70.89
60	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	72.79	74.67
61	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	21.54	21.81
62	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	N/A
63	Total Fertility Rate (TFR).	N/A	N/A
64	Unmet need pelayanan kesehatan.	23.59	22.48
65	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	90.75	101.61
66	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95.16	103.95

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
67	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0
68	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	N/A	25.04
69	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100
70	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	100	100
71	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	N/A	97.45
72	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	79.48	94.7
73	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	65.51	81.8
74	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	111.66	105.91
75	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	86.17	84.91
76	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	15.03	
77	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	N/A	16.54
78	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	5.71	28.85
79	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	N/A	N/A
80	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	96.41	98.02
81	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99.83	99,41 & 97,45
82	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	N/A	N/A
83	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	N/A	SD (50,61); SMP (54,79); SMA (57,69), SMK (52,46)
84	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	N/A	2
85	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	6	3
86	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	N/A	N/A

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
87	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0.02	0.09
88	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	7.09	22.07
89	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0.96	1.00
90	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	N/A	N/A
91	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	12.9
92	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	20%	20%
93	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	11.76	11.76%
94	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	N/A	N/A
95	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	23.59	22.48
96	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	66.42	70.89
97	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	70.74	79.24
98	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	86	93.43
99	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	320m3/detik	550l/detik
100	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	86	93.43
101	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	N/A	N/A
102	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	86.58	99.58
103	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	9	9
104	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	N/A	9
105	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	0	180 skala lingkungan
106	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	0	0

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
107	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	1	1
108	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0	0
109	Kualitas air danau.	N/A	N/A
110	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Menenuhi Standar	Menenuhi Standar
111	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	0	0
112	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	0	0
113	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	0	0
114	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2	2
115	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	0	0
116	Bauran energi terbarukan.	N/A	N/A
117	Intensitas energi primer.	N/A	N/A
118	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	6.9	7.1
119	PDB per kapita.	34,2 juta	37,0 juta
120	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	76.66	70.56
121	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	N/A	N/A
122	Persentase tenaga kerja formal.	47.72	N/A
123	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	N/A	N/A
124	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	16.85	19.65
125	Upah rata-rata per jam pekerja.	14,062	15,200
126	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	14.43	10.96
127	Tingkat setengah pengangguran.	26.01	23.18
128	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	N/A	N/A
129	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1.16	8.45
130	Jumlah wisatawan mancanegara.	207	622
131	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	95,711	98,895
132	Jumlah devisa sektor pariwisata.	3.45	3.51

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
133	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	30.75	32.07
134	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	N/A	20
135	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	<3km	<3km
136	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	9.26	9,26(2016)
137	Panjang pembangunan jalan tol.	0	0
138	Panjang jalur kereta api.	0	0
139	Jumlah dermaga penyeberangan.	0	0
140	Jumlah pelabuhan strategis.	1	1
141	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	2.96	2.91
142	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	5.1	3.57
143	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	3.3	6.18
144	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	N/A	N/A
145	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	N/A	N/A
146	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0.0038	0.0036
147	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	0.08	0.09
148	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	70.74	79.24
149	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.08	0.09
150	Koefisien Gini.	0.37	0.34
151	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.74	8.78
152	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	N/A	N/A
153	Indeks Kebebasan Sipil.	N/A	N/A
154	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0
155	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37	37
156	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	0.16	0.16
157	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	N/A	N/A
158	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	N/A	N/A
159	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	N/A	N/A

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
160	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	0	0
161	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	0	0
162	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	0	0
163	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	43	43
164	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	0	0
165	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	1	1
166	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Mengungsi 121,4	Meninggal 0; Hilang 0; Mengungsi 45,22
167	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	N/A	N/A
168	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	0	0
169	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	0
170	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	N/A	1,173,000,000
171	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	84.47	91.66
172	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	0	0
173	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	0	1
174	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	0	0
175	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0
176	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	410 kg	410 kg
177	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	1.5	1.6
178	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	0	0
179	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	0	0
180	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	0	0
181	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0
182	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Mengungsi 121,4	Meninggal 0; Hilang 0; Mengungsi 45,22

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
183	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	58.39	58.39
184	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0	0
185	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	0	0
186	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0	0
187	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	N/A	N/A
188	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0
189	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	N/A	1.29
190	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	N/A	N/A
191	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0	0
192	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	7.09	22.07
193	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	0
194	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	N/A	N/A
195	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	N/A	N/A
196	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP
197	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	CC	C
198	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	N/A	N/A
199	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	60.42	62.44
200	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Hijau	Hijau
201	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	5	5

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
202	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	7	7
203	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	N/A	83.63
204	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	N/A	87.98
205	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	N/A	93.57
206	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0
207	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0
208	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	2.23	2.78
209	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0.33	0.42
210	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	13.35	14.55
211	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	N/A	N/A
212	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	N/A	N/A
213	Proporsi individu yang menggunakan internet.	0.08	0.09
214	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0
215	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0
216	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	100	98.05
217	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	95.83	88.9
218	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	0	5
219	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	N/A	N/A
220	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	0	0
221	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	5587	6399
222	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	99.31	99

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Tabel 2.329
Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Sampai dengan Triwulan II 2019

No	KOTA PALOPO	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		KET
		KINERJ A (%)	REALISASI ANGGARA N (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3		4		5
1	Dinas Pendidikan	32.07	5.49	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2	Dinas Kesehatan	28.84	23.37	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah	19.00	21.90	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	24.49	4.02	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5	Kantor Pemadam Kebakaran	29.46	43.63	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6	Dinas Persandian dan Statistik	50.04	49.04	Rendah	Sangat Rendah	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	53.95	39.94	Rendah	Sangat Rendah	
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.50	50.66	Sangat Rendah	Rendah	
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)	37.78	36.82	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
10	Dinas Perumahan dan Permukiman	27.35	10.04	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14.88	22.54	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
12	Dinas Ketenaga Kerjaan	41.88	18.36	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
13	Dinas Sosial	43.41	45.31	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
14	Badan Penelitian dan Pengembangan	34.06	34.32	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15	Dinas Koperasi dan UMKM	33.90	33.83	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	33.31	32.20	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
17	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	40.65	42.00	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	36.56	25.47	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
19	Dinas Perhubungan	31.58	42.04	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20	Satuan Polisi Pamong Praja	44.76	47.01	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	KOTA PALOPO	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		KET
		KINERJA A (%)	REALISASI ANGGARAN N (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
21	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	56.35	44.12	Rendah	Sangat Rendah	
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.22	45.96	Rendah	Sangat Rendah	
23	Sekretariat Daerah (SEKDA)	42.42	40.46	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
24	Sekretariat DPRD	38.78	37.43	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
25	Inspektorat	64.12	30.67	Rendah	Sangat Rendah	
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.20	41.97	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
27	Badan Pendapatan Daerah	17.64	35.21	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
28	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	25.28	22.20	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
29	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh	49.61	39.79	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
30	Dinas Kearsipan	29.99	35.70	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
31	Dinas Pertanahan	61.06	8.24	Rendah	Sangat Tinggi	
32	Dinas Perpustakaan	46.26	18.62	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
33	Dinas Pertanian, dan Peternakan, Perkebunan	76.70	32.51	Sedang	Sangat Rendah	
34	Dinas Perindustrian	74.16	36.85	Sedang	Sangat Rendah	
35	Dinas Pariwisata	58.08	10.97	Rendah	Sangat Rendah	
36	Dinas Kebudayaan	46.88	33.21	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
37	Dinas Transmigrasi	47.91	25.71	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
38	Dinas Perdagangan	56.16	51.47	Rendah	Rendah	
39	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	40.85	18.11	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
40	Dinas Perikanan	52.38	18.95	Rendah	Sangat Rendah	
41	Kecamatan Sendana	31.89	12.77	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
42	Kecamatan Bara	61.49	18.71	Rendah	Sangat Rendah	
43	Kecamatan Mungkajang	74.96	15.17	Sedang	Sangat Rendah	

No	KOTA PALOPO	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		KET
		KINERJA A (%)	REALISASI ANGGARAN N (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
44	Kecamatan Telluwanua	50.21	10.46	Rendah	Sangat Rendah	
45	Kecamatan Wara Timur	19.86	13.08	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
46	Kecamatan Wara Barat	42.02	10.06	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
47	Kecamatan Wara Selatan	57.85	15.17	Rendah	Sangat Rendah	
48	Kecamatan Wara Utara	49.05	12.14	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
49	Kecamatan Wara	22.05	5.82	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Total		41.83	27.95	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pokok pembangunan di Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut : Kualitas sumber daya manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar dan Infrastruktur Daerah termasuk lingkungan hidup dan kebencanaan; serta Inovasi dan Daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berikut adalah rumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2020 yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah :

Tabel 2.330
Keterkaitan Sasaran dan Permasalahan Pembangunan

Sasaran Pembangunan	Permasalahan Pembangunan 2020
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Belum meratanya pemenuhan sarana-prasarana serta SDM kependidikan dalam mendukung akses/partisipasi pada pendidikan dasar, pemenuhan layanan minimal pendidikan dasar, dan peningkatan kualitas pendidikan dasar.
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Belum meratanya pemenuhan sarana-prasarana serta SDM kesehatan dalam mendukung akses masyarakat atas layanan kesehatan, pemenuhan pelayanan minimal kesehatan, pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat serta belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Masih signifikannya populasi penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada 2017 sebesar 8,78%, meningkat dari 2016 yang sebesar 8,74%. Jumlah penduduk miskin juga meningkat, pada 2017 sebanyak 15.440 jiwa, sementara pada 2016 sebanyak 15.020 jiwa 2015 hanya 14.510 jiwa.
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Keterpenuhan sarana-prasarana perumahan dan pemukiman sudah mencukupi tetapi memerlukan upaya pemeliharaan. Rasio rumah layak huni sebesar 0,16, luas

Sasaran Pembangunan	Permasalahan Pembangunan 2020
	pemukiman kumuh masih terisa 35,09 Ha, dan rumah tinggal bersanitasi sebanyak 69,35%, dan masih ada rumah tinggal yang belum mengakses air bersih.
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Keterpenuhan sarana dan prasarana aksesibilitas wilayah belum optimal. Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik hanya 58,96, sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Jumlah pengguna terminal dan pelabuhan cenderung stagnan.
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Bertambahnya potensi bencana karena kerusakan alam/lingkungan. Jumlah spot/lokasi rawan bencana seperti tanah longsor, banjir, genangan, abrasi, rob, kekeringan dan kebakaran cenderung bertambah.
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Transparansi dan kualitas akuntabilitas kinerja masih rendah, Kualitas dan ketersediaan data dan informasi pembangunan serta Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) belum optimal, termasuk pada tingkat OPD, Tingkat kesesuaian dan kualitas perencanaan kinerja tingkat kota dan OPD masih lemah akibat asistensi, verifikasi dan sinkronisasi yang belum memadai, Kualitas SDM perencanaan pada level kota dan OPD belum optimal, Kualitas dan transparansi atas proses pengadaan barang dan jasa serta keterbukaan informasi publik lainnya masih terbatas dan belum massive.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Cakupan 100% terhadap penerima layanan untuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pemukiman dan perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dan sosial sesuai PP 02/2018 belum semuanya memenuhi target SPM. selain itu kualitas layanan publik Kota Palopo

Sasaran Pembangunan	Permasalahan Pembangunan 2020
	meski terus meningkat namun, inovasi layanan berjalan lamban
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Belum optimalnya serapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian. Angka pengangguran Kota Palopo s.d tahun 2017 pada angka 10,96%, 2016 pada angka 14,43% yang masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing hanya berada pada angka 9,03% dan 8,15%, Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja karena terbatasnya akses untuk meningkatkan keterampilan kerja dan etos kewirausahaan.
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Stagnasi produksi dan produktivitas serta daya saing produk sektor perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja yakni pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta perikanan, Pembangunan dilakukan belum fokus pada pengembangan potensi dan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada.
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Belum optimalnya perkembangan sektor perekonomian sekunder dan tersier terutama perdagangan, industri dan jasa perkotaan, Belum optimalnya perkembangan investasi dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk pada sektor ekonomi kreatif,

2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

(1) Urusan Pendidikan

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Belum Maksimal.
2. Penyebaran lembaga dan prasarana pendidikan pada semua jenjang masih banyak terfokus di Kecamatan di dekat wilayah perkotaan.
3. Pertumbuhan jumlah anak usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar belum berbanding lurus dengan penyediaan sarana dan prasarana gedung sekolah.
4. Rasio guru dan murid menunjukkan trend negatif dan tidak berimbang, termasuk rasio antara jumlah lulusan pendidikan dasar dengan ketersediaan dan daya tampung gedung sekolah pada jenjang pendidikan di atasnya.
5. Pendidikan non formal dan pendidikan luar biasa belum berkembang dengan baik dan berstandarisasi.
6. Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan masih terbatas pada sekolah di dalam kota sementara di luar kota masih berkutat pada persoalan akses terhadap pendidikan.
7. Penyebaran tenaga pendidik belum merata dan lebih banyak terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di kota, termasuk penyebaran tenaga pendidikan yang bersertifikasi.
8. Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal dalam mendorong pendidikan kesetaraan
9. Penguatan dan pemberian peran yang lebih besar kepada Dewan Pendidikan belum konsisten.

(2) Urusan Kesehatan

1. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan belum mencakupi seluruh unsur pelayanan yang dipersyaratkan.
2. Partisipasi masyarakat miskin terhadap Jaminan Kesehatan Nasional masih belum memadai, akibat keterbatasan ekonomi.
3. Ketersediaan jumlah angkutan medis (ambulance) dan jangkauan pelayanan masih terbatas.
4. Jumlah dan ketersediaan ruang rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (Rumah Sakit) belum memadai.
5. Rasio jumlah balita dan posyandu dari waktu ke waktu terus menunjukkan trend yang tidak berimbang. Demikian halnya dengan rasio ideal

-
- pelayanan dokter umum, dokter spesialis terhadap jumlah pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (RS).
6. Penyebaran dan distribusi keberadaan puskesmas terakreditasi, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana faskes tingkat pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak dan balita termasuk ibu hamil dan melahirkan serta bagi lansia.
 7. Koordinasi dengan perangkat daerah lain belum optimal terkait pembukaan dan peningkatan kualitas jalan dari beberapa pemukiman masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan.
 8. Upaya mengembangkan obat asli dengan memanfaatkan potensi lokal belum memadai.
 9. Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal.
 10. Standar dan cara pelayanan tenaga kesehatan masih sering dikeluhkan pasien, terutama dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan status RSUD Sawerigading menjadi RS Rujukan di Luwu Raya.
 11. Penyediaan dan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana di RSUD diperhadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

(3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai belum memadai.
2. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir belum optimal.
3. Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai.
4. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan pesisir dan daerah luar kota belum memadai dan belum merata.
5. Koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan ke fasilitas kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya.
6. Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau belum maksimal.
8. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan serta perlindungan ruang terbuka hijau masih minim.
9. Eksistensi lahan budidaya secara khusus lahan pertanian di Kota Palopo terus tertekan oleh pengembangan sektor lain seperti perumahan dari waktu ke waktu.
10. Jaringan irigasi kabupaten sebagian mengalami kerusakan sehingga kurang efektif dalam layanan air.

(4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat perumahan belum optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan perumahan, termasuk masih adanya rumah layak huni.
2. Pemberdayaan komunitas perumahan belum memadai dalam penataan pemukiman termasuk penataan lingkungan pemukiman kumuh.
3. Pengelolaan areal pemakaman belum optimal
4. Belum tercukupinya dukungan prasarana dan sarana umum (PSU) dalam menghadirkan lingkungan perumahan/pemukiman yang sehat dan aman.

(5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi antar stakeholder
2. Fasilitas, sarana-prasarana serta kapasitas SDM Satpol PP dalam penegakan Perda secara menyeluruh belum memadai.
3. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan, belum memadai.
4. Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam masyarakat termasuk pada lingkungan perumahan belum memadai.
5. Kecukupan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan kebakaran belum memadai dalam memenuhi tingkat waktu tanggap (response time rate) yang baik pada wilayah manajemen kebakaran (WMK).
6. Kapasitas dalam penyediaan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, ^[SEP]penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta ^[SEP]penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum berkembang seiring dengan tuntutan/kebutuhan.
7. Kapasitas dan kerjasama stakeholder daerah dalam pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat, serta deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, masih rendah.

(6) Urusan Sosial

1. Data mutakhir untuk keseluruhan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS dalam berbagai kelompok/golongan belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam penanganan PMKS.
2. Ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan sarana-prasarana dalam penanganan, pemberian bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS masih terbatas.
3. Kemampuan panti sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis

masyarakat (WKBSM) dalam penyediaan sarana pelayanan sosial dan prasarana kesejahteraan sosial masih terbatas.

4. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia terlantar di luar panti, ^[11]_[SEP] tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, masih terbatas.
5. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam evakuasi, bantuan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih terbatas.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

(1) Urusan Tenaga Kerja

1. Data yang lengkap tentang pekerja dan pencari kerja untuk kepentingan penyaluran pencari kerja, keselamatan dan perlindungan pekerja, serta kepesertaan dalam program Jamsostek belum tersedia secara termutakhirkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.
3. Cakupan besaran pencari kerja dan tenaga kerja dalam pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan belum memadai.
4. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan belum memadai.

(2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kompetensi dan peluang perempuan untuk bersaing pada pekerjaan di lembaga pemerintah, DPRD dan lembaga swasta belum memadai.
2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikologis menunjukan trend yang terus meningkat.
3. Kapasitas unit pelayanan terpadu dalam penanganan pengaduan, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih terbatas.
4. Kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum efektif dalam pengintegrasian pada kebijakan dan penganggaran.
5. Kapasitas dalam layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum memadai.
6. Akses dan kemampuan perempuan dalam partisipasi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta pendidikan kesetaraan melek huruf masih tertinggal.

(3) Urusan Pangan

-
1. Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holder lain yang terkait belum efektif
 2. Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai
 3. Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal dalam mendukung pemenuhan pangan berimbang sesuai pola pangan harapan.
 4. Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal

(4) Urusan Pertanahan

1. Pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah belum memadai dalam mendukung sertifikasi tanah.
2. Penataan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tanah negara maupun tanah masyarakat.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi secara bersinergi dengan perangkat daerah lain belum optimal termasuk dalam penyelesaian izin lokasi.

(5) Urusan Lingkungan Hidup

1. Beberapa spot lokasi di Kota Palopo masih sering dilanda banjir dan di beberapa titik lainnya digenangi air saat musim penghujan tiba serta kebakaran hutan dalam skala kecil pada musim kemarau.
2. Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah seiring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan, kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
3. Pengintegrasian RPPLH dan KLHS kedalam dokumen perencanaan daerah belum terukur dan dilengkapi data mutakhir.
4. Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif.
5. Identifikasi, verifikasi, penetapan dan pendampingan masyarakat hukum adat serta kearifan dan pengetahuan lokal terkait pengelolaan lingkungan hidup belum terprioritaskan.
6. Luas area penanganan sampah serta pengurangan sampah melalui mekanisme reduce, reuse dan recicle (3R) masih terbatas.
7. Dampak pemanasan global semakin meningkat dalam kondisi penanganan efek gas rumah kaca belum optimal.

(6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Ketidaktersediaan bahan dan fasilitas menghambat pelayanan Penerbitan KTP secara tepat waktu dan memuaskan.
2. Komitmen pelaporan kelahiran dan pengurusan akte kelahiran oleh masyarakat belum maksimal.

-
3. Kordinasi antar stakeholder dalam penerbitan akte nikah belum optimal.
 4. Pelaporan dan pencatatan penduduk datang, pergi dan meninggal belum optimal.

(7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kinerja LPM dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif dan merata.
3. Kinerja PKK dalam pembinaan masyarakat belum efektif dan merata.
4. Kapasitas SDM dan perlengkapan pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.
5. Keswadayaan masyarakat dalam mendorong dan memelihara keberlanjutan pemberdayaan masyarakat belum optimal
6. Kapasitas SDM pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa belum mencukupi.

(8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Ketersediaan dan Pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk dan kebijakan kependudukan lainnya dalam pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk belum efektif.
2. Pelayanan kontrasepsi belum menjangkau secara menyeluruh pada pasangan usia subur dalam menekan kelahiran anak.
3. Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri serta kesadaran kesehatan reproduksi belum memadai.
4. Bina keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia belum didukung oleh tenaga pendamping yang memadai.
5. Model operasional BKB-Posyandu-PADU belum terkoordinasi.

(9) Urusan Perhubungan

1. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan belum optimal dalam merespons pertambahan kebutuhan angkutan umum, pelayanan terminal dan penataan izin trayek.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal
3. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas belum memadai
4. Pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum belum memadai
5. Pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan belum tergali dengan baik.
6. Uji KIR sesuai standar belum mencakupi semua angkutan umum.
7. Pemenuhan rambu-rambu lalu lintas belum mencakupi sesuai kebutuhan.

(10) Urusan Komunikasi dan Informatika

-
1. Kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan belum berkembang secara fungsional.
 2. Layanan telekomunikasi belum menjangkau semua wilayah.
 3. Data tentang kepemilikan masyarakat atas hand-phone/telepon, akses internet dan komputer pribadi belum terpenuhi secara lengkap.
 4. SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi pada OPD belum terpenuhi.

(11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Iklim usaha kecil dan menengah belum kondusif dan memadai.
2. Kemampuan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM belum memadai
3. Sistem pendukung usaha bagi UMKM belum optimal belum berkembang.
4. Kompetensi dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bagi keaktifan koperasi rendah.
5. Kapasitas SDM, teknologi dan permodalan dalam pengelolaan UKM, lembaga keuangan mikro (LKM) dan BPR terbatas.
6. Daya saing produk usaha mikro dan kecil masih rendah.

(12) Urusan Penanaman Modal

1. Iklim investasi dan realisasi investasi belum didukung oleh kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pengembangan sistem informasi, penyederhanaan prosedur, kajian isentif investasi secara memadai.
2. Ketersediaan data potensi ekonomi daerah yang siap ditawarkan kepada investor nasional dan asing belum lengkap.
3. Upaya promosi dan kerjasama investasipada level domestik dan luar negeri masih minim.
4. Penyiapan potensi sumberdaya dan sarana-prasarana daerah pendukung investasi masih terbatas.
5. Pengembangan data dan informasi statistik daerah terkait investasi belum tersinergikan antar OPD.

(13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
2. Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
3. Sarana/prasarana serta fasilitas olah raga serta pelatih cabang olah raga dalam mendorong atlet/cabang olah raga berprestasi masih terbatas.
4. Kebijakan dan manajemen serta pemasyarakatan olahraga belum memadai

(14) Urusan Statistik

1. Belum tersedianya data lengkap berdasarkan indikator kinerja kunci masing-masing perangkat daerah.

-
2. Terlambatnya ketersediaan data umum kondisi daerah yang termuat dalam "Kabupaten dalam Angka", dan "PDRB" sehingga kurang mutakhir dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan.
 3. Upaya pengembangan data/informasi/statistik daerah belum terkoordinasi dan masih sektoral, dimana data statistik daerah masih bervariasi pada tingkat PD, bahkan terkadang multi interpretasi.
 4. Pemanfaatan informasi dan teknologi digital berbasis web dalam pengelolaan data statistik daerah belum signifikan.

(15) Urusan Persandian

1. Kelembagaan dan arah pengembangan dan pengelolaan SDM persandian daerah belum terstruktur secara massive dan terkoordinasi dengan baik.
2. Penggunaan sandi belum termanifestasikan dalam komunikasi perangkat daerah

(16) Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya belum berlangsung secara berkala
2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya belum dikelola secara sistematis dalam kerangka pelestarian.
3. Ketersediaan data karya budaya untuk kepentingan inventarisasi dan revitalisasi belum akurat dan komprehensif.

(17) Urusan Perpustakaan

1. Budaya baca dan pembinaan perpustakaan di sejumlah lembaga pendidikan belum memadai dan belum merata.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan minat baca masyarakat masih sangat kurang.
3. Kualitas SDM (pustakawan, tenaga teknis, dan penilai) dalam pengelolaan perpustakaan daerah masih rendah.
4. Cakupan materi dan jumlah unit pada koleksi buku perpustakaan daerah masih terbatas.

(18) Urusan Kearsipan

1. Cakupan dan kualitas penerapan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah belum menyeluruh.
2. Jumlah dan kualitas SDM pengelola kearsipan belum cukup untuk mendukung perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan pemeliharaan sarana prasana kearsipan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengelolaan kearsipan belum memadai.

C. Urusan Pilihan

(1) Urusan Pariwisata

1. Destinasi wisata yang ada belum tertata mengikuti perkembangan kontemporer kepariwisataan dan masih ada potensi destinasi wisata yang belum dikembangkan.
2. Pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan belum efektif mendukung peningkatan jumlah pengunjung wisata.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi dalam promosi kepariwisataan masih minim.
4. Penerimaan dan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB belum optimal.
5. Pengintegrasian ekonomi kreatif sebagai salah satu fokus komoditas penunjang kepariwisataan masih terkendala dengan belum tersedianya lokasi yang memadai.
6. Pendayagunaan keindahan alam dan lingkungan hidup sebagai salah satu potensi wisata belum optimal.

(2) Urusan Pertanian

1. Penerapan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
2. Eksistensi lahan pertanian produktif terus terancam akibat pengembangan pembangunan sektor lain.
3. Pengolahan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal
4. Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim
6. Kualifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam mendukung peningkatan produktivitas usahatani masih rendah.

(3) Urusan Perdagangan

1. Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat lainnya masih jauh dari kondisi nyaman
2. Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal
3. Pengawasan mutu dan peredaran barang yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan PD lainnya.
4. Perlindungan atas konsumen belum optimal
5. Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.
6. Data tentang pedagang/usaha informal belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam pembinaan.

(4) Urusan Perindustrian

1. Data potensi dan karakteristik usaha kelompok pengrajin belum tersedia

-
- dengan cukup.
2. Kluster industri kecil dan menengah dalam suatu kawasan industri belum berkembang dengan optimal.
 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan industri belum memadai.

(5) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Kapasitas peralatan dan teknologi penangkapan ikan belum berkembang mengikuti tuntutan baru dalam modernisasi perikanan.
2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan masih minim.
3. Kelompok nelayan belum berkembang optimal sebagai wahana peningkatan produksi dan edukasi bagi penangkapan yang ramah lingkungan
4. Kesejahteraan nelayan lapisan bawah masih rendah dan memiliki kesenjangan yang tinggi dengan nelayan lapis atas.

D. Penunjang Urusan

(1) Perencanaan

1. Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas
2. Ketersediaan data sesuai indikator kinerja kunci berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.
3. Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu.
4. Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD belum substantif berbasis fakta.
5. Penjabaran konsistensi RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD kedalam APBD belum akurat.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam membangun konsistensi RTRW belum akurat dan menyeluruh.

(2) Keuangan

1. SDM berkualitas pada OPD dalam analisis dan pelaporan keuangan masih terbatas.
2. Porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah masih signifikan.
3. Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan realisasi anggaran masih ada.
4. Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim dan masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum.

(4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Kebutuhan dana untuk pendidikan dan pelatihan formal, structural dan fungsional bagi ASN tidak mencukupi sesuai tingkat kebutuhan ASN.
2. Penyelenggaraan tugas jabatan fungsional pada beberapa PD belum optimal dalam peningkatan capaian kinerja.

(4) Penelitian dan Pengembangan

1. SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah belum memadai dalam mendukung kegiatan kelitbangan
2. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas.
3. Iklim pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah belum berjalan dengan baik.

(5) Pengawasan

1. Temuan pelanggaran administrative dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah masih ada.
2. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK belum maksimal.

(6) Sekretariat Dewan

1. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD belum akurat.
2. Program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan fungsi anggaran belum sepenuhnya terintegrasi dalam RPJMD dan RKPD.

(7) Sekretariat Daerah

1. Perumusan kebijakan dan kordinasi administrasi belum sepenuhnya efektif mendukung penyelenggaraan urusan.
2. Penyelenggaraan kegiatan antara secretariat daerah dengan perangkat daerah sering tumpang tindih.

(8) Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan belum sepenuhnya efektif.
2. Fungsi kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan PD di kecamatan, penerapan dan penegakan Perda belum sepenuhnya efektif.
3. Fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di desa dan kelurahan belum sepenuhnya efektif.
4. Fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum belum sepenuhnya efektif di kelurahan.

BAB. III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Pertumbuhan dan Komposisi Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				2018
		2014	2015	2016	2017	
1	Pertumbuhan Ekonomi Palopo (%)	7,05	6,45	6,98	7,19	7,52

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

regional dengan wilayah Luwu Raya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo), maka Kota Palopo menempati posisi dibawah Kabupaten Luwu Utara yang pertumbuhan ekonominya sebesar 8,42 persen, tapi di atas Kabupaten Luwu (6,85 persen) dan Kabupaten Luwu Timur (3,44 persen).

Perbandingan PDRB Harga Berlaku dan Konstan
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2014	4.743.856,90	3.877.030,40
2015	4.748.586,50	4.140.236,60
2016	5.906.480,40	4.428.497,00
2017	6.550.688,70	4.746.935,70
2018	7.285.142,35	5.102.987,20

Sumber Data : BPS Kota Palopo

rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 4,7 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 5,10 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Palopo mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 7,52 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pertumbuhan suatu daerah dalam satu periode, Kota Palopo memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 7,52 persen pada tahun 2018.

Jika dibandingkan secara

Nilai PDRB Kota Palopo atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 7,28 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,77 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 6,5 triliun

Perkembangan Lima Kategori Terbesar Ekonomi Palopo

Kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 1,72 triliun rupiah atau sebesar 23,66 persen. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2018, kategori ini tumbuh sebesar 9,15 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 10,19 persen. Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 21 persen hingga mencapai 23 persen di tahun 2018. Pada tahun 2018 kontribusi kategori ini mencapai 1,72 triliun rupiah atau sekitar 23,66 persen

**PDRB Harga Berlaku
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018**

Ket./ Cat.	Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry & Fishing	19,68	18,96	17,85	17,74	16,91
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	0,18	0,19	0,19	0,18	0,17
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	3,02	2,96	2,92	2,84	2,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	0,20	0,18	0,17	0,17	0,17
F	Konstruksi/Construction	15,94	15,45	15,86	16,12	16,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	21,16	21,91	22,63	23,18	23,66
H	Transportasi dan Pengudangan/Transportation & Storage	5,22	6,24	6,21	5,97	5,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & Food Service Activities	1,19	1,18	1,22	1,21	1,18
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	4,10	3,72	3,87	4,02	4,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	8,16	8,12	8,66	8,21	7,78
L	Real Estat/Real Estate Activities	5,24	5,10	5,05	5,06	4,92
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	7,76	8,06	7,53	7,37	7,96
P	Jasa Pendidikan/Education	4,50	4,31	4,17	4,15	4,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	2,22	2,24	2,30	2,36	2,35
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	1,24	1,23	1,22	1,24	1,29
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara/Preliminary Figures

** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber Data : BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka

Secara nominal, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkembang dari 0,93 triliun rupiah menjadi 1,23 triliun rupiah selama 5 tahun terakhir. Namun pertumbuhannya berfluktuasi sepanjang 2014-2018 dengan pertumbuhan terendah berada pada tahun 2015. Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,42 persen di tahun 2018 melambat dari 5,82 di tahun 2017. Pada tahun 2018, kontribusi kategori konstruksi mencapai 1,19 triliun rupiah atau sebesar 16,40 persen terhadap total perekonomian Palopo dan menduduki peringkat ketiga. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2014

dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,68 persen per tahun. Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2014-2018 yaitu berkisar 15-16 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Palopo cenderung berfluktuasi yaitu dari 4,12 persen pada tahun 2014 menjadi 5,41 persen pada tahun 2018. Secara umum, kontribusi Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib cenderung berfluktuatif selama periode 2014-2018. Laju pertumbuhan tahun 2014 sebesar 2,47 persen menjadi 16,75 persen.

**PDRB Harga Konstan
Kota Palopo Tahun 2014 – 2018**

Kat./ Cat.	Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry & Fishing	8,26	8,34	8,45	5,82	3,42
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	-1,12	4,66	5,54	4,26	2,55
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	5,73	5,22	5,10	3,57	2,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	25,80	-4,87	8,10	7,50	5,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	4,45	0,38	3,75	6,66	8,05
F	Konstruksi/Construction	4,12	4,97	7,48	6,40	5,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	13,26	12,21	10,84	10,19	9,15
H	Transportasi dan Pengangkutan/Transportation & Storage	9,00	7,28	7,52	7,39	10,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & Food Service Activities	4,91	7,15	8,45	7,36	7,27
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	2,83	7,82	10,25	11,56	13,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	4,41	7,42	14,95	0,30	1,67
L	Real Estate/Real Estate Activities	6,53	5,79	6,78	7,48	4,70
MN	Jasa Perusahaan/Business Activities	5,60	4,10	4,74	7,88	9,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wage/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	2,47	6,63	-0,69	5,36	16,75
P	Jasa Pendidikan/Education	1,78	6,05	5,14	8,23	10,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	7,81	10,39	9,59	9,94	9,68
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	2,47	3,35	5,88	9,69	12,22
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		7,05	6,47	6,95	7,17	7,52

* Angka Sementara/Preliminary Figures

** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka

3.1.2 Inflasi

Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasi (Persen)	8,95	3,38	2,47	3,94	4,19

Tim Pengendalian Inflasi Daerah-nya (TPID) dinilai mampu menjaga inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan kemajuan perekonomian di suatu wilayah adalah kemampuan pemerintah untuk mengendalikan laju Inflasi setiap tahunnya secara kontinyu.

Sesuai data BPS Palopo, inflasi bulanan sepanjang tahun 2018 menunjukkan fluktuasi harga yang cukup signifikan terutama pada beberapa bulan tertentu. Pada tahun 2018 tercatat puncak inflasi terjadi pada bulan Juni yakni 1,44 persen sedangkan deflasi terdalam terjadi pada akhir triwulan ketiga yakni pada bulan Maret, dengan deflasi sebesar 0,69 persen.

3.1.3. Gini Ratio

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukkan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan.

Gini Rasio Kota Palopo Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Gini Rasio	-	0.43	0.37	0.34	0.33

Pada tahun 2018 Jasa Keuangan dan Asuransi menyumbang sebesar 7,78 persen terhadap total perekonomian Palopo, nyaris sama dengan tahun 2014 yang sebesar 8,16 persen. Kontribusinya meningkat dari 0,39 triliun rupiah di tahun 2014 menjadi 0,57 triliun rupiah pada tahun 2018. Tren pertumbuhan kategori ini berfluktuasi selama lima tahun terakhir, dari 4,41 persen menjadi 1,67 persen pada periode 2014-2018.

Kota Palopo meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat Kabupaten/Kota untuk Wilayah Sulawesi tahun 2019, Kota Palopo

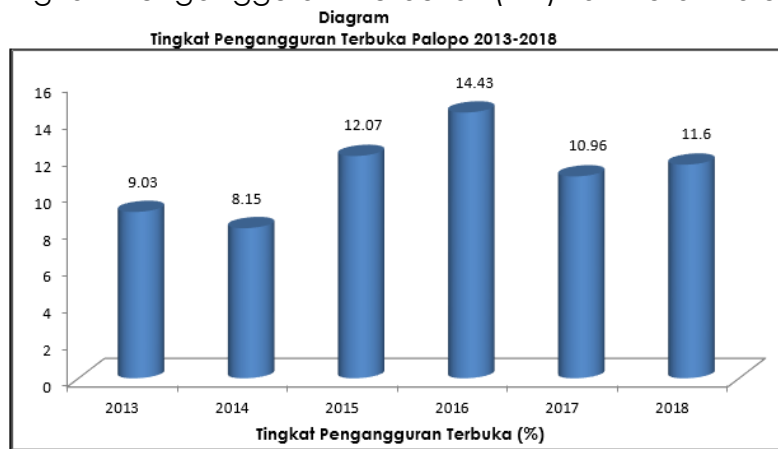
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai rasio Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna yang dijelaskan sebagai berikut :

- ❖ Ketimpangan rendah bila gini ratio $\leq 0,3$
- ❖ Ketimpangan sedang bila gini ratio antara $0,3 \leq G \leq 0,5$
- ❖ Ketimpangan tinggi bila gini ratio $\geq 0,5$

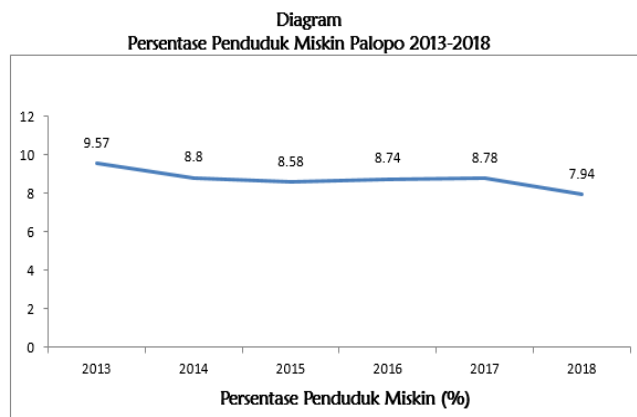
3.1.4. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palopo pada tahun 2018 mencapai 11,6 % lebih tinggi



dibandingkan setahun lalu yang berada pada angka 10.96%. Pada tahun 2016, pengangguran terbuka mencapai 14.43% dan di tahun 2015 pada angka 12.07%.

3.1.5. Kemiskinan



Persentase penduduk miskin di Kota Palopo pada tahun 2018 pada angka 7.94% lebih rendah dibandingkan 2017 yang berada pada angka 8.78%, 2016 yang berada di 8.74%. Sepanjang lima tahun terakhir 2013-2018, persentase penduduk miskin Kota Palopo menunjukkan trend penurunan dari 9.57% tahun 2013 menjadi 7.94 % di tahun 2018.

3.1.6. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

Beberapa tantangan berkaitan dengan kondisi perekonomian Kota Palopo seperti yang digambarkan di atas adalah sebagai berikut :

- a) Memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan merata terutama pada sektor strategis daerah seperti jasa, perdagangan dan industri rumah tangga yang berbasis masyarakat.

-
- b) Memantapkan pertumbuhan dan skala investasi yang lebih mampu membuka dan menyerap lapangan kerja lebih banyak dalam menangani masalah pengangguran dengan memantapkan ketertiban daerah dan kenyamanan dan kemudahan pelayanan investasi daerah, termasuk tata kelola pemerintahan yang lebih melayani
 - c) Mempertahankan dan terus memantapkan upaya sinergi untuk pengendalian inflasi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk kerjasama dengan dengan stake holder non government lain yang terlibat.
 - d) Pemberdayaan dan penanganan masyarakat miskin melalui program program pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan SDM masyarakat miskin atau rentan.
 - e) Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur daerah yang lebih merata dan berkualitas terutama pada aspek konektifitas dan aksesibilitas wilayah.

Olehnya, fokus utama kebijakan ekonomi makro Kota Palopo tahun 2020 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah yang menekankan pada upaya mengurangi angka kemiskinan dan menekan angka, pengangguran, meningkatkan pendapatan per kapita serta mempertahankan kestabilan ekonomi daerah.

Meski terdapat sejumlah tantangan, terdapat juga prospek dari berbagai kebijakan Pemerintah diarahkan untuk memperbaiki pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Palopo sehingga sampai akhir tahun 2020 ini diharapkan dapat lebih meningkat.

Peningkatan tersebut diharapkan berasal dari lima besar sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi bagi perekonomian Kota Palopo sebagai berikut :

- a) Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dimana pada tahun 2018 mampu memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Palopo yakni 23, 66%.
- b) Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dimana pada tahun 2018 mampu memberikan kontribusi sebesar 16,91 %.
- c) Bangunan dan Konstruksi :dimana pada tahun 2018 mampu memberikan kontribusi sebesar 16.40% bagi perekonomian Kota Palopo.
- d) Jasa Keuangan dan Asuransi : dimana pada tahun 2017 mampu memberikan kontribusi sebesar 7.78% bagi perekonomian Kota Palopo.
- e) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib mengikat dimana pada tahun 2018 mampu memberikan kontribusi sebesar 7.96 % bagi perekonomian Kota Palopo.

3.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Perkenomian Daerah

3.2.1. Sasaran Ekonomi Makro

Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020		
		Palopo	Nasional	Sulsel
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	7.16	5.3-5.5	7.4-7.8
2	Laju inflasi (%/Tahun)	3.3	2.0-4.0	3.0-1.0
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.3	n/a	65-70
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12.866	n/a	n/a
5	Indeks Gini (Angka)	0.337	0.375-0.380	0.376
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64	8.5-9	8.52
7	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9.51	4.8-5.1	5.05

Beberapa proyeksi indikator Makro Ekonomi Kota Palopo Tahun 2020 disandingkan dengan Nasional dan Propinsi Sulsel dapat dilihat pada tabel di samping :

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.2.1. Pendapatan Daerah

Berikut ini adalah gambaran mengenai realisasi dan target pendapatan Pemerintah Kota Palopo :

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palopo
Tahun 2018-2021

No. Urut	URAIAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI (TW I) TAHUN 2019	ANGGARAN TAHUN 2019	PROYEKSI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021
1	PENDAPATAN DAERAH					
1 . 1	Pendapatan Asli Daerah	139.282.846.484	30.217.471.747	167.052.191.690	189.592.384.308	211.214.198.452
1 . 1 . 1	Hasil Pajak Daerah	31.505.802.321	7.196.345.371	31.675.000.000	35.647.700.000	43.451.364.410
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	8.022.878.576	1.906.387.648	13.759.544.000	10.443.967.200	8.445.713.482
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.635.170.716	-	7.000.000.000	7.500.000.000	7.541.140.595
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.118.994.871	21.114.738.728	114.617.647.690	136.000.717.108	151.775.979.964
1 . 2	Dana Perimbangan	747.082.593.924	179.379.547.250	751.370.486.000	734.654.757.000	817.643.317.254
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.523.117.559	2.962.183.250	18.737.193.000	15.320.569.000	25.551.419.087
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	516.167.587.000	176.417.364.000	546.193.286.000	549.105.917.000	619.401.104.400
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	215.391.889.365	-	186.440.007.000	170.228.271.000	172.690.793.767
1 . 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	78.418.511.298	8.744.108.290	90.223.381.100	81.765.348.300	60.543.809.582
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	19.445.810.000	-	19.783.200.000	19.177.800.000	-
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.953.517.276	2.240.286.290	48.475.555.100	48.475.555.100	47.084.481.982
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10.250.000.000	6.503.822.000	13.007.644.000	7.970.110.000	7.500.000.000
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.639.440.139	-	8.956.982.000	6.141.883.200	5.959.327.600
1 . 3 . 6	Pendapatan lain-Lain	129.743.883				
	JUMLAH PENDAPATAN	964.783.951.706	218.341.127.287	1.008.646.058.790	1.006.012.489.608	1.089.401.325.287

Sumber : LKPJ Kota Palopo Tahun 2018 & Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2023

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun 2018 seperti terlihat pada Tabel di atas sebesar Rp.964.783.951.706,00 atau 96,37% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.001.107.733.585,00 Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi PAD yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.139.282.846.484,07 atau 89,22% dari yang ditargetkan Rp.156.111.703.360,00. Realisasi ini terdiri dari :

- 1) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp.31.505.802.321,00 atau 106,92 %. Secara keseluruhan capaian yang didapat pada tahun 2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan.
- 2) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah, sebesar Rp.8.022.878.576,00 atau 95,33%. Realisasi retribusi yang tidak mencapaitarget yang telah ditetapkan diakibatkan oleh adanya beberapa sumber penerimaan yang mengalami kendala dalam pelaksanaan pemungutannya.
- 3) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, mencapai Rp. 6.635.170.716,00 atau 92,99% yang bersumber dari pendapatan atas penyertaan modal ke Bank Sulselbar.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah, terealisasi sebesar Rp.93.118.994.871,07 atau sebesar 83,82% dari target. Adapun rician sumber dana tersebutdiperoleh darihasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, Kelebihan realisasi Jasa Giro pemegang kas, Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan, pengembalian tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan dari pihak ketiga, Pendapatan BLUD dan Pendapatan JKN.

b. Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.747.082.593.924,00 atau 98,86% dari target sebesar Rp.755.717.209.775,00 Realisasi ini bersumber dari :

- 1) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak mencapai Rp.15.523.117.559,00 atau terealisasi 74,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.20.749.762.775,00. Rendahnya nilai realisasi DBH yang di terima oleh Pemerintah Kota Palopo sangat tergantung dari realisasi penerimaan Pajak/Non Pajak Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2018, realisasi DBH pajak sekitar 72,81% sedangkan realisasi DBH Bukan Pajak hanya sekitar 80,09%.
- 2) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp.516.167.587.000,00 atau terealisasi 100% dari target yang ditetapkan.
- 3) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp.215.391.889.365,00 atau terealisasi 98,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.218.799.860.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp.78.418.511.297,66 atau 87,84% dari target sebesar Rp.89.278.820.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

-
- 1) Realisasi penerimaan yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah sebesar Rp.19.445.810.000,00 atau terealisasi 98,29% dari target yang ditetapkan yang diperuntukkan membiaya Operasional Sekolah (Dana BOS).
 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terealisasi sebesar Rp.40.953.517.276,00 atau 84,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.48.389.559.250,00.
 - 3) Realisasi penerimaan dari dana Insentif Daerah mencapai Rp.10.250.000.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp. 10.250.000.000,00
 - 4) Realisasi penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi mencapai Rp.7.639.440.139,00 atau 70,73% dari target sebesar Rp.10.856.061.200,00.
 - 5) Realisasi Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp.129.743.882,66. Realisasi nilai tersebut disebabkan karena adanya pengembalian Belanja Hibah dari KNPI tahun Anggaran 2017, Pengembalian atas Jasa Giro, Pengembalian atas temuan Pemeriksa dalam pengelolaan Dana BOS dan pengembalian pembayaran Pajak PPH.

Permasalahan Pengelolaan Pendapatan

Berdasarkan realisasi pendapatan Tahun 2018, Porsi Pendapatan Dana Perimbangan sebesar 77,44% terhadap total Pendapatan. Hal ini menunjukkan Kinerja Pendapatan sangat dipengaruhi oleh realisasi Dana Perimbangan. Dengan Perubahan peraturan teknis yang mengatur proses pencairan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus cukup menghambat dalam upaya merealisasikan seluruh dana Perimbangan, hal ini terlihat dari realisasi DAK sebesar 98,44% sedangkan DBH Pajak/Non Pajak hanya sebesar 74,81%. Selain itu, Adanya Perubahan peraturan Pengelolaan Pendapatan seperti Penganggaran Pendapatan Dana BOS berdampak pada penyesuaian dan/atau perubahan kembali terhadap kebijakan dan regulasi penunjang sehingga pengelolaan pendapatan di Kota Palopo memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah Kota Palopo tidak mencapai seratus persen atau hanya sebesar 96,37%, Realisasi tersebut disebabkan karena beberapa pendapatan dari dana perimbangan dan retribusi daerah yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan upaya agar target Pendapatan daerah dapat terealisasi bahkan diharapkan dapat melampaui target dimasa yang akan datang. Pada dasarnya realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, namun pada dua tahun terakhir cenderung stagnan dan sedikit menurun untuk beberapa jenis pendapatan. Ada beberapa kebijakan yang cukup mempengaruhi elastisitas realisasi Pendapatan :

1. Kebijakan BPJS yang lambat membayar klaim dari RSUD Sawerigading, kebijakan ini cenderung memberatkan Pemerintah Daerah khususnya RSUD Sawerigading dalam pengelolaan Dana JKN. Hal ini berdampak terhadap rendahnya realisasi Pendapatan JKN pada BLUD RSUD yang hanya sebesar 87,86%.
2. Perubahan kebijakan penganggaran Dana BOS yang awalnya dianggarkan pada Lain-Lain PAD di pindahkan ke Lain-lain Pendapatan.
3. Pendapatan yang bersumber dari Kerjasama dengan Pihak Ketiga khususnya pengelolaan City Market, dimana pada tahun ini Pengelola City Market tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya sesuai kontrak yang telah disepakati.

-
4. Aset yang belum dapat dimanfaatkan karena dalam proses sengketa di pengadilan.

Selain itu, masih terdapat beberapa jenis Objek Pendapatan Daerah yang perlu dikelola secara intensif sehingga memberikan pendapatan yang lebih optimal, hal ini menandakan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, khususnya dari sektor retribusi daerah yang tidak mencapai target di tahun 2018.

Langkah Penanganan

Dalam upaya untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Daerah, maka ada beberapa kebijakan yang akan diterapkan. Dari sisi Perpajakan Daerah, kebijakan tersebut antara lain: (a) melakukan penataan kebijakan perpajakan daerah; (b) melakukan penyuluhan peningkatan pelayanan dan sosialisasi perpajakan; (c) melakukan pembinaan internal aparatur dalam pelaksanaan perpajakan daerah; (d) melakukan penegakan hukum; serta (e) mensinergikan unsur-unsur terkait dalam penggalian potensi perpajakan untuk memberikan dukungan data/informasi kepada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

Di bidang Retribusi Daerah dan PAD lain-lain yang sah, kebijakan yang dilakukan adalah melalui : (1) peninjauan atas jenis dan tarif penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu; (2) peningkatan pengawasan dan penggalian potensi penerimaan Retribusi Jasa Umum; (3) Pembinaan, Sosialisasi dan Penyebarluasan terkait Ketentuan tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendapatan Daerah kepada Masyarakat; (4) peningkatan kinerja dan perbaikan administrasi dan pelayanan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah serta penyelesaian Aset yang bersengketa; dan (5) Peningkatan Koordinasi dalam pengelolaan Pendapatan yang melibatkan Pihak Ketiga seperti BPJS dan lain-lain.

Sementara itu, untuk mencapai target Pendapatan di Bidang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dalam tahun 2018, Pemerintah Kota Palopo melaksanakan kebijakan dan upaya optimalisasi antara lain melalui: (a) Sinkronisasi data kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian terkait guna pencapaian penerimaan Dana perimbangan dan dana Penyesuaian; (b) Koordinasi dan konsultasi intensif kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan terkait Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi, dan bantuan keuangan; (c) perbaikan administrasi dan sistim pelaporan pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 2019

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Rasionalisasi dalam penetapan target pendapatan daerah berdasarkan potensi dan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya;

-
2. Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Domestik Regional Bruto. Untuk mencapai hal tersebut Pertama dilakukan Intensifikasi meliputi peningkatan pelayanan pajak, pembinaan sumber daya manusia dan administrasi, peningkatan warga binaan, Sosialisasi perpajakan, dan koordinasi lintas pemda/sektor/SKPD. Kedua dilakukan Ekstensifikasi dengan pemberlakuan Perda, Pengembangan jenis dan obyek pajak; dan
 3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan dan aset daerah. Dengan arah kebijakan Pendapatan diatas diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Daerah Kota Palopo sehingga dapat mendukung program-program prioritas pemerintah daerah dalam mensejahterahkan masyarakat Kota Palopo. Pada tahun 2020 untuk membiaya pembangunan infrastruktur maka Pemerintah Kota Palopo akan melakukan pelepasan hak atas kepemilikan aset Ruko Sawerigading. Hasil penjualan aset ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah untuk membiaya belanja daerah tahun 2020.

Memperhatikan kebijakan pemerintah pusat serta trend pertumbuhan pendapatan daerah maka pendapatan daerah pada Tahun 2020 diproyeksikan akan naik menjadi Rp. 1.008.646.058.790,00.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 dengan memperhatikan:

1. Realisasi pendapatan Tahun 2018 dan Target Pendapatan Tahun 2019.
2. Target pertumbuhan PAD
3. Dana perimbangan diestimasikan naik 5% dan DAK diestimasikan tetap.
4. Begitupun dengan Lain-Lain Pendapatan yang sah di estimasikan tetap kecuali DBH pajak provinsi yang memiliki trend meningkat setiap tahunnya, sehingga DBH pajak provinsi diestimasikan naik sebesar 5% dari realisasi 2019.

Ketergantungan Pemerintah Kota Palopo terhadap Dana Perimbangan masih sangat besar seperti daerah lainnya. Fluktuasi Pendapatan dari dana perimbangan akan sangat mempengaruhi keuangan pemerintah kota palopo namun keadaan tersebut berada di luar kendali pemerintah daerah karena alokasi dana perimbangan ditentukan oleh pemerintah pusat dan Provinsi berdasarkan formula yang telah ditetapkan.

Dalam mengoptimalkan PAD Kota Palopo masih banyak Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini, mulai dari lemahnya sanksi pelanggaran terhadap wajib pajak dan retribusi, pendapatan dari bagi hasil belum optimal, pemberdayaan aset daerah belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam pembangunan daerah.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan diatas, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;

-
- b. Upaya penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
 - c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
 - d. Peningkatan koordinasi antar SKPD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

3.2.2.2. Belanja Daerah

Berikut ini adalah gambaran mengenai realisasi dan target belanja daerah Pemerintah Kota Palopo :

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo
Tahun 2018-2021

No. Urut	URAIAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI (TW I) TAHUN 2019	ANGGARAN TAHUN 2019	PROYEKSI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021
2	BELANJA DAERAH					
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	416.933.656.059	74.999.144.130	431.710.263.996	445.611.498.995	423.098.349.439
2.1.1	Belanja Pegawai	376.082.990.010	73.950.960.158	414.465.256.996	427.412.998.942	398.381.001.710
2.1.2	Belanja Bunga	2.346.991.491	1.048.183.972	3.357.876.000	5.464.307.563	15.790.103.583
2.1.4	Belanja Hibah	33.992.044.883	-	10.546.700.000	10.379.600.000	5.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.671.200.000	-	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota & Pemerintahan Desa dan	840.429.675	-	840.431.000	854.592.490	927.244.146
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	565.988.971.307	44.486.247.180	579.494.419.794	660.840.740.613	586.244.002.718
2.2.1	Belanja Pegawai	54.081.160.933	9.092.255.671	55.927.290.150	55.701.796.000	25.198.200.753
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	273.116.299.707	34.393.034.509	302.956.035.180	260.975.459.000	198.563.686.361
2.2.3	Belanja Modal	238.791.510.667	1.000.957.000	220.611.094.464	344.163.485.613	362.482.115.604
	JUMLAH BELANJA	982.922.627.366	119.485.391.310	1.011.204.683.790	1.106.452.239.608	1.009.342.352.158

Sumber : LKPJ Kota Palopo Tahun 2018 & Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2023

Menyangkut pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini, susunan belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang teralisasi sebesar Rp.416.933.656.058,61 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 426.365.870.522,00 atau 97,79 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Belanja Pegawai** yang direncanakan sebesar Rp.384.027.993.289,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.376.082.990.010,00 atau 97,93%.
- 2) **Belanja Bunga** yang dianggarkan sebesar Rp.2.695.744.550,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.346.991.490,61 atau 87,06%, realisasi ini untuk pembayaran bunga pinjaman pemerintah Kota Palopo pada Bank Dunia melalui penerusan pinjaman SLA nomor 1215 tanggal 17 April tahun 2008.
- 3) **Belanja Hibah** yang direncanakan sebesar Rp.34.371.701.683,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.33.992.044.883,00 atau 98,90%. Capaian realisasi ini digunakan untuk pelaksanaan hibah kepada beberapa kegiatan organisasi kemasyarakatan, dalam rangka penunjang pelaksanaan pembangunan dan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.
- 4) **Belanja Bantuan Sosial** yang direncanakan sebesar Rp.4.030.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.3.671.200.000,00 atau 91,10%.Capaian realisasi ini digunakan untuk pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, Selain itu alokasi Bantuan Sosial sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk pelaksanaan program bantuan bedah rumah.
- 5) **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik** yang direncanakan sebesar Rp.840.431.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.840.429.675,00 atau 99,99%. Bantuan Keuangan ini diberikan kepada sebelas partai yang memiliki perwakilan di DPRD Kota Palopo.
- 6) **Belanja Tidak Terduga** yang dialokasikan sebesar Rp.400.000.000,00 dan tidak ada realisasi.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp.594.015.064.943,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 565.988.971.307,28 atau 95,28% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Belanja Pegawai** yang direncanakan sebesar Rp.57.485.559.258,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.54.081.160.933,10 atau 95,28%. Belanja Pegawai pada belanja langsung di peruntukan untuk honorarium pelaksana kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah, Lembur, Pengelola Keuangan dan Pengelola Pengadaan barang dan Jasa.
- 2) **Belanja Barang dan Jasa** yang dialokasikan anggran sebesar Rp.283.195.706.372,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.273.116.299.707,18 atau 96,44%.
- 3) **Belanja Modal** yang direncanakan sebesar Rp.253.333.799.313,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.238.791.510.667,00 atau 94,26%.

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2018, Jumlah Unit Kerja (OPD) yang mengelola Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018 terdapat 49 (empat puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah dengan total

realisasi Rp.982.922.627.365,89 atau 96,33% dari rencana belanja sebesar Rp.1.020.380.935.465,00.

Permasalahan Pengelolaan Belanja Daerah 2018

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, permasalahan yang dihadapi secara umum meliputi :

- a) Pelaksanaan beberapa program dan kegiatan tertentu cenderung bertumpuk diakhir tahun sehingga mempengaruhi proses pembayaran dan laporan kegiatan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan proses Pelaksanaan kegiatan telah selesai namun proses administrasi pembayaran menjadi lambat sehingga pembayaran kegiatan tersebut menyebrang tahun anggaran.
- b) Kemampuan Aparatur dalam mengabsorbsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif masih terbatas.

Langkah Penanganan

Dari identifikasi permasalahan yang timbul, maka alternatif solusi terhadap kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan SDM yang handal sebagai Tenaga Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo, utamanya Tenaga Teknis dan Operasional Pengelola melalui Diklat dan Pendidikan Teknis Keuangan lainnya.
- 2) Segera melakukan perubahan dan peninjauan terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen perangkat aturan sebagai acuan kebijakan digunakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.
- 3) Memperbaiki dan menyempurnakan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Arah Perubahan Undang – Undang Paket Keuangan Negara serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Memantapkan Koordinasi, kerjasama dan pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Penyusunan Naskah APBD, Pembahasan APBD, Penetapan APBD serta Penatausahaan APBD antar Unit Kerja Pengelola APBD dengan Tim Penyusun APBD serta Tim Anggaran Pemerintah Kota Palopo dengan Tim Anggaran DPRD Kota Palopo.
- 5) Tetap mempedomani Strategi Pembangunan Kota Palopo dan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Pelaksanaan kegiatan yang terjadwal sesuai anggaran kas yang telah dibuat, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah 2020

Arah kebijakan daerah pada tahun 2020 akan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD Kota Palopo 2018-2023. Dimana terdapat 5 tujuan, 11 sasaran dan 12 Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan dengan 250 Program Perangkat Daerah. Yang didalamnya termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebanyak 29 Program Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan Belanja Daerah juga akan mengakomodir pemenuhan alokasi sebagai berikut :

- ❖ Pendidikan : Minimal 20% dari Total APBD
- ❖ Kesehatan : Minimal 10% dari Total APBD
- ❖ Program Keluarga Harapan : Minimal 5% dari Total APBN
- ❖ Program Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Aparatur : 2.5% dari Total APBD
- ❖ Penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya 0,75% dari Total APBD

3.2.3.1. Belanja Tidak Langsung

Alokasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji pegawai dengan asumsi bahwa sudah tidak ada lagi kenaikan gaji pegawai dan diganti dengan Gaji Tunjangan Hari Raya. Akrasi Gaji sebesar 2,5 persen untuk mengantisipasi kenaikan gaji pegawai yang disebabkan KGB, kenaikan tunjangan maupun yang disebabkan karena adanya promosi jabatan, pemberian insentif pegawai termasuk gaji ke 13 yang diberikan setiap tahunnya, iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PNS, Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, tambahan penghasilan guru non sertifikasi serta tambahan penghasilan lainnya bagi PNSD, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat, sepanjang berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Palopo;
3. Belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi/jasa kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat ;
4. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau membantu masyarakat yang mengalami Krisis Sosial;
5. Bantuan keuangan dianggarkan untuk pemberian bantuan kepada partai politik sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
6. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan social serta kebutuhan mendesak lainnya.

3.2.3.2. Belanja Langsung

Sementara itu, Belanja Langsung disusun dengan memperhitungkan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi, disusun baik menurut klasifikasi belanja berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi

yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Oleh karena itu Belanja Langsung diarahkan pada :

- 1) Penanganan Angka Pengangguran dan Kemiskinan serta Peningkatan SDM
- 2) Penuntasan Kawasan Kumuh dan Sanitasi Masyarakat
- 3) Penanganan Wilayah Terendam Banjir Skala Bencana dan Genangan Dalam Skala Banjir
- 4) Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Mendukung Aksesibilitas dan Pemerataan Pembangunan
- 5) Pemenuhan dan Pemantapan Layanan Standar Pelayanan Minimal dan Layanan Publik
- 6) Penguatan dan Pemantapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2020 Belanja Daerah menjadi Rp. 1,10 Trilyun.

3.2.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Palopo dari tahun 2014-2018 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah
Kota Palopo Tahun 2018-2021

No. Urut	URAIAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI (TW I) TAHUN 2019	ANGGARAN TAHUN 2019	PROYEKSI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	37.844.544.938	-	5.500.000.000	103.381.125.000	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	37.844.544.938	-	5.500.000.000	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	103.381.125.000	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.563.020.129	1.470.686.565	2.941.375.000	2.941.375.000	80.058.973.130
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	9.500.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	14.563.020.129	1.470.686.565	2.941.375.000	2.941.375.000	70.558.973.130
	PEMBIAYAAN NETTO	23.281.524.809	2.558.625.000	2.558.625.000	100.439.750.000	(80.058.973.130)

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 2020

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah, Trend Pembiayaan dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2020 adalah :

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
2. Sehubungan dengan rencana pembangunan pusat kuliner dan cinderamata, maka APBD diperkirakan defisit oleh karena itu pemerintah Kota Palopo berencana melakukan Pinjaman Daerah dengan nilai pinjaman diperkirakan sebesar Rp. 103 Milyar.
3. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
4. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD.

Dari analisis diatas maka jumlah penerimaan pembiayaan Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 103 Milyar. Sedangkan untuk Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 2,94 Milyar.

BAB. IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini akan mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Dengan memperhatikan prioritas dan tujuan pembangunan dalam RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, maka tema pembangunan daerah Tahun 2020 adalah “ **Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah** ” dengan 3 (tiga) kata kunci utama tema, yaitu :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan cakupan layanan dasar masyarakat seperti akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social masyarakat melalui perbaikan pelayanan dasar masyarakat, perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

b. Peningkatan Produktifitas

Peningkatan Produktifitas dalam konteks Pembangunan Kota Palopo Tahun 2020 diarahkan pada upaya memperkuat keunggulan dan potensi yang dimiliki Kota Palopo dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya infrastruktur.

Peningkatan produktifitas ini akan ditempuh dengan meningkatkan pertumbuhan sektor sektor potensial yang ada di Kota Palopo, merevitalisasi dan melakukan modernisasi lapangan usaha secara luas, dan transformasi sektor atau lapangan Usaha Jasa dan Perdagangan.

Hal kedua adalah menguatkan kinerja perdagangan daerah maupun peran Kota Palopo dalam perdagangan regional, dengan memastikan bahwa peningkatan investasi di daerah sebagai ujung tombak pertumbuhan lebih mampu menyerap tenaga kerja, melaksanakan diversifikasi produk, menguatkan stabilitas daerah secara internal, dan memberikan stimulus bagi usaha kecil menengah dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya upaya tersebut dilakukan secara berkesinambungan dengan meningkatkan kapasitas SDM pembangunan, pembangunan Infrastruktur, pemantapan regulasi dan institusi pemerintahan.

c. Peningkatan Perekonomian Daerah

Peningkatan perekonomian diarahkan pada upaya menguatkan ketangguhan dan ketahanan daerah dalam semua aspek pembangunan, dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah Kota Palopo akan berupaya menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, dengan menjaga tingkat inflasi, dan akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar tetap terjaga. Olehnya upaya untuk memastikan inklusifitas dan keberlanjutan pembangunan Ekonomi Kota Palopo menjadi point penting dalam aspek ini. Sehingga Pemerataan Antar Wilayah dan Tingkat Pendapatan lebih tercapai dengan mendorong penurunan

tingkat kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat dan tetap menjaga dan mempertahankan keberlanjutan dan keseimbangan pembangunan ekonomi dan lingkungan.

Kerangka pikir konseptual yang melandasi pemilihan tema dan prioritas pembangunan Kota Tahun 2020 didasarkan atas permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kota Palopo dan digambarkan dalam uraian sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Kerangka Pikir Konseptual Masalah,
Prioritas Pembangunan dan Tema RKPD Kota Palopo 2020

Masalah	Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Tema RKPD 2020
Belum meratanya pemenuhan sarana-prasarana serta SDM kependidikan dalam mendukung akses/partisipasi pada pendidikan dasar, pemenuhan layanan minimal pendidikan dasar, dan peningkatan kualitas pendidikan dasar.	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (1)	Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah
Belum meratanya pemenuhan sarana-prasarana serta SDM kesehatan dalam mendukung akses masyarakat atas layanan kesehatan, pemenuhan pelayanan minimal kesehatan, pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat serta belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (1)	
Masih signifikannya populasi penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada 2017 sebesar 8,78%, meningkat dari 2016 yang sebesar 8,74%. Jumlah penduduk miskin juga meningkat, pada 2017 sebanyak 15.440 jiwa, sementara pada 2016 sebanyak 15.020 jiwa 2015 hanya 14.510 jiwa.	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (1)	
Keterpenuhan sarana-prasarana perumahan dan pemukiman sudah mencukupi tetapi memerlukan upaya pemeliharaan. Rasio rumah layak huni sebesar 0,16, luas pemukiman kumuh masih terisa 35,09 Ha, dan rumah tinggal bersanitasi sebanyak 69,35%,	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah (2)	

Masalah	Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Tema RKPD 2020
dan masih ada rumah tinggal yang belum mengakses air bersih.		
Keterpenuhan sarana dan prasarana aksesibilitas wilayah belum optimal. Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik hanya 58,96, sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Jumlah pengguna terminal dan pelabuhan cenderung stagnan.	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah (2)	
Bertambahnya potensi bencana karena kerusakan alam/lingkungan. Jumlah spot/lokasi rawan bencana seperti tanah longsor, banjir, genangan, abrasi, rob, kekeringan dan kebakaran cenderung bertambah.	Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (4)	
Transparansi dan kualitas akuntabilitas kinerja masih rendah, Kualitas dan ketersediaan data dan informasi pembangunan serta Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) belum optimal, termasuk pada tingkat OPD, Tingkat kesesuaian dan kualitas perencanaan kinerja tingkat kota dan OPD masih lemah akibat asistensi, verifikasi dan sinkronisasi yang belum memadai, Kualitas SDM perencanaan pada level kota dan OPD belum optimal, Kualitas dan transparansi atas proses pengadaan barang dan jasa serta keterbukaan informasi publik lainnya masih terbatas dan belum massive.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi (5)	
Cakupan 100% terhadap penerima layanan untuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pemukiman dan perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi (5)	

Masalah	Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Tema RKPD 2020
masyarakat, dan sosial sesuai PP 02/2018 belum terpenuhi semua. Inovasi layanan publik juga masih lamban		
Belum optimalnya serapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian. Angka pengangguran Kota Palopo s.d tahun 2017 pada angka 10,96%, 2016 pada angka 14,43% yang masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing hanya berada pada angka 9,03% dan 8,15%, Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja karena terbatasnya akses untuk meningkatkan keterampilan kerja dan etos kewirausahaan.	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat (3)	
Stagnasi produksi dan produktivitas serta daya saing produk sektor perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja yakni pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta perikanan, Pembangunan dilakukan belum fokus pada pengembangan potensi dan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada.	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat (3)	
Belum optimalnya perkembangan sektor perekonomian sekunder dan tersier terutama perdagangan, industri dan jasa perkotaan, Belum optimalnya perkembangan investasi dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk pada sektor ekonomi kreatif,	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat (3)	

Tabel 4.2
Sinkronisasi Tema RKP Nasional,
RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKPD
Kota Palopo Tahun 2020

Tema RKP Nasional	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan	Tema RKPD Kota Palopo
Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas	Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan yang inklusif	Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah

Tabel 4.3.
Matriks Keterkaitan/Konsistensi Sasaran,
Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Palopo Tahun 2020

No	Prioritas Nasional		Prioritas Sulsel		Prioritas Kota Palopo	
	Indikator Sasaran	Target 2020	Indikator Sasaran	Target 2020	Indikator Sasaran	Target 2020
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan		Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan angka kemiskinan		Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
			Rata-rata Lama Sekolah	8.29	Rata-rata Lama Sekolah	10.39
			Angka Melek Huruf	91.26	Angka Melek Huruf	100
			Angka Harapan Hidup	70.16	Angka Harapan Hidup	70.34
	Tingkat Kemiskinan (%)	8.5-9.0	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.46	Persentase Penduduk Miskin	7.64
	Indeks Pembangunan Manusia	72.5	Indeks Pembangunan Manusia	72.19	Indeks Pembangunan Manusia	77.98
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.8 – 5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.97	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.51
			Presentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	96	Presentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	100
			Laju Pertumbuhan Penduduk	1.158%	Laju Pertumbuhan Penduduk	2.29
	Gini Rasio	0.375 - 0.380	Gini Rasio	0.376	Gini Rasio	0.337
			Skor Pola Pangan Harapan	94.4	Skor Pola Pangan Harapan	91.65
2	Penguatan Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah		Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah		Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	
			Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	84.95	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	92
			Proporsi rumah tangga dengan akses	75.65%	Proporsi rumah tangga dengan akses	95

No	Prioritas Nasional		Prioritas Sulsel		Prioritas Kota Palopo	
	Indikator Sasaran	Target 2020	Indikator Sasaran	Target 2020	Indikator Sasaran	Target 2020
			berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)		berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	
			Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik (%)	56.84	Persentase jalan kewenangan kota yang berkondisi baik	61
			Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh	0.055	Persentase Luas Pemukiman Kumuh (%)	0%
	Kontribusi Sulsel terhadap Pembangunan Nasional (%)	6.68				
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi, Industrialisasi dan kesempatan kerja		Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru dan Pengembangan destinasi wisata		Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat	
	Pertumbuhan ekonomi (%)	5.3-5.5	Pertumbuhan PDRB (%)	7.4-7.8	Pertumbuhan ekonomi (%)	7.16
			PDRB per Kapita (Juta/Tahun)	62.97	PDRB per Kapita (Juta/Tahun)	37.3
	Inflasi (%)	2.0-4.0	Inflasi (%)	3.0-1.0	Inflasi (%)	3.3
			Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	411.41	Produktifitas Tanaman Pangan Utama (Ton/Ha)	7,28
			Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	57.62	Produktifitas Tanaman perkebunan (Ton/Ha)	4,6
			Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	4.69	Produksi Daging dan Telur Daerah (Ton/Tahun)	8.275.669

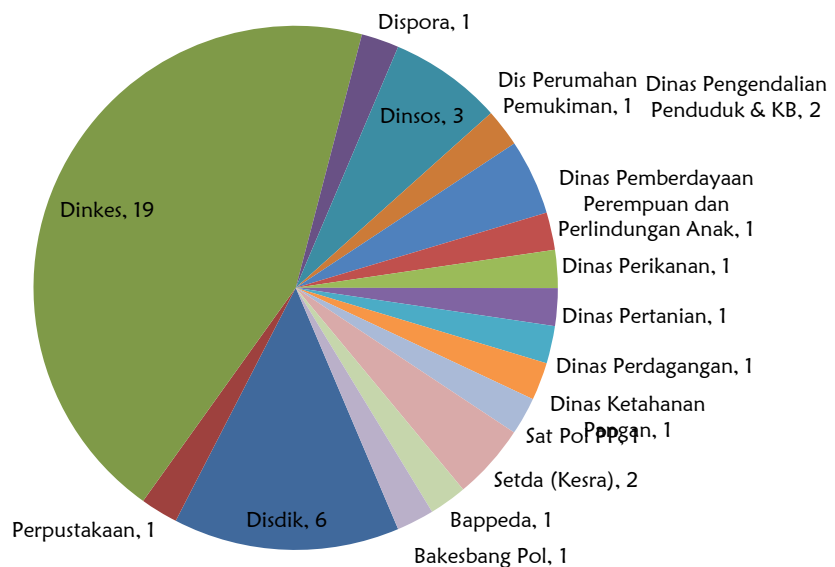
No	Prioritas Nasional		Prioritas Sulsel		Prioritas Kota Palopo	
	Indikator Sasaran	Target 2020	Indikator Sasaran	Target 2020	Indikator Sasaran	Target 2020
			Produksi sub sektor Peternakan (Daging/Kg)	138.555.338	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	15.512
			Produksi sub sektor Peternakan (Telur/Kg)	154.834.967	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	2.2
					Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.17
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	371.649	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.82
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup		Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup	4	Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	75.65	Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	90%
			Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani (Kawasan)	8	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	15
			Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	30	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.93

No	Prioritas Nasional		Prioritas Sulsel		Prioritas Kota Palopo	
	Indikator Sasaran	Target 2020	Indikator Sasaran	Target 2020	Indikator Sasaran	Target 2020
			Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	11.20	Timbulan sampah yang ditangani (%)	91.75
			Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi (%)	74	Persentase cakupan area pelayanan sampah (%)	70
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan		Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi dan Inovasi pelayanan public		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi	
			Opini Laporan Keuangan	WTP	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP
			Predikat SAKIP	A	Kategori Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Baik (B)
			Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan (%)	40.72	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	52
					Jumlah Konflik	0
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	C	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	20.61%
					Level SPIP Daerah (Point)	3
					Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	81.12

Kontribusi Program Perangkat Daerah Kota Palopo Terhadap Prioritas Nasional dan Sulsel Tahun 2010

Berikut adalah diagram yang menggambarkan jumlah kontribusi program perangkat daerah Kota Palopo melaksanakan masing-masing prioritas pembangunan pada tahun 2020 :

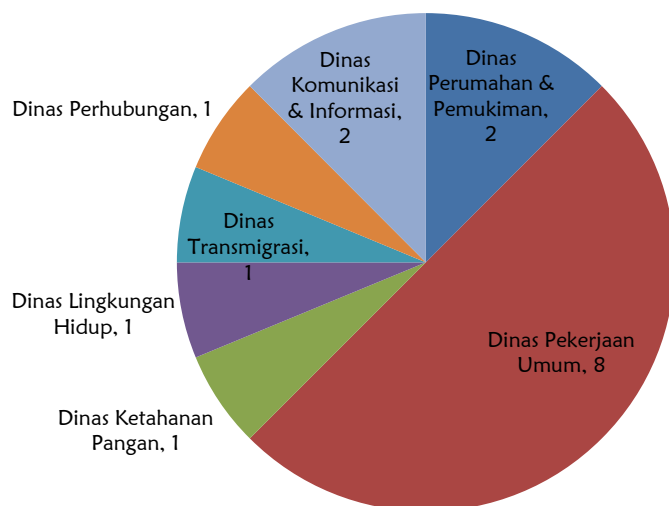
Prioritas I : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan (Pusat)
Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan (Sulsel)
Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Palopo)



Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan sebanyak 43 Program Perangkat Daerah untuk melaksanakan prioritas pertama pembangunan pada tahun 2020

Prioritas II :

- **Penguatan Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah (Nasional)**
- **Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah (Sulsel)**
- **Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah (Kota Palopo)**



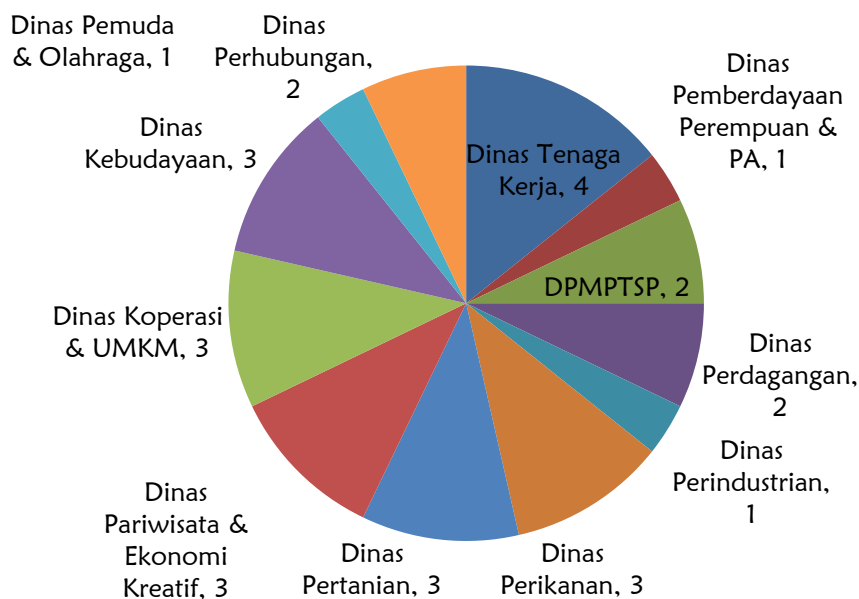
Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan sebanyak 16 Program Perangkat Daerah untuk melaksanakan prioritas kedua pembangunan pada tahun 2020.

Prioritas III :

Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja (Nasional)

Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru dan Pengembangan destinasi wisata (Sulsel)

Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat (Kota Palopo)



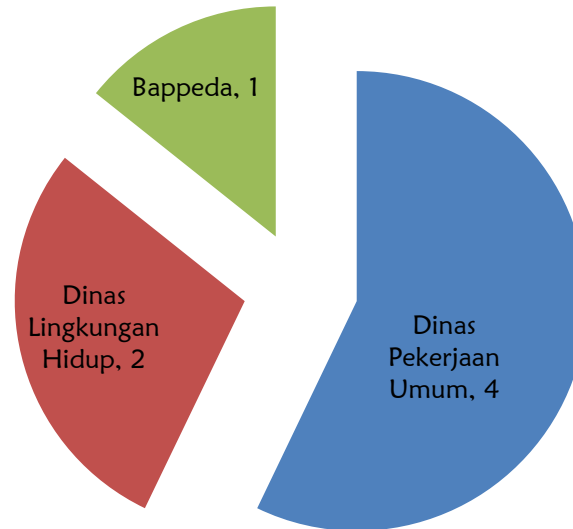
Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan sebanyak 28 Program Perangkat Daerah untuk melaksanakan prioritas ketiga pembangunan pada tahun 2020.

Prioritas IV :

Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Nasional)

Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup (Sulsel)

Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kota Palopo)



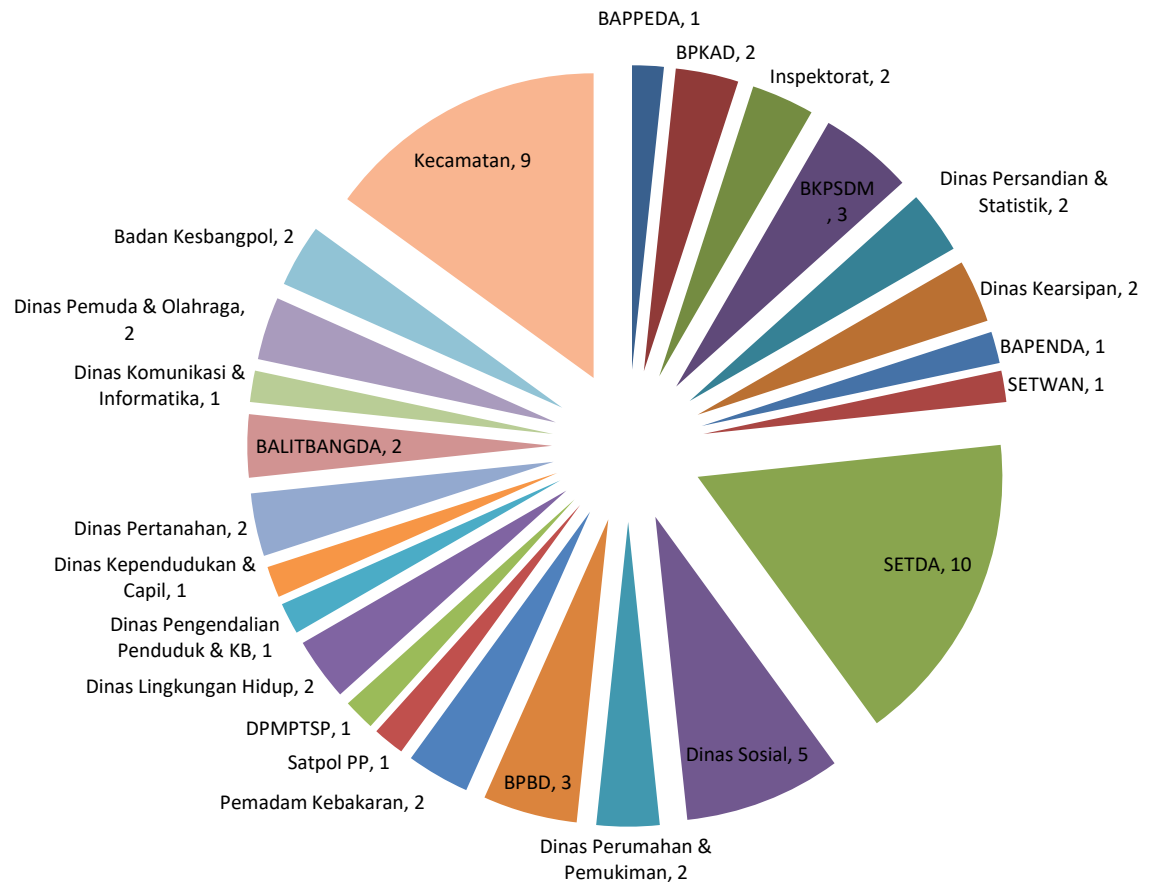
Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan sebanyak 7 Program Perangkat Daerah untuk melaksanakan prioritas keempat pembangunan pada tahun 2020.

Prioritas V :

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan (Nasional)

Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi dan Inovasi pelayanan public (Sulsel)

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi (Kota Palopo)



Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan sebanyak 60 Program Perangkat Daerah untuk melaksanakan prioritas kelima pembangunan pada tahun 2020

Berikut adalah tabel kontribusi program perangkat daerah Kota Palopo tahun 2020 terhadap prioritas nasional dan Sulawesi selatan tahun 2020 :

Tabel 4.4
Kontribusi Program Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2020
Terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Sulsel

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	o Peningkatan kualitas pendidikan menengah	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P1)	Program Peningkatan Akses Dan Kualitas Pendidikan (PP 1)	1	Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis
		o Peningkatan kualitas pendidikan vokasional			2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		o Pendidikan karakter dan sekolah sehat			3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		o Pengembangan dan kepeloporan pemuda			4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		o Peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan khusus		Program Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan (PP2)	5	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		o Perlindungan perempuan dan anak			6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		o Peningkatan peran perempuan perdesaan			7	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
		o Pembangunan rumah sakit regional			8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		o Pengembangan spesialisasi dan kualitas			9	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
		o layanan rumah sakit			10	Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan
		o Pelayanan 1000 hari pertama kehidupan serta promosi kesehatan			11	Program pengadaan, peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
		o Bina gizi dan kesehatan ibu dan anak			12	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
		o Upaya kesehatan dan standarisasi pelayanankesehatan		Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Pengendalian Penduduk, Dan Kesenjangan (PP3)	13	Program Bantuan Non Tunai
					14	Program Pembinaan Penyandang Cacat
					15	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
						Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
					16	Program Rumah Layak Huni
					17	Program Keluarga Berencana
					18	Program Pengembangan Bina Keluarga
					19	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
					20	Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
					21	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
					22	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
					23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
					24	Program Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Masyarakat
					25	Program Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
					26	Program Koordinasi Pengelolaan Perekonomian Daerah
					27	Program Perencanaan Ekonomi & Sosial Budaya
					28	Program Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat
				Program Pemenuhan Layanan Dasar Masyarakat (PP8)	29	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
					30	Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .
					31	Program Pendidikan Kesetaraan .
					32	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .
					33	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .
					34	Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir .
					35	Program Pelayanan Kesehatan Balita .
					36	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar .
					37	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif .

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
					38	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut .
					39	Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi .
					40	Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus .
					41	Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat .
					42	Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis .
					43	Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) .
Penguatan Konektifitas dan Pemerataan	Peningkatan Konektifitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	o Preservasi jalan	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah (2)	Program Pengembangan Pemukiman Dan Hunian Layak (PP4)	1	Program Pengembangan Perumahan
		o Pengendalian jalan akses wilayah terisolir,			2	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		o Penyelenggaraan kepelabuhanan dan angkutan pelayaran			3	Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
		o Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan			4	Program Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
		o Penanggulangan daerah-daerah potensi banjir			5	Program Pembinaan Jasa Konstruksi
		o Penyediaan air bersih			6	Program Peningkatan Produktifitas Kawasan Hunian dan Lingkungan Pemukiman
					7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum
					8	Program Transmigrasi Lokal
				Program Peningkatan Infrastruktur Daerah (PP5)	9	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
					10	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
					11	Program Pembangunan Infrastuktur Strategis Daerah
					12	Program Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
					13	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
					14	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
				Program Pemenuhan Layanan Dasar Masyarakat (PP8)	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah .
					16	Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
Peningkatan Nilai Tambah dan Kesempatan Kerja	Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis SDA, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	o Pengembangan pusat pertumbuhan baru	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat (P3)	Program Penyediaan Lapangan Kerja Dan Usaha Serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (PP10)	1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		o Peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan internasional			2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		o Peningkatan dan pengembangan ekspor			3	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan
		o Perluasan dan pengembangan tenaga kerja			4	Program Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
		o Pengembangan dan pembinaan kelompok			5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
		o UKM bagi masyarakat miskin			6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		o Pengembangan dan penataan fasilitas umum			7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		o Pengembangan pemasaran pariwisata		Program Pengembangan Produksi Dan Produktifitas Daerah (PP11)	8	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
		o Pengembangan usaha dan promosi produk UMKM			9	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Potensi Daerah
		o Penataan permukiman			10	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Air Tawar
					11	Program pengembangan budidaya perikanan
					12	Program pengembangan perikanan tangkap
					13	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil Pertanian
					14	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
					15	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan
				Program Pengembangan Pariwisata, Ekraf Dan Sarana Dan Prasarana Pendukung (PP12)	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
					17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata
					18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
					19	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
					20	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
					21	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
					22	Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
					23	Program Pembinaan Pedagang
					24	Program Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
					25	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
					26	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah
					27	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
					28	Program peningkatan pelayanan angkutan
Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber daya	o Hilirisasi pertanian	Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P4)	Program Pengelolaan Kualitas Tata Ruang, Sumber Daya Air Dan Persampahan (PP6)	1	Program Pengendalian Banjir
dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Air dan Pelestarian Lingkungan Hidup	o Hilirisasi perikanan			2	Program Pembangunan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong
		o Hilirisasi perkebunan			3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya
		o Hilirisasi peternakan			4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		o Hilirisasi pertambangan			5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
		o Eksplorasi sumber daya geologi konservasi dan pemanfaatan air tanah			6	Program Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		o Peningkatan produksi dan produktivitas ternak			7	Program Perencanaan Pengembangan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
		o Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup				
		o Rehabilitasi hutan dan lahan				
		o Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya				
		o Penataan hutan dan pemanfaatan hutan				
Stabilisasi Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan,	o Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi (P5)	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Reformasi Birokrasi (PP7)	1	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
	Reformasi Birokrasi, dan Inovasi Pelayanan Publik	o Penilaian potensi dan kompetensi aparatur			2	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		o Penataan dan penguatan kelembagaan			3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
		o Pengembangan dan implementasi e-government			4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
		o Pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan.			5	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
					6	Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Pelayanan Data serta Informasi Kepegawaian
					7	Program Pelayanan Kepegawaian Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir)
					8	Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya Aparatur
					9	Program Pengembangan Statistik Sektoral
					10	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
					11	Program Pembinaan Kearsipan
					12	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
					13	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
					14	Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
					15	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa
					16	Program Pengelolaan Ketatausahaan dan Rumah Tangga
					17	Program Kehumasan dan Keprotokoleran
					18	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan, Perbendaharaan dan TPTGR
					19	Program Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah
					20	Program Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum
					21	Program Pengelolaan Administrasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
				Program Pemenuhan Layanan Dasar Masyarakat (PP8)	22	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti .
					23	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti .
					24	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti .
					25	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti .
					26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota .
					27	Program Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana .
					28	Program Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah .
					29	Program Pelayanan Informasi rawan bencana .

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
					30	Program Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana .
					31	Program Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana .
					32	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran .
					33	Program Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Program Pengembangan Layanan Non Dasar, Inovasi Daerah Dan Partisipasi Publik (PP9)	34	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan
					35	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
					36	Program Pelayanan Pemakaman &Pengelolaan Pertamanan
					37	Program Pelayanan Kontrasepsi
					38	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
						Kependudukan dan Catatan Sipil
					39	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran .
					40	Program Pelayanan Pertanahan
					41	Program Perencanaan dan Pengendalian Tanah
					42	Program Pengelolaan Arsip
					43	Program Tata Laksana Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik
					44	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
					45	Program Penelitian dan Pengembangan
					46	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
					47	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
					48	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
					49	Program peningkatan peran serta kepemudaan
					50	Program Pendidikan Politik Masyarakat

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Program Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2020	Program Pembangunan Daerah	No	Program Perangkat Daerah Kota Palopo
					51	Program Peningkatan Demokratisasi Ideologi dan Pembauran
					52	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai gambaran tentang kondisi Kota Palopo yang diharapkan terwujud/tercapai pada akhir periode 2018-2023. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasannya dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah.

**Visi Kota Palopo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
“ Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan
Berkelanjutan Pada Tahun 2023 ”.**

Pada Visi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak ke arah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu member solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya local

Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

Misi

Sesuai dengan Visi tersebut diatas dan sebagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;

5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

Tabel 4.5

Penjelasan Misi dan Keterkaitan dengan Visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Misi ini bermakna bahwa pembangunan manusia dilaksanakan melalui intervensi sektor pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan perlindungan sosial masyarakat, utamanya bagi kelompok-kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok minoritas.	Maju
2	Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Misi ini bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup.	Berkelanjutan dan Maju
3	Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan	Modernisasi layanan public bermakna bahwa pelaksanaan layanan public diubah menjadi lebih inovatif, professional, serta efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan public dalam pembangunan.	Inovatif
4	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan kerja didorong pada sector usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat.	Maju

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
5	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sector pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu yang berdimensi religi (agama).	Maju dan Berkelanjutan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Jumlah tujuan pembangunan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) dan sasaran sebanyak 11 (sebelas)

Perumusan tujuan dan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selain menerjemahkan visi/misi, perumusan tujuan dan sasaran juga dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis daerah, dan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja pembangunan Kota Palopo 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah
Kota Palopo Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja 2020
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)		Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.98
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.39
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Angka Harapan Hidup	70.34
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)		Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	81
	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0
	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	3.73
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	15
		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.93
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)		Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	66
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	75
		Level SPIP Daerah (Point)	3
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	81.12
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)		Pertumbuhan PDRB (%)	7.16
	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.51
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S.10)	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.3
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)		Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	2.2

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja 2020
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.17
		Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.82

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam menentukan tujuan jangka menengah penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu strategis ini dianalisis pada level internasional/global, nasional dan daerah. Adapun isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Palopo yang perlu mendapat perhatian ke depan serta faktor penentu keberhasilan dalam penanganannya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penanganan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
2. Penanganan Kawasan Kumuh dan Akses Sanitasi Masyarakat
3. Penanganan Wilayah Terendam Banjir Skala Bencana dan Genangan Skala Banjir.
4. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Mendukung Aksesibilitas dan Pemerataan Pembangunan
5. Penguatan Layanan Standar Pelayanan Minimal dan Layanan Publik
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tabel 4.7
Tingkat Isu, Isu Daerah dan Faktor
Penentu Keberhasilan

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
Tingkat Internasional:		
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Kemiskinan perdesaan dan perkotaan (T1)	Kordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kantong-kantong kemiskinan di perdesaan dan perkotaan
	2. Gizi, pangan dan pertanian berkelanjutan (T2)	Penanganan gizi masyarakat, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan
	3. Kehidupan sehat pada semua usia (T3)	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan serta pengembangan pola hidup sehat dalam masyarakat
	4. Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan (T4)	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan dan perbaikan capaian akreditasi SD dan SMP
	5. Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (T5)	Kebijakan dan penganggaran sensitif gender serta perlindungan perempuan dan dari korban kekerasan
	6. Air bersih dan sanitasi (T6)	Penyediaan air bersih dan sanitasi total berbasis masyarakat
	7. Kesempatan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak (T8)	Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing tenaga kerja
	8. Infrastruktur, industri dan inovasi (T9)	Pengembangan kawasan industri, infrastruktur wilayah dan inovasi daerah

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
	9. Kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan (T10)	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa tertinggal
	10. Pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (T11)	Bedah rumah dan pembangunan PSU pada pemukiman kumuh
	11. Limbah B3 dan timbunan sampah (T12)	Penanganan limbah B3 dan daur ulang sampah
	12. Perubahan iklim (T13)	Penurunan emisi gas rumah kaca
	13. Penangkapan ikan dalam batasan biologis aman (T14)	Sosialisasi dan penyadaran tentang batasan biologis aman dalam penangkapan ikan
	14. Pemeliharaan tutupan lahan (T15)	Pemantauan dan pengendalian tutupan lahan
	15. Konflik dan Tatakelola Pemerintahan (T16)	Penanganan konflik dan Reformasi Birokrasi
	16. Pendapatan Pemerintah Daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah
Masyarakat Ekonomi Asean	1. Daya saing produk dalam masyarakat ekonomi Asean	Peningkatan daya saing produk
	2. Daya saing tenaga kerja dalam masyarakat ekonomi Asean	Peningkatan daya saing tenaga kerja
Tingkat Nasional:		
Prioritas pembangunan nasional	1. Revolusi mental	Pembangunan sosial budaya dan mental spiritual
	2. Pendidikan	Pendidikan vokasi, kualitas guru dan pencapaian SPM
	3. Kesehatan	Pola hidup sehat dan pencapaian SPM
	4. Infrastruktur	Infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman
	5. Kemandirian pangan	Pembangunan pertanian berkelanjutan
	6. Kemandirian energi dan ketenagalistrikan	Pengembangan energi terbarukan
	7. Kemaritiman dan kelautan	Pembangunan tol laut dan perikanan
	8. Industri dan pariwisata	Pembangunan kawasan industri dan pariwisata
	9. Pemerataan antar kelompok pendapatan	Penanggulangan kemiskinan
	10. Pembangunan desa	Perbaikan kualitas pemanfaatan dana desa
	11. Pembangunan perbatasan	Pembangunan wilayah perbatasan antar Negara
	12. Pembangunan daerah tertinggal	Pembangunan kabupaten tertinggal
	13. Pembangunan perkotaan	Pembangunan pemukiman kumuh perkotaan
	14. Kepatuhan dan penegakan hukum	Penegakan hukum

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
	15. Keamanan dan ketertiban	Penanganan pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keamanan
	16. Politik dan demokrasi	Penyelenggaraan kegiatan politik dan demokrasi
	17. Tata kelola dan reformasi birokrasi	Perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi
Tingkat Daerah:		
Permasalahan Pembangunan Daerah	1. Pendidikan	Pembangunan pendidikan
	2. Kesehatan	Pembangunan kesehatan
	3. Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
	4. Infrastruktur wilayah	Pembangunan transportasi, perhubungan, pemukiman dan perumahan
	5. Lingkungan hidup	Penanganan tutupan lahan dan pengendalian pen-cemaran
	6. Tatakelola pemerintahan	Perbaikan sistem akunta-bilitas kinerja
	7. Pelayanan public	Pemenuhan standar pe-layanan minimal
	8. Ketertiban, ketentera-man dan konflik social	Penegakan ketertiban dan ketenteraman serta pe-nanganan konflik social

4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Prioritas pembangunan daerah Kota Palopo pada tahun 2020 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah
3. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat
4. Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi

Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palopo 2020 tersebut didasarkan pada analisa terhadap kesesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2020. Jumlah program pembangunan daerah yang dilaksanakan di Tahun 2020 sebanyak 12 Program Pembangunan yang Dilaksanakan oleh 49 Perangkat Daerah.

Berikut adalah matriks hubungan antara arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Palopo 2018-2023 terhadap prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2020 :

Tabel 4.8
Matriks keterkaitan dan kerangka konseptual
Arah kebijakan, Program Pembangunan dan Prioritas Pembangunan
Kota Palopo Tahun 2020

Arah Kebijakan Tahun 2020	Tahun 2020			Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target		
Peningkatan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)	Persentase Rata-Rata Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar (%)	0	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dinas Pendidikan & Dinas Perpustakaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas PPA, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Setda, Bappeda, Bakesbang Pol Linmas
		Angka Melek Huruf (%)	100		
Akselerasi cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan kesehatan serta pemenuhan UHC	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)	Tingkat Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) (%)	100		
		Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	60		

Arah Kebijakan Tahun 2020	Tahun 2020			Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target		
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1		
Akselerasi Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	39.91		
		Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12866		
		Rasio ketergantungan	47.58		
		Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)	2.29		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74.15		
Optimalisasi Pemenuhan Sanitasi dan Pemukiman Layak dan Pencegahan Munculnya Kawasan dan Rumah Tangga Kumuh	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	30	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman, Dinas PU PR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LH dan Kebersihan, Dinas Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dis Komunikasi dan Informas, Dinas

Arah Kebijakan Tahun 2020	Tahun 2020			Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target		
					Perdagangan, Bappeda
		Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	92	Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	95	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	
		Backlog Perumahan (Angka)	4633		
Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemandapan jalan di daerah dan fasilitas perkotaan lainnya	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	2,032,555	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (Km/Unit Kendaraan)	22		
Akselarasi Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)	Jumlah Kejadian Banjir Kategori Bencana (Kali/Tahun)	0	Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

Arah Kebijakan Tahun 2020	Tahun 2020			Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target		
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	4.77		
Akselerasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)	Indeks Profesionalisme Aparatur (Angka)	71	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BKDPSDM, Dis Persandian Statistik, Dinas Kearsipan, Bappeda, Sekertariat DPRD, Sekertariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU PR, Dinas Sosial, Dis Perumahan & Kawasan Pemukiman, BPBD, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP, DPMPTSP, Dis LH & Kebersihan, Dis Pengendalian Penduduk & KB, Dis Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dis Pertanahan, Sekretariat Daerah, Balitbangda, Dis Kominfo, Dis Pemuda & Olahraga, Bakesbang Pol & Linmas, Kecamatan

Arah Kebijakan Tahun 2020	Tahun 2020			Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target		
		Jumlah temuan BPK (Temuan)	15		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen kelengkapan SAKIP yang terukur (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, IKU, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan)	90		
		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada		
Akselerasi layanan dasar maupun layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	Rata-rata Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota (%)	100		
	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	Predikat Zona Pelayanan Publik (Ombudman) (Angka)	83		

Arah Kebijakan Tahun 2020	Tahun 2020			Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target		
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja (Life Skill) dan Peningkatan Rasio Daya Derap Tenaga Kerja	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	90.47	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Dis Perindustrian, Dinas Perikanan, Dis Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata & Ekraf, Dinas Kebudayaan, Dis Pemuda & Olahraga, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dis Koperasi & UMKM, Dis Perhubungan, Dinas PU PR
		Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	63.24		
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (per 100 Juta Investasi)	9		
Peningkatan Nilai Tambah Produk	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	78.6		

Arah Kebijakan Tahun 2020	Tahun 2020			Prioritas Pembangunan Daerah 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target		
Akselerasi Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Seniman dan Budayawan, Infrastruktur, Kualitas Produk dan Kerjasama serta Promosi		Produktivitas total daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	98.32		
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.92		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)	Nilai PAD dari ekonomi kreatif daerah (Rupiah)	4.67 Milyar		
		Nilai PAD sektor pariwisata (Rupiah)	220 Juta		
		Lama kunjungan wisata (Rata - rata lama kunjungan wisata dalam 1 tahun)	2		

4.4. Pokok Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan yang selanjutnya dirumuskan menjadi program/kegiatan oleh tim perumus RKPD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Berikut adalah tabel penyelarasan pokok pokok pikiran DPRD terhadap sasaran dan prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2020 :

Tabel 4.9
Penyelarasan Pokok Pikiran DPRD Terhadap Sasaran dan
Prioritas Pembangunan 2020

Pokok Pikiran DPRD	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran 2020	Prioritas Pembangunan 2020
Penanganan Kemiskinan, Pengurangan Angka Pengangguran	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat
Penataan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan

Pokok Pikiran DPRD	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran 2020	Prioritas Pembangunan 2020
			Daya Saing Daerah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	
Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Angka Harapan Hidup	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Pemenuhan Sarana Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi
		Level SPIP Daerah (Point)	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi

4.5. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RKPD. Target-target TPB/SDGs sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) dengan RKPD Tahun 2020 merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kota Palopo.

RKPD Kota Palopo Tahun 2020 telah mengarusutamakan pencapaian TPB dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi TPB dalam RKPD Kota Palopo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel.4.10
Sinkronisasi Tujuan TPB dan Program Pembangunan Daerah
Kota Palopo Tahun 2020

No	Tujuan TPB	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)	Dinas Pendidikan & Dinas Perpustakaan
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas PPA, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Setda,

No	Tujuan TPB	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
			Bappeda, Bakesbang Pol Linmas
		PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	Dis Perindustrian, Dinas Perikanan, Dis Pertanian, Peternakan dan Perkebunan,
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas PPA, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Setda, Bappeda, Bakesbang Pol Linmas
		PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU PR, Dinas Sosial, Dis Perumahan & Kawasan Pemukiman, BPBD, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP,
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)	Dinas Pendidikan & Dinas Perpustakaan
		PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU PR, Dinas Sosial, Dis Perumahan & Kawasan Pemukiman, BPBD, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP,
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas PPA, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Setda, Bappeda, Bakesbang Pol Linmas

No	Tujuan TPB	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)	Dis PU PR, Dis Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bappeda
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)	Dis PU PR, Dinas Perhubungan, Dis Komunikasi dan Informas, Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	Dis Perindustrian, Dinas Perikanan, Dis Pertanian Peternakan dan Perkebunan,
		PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)	Dinas Pariwisata & Ekraf, Dinas Kebudayaan, Dis Pemuda & Olahraga, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dis Koperasi & UMKM, Dis Perhubungan, Dinas PU PR
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara		
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman, Dinas PU PR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LH dan Kebersihan, Dinas Transmigrasi
		PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)	Dis PU PR, Dinas Perhubungan, Dis Komunikasi dan Informas, Dinas Perdagangan
12	Menjamin pola dan produksi	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR,	DPMPSTP, Dis LH & Kebersihan, Dis Pengendalian Penduduk &

No	Tujuan TPB	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
	konsumsi yang berkelanjutan	INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	KB, Dis Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP, Dis Pertanahan, Dinas Kearsipan, Sekretariat Daerah, Balitbangda, Dis Kominfo, Dis Pemuda & Olahraga, Bakesbang Pol & Linmas, Kecamatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	Dis Perindustrian, Dinas Perikanan, Dis Pertanian Peternakan dan Perkebunan,
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU PR, Dinas Sosial, Dis Perumahan & Kawasan Pemukiman, BPBD, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP,
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas PPA, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Setda, Bappeda, Bakesbang Pol Linmas
		PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	Dis Perindustrian, Dinas Perikanan, Dis Pertanian Peternakan dan Perkebunan,
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)	Dis PU PR, Dis Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bappeda
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BKDPSDM, Dis Persandian Statistik, Dinas Kearsipan, Bapenda,

No	Tujuan TPB	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
	pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.		Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah,
		PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	DPMPTSP, Dis LH & Kebersihan, Dis Pengendalian Penduduk & KB, Dis Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP, Dis Pertanahan, Dinas Kearsipan, Sekretariat Daerah, Balitbangda, Dis Kominfo, Dis Pemuda & Olahraga, Bakesbang Pol & Linmas, Kecamatan
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BKDPSDM, Dis Persandian Statistik, Dinas Kearsipan, Bapenda, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah,
		PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	DPMPTSP, Dis LH & Kebersihan, Dis Pengendalian Penduduk & KB, Dis Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP, Dis Pertanahan, Dinas Kearsipan, Sekretariat Daerah, Balitbangda, Dis Kominfo, Dis Pemuda & Olahraga, Bakesbang Pol & Linmas, Kecamatan

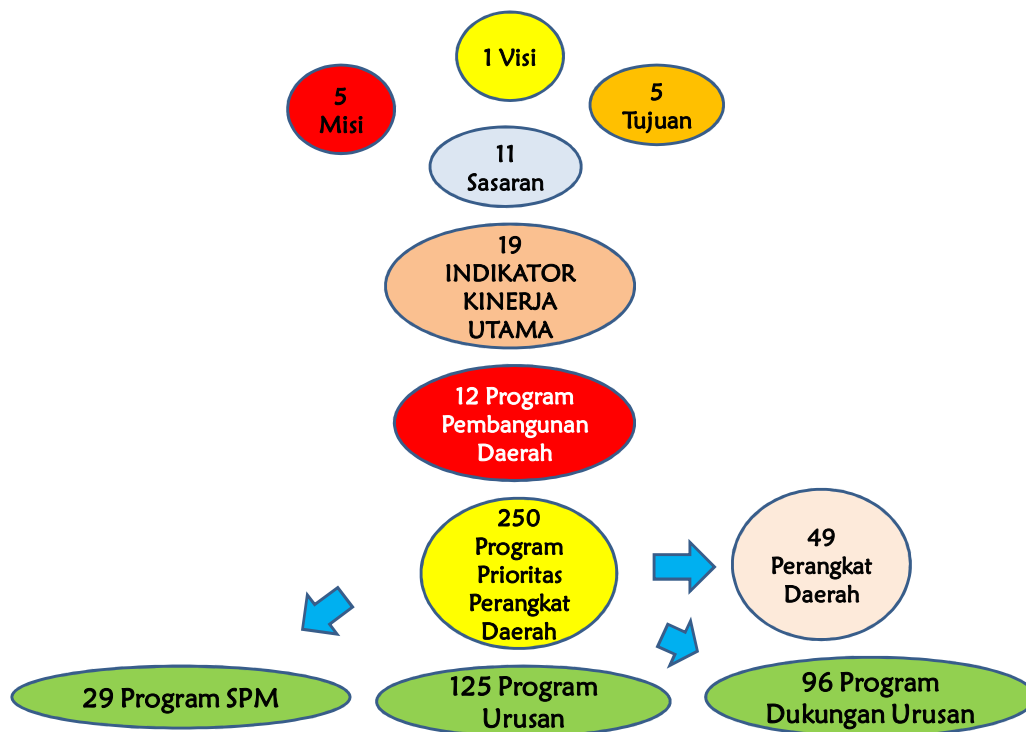
BAB. V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit **rencana program dan kegiatan prioritas daerah** yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan sebanyak **12 Program Pembangunan Daerah** yang berisi sebanyak **250 Program Perangkat Daerah**. Sebanyak **29 program** perangkat daerah merupakan program untuk memenuhi **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, 129 Program Perangkat Daerah untuk Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan dan 96 Program Dukungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Log Frame Program RKPD 2020



Sebelum proses penyusunan RKPD Kota Palopo 2020 diawali dengan pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat Kota Palopo yang diuraikan sebagai berikut :

Acara	Tanggal Pelaksanaan	Isu-Isu Utama
Musrenbang Kelurahan	14-31 Januari 2019	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terutama Soal Penanganan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja dan Lapangan Berusaha serta Pembinaan Usaha Produktif Masyarakat
		Penanganan Kualitas Lingkungan, Penataan Kasawan Perumahan Pemukiman, Persampahan dan Persoalan genangan air dalam skala banjir
		Penguatan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terutama bidang air bersih dan limbah domestick (sanitasi)
		Lahir sebanyak 1.992 Usulan Masyarakat
Musrenbang Kecamatan	18-20 Februari 2019	Penajaman Isu Pemenuhan Pelayanan Dasar Terutama Pemantapan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Penanganan Limbah Domestik
		Penajaman Isu Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti penanganan banjir dan genangan, penanganan persampahan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan dan sarana prasarana publik seperti pendidikan dan kesehatan
		Penajaman atas isu pemberdayaan masyarakat, peningkatan lapangan berusaha dan lapangan kerja serta life skill
		Penguatan dan Pemantapan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah dan Optimalisasi Dana Kelurahan
		Lahir sebanyak 405 Usulan Prioritas Kecamatan
Reses Anggota DPRD		Penanganan Kemiskinan, Pengurangan Angka Pengangguran

Acara	Tanggal Pelaksanaan	Isu-Isu Utama
		Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan
		Penataan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pelayanan Kesehatan
		Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
		Pemenuhan Sarana Dasar
		Lahir sebanyak 366 Usulan Pekerjaan yang Merupakan Pokok Pikiran DPRD
Forum SKPD	28 Februari - 1 Maret	Sinkronisasi dan Penajaman Usulan Terhadap Prioritas dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
		Sebanyak 119 Usulan Diterima Perangkat Daerah
Musrenbang Anak	27 Maret 2019	Fasilitas Publik Ramah Anak
		Pemenuhan Hak Dasar Anak
		Pemantapan Indikator Kota Layak Anak
Musrenbang Kota Palopo	28 Maret 2019	Pemantapan pada lima Prioritas Pembangunan Daerah yakni Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha dan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah, Pemantapan Ketahanan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi

Selengkapnya tabel rencana program kegiatan serta kerangka pendanaan daerah tahun 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut (indikatif : lihat di lampiran) :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA PALOPO**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							535,717,030,938				571,895,580,855		
DINAS PENDIDIKAN							42,642,030,238				43,814,590,580		
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1	01			PENDIDIKAN									
1	01	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)	100%	1,045,767,400		100%	1,085,090,000	
1	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar & Masuk		Kota Palopo	1000 Surat	85,000,000	APBD Kota	1000 Surat	152,400,000
1	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Air, Listrik, Internet yang		Kota Palopo	4 Rekening	185,000,000	APBD Kota	4 Rekening	124,440,000
1	01	01	01	04	Pengadaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi yang dibayar		Kota Palopo	27 Orang	197,207,400	APBD Kota	27 Orang	198,000,000
1	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibiayai		Kota Palopo	52 Unit	12,650,000	APBD Kota	52 Unit	12,650,000
1	01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan		Kota Palopo	2002 m	37,000,000	APBD Kota	2002 m	37,740,000
1	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang diadakan		Kota Palopo	21 Jenis	2,000,000	APBD Kota	22 Jenis	2,040,000
1	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Koran/Buku perundang-undangan		Kota Palopo	3 Eksamplar	5,520,000	APBD Kota	3 Eksamplar	5,520,000
1	01	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas		Kota Palopo	50 Kali	175,000,000	APBD Kota	50 Kali	204,000,000
1	01	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli		Kota Palopo	5 Unit	11,550,000	APBD Kota	5 Unit	12,000,000
1	01	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli		Kota Palopo	2 Unit	40,000,000	APBD Kota	2 Unit	40,200,000
1	01	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli		Kota Palopo	2 Unit/Set	4,000,000	APBD Kota	2 Unit/Set	4,080,000
1	01	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kota Palopo	2.127 m	50,000,000	APBD Kota	2.127 m	50,200,000
1	01	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil Jabatan kondisi baik		Kota Palopo	1 Unit	20,000,000	APBD Kota	1 Unit	20,300,000

1	01	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas kondisi baik			Kota Palopo	53 Unit	14,000,000	APBD Kota		53 Unit	14,280,000
1	01	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			Kota Palopo	81 Unit	6,000,000	APBD Kota		81 Unit	6,000,000
1	01	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			Kota Palopo	50 Unit	10,000,000	APBD Kota		50 Unit	10,200,000
1	01	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti BIMTEK			Kota Palopo	12 Orang	15,000,000	APBD Kota		12 Orang	15,000,000
1	01	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah pengelola administrasi umum			Kota Palopo	12 Bulan	175,840,000	APBD Kota		12 Bulan	176,040,000
1	01	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	11,000,000			100%	11,000,000
1	01	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan			Kota Palopo	2 Dokumen	5,000,000	APBD Kota		2 Dokumen	5,000,000
1	01	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran			Kota Palopo	2 Laporan	3,000,000	APBD Kota		2 Laporan	3,000,000
1	01	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun			Kota Palopo	1 Laporan	3,000,000	APBD Kota		1 Laporan	3,000,000
1	01	01	03		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Penduduk Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD (%)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S 1)			145,000,000				231,000,000
1	01	01	03	02	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD yang dibina (TK,KB, TPA dan			Kota Palopo	120 PAUD	145,000,000	APBD Kota		120 PAUD	231,000,000
1	01	01	04		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S 1)			24,513,969,415				24,833,907,157
1	01	01	04	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Sekolah yang dibangun			Kota Palopo	7 Gedung	350,000,000	APBD Kota		7 Gedung	605,000,000
1	01	01	04	03	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah	Jumlah Pakaian yang di adakan			Kota Palopo	12989 Siswa	3,866,050,000	APBD Kota		12989 Siswa	3,904,710,500
1	01	01	04	04	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara	Jumlah Sekolah yang mendapatkan			Kota Palopo	110 Sekolah	19,843,195,200	APBN		110 Sekolah	19,843,195,200
1	01	01	04	05	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti (OSN, O2SN dan FLS2N)			Kota Palopo	300 Siswa	279,134,215	APBD Kota		300 Siswa	279,405,557
1	01	01	04	06	Pelaksanaan Pendidikan Gratis	Jumlah laporan Pendidikan gratis			Kota Palopo	112 Laporan	100,590,000	APBD Kota		112 Laporan	101,595,900
1	01	01	04	07	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah	Jumlah siswa SD dan SMP yang mengikuti ujian			Kota Palopo	7500 Siswa	75,000,000	APBD Kota		7500 Siswa	100,000,000

1	01	01	05		Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S 1)			26,000,000				30,000,000
1	01	01	05	02	Pelaksanaan Penyediaan Operasional Pendidikan Non Formal	Jumlah Kelompok/Lembaga Kursus yang			Kota Palopo	10 Kelompok	26,000,000	APBD Kota		10 Kelompok	30,000,000
1	01	01	06		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-Rata Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar (per 10.000)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S 1)			185,000,000				192,300,000
1	01	01	06	01	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan yang dievaluasi			Kota Palopo	3 Bidang	50,000,000	APBD Kota		3 Bidang	51,000,000
1	01	01	06	02	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah Dewan Pendidikan yang mengikuti			Kota Palopo	11 Orang	55,000,000	APBD Kota		11 Orang	60,500,000
1	01	01	06	03	Pelaksanaan UNBK SMP/MTs	Jumlah siswa yang mengikuti UNBK			Kota Palopo	10137 Siswa	45,000,000	APBD Kota		10137 Siswa	45,400,000
1	01	01	06	04	Pelaksanaan PPDB online	Jumlah peserta PPDB Online			Kota Palopo	7500 Orang	35,000,000	APBD Kota		7500 Orang	35,400,000
1	01	01	07		Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis	Persentase Murid Pendidikan Dasar yang Menerima Bantuan Pendidikan (%)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S 1)			7,066,140,000				7,066,140,000
1	01	01	07	01	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 1 Lalebbata	Jumlah siswa			Kota Palopo	532 Orang	111,900,000	APBD Kota		532 Orang	111,900,000
1	01	01	07	02	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 2 Pincepute	Jumlah Siswa			Kota Palopo	139 Orang	33,300,000	APBD Kota		139 Orang	33,300,000
1	01	01	07	03	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 3 Surutanga	Jumlah Siswa			Kota Palopo	572 Orang	123,300,000	APBD Kota		572 Orang	123,300,000
1	01	01	07	04	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 4 Malimongan	Jumlah siswa			Kota Palopo	314 Orang	68,300,000	APBD Kota		314 Orang	68,300,000
1	01	01	07	05	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 5 Salamae	Jumlah siswa			Kota Palopo	403 Orang	108,100,000	APBD Kota		403 Orang	108,100,000
1	01	01	07	06	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 6 Bogar	Jumlah siswa			Kota Palopo	330 Orang	66,000,000	APBD Kota		330 Orang	66,000,000
1	01	01	07	07	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 7 Ponjalae	Jumlah siswa			Kota Palopo	340 Orang	68,500,000	APBD Kota		340 Orang	68,500,000
1	01	01	07	08	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 8 Salobulo	Jumlah siswa			Kota Palopo	128 Orang	31,100,000	APBD Kota		128 Orang	31,100,000
1	01	01	07	09	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 9 Mattekko	Jumlah siswa			Kota Palopo	155 Orang	29,200,000	APBD Kota		155 Orang	29,200,000
1	01	01	07	10	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 10 Tomarunding	Jumlah siswa			Kota Palopo	108 Orang	21,600,000	APBD Kota		108 Orang	21,600,000
1	01	01	07	11	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 11 Dangerakko	Jumlah siswa			Kota Palopo	334 Orang	64,200,000	APBD Kota		334 Orang	64,200,000
1	01	01	07	12	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 12 Langkanae	Jumlah siswa			Kota Palopo	481 Orang	134,700,000	APBD Kota		481 Orang	134,700,000
1	01	01	07	13	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 13 Tappong	Jumlah siswa			Kota Palopo	282 Orang	56,400,000	APBD Kota		282 Orang	56,400,000

1	01	01	07	14	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 14 Temmalullu	Jumlah siswa			Kota Palopo	155 Orang	33,300,000	APBD Kota		155 Orang	33,300,000
1	01	01	07	15	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 15 Salolo	Jumlah siswa			Kota Palopo	150 Orang	28,400,000	APBD Kota		150 Orang	28,400,000
1	01	01	07	16	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 16 Sampoddo	Jumlah siswa			Kota Palopo	207 Orang	51,800,000	APBD Kota		207 Orang	51,800,000
1	01	01	07	17	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 17 Benteng	Jumlah siswa			Kota Palopo	283 Orang	73,100,000	APBD Kota		283 Orang	73,100,000
1	01	01	07	18	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 18 Maroangin	Jumlah siswa			Kota Palopo	330 Orang	85,600,000	APBD Kota		330 Orang	85,600,000
1	01	01	07	19	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 19 Mappesau	Jumlah siswa			Kota Palopo	60 Orang	12,000,000	APBD Kota		60 Orang	12,000,000
1	01	01	07	20	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 20 Battang	Jumlah siswa			Kota Palopo	76 Orang	20,300,000	APBD Kota		76 Orang	20,300,000
1	01	01	07	21	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 21 Paredean	Jumlah siswa			Kota Palopo	101 Orang	20,200,000	APBD Kota		101 Orang	20,200,000
1	01	01	07	22	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 22 Murante	Jumlah siswa			Kota Palopo	245 Orang	55,800,000	APBD Kota		245 Orang	55,800,000
1	01	01	07	23	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 23 Batara	Jumlah siswa			Kota Palopo	458 Orang	102,500,000	APBD Kota		458 Orang	102,500,000
1	01	01	07	24	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 24 Temmalebba	Jumlah siswa			Kota Palopo	404 Orang	80,800,000	APBD Kota		404 Orang	80,800,000
1	01	01	07	25	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 25 Sabbamparu	Jumlah siswa			Kota Palopo	260 Orang	52,000,000	APBD Kota		260 Orang	52,000,000
1	01	01	07	26	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 26 Pattene	Jumlah siswa			Kota Palopo	369 Orang	98,800,000	APBD Kota		369 Orang	98,800,000
1	01	01	07	27	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 27 Lebang	Jumlah siswa			Kota Palopo	162 Orang	35,300,000	APBD Kota		162 Orang	35,300,000
1	01	01	07	28	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 28 Mancani	Jumlah siswa			Kota Palopo	200 Orang	52,600,000	APBD Kota		200 Orang	52,600,000
1	01	01	07	29	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 29 Songka	Jumlah siswa			Kota Palopo	266 Orang	53,200,000	APBD Kota		266 Orang	53,200,000
1	01	01	07	30	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 30 Mattirowalie	Jumlah siswa			Kota Palopo	567 Orang	124,400,000	APBD Kota		567 Orang	124,400,000
1	01	01	07	31	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 31 Salotellue	Jumlah siswa			Kota Palopo	170 Orang	36,900,000	APBD Kota		170 Orang	36,900,000
1	01	01	07	32	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 32 Lagaligo	Jumlah siswa			Kota Palopo	547 Orang	134,800,000	APBD Kota		547 Orang	134,800,000
1	01	01	07	33	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 33 Kalukulajuk	Jumlah siswa			Kota Palopo	164 Orang	32,200,000	APBD Kota		164 Orang	32,200,000
1	01	01	07	34	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 34 Bara	Jumlah siswa			Kota Palopo	261 Orang	63,200,000	APBD Kota		261 Orang	63,200,000
1	01	01	07	35	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 35 Lamandu	Jumlah siswa			Kota Palopo	185 Orang	42,500,000	APBD Kota		185 Orang	42,500,000
1	01	01	07	36	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 36 Latuppa	Jumlah siswa			Kota Palopo	163 Orang	29,400,000	APBD Kota		163 Orang	29,400,000
1	01	01	07	37	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 37 Mawa	Jumlah siswa			Kota Palopo	172 Orang	37,900,000	APBD Kota		172 Orang	37,900,000
1	01	01	07	38	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 38 Bora	Jumlah siswa			Kota Palopo	137 Orang	38,000,000	APBD Kota		137 Orang	38,000,000
1	01	01	07	39	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 39 Kambo	Jumlah siswa			Kota Palopo	175 Orang	42,800,000	APBD Kota		175 Orang	42,800,000
1	01	01	07	40	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 40 Lappo	Jumlah siswa			Kota Palopo	57 Orang	11,400,000	APBD Kota		57 Orang	11,400,000
1	01	01	07	41	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 41 Batuputih	Jumlah siswa			Kota Palopo	217 Orang	51,400,000	APBD Kota		217 Orang	51,400,000
1	01	01	07	42	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 42 Limpomajang	Jumlah siswa			Kota Palopo	86 Orang	14,200,000	APBD Kota		86 Orang	14,200,000
1	01	01	07	43	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 43 Takkalala	Jumlah siswa			Kota Palopo	238 Orang	56,600,000	APBD Kota		238 Orang	56,600,000
1	01	01	07	44	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 44 Rampoang	Jumlah siswa			Kota Palopo	238 Orang	47,200,000	APBD Kota		238 Orang	47,200,000
1	01	01	07	45	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 45 Padang Alipan	Jumlah siswa			Kota Palopo	217 Orang	42,700,000	APBD Kota		217 Orang	42,700,000

1	01	01	07	46	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 46 Buntu Batu	Jumlah siswa			Kota Palopo	207 Orang	50,200,000	APBD Kota		207 Orang	50,200,000
1	01	01	07	47	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 47 Tompotikka	Jumlah siswa			Kota Palopo	425 Orang	97,700,000	APBD Kota		425 Orang	97,700,000
1	01	01	07	48	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 48 Pattiware	Jumlah siswa			Kota Palopo	457 Orang	105,900,000	APBD Kota		457 Orang	105,900,000
1	01	01	07	49	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 49 Mappatongko	Jumlah siswa			Kota Palopo	65 Orang	24,000,000	APBD Kota		65 Orang	24,000,000
1	01	01	07	50	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 50 Bulu Datu	Jumlah siswa			Kota Palopo	315 Orang	74,000,000	APBD Kota		315 Orang	74,000,000
1	01	01	07	51	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 51 Sumarambu	Jumlah siswa			Kota Palopo	172 Orang	34,400,000	APBD Kota		172 Orang	34,400,000
1	01	01	07	52	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 52 Salutete	Jumlah siswa			Kota Palopo	141 Orang	26,000,000	APBD Kota		141 Orang	26,000,000
1	01	01	07	53	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 53 Sawerigading	Jumlah siswa			Kota Palopo	310 Orang	76,900,000	APBD Kota		310 Orang	76,900,000
1	01	01	07	54	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 54 Salupikung	Jumlah siswa			Kota Palopo	256 Orang	54,900,000	APBD Kota		256 Orang	54,900,000
1	01	01	07	55	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 55 Padang Lambe	Jumlah siswa			Kota Palopo	114 Orang	22,800,000	APBD Kota		114 Orang	22,800,000
1	01	01	07	56	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 56 Bula Tua	Jumlah siswa			Kota Palopo	155 Orang	30,800,000	APBD Kota		155 Orang	30,800,000
1	01	01	07	57	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 57 Pepabri	Jumlah siswa			Kota Palopo	292 Orang	74,300,000	APBD Kota		292 Orang	74,300,000
1	01	01	07	58	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 58 Tandung	Jumlah siswa			Kota Palopo	60 Orang	28,500,000	APBD Kota		60 Orang	28,500,000
1	01	01	07	59	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 59 Siguntu	Jumlah siswa			Kota Palopo	60 Orang	17,500,000	APBD Kota		60 Orang	17,500,000
1	01	01	07	60	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 60 Salubattang	Jumlah siswa			Kota Palopo	133 Orang	37,600,000	APBD Kota		133 Orang	37,600,000
1	01	01	07	61	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 61 Tondok Alla Jaya	Jumlah siswa			Kota Palopo	143 Orang	39,600,000	APBD Kota		143 Orang	39,600,000
1	01	01	07	62	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 62 Pementa	Jumlah siswa			Kota Palopo	60 Orang	28,500,000	APBD Kota		60 Orang	28,500,000
1	01	01	07	63	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 63 Ponjalae Baru	Jumlah siswa			Kota Palopo	308 Orang	93,800,000	APBD Kota		308 Orang	93,800,000
1	01	01	07	64	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 64 To'Bulung	Jumlah siswa			Kota Palopo	229 Orang	56,800,000	APBD Kota		229 Orang	56,800,000
1	01	01	07	65	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 65 Pajalesang	Jumlah siswa			Kota Palopo	67 Orang	35,400,000	APBD Kota		67 Orang	35,400,000
1	01	01	07	66	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SD Swasta	Jumlah siswa			Kota Palopo	1952 Orang	651,700,000	APBD Kota		1952 Orang	651,700,000
1	01	01	07	67	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 1	Jumlah siswa			Kota Palopo	898 Orang	231,500,000	APBD Kota		898 Orang	231,500,000
1	01	01	07	68	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 2	Jumlah siswa			Kota Palopo	737 Orang	208,500,000	APBD Kota		737 Orang	208,500,000
1	01	01	07	69	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 3	Jumlah siswa			Kota Palopo	894 Orang	241,380,000	APBD Kota		894 Orang	241,380,000
1	01	01	07	70	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 4	Jumlah siswa			Kota Palopo	906 Orang	227,750,000	APBD Kota		906 Orang	227,750,000
1	01	01	07	71	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 5	Jumlah siswa			Kota Palopo	509 Orang	123,750,000	APBD Kota		509 Orang	123,750,000
1	01	01	07	72	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 6	Jumlah siswa			Kota Palopo	714 Orang	187,000,000	APBD Kota		714 Orang	187,000,000
1	01	01	07	73	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 7	Jumlah siswa			Kota Palopo	543 Orang	110,000,000	APBD Kota		543 Orang	110,000,000
1	01	01	07	74	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 8	Jumlah siswa			Kota Palopo	794 Orang	209,750,000	APBD Kota		794 Orang	209,750,000
1	01	01	07	75	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 9	Jumlah siswa			Kota Palopo	633 Orang	151,500,000	APBD Kota		633 Orang	151,500,000
1	01	01	07	76	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 10	Jumlah siswa			Kota Palopo	258 Orang	68,000,000	APBD Kota		258 Orang	68,000,000
1	01	01	07	77	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 11	Jumlah siswa			Kota Palopo	101 Orang	22,250,000	APBD Kota		101 Orang	22,250,000

1	02	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	2,740,650,000			100%	2,957,650,000
1	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim		Wara	13000 surat	50,000,000	APBD Kota		13000 surat	55,000,000
1	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiaya		Wara 48 Kelurahan	66 rek	650,000,000	APBD Kota		66 rek	700,000,000
1	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah STNK yg dibiayai		Wara 48 Kelurahan	144 stnk	55,000,000	APBD Kota		144 stnk	60,000,000
1	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola keuangan		Wara	22 OT	150,000,000	APBD Kota		22 OT	155,000,000
1	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan		Wara 12 puskesmas	20 OT	50,000,000	APBD Kota		20 OT	70,000,000
1	02	01	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Barang Milik Daerah	jumlah pengelola BMD		Wara 12 puskesmas	7 OT	70,400,000	APBD Kota		7 OT	70,400,000
1	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang diadakan		Wara 48 Kelurahan	65 komponen	2,500,000	APBD Kota		65 komponen	3,000,000
1	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	jumlah koran/majalah/buku		Wara 12 puskesmas	10 eks	5,000,000	APBD Kota		10 eks	5,500,000
1	02	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas		Wara 12 puskesmas	150 kali	450,000,000	APBD Kota		150 kali	495,000,000
1	02	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang akan diadakan		Wara 12 puskesmas	5 paket	45,000,000	APBD Kota		5 paket	50,000,000
1	02	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	pengadaan mebeleur		Wara 48 Kelurahan	20 paket	100,000,000	APBD Kota		20 paket	110,000,000
1	02	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor pemeliharaan rutin/ berkala		Wara 12 puskesmas	1 unit	20,000,000	APBD Kota		1 unit	32,000,000
1	02	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	jumlah mobil dinas yang akan dirawat		Wara	1 unit	25,000,000	APBD Kota		1 unit	20,000,000
1	02	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah Pemeliharaan rutin berkala mobil dinas/ jabatan		Wara 12 puskesmas	30 unit	22,000,000	APBD Kota		30 unit	25,000,000
1	02	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor		Wara 12 puskesmas	10 unit	3,000,000	APBD Kota		10 unit	3,500,000
1	02	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor		Wara 12 puskesmas	15 unit	22,000,000	APBD Kota		15 unit	82,000,000
1	02	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Wara	65 paket	22,750,000	APBD Kota		65 unit	22,750,000

1	02	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	pertemuan sosialisasi peraturan dan perundang - undangan			Wara 12 puskesmas	3 kali	5,000,000	APBD Kota		3 kali	5,500,000
1	02	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan dan perundang - undangan			Wara	2 kali	38,000,000	APBD Kota		2 kali	38,000,000
1	02	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	jumlah pengelola administrasi umum			Wara 12 puskesmas	58 OT	955,000,000	APBD Kota		58 OT	955,000,000
1	02	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	15,000,000			100%	16,500,000
1	02	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Wara 12 puskesmas	3 dokumen	5,000,000	APBD Kota		3 dokumen	5,500,000
1	02	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	jumlah laporan keuangan semester yang disusun			Wara 12 puskesmas	1 dokumen	5,000,000	APBD Kota		1 dokumen	5,500,000
1	02	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			Wara	1 dokumen	5,000,000	APBD Kota		1 dokumen	5,500,000
1	02	01	03		Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	186,000,000			100%	186,000,000
1	02	01	03	01	Pendataan Ibu Hamil	jumlah faskes yang melaporkan pendataan ibu hamil			kota palopo	1 kali	66,000,000	APBD Kota		1 kali	66,000,000
1	02	01	03	02	Pemeriksaan Kehamilan	jumlah pemeriksaan kehamilan di faskes			kota palopo	1521 bumil	50,000,000	APBD Kota		1600 bumil	50,000,000
1	02	01	03	03	Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA	jumlah buku KIA yang di isi			kota palopo	300 buku	40,000,000	APBD Kota		5000 buku	40,000,000
1	02	01	03	04	Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah laporan hasil pencatatan kesehatan ibu hamil			kota palopo	5 laporan	20,000,000	APBD Kota		5 laporan	20,000,000
1	02	01	03	05	Rujukan ANC	jumlah rujukan ANC			kota palopo	639 bumil	10,000,000	APBD Kota		600 bumil	10,000,000
1	02	01	04		Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	140,000,000			100%	140,000,000
1	02	01	04	01	Pendataan Ibu Bersalin	jumlah faskes yang melaporkan hasil pendataan ibu bersalin			kota palopo	1 faskes	20,000,000	APBD Kota		1 faskes	20,000,000

1	02	01	04	02	Pelayanan Persalinan	jumlah pelayanan persalinan di faskes			kota palopo	3193 bumil	100,000,000	APBD Kota		3193 bumil	100,000,000
1	02	01	04	03	Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah laporan hasil pencatatan ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			kota palopo	4 laporan	20,000,000	APBD Kota		4 laporan	20,000,000
1	02	01	05		Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	60,000,000			100%	65,000,000
1	02	01	05	01	Pendataan Bayi Baru Lahir	jumlah faskes yang melaporkan hasil pendataan bayi baru lahir			kota palopo	1578 bayi	10,000,000	APBD Kota		1578 bayi	10,000,000
1	02	01	05	02	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir yang ditangani kesehatannya (Orang/Tahun)			kota palopo	1578 bayi	20,000,000	APBD Kota		1578 bayi	25,000,000
1	02	01	05	03	Pencatatan dan Pelaporan Bayi Baru Lahir	jumlah laporan hasil pencatatan bayi baru lahir			kota palopo	12 laporan	10,000,000	APBD Kota		12 laporan	10,000,000
1	02	01	05	04	Rujukan Pertolongan Kasus Komplikasi Pada Bayi Baru Lahir	jumlah rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi			kota palopo	51 bayi	20,000,000	APBD Kota		51 bayi	20,000,000
1	02	01	06		Program Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	80,000,000			100%	80,000,000
1	02	01	06	01	Pendataan Balita 0-59 Bulan	jumlah laporan hasil pendataan balita			kota palopo	3910 balita	20,000,000	APBD Kota		3910 balita	20,000,000
1	02	01	06	02	Pemberian Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan			kota palopo	13910 balita	50,000,000	APBD Kota		3910 balita	50,000,000
1	02	01	06	03	Pencatatan dan Pelaporan	jumlah laporan hasil pencatatan			kota palopo	12 laporan	10,000,000	APBD Kota		12 laporan	10,000,000
1	02	01	07		Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	65,000,000			100%	65,000,000
1	02	01	07	02	Pra Penjaringan	jumlah sekolah yang akan dilakukan penjaringan			kota palopo	83 sekolah	20,000,000	APBD Kota		83 sekolah	20,000,000
1	02	01	07	03	Pelaksanaan Penjaringan Kesehatan	Jumlah Wilayah Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan (Puskesmas)			kota palopo	83 tahunsekolah	20,000,000	APBD Kota		83 sekolah	20,000,000
1	02	01	07	04	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penjaringan Kesehatan	jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan			kota palopo	83 sekolah	20,000,000	APBD Kota		83 sekolah	20,000,000
1	02	01	07	05	Pencatatan dan Pelaporan	jumlah laporan hasil pencatatan			kota palopo	12 laporan	5,000,000	APBD Kota		12 laporan	5,000,000

1	02	01	08	Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Penduduk Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	45,000,000			100%	45,000,000
1	02	01	08	01	Peningkatan Kapasitas SDM TB	jumlah tenaga SDM TB yang akan ditingkatkan kapasitasnya (orang/tahun)		kota palopo	415 orang	25,000,000	APBD Kota		415 orang	25,000,000
1	02	01	08	02	Promosi/Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE TB	jumlah media KIE TB yang dicetak		kota palopo	2000 lembar	20,000,000	APBD Kota		2000 lembar	20,000,000
1	02	01	09	Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentase Penduduk Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	45,000,000			100%	37,000,000
1	02	01	09	01	Pemetaan Kelompok Sasaran	jumlah kelompok sasaran yang dipetakan		Wara 12 puskesmas	12 Kelompok	10,000,000	APBD Kota		12 Kelompok	10,000,000
1	02	01	09	02	Penyiapan SDM	jumlah SDM yang dilatih		Wara 12 puskesmas	12 orang	20,000,000	APBD Kota		12 orang	12,000,000
1	02	01	09	03	Promosi/Penyuluhan	jumlah promosi/penyuluhan HIV yang dilaksanakan		Wara 48 Kelurahan	4 kali	10,000,000	APBD Kota		4 kali	10,000,000
1	02	01	09	05	Sosialisasi HIV	Jumlah Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS		Wara 48 Kelurahan	1 kali	5,000,000	APBD Kota		1 kali	5,000,000
1	02	01	10	Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	27,000,000			100%	27,000,000
1	02	01	10	01	Pendataan Penderita Hipertensi Menurut Wilayah Kerja FKTP	jumlah laporan hasil pendataan penderita hipertensi oleh faskes		Wara 12 puskesmas	1 laporan	5,000,000	APBD Kota		1 laporan	5,000,000
1	02	01	10	02	Skrining Faktor Risiko Hipertensi Untuk Seluruh Pasien di FTKP	jumlah kegiatan Skrining		Wara 12 puskesmas	2 kali	10,000,000	APBD Kota		2 kali	10,000,000
1	02	01	10	05	Pelatihan Teknis Pelayanan Kesehatan Hipertensi dan Surveilans Faktor Risiko Hipertensi Berbasis Web	jumlah pelatihan surveilans faktor risiko berbasis web		Wara 12 puskesmas	12 orang	12,000,000	APBD Kota		12 orang	12,000,000

1	02	01	11	Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penduduk Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	5,500,000			100%	5,500,000
1	02	01	11	01	Pendataan Penderita DM Menurut Wilayah Kerja FKTP	Jumlah Laporan hasil pendataan yang dilakukan Puskesmas		Wara 12 puskesmas	1 laporan	5,500,000	APBD Kota		1 laporan	5,500,000
1	02	01	12	Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Penduduk Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	65,000,000			100%	65,000,000
1	02	01	12	01	Penyediaan Materi KIE Keswa, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa	Jumlah Materi materi KIE Keswa, pedoman dan buku kerja kesehatan jiwa yang disediakan		Wara 12 puskesmas	1 keg	10,000,000	APBD Kota		3 Buku	10,000,000
1	02	01	12	02	Peningkatan Pengetahuan SDM	Jumlah pengelola program Kesehatan Jiwa yang Dilatih		Wara 12 puskesmas	12 orang	50,000,000	APBD Kota		12 orang	50,000,000
1	02	01	12	03	Penyediaan Form Pencatatan dan Pelaporan	jumlah form pencatatan dan pelaporan yang disediakan		Wara 12 puskesmas	1 kali	5,000,000	APBD Kota		1 kali	5,000,000
1	02	01	13	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	20,000,000			100%	24,000,000
1	02	01	13	01	Skrining Faktor Risiko PTM dan Gangguan Mental Emosional dan Perilaku	Skrining faktor risiko PTM dan gangguan Emosional perilaku		wara, 12 puskesmas	2 kali	5,000,000	APBD Kota		2 kali	7,000,000
1	02	01	13	03	Pelatihan Teknis Petugas Skrining Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan dan Petugas Pelaksana (Kader) Posbindu PTM	Difahaminya tugas petugas PTM dalam pelaksanaan skrining		wara, 12 puskesmas	12 orang	5,000,000	APBD Kota		12 orang	7,000,000
1	02	01	13	04	Pelatihan Surveilans Faktor Risiko PTM Berbasis Web	pemanfaatan PTM berbasis web		wara, 12 puskesmas	12 orang	10,000,000	APBD Kota		12 orang	10,000,000
1	02	01	14	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	110,000,000			100%	142,000,000
1	02	01	14	01	Pendataan Lansia	jumlah laporan hasil Pendataan lansia		wara, 12 puskesmas	3 laporan	5,000,000	APBD Kota		3 laporan	37,000,000
1	02	01	14	03	Pemberian Buku Kesehatan Lansia	jumlah buku kesehatan lansia yang dicetak		wara, 48 kelurahan	3000 buku	105,000,000	APBD Kota		3000 buku	105,000,000

1	02	01	15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Puskesmas (%)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)	133,33	3,945,000,000			133,33	3,971,000,000
1	02	01	15	01	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat								
					Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	jumlah Peta Informasi masyarakat kurang gizi yang disusun	Wara 12 puskesmas	1 peta	20,000,000	APBD Kota		1 peta	20,000,000
					pemberian makanan tambahan	jumlah bayi/balita gizi kurang yang diberikan makanan tambahan	Wara 48 Kelurahan	512 balita	50,000,000	APBD Kota		512 balita	50,000,000
1	02	01	15	02	Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat								
					Promosi dan pemberdayaan masyarakat (Kader Posyandu)	jumlah kader posyandu yang diberikan insentif	Wara 48 Kelurahan	755 kader	2,800,000,000	APBD Kota		755 kader	2,800,000,000
					Pengembangan media promosi dan sadar hidup sehat	jumlah media promosi yang bekerjasama	Wara 12 puskesmas	4 media	80,000,000	APBD Kota		4 media	80,000,000
					Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat	jumlah pembuatan stiker, leaflet, baliho tentang t pola hidup sehat yang dicetak	Wara 48 Kelurahan	1000 stiker/leaflet	30,000,000	APBD Kota		1000 stiker/leaflet	35,000,000
					peningkatan pendidikan tenaga penyuluh	jumlah tenaga penyuluh yang dididik	Wara 12 puskesmas	12 orang	40,000,000	APBD Kota		12 orang	40,000,000
1	02	01	15	03	Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah faskes yang melakukan pembinaan	Wara 12 puskesmas	12 faskes	320,000,000	APBD Kota		12 faskes	320,000,000
1	02	01	15	04	Surveillance Pencegahan dan Pengendalian Penyakit								
					Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk	jumlah terlaksananya Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk	Wara 48 Kelurahan	2000 kasus	200,000,000	APBD Kota		2000 kasus	200,000,000
					Peningkatan Imunisasi	jumlah bayi dan balita di posyandu yang diimunisasi	Wara 48 Kelurahan	17666 balita	50,000,000	APBD Kota		17666 balita	50,000,000
1	02	01	15	05	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	jumlah penyakit menular dan potensi menular yang di deteksi	Wara 48 Kelurahan	10 penyakit	210,000,000	APBD Kota		10 penyakit	231,000,000
1	02	01	15	06	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular								
					Pelatihan pandu PTM	jumlah tenaga Pandu PTM yang dilatih	Wara 48 Kelurahan	24 orang	20,000,000	APBD Kota		24 orang	20,000,000
					Workshop jejaring layanan PTM	jumlah jejaring pandu PTM yang dilaksanakan	Wara 12 puskesmas	12 jejaring	25,000,000	APBD Kota		12 jejaring	25,000,000
					Pengembangan Posbindu khusus OPD	jumlah Posbindu aktif	Wara 48 Kelurahan	60 orang	50,000,000	APBD Kota		60 orang	50,000,000
					Penguatan pengumpulan dan analisa data dasar standar pelayanan kesehatan	jumlah data dasar kesehatan yang tersedia	Wara 12 puskesmas	12 laporan	25,000,000	APBD Kota		12 laporan	25,000,000

					Penguatan pengumpulan dan analisa data dasar standar pelayanan kesehatan	jumlah data dasar kesehatan yang tersedia			Wara 12 puskesmas	12 laporan	25,000,000	APBD Kota		12 laporan	25,000,000
1	02	01	16		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan (%)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	28,500,000,000			100%	29,000,000,000
1	02	01	16	01	Penjaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah masyarakat yang ditanggung asuransi kesehatannya			wara, 48 kelurahan	83000 jiwa	28,500,000,000	APBD Kota		83000 jiwa	29,000,000,000
1	02	01	17		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)			15,618,000,000				17,225,000,000
1	02	01	17	01	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wara	biaya operasional puskesmas wara			Wara	1 puskesmas	300,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	330,000,000
1	02	01	17	02	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wara Utara	Biaya Operasional Puskesmas Wara Utara			Wara Utara	1 puskesmas	250,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	275,000,000
1	02	01	17	03	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Bara Permai	Biaya Operasional Puskesmas Bara Permai			Bara Permai	1 puskesmas	215,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	236,500,000
1	02	01	17	04	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wara Selatan	Biaya Operasional Puskesmas Wara Selatan			Wara Selatan	1 puskesmas	410,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	414,000,000
1	02	01	17	05	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Maroangin	Biaya Operasional Puskesmas Maroangin			Maroangin	1 puskesmas	200,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	220,000,000
1	02	01	17	06	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Pontap	Biaya Operasional Puskesmas pontap			Pontap	1 puskesmas	140,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	154,000,000
1	02	01	17	07	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Benteng	Biaya Operasional Puskesmas Benteng			Benteng	1 puskesmas	180,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	198,000,000
1	02	01	17	08	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wara Barat	biaya operasional puskesmas wara barat			Wara Barat	1 puskesmas	205,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	225,500,000
1	02	01	17	09	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Sendana	biaya operasional puskesmas sendana			Sendana	1 puskesmas	300,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	330,000,000
1	02	01	17	10	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Mungkajang	Biaya Operasional Puskesmas Mungkajang			Mungkajang	1 puskesmas	150,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	165,000,000
1	02	01	17	11	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wara Utara Kota	Biaya Operasional Puskesmas Wara Utara Kota			Wara Utara Kota	1 puskesmas	250,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	275,000,000
1	02	01	17	12	Pengelolaan dan Operasional Puskesmas Wisata Padang Lambe	Biaya Operasional Puskesmas wisata padang lambe			Padang Lambe	1 puskesmas	260,000,000	APBD Kota		1 puskesmas	286,000,000
1	02	01	17	13	Pelayanan Kesehatan Event Tertentu dan Hari Khusus	jumlah pelaksana event tertentu & hari khusus			wara, 12 puskesmas	3 event	30,000,000	APBD Kota		3 event	30,000,000
1	02	01	17	14	Pengelolaan dan Operasional Jemput Antar (JA)	Biaya Operasional JA			wara, 48 kelurahan	48 Kelurahan	1,000,000,000	APBD Kota		48 Kelurahan	1,200,000,000
1	02	01	17	15	Pengelolaan dan Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah	Biaya Operasional Labkesda			wara, 12 puskesmas	1 UPT	120,000,000	APBD Kota		1 UPT	132,000,000
1	02	01	17	16	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wara	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			wara, 12 puskesmas	1 puskesmas	2,200,000,000	APBN		1 puskesmas	2,420,000,000

1	02	01	17	17	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wara Utara	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			wara utara	1 puskesmas	1,100,000,000	APBN		1 puskesmas	1,210,000,000
1	02	01	17	18	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bara Permai	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			Bara Permai	1 puskesmas	1,000,000,000	APBN		1 puskesmas	1,100,000,000
1	02	01	17	19	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wara Selatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			Wara Selatan	1 puskesmas	850,000,000	APBN		1 puskesmas	935,000,000
1	02	01	17	20	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Maroangin	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			Maroangin	1 puskesmas	840,000,000	APBN		1 puskesmas	924,000,000
1	02	01	17	21	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Pontap	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			Pontap	1 puskesmas	1,300,000,000	APBN		1 puskesmas	1,500,000,000
1	02	01	17	22	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Benteng	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			Benteng	1 puskesmas	800,000,000	APBN		1 puskesmas	880,000,000
1	02	01	17	23	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wara Barat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			Wara Barat	1 puskesmas	750,000,000	APBN		1 puskesmas	825,000,000
1	02	01	17	24	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Sendana	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			Sendana	1 puskesmas	600,000,000	APBN		1 puskesmas	660,000,000
1	02	01	17	25	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Mungkajang	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			Mungkajang	1 puskesmas	700,000,000	APBN		1 puskesmas	770,000,000
1	02	01	17	26	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wara Utara Kota	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			Wara utara Kota	1 puskesmas	1,248,000,000	APBN		1 puskesmas	1,300,000,000
1	02	01	17	27	Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Wisata Padang Lambe	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN			Padang Lambe	1 puskesmas	220,000,000	APBN		1 puskesmas	230,000,000
1	02	01	18		Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase Faskes Pertama Bersertifikat ISO (%)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		8%	351,000,000			7%	531,000,000
1	02	01	18	01	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
					<i>Peningkatan Standarisasi pelayanan kesehatan</i>	jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi			wara, 12 puskesmas	12 puskesmas	25,000,000	APBD Kota		12 puskesmas	125,000,000
					<i>Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan</i>	jumlah fasilitas kesehatan dengan SIK online			wara, 12 puskesmas	12 puskesmas	111,000,000	APBD Kota		12 puskesmas	111,000,000
1	02	01	18	02	Penyediaan dan Pengelolaan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	jumlah fasilitas yang terpenuhi obat dan pembekalan kesehatannya			Wara	12 puskesmas	120,000,000	APBD Kota		12 puskesmas	200,000,000

1	02	01	18	03	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah UPT yang ingin ditingkatkan sumber daya kesehatannya			wara, 12 puskesmas	15 UPT	95,000,000	APBD Kota		15 UPT	95,000,000
1	02	01	19		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk (per 10.000)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		3	800,000,000			4	880,000,000
1	02	01	19	01	Penyediaan/Renovasi/Rehabilitasi Gedung/Bangunan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu	jumlah puskesmas/pustu/ puskesmas/posyan du yang direhab			Kota Palopo	1 Tahun	800,000,000	APBD Kota		1 Tahun	880,000,000
1	02	01	20		Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	% Pencapaian Indikator Kinerja BLUD RS (Keuangan & Pelayanan)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		85%	3,493,700,000			90%	3,493,700,000
1	02	01	20	01	Pelayanan kesehatan BLUD RSUD	Penyediaan biaya operasional BLUD RS. Dr.Palemmmai Tandi			RSUD dr. Palemmmai Tandi	1 RSUD	3,493,700,000	APBD Kota		1 RSUD	3,493,700,000
1	02	01	22		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	47,000,000,000			100%	51,000,000,000
1	02	01	22	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	Jumlah sarana dan prasana DAK Dasar yang dipenuhi			wara, 12 puskesmas	12 Paket	15,000,000,000	DAK		12 Paket	25,000,000,000
1	02	01	22	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Farmasi	Jumlah sarana dan prasana DAK Farmasi yang terpenuhi			wara, 12 puskesmas	1 keg	5,500,000,000	DAK		1 keg	6,000,000,000
1	02	01	22	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan	Jumlah sarana dan prasarana DAK Rujukan yang dipenuhi			wara, 12 puskesmas	1 keg	26,500,000,000	DAK		1 UPT	20,000,000,000
1	02	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik	Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	9,075,000,000			100%	10,082,500,000
1	02	01	23	01	Pelayanan Kesehatan BOK	Jumlah sarana kesehatan pelaksana BOK			wara, 12 puskesmas	1 keg	7,500,000,000	DAK		1 keg	8,350,000,000
1	02	01	23	02	Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan jampersal			Wara	1 keg	700,000,000	DAK		1 keg	770,000,000
1	02	01	23	03	Akreditasi Puskesmas	jumlah puskesmas yang akan di reakreditasi puskesmas			wara, 12 puskesmas	1 keg	800,000,000	DAK		1 keg	880,000,000
1	02	01	23	04	Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah Puskesmas yang didistribusi obat dan perbekalan kesehatan			wara, 12 puskesmas	12 puskesmas	75,000,000	DAK		12 puskesmas	82,500,000
RSUD SAWERIGADING											127,400,000,000				141,640,000,000

1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1	02				KESEHATAN										
1	02	02	20		Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	% Pencapaian Indikator Kinerja BLUD RS (Keuangan & Pelayanan)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	92,400,000,000		100%	101,640,000,000	
1	02	02	20	01	Pelayanan kesehatan BLUD RSUD										
					Pelayanan kesehatan BLUD	Terpenuhinya pelayanan kesehatan Rs			RSUD Sawerigading Kota Palopo	1 paket	92,400,000,000	APBD Kota	Untuk memenuhi standar pelayanan minimal Rs sebagai Rs rujukan regional	1 paket	101,640,000,000
1	02	02	22		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan	% Cakupan Sarana dan Prasarana RS	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S 2)		100%	35,000,000,000		100%	40,000,000,000	
1	02	02	22	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan Rs			RSUD Sawerigading Kota Palopo	500 unit	35,000,000,000	DAK	Untuk pemenuhan standar pelayanan minimal Rs sebagai Rs rujukan regional Propinsi Sulsel	2 unit	40,000,000,000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											219,057,091,500				230,493,548,175
1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1	03				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	03	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,997,091,500		100%	2,115,398,175	
1	03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Masuk			Kota Palopo	1 Tahun	54,500,000	APBD Kota		4500 Tahun	57,225,000
1	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air, listrik, internet yang di biayai(Rekening/b ulan			Kota Palopo	5 Rekening	262,500,000	APBD Kota		5 Rekening	266,000,000
1	03	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang di biayai(Unit)			Kota Palopo	71 Unit	21,199,500	APBD Kota		71 Tahun	21,759,475
1	03	01	01	07	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Jenis dan Jumlah Laporan keuangan yang di buat(dokumen/lap oran)			Kota Palopo	1 Tahun	118,818,000	APBD Kota		1 Tahun	124,758,900
1	03	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang biaya kebersihannya di tanggung(Orang/lo kasi)			Kota Palopo	2 Orang	25,830,000	APBD Kota		1 Tahun	27,121,500

1	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			Kota Palopo	1 Tahun	3,150,000	APBD Kota		1 Tahun	3,307,500
1	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rekening koran yang berlangganan (ekslamper/bulan)			Kota Palopo	48 Eks	5,544,000	APBD Kota		1 Tahun	5,821,200
1	03	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (Kali/tahun)			Kota Palopo	1 Tahun	290,000,000	APBD Kota		1 Tahun	314,500,000
1	03	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah randis operasional yang diadakan (unit)			Kota Palopo	2 Unit	300,000,000	APBD Kota		1 Unit	294,000,000
1	03	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor			Kota Palopo	3 Unit	5,500,000	APBD Kota		3 Unit	6,275,000
1	03	01	01	26	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang diperbaiki (unit)			Kota Palopo	2 Unit	30,000,000	APBD Kota		3 Unit	40,000,000
1	03	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	14 Unit	85,000,000	APBD Kota		14 Unit	93,500,000
1	03	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeler yang diadakan (unit)			Kota Palopo	1 Tahun	9,000,000	APBD Kota		2 Unit	9,450,000
1	03	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang pemeliharaan dibiayai (unit)			Kota Palopo	1 Tahun	25,000,000	APBD Kota		1 Tahun	26,250,000
1	03	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dibiayai (unit)			Kota Palopo	1 Unit	27,500,000	APBD Kota		1 Unit	28,875,000
1	03	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Mobil operasional yang pemeliharaannya dibiayai (unit)			Kota Palopo	1 Unit	18,550,000	APBD Kota		1 Unit	19,550,000
1	03	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perelngkapan gedung kantor yang pemeliharaanya dibiayai (unit)			Kota Palopo	17 Unit	3,600,000	APBD Kota		17 Unit	3,780,000
1	03	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang pemeliharaan dibiayai (unit)			Kota Palopo	51 Unit	15,000,000	APBD Kota		20 Unit	16,500,000
1	03	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Stel)			Kota Palopo	82 Pasang	41,000,000	APBD Kota		82 Pasang	43,050,000
1	03	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti (kali)			Kota palopo	8 Orang	75,400,000	APBD Kota		1 Tahun	75,674,600
1	03	01	01	53	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat dan Perbengkelan	Jumlah alat-alat berat yang diperbaiki (unit)			Kota Palopo	11 Unit	80,000,000	APBD Kota		15 Unit	88,000,000
1	03	01	01	56	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah orang yang dibayarkan			Kota Palopo	85 Orang	500,000,000	APBD Kota			550,000,000
1	03	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Peringkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	38,000,000			100%	39,900,000

1	03	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan perencanaan dan kinerja yang di buat (dokumen/tahun)			Kota Palopo	3 Kegiatan	4,500,000	APBD Kota		3 Kegiatan	4,725,000
1	03	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	jumlah laporan keuangan yg di susun (Buah/rangkap)			Kota Palopo	1 Kegiatan	1,500,000	APBD Kota		1 Kegiatan	1,575,000
1	03	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun (Buah/rangkap)			Kota Palopo	1 Kegiatan	1,500,000	APBD Kota		1 Kegiatan	1,575,000
1	03	01	02	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan perkembangan di susun (Buah)			Kota Palopo	1 Tahun	30,500,000	APBD Kota		1 Tahun	32,025,000
1	03	01	04		Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		100%	5,700,000,000			100%	6,115,000,000
1	03	01	04	02	Penyediaan Pelayanan Dasar Air Limbah	Jumlah septictank yang dibangun			Kota Palopo	1231 Unit	5,700,000,000	APBD Kota		1255 Unit	6,115,000,000
1	03	01	05		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (per 10,000)	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		29 Orang/Km	32,550,000,000			29 Orang/Km	35,785,000,000
1	03	01	05	01	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang beraspal (km), panjang jalan yang di beton, panjang jalan yangg berkondisi kerikil			Kota Palopo	11 Km	30,000,000,000	APBD Kota			33,000,000,000
1	03	01	05	02	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang di tangani (meter)			Kota Palopo	2 Paket	250,000,000	APBD Kota			255,000,000
1	03	01	05	03	Pembangunan Trotoar	Panjang trotoar yang ditangani			Kota Palopo	500 Meter	2,300,000,000	APBD Kota			2,530,000,000
1	03	01	06		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		61%	400,000,000			62%	400,000,000
1	03	01	06	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang diperbaiki			Kota Palopo	100 Km	200,000,000	APBD Kota		100 Km	200,000,000
1	03	01	06	02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Panjang jembatan yang diperbaiki			Kota Palopo	1000 Meter	200,000,000	APBD Kota		100 -	200,000,000
1	03	01	07		Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		25%	2,850,000,000			35%	2,850,000,000
1	03	01	07	01	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang drainase//gorong-gorong yang ditangani (meter)			Kota Palopo	13.850 Meter	2,850,000,000	APBD Kota			2,850,000,000

1	03	01	08	Program Pembangunan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		5%	2,850,000,000			6%	2,965,000,000
1	03	01	08	01	Pembangunan/Rehab/Renov Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap talud bronjong yang ditangani		Kota Palopo	5.000 Meter	2,050,000,000	APBD Kota			2,150,000,000
1	03	01	08	02	Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang dipelihara (M)		Kota Palopo	1 Tahun	800,000,000	APBD Kota		1 Tahun	815,000,000
1	03	01	09	Program Pengendalian Banjir	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		20%	100,000,000			25%	115,000,000
1	03	01	09	02	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Jumlah Sungai yang di rehabilitasi dan di pelihara		Kota Palopo	1 Tahun	100,000,000	APBD Kota		1 Tahun	115,000,000
1	03	01	10	Program Pembangunan Infrastruktur Publik/Strategis Daerah	Cakupan Penyediaan Infrastruktur Publik & Strategis Daerah (Buah)	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		10 Buah	151,600,000,000			10 Buah	156,710,000,000
1	03	01	10	01	Pembangunan/Rehab/Renov Gedung atau Sarana Prasarana Bangunan Pemerintah	Jumlah bangunan gedung atau sarana prasarana bangunan pemerintah yang terbangun		Kota Palopo	5 Unit	1,600,000,000	APBD Kota			1,710,000,000
1	03	01	10	02	Pembangunan/Rehab/Renov Gedung atau Sarana Prasarana Bangunan Layanan Publik	Jumlah prasarana bangunan layanan publik yang ditangani		Kota Palopo	17 Unit	150,000,000,000	APBD Kota/Loan			155,000,000,000
1	03	01	12	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik (%)	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		72%	50,000,000			72%	55,000,000
1	03	01	12	01	Pembangunan/Rehab/Renov Irigasi dan Jaringannya	Panjang Irigasi yang terpelihara dengan baik		Kota Palopo	1 Tahun	50,000,000	APBD Kota		1 Tahun	55,000,000
1	03	01	13	Program Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan (%)	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		52%	557,000,000			54%	573,000,000
1	03	01	13	01	Perencanaan Pengelolaan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan ruang		Kota Palopo	3 Dokumen	407,000,000	APBD Kota			410,000,000
1	03	01	13	02	Pembinaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan ruang		Kota Palopo	100 Orang	70,000,000	APBD Kota			75,000,000
1	03	01	13	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang		Kota Palopo	180 Laporan	80,000,000	APBD Kota			88,000,000

1	03	01	14		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi yang Lulus Sertifikasi (%/Tahun)	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		80%/Tahun	115,000,000			85%/Tahun	155,250,000
1	03	01	14	01	Pengaturan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi tukang yang diatur			Kota Palopo	180 Orang	60,000,000	APBD Kota			66,000,000
1	03	01	14	02	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan jasa konstruksi yang			Kota Palopo	5 Pelatihan	30,000,000	APBD Kota			63,000,000
1	03	01	14	03	Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan jasa konstruksi yang dihasilkan			Kota Palopo	3 Dokumen	25,000,000	APBD Kota			26,250,000
1	03	01	15		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		100%	18,500,000,000			100%	20,700,000,000
1	03	01	15	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang ditangani			Kota Palopo	150 Km	16,500,000,000	DAK			18,500,000,000
1	03	01	15	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi	Panjang irigasi dibangun			Kota Palopo	4.000 Meter	2,000,000,000	DAK			2,200,000,000
1	03	01	16		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		100%	1,750,000,000			100%	1,915,000,000
1	03	01	16	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Air Minum	Jumlah sarana dan prasarana air minum yang terbangun			Kota Palopo	585 Unit	1,100,000,000	DAK			1,200,000,000
1	03	01	16	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi yang dibangun			Kota Palopo	10 BUah	650,000,000	DAK			715,000,000
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN											5,618,380,000				5,728,352,000
1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1	04				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN										
1	04	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	884,280,000			100%	941,352,000
1	04	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk & Surat Keluar			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1000 Eksemplar	57,000,000	APBD Kota		1000 Eksemplar	62,700,000

1	04	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air, listrik, internet yang dibiayai			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	4 Rekening	135,200,000	APBD Kota		4 Rekening	136,552,000
1	04	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	17 unit	5,300,000	APBD Kota		17 unit	5,300,000
1	04	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis dan jumlah laporan keuangan yang dibuat			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	5 dok	90,000,000	APBD Kota		5 dok	92,000,000
1	04	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang biaya kebersihan ditanggung			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1 orang	15,500,000	APBD Kota		1 orang	15,500,000
1	04	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	55 buah	3,000,000	APBD Kota		55 buah	3,000,000
1	04	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rekening koran yang berlangganan			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	4 eks	5,280,000	APBD Kota		4 eks	5,800,000
1	04	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	100 orang	350,000,000	APBD Kota		120 orang	385,000,000
1	04	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang pemeliharaan dibiayai			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1 unit	30,000,000	APBD Kota		1 unit	33,000,000
1	04	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang pemeliharaan dibiayai			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1 unit	25,000,000	APBD Kota		1 unit	25,000,000
1	04	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil operasional yang pemeliharaan dibiayai			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1 unit	20,000,000	APBD Kota		1 unit	20,000,000
1	04	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang pemeliharaan			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	40 unit	2,800,000	APBD Kota		45 unit	2,800,000
1	04	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang pemeliharaan			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	64 unit	10,200,000	APBD Kota		74 unit	10,200,000
1	04	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	5 kali	20,000,000	APBD Kota		5 kali	20,000,000
1	04	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang diikuti			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	5 kali	20,000,000	APBD Kota		5 kali	20,000,000
1	04	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah tenaga pegawai kontrak yang dibiayai			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	15 orang	95,000,000	APBD Kota		15 orang	104,500,000

1	04	01	01	54	Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Unit	350,000,000	APBD Kota		-	-
1	04	01	01	55	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Unit	50,000,000	APBD Kota		-	-
1	04	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	6,000,000			100%	6,000,000
1	04	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan perencanaan dan kinerja yang dibuat			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	4 dok	4,000,000	APBD Kota		4 dok	4,000,000
1	04	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	2 buah	1,000,000	APBD Kota		2 buah	1,000,000
1	04	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1 buah	1,000,000	APBD Kota		1 buah	1,000,000
1	04	01	03		Program Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan Menjadi Layak Huni (%/Tahun)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		1,2%	440,100,000			1,2%	415,000,000
1	04	01	03	01	Pendataan Backlog Perumahan	Mengukur jumlah kebutuhan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1 dokumen	40,000,000	APBD Kota		1 dokumen	45,000,000
1	04	01	03	02	Pemutakhiran dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Mengupdate data rumah tidak layak huni sebagai acuan peningkatan kualitas rumah			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1 dokumen	40,100,000	APBD Kota		1 dokumen	45,000,000
1	04	01	03	03	Koordinasi Pembangunan Perumahan Dengan Lembaga /Badan Usaha	Jumlah ASN yang terdata			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1000 orang	20,000,000	APBD Kota		1000 orang	20,000,000
1	04	01	03	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pengelolaan penghunian rusun dan rusus			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	212 rumah	50,000,000	APBD Kota		212 rumah	55,000,000
1	04	01	03	07	Kegiatan Pemutakhiran dan Pendataan Rumah Layak Huni & Tidak Layak Huni	Jumlah dokumen data rumah dan layak huni & tidak layak huni			kota palopo	1 tahun	70,000,000	APBD Kota		1 tahun	70,000,000
1	04	01	03	08	Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Perumahan dan Permukiman	Jumlah Aplikasi Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman (buah)			kota palopo	1 tahun	70,000,000	APBD Kota		1 tahun	30,000,000

1	04	01	03	09	Kegiatan Pendampingan Program KOTAKU	Jumlah Pendamping Program KOTAKU (orang)			kota palopo	10 Kegiatan	150,000,000	APBD Kota		10 kegiatan	150,000,000
1	04	01	04		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		91,40%	900,000,000			97,40%	967,000,000
1	04	01	04	01	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan (BSPS)	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	2405 rumah	60,000,000	APBD Kota		1695 rumah	60,000,000
1	04	01	04	02	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Penyusunan Peraturan Walikota tentang penghunian Rusus dan Rusun			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1 dok	20,000,000	APBD Kota		1 dok	20,000,000
1	04	01	04	05	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Permukiman	Jumlah produk hukum yang dihasilkan tentang pencegahan			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1 dok	150,000,000	APBD Kota		1 dok	150,000,000
1	04	01	04	07	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Infrastruktur yang terbangun			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	50 unit	670,000,000	APBD Kota		45 unit	737,000,000
1	04	01	05		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Pemukiman yang Tertata (%)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		100%	58,000,000			100%	61,000,000
1	04	01	05	01	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	Jumlah bulan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	12 bulan	25,000,000	APBD Kota		12 bulan	26,500,000
1	04	01	05	02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan kegiatan			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1 dok	8,000,000	APBD Kota		1 dok	8,000,000
1	04	01	05	03	Inventarisasi dan Pemutakhiran PSU Perumahan Yang Sudah Diserahterimakan	Jumlah perumahan yang terinventarisasi dan termutakhirkan data PSU untuk			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	5 perumahan	25,000,000	APBD Kota		5 perumahan	26,500,000
1	04	01	06		Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase Penduduk Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		100%	165,000,000			100%	169,000,000
1	04	01	06	01	Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial	Jumlah penduduk yang memperoleh stimulan rehabilitasi rumah			Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	10 orang	165,000,000	APBD Kota		10 orang	169,000,000

1	04	01	07	Program Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Persentase Penduduk yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		100%	165,000,000			100%	169,000,000
1	04	01	07	01	Pengelolaan/Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rumah Khusus dan Rumah Susun	Jumlah rumah khusus dan rumah susun yang dikelola		Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	3 unit	165,000,000	APBD Kota		3 unit	169,000,000
1	04	01	08	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perumahan	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Perumahan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Layanan Infrastruktur Perkotaan (S 4)		100%	3,000,000,000			100%	3,000,000,000
1	04	01	08	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman yang disediakan				3,000,000,000	DAK			3,000,000,000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										2,248,452,000				2,317,952,000
1	05			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1	05			KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,250,452,000			100%	1,286,452,000
1	05	01	01	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar/masuk		Badan Kesbang Pol	350 Surat	30,000,000	APBD Kota		350 Surat	40,000,000
1	05	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sarana jasa rekening air, listrik, dan telp.		Badan Kesbang Pol	3 rekening	65,000,000	APBD Kota		3 rekening	80,000,000
1	05	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas		Badan Kesbang Pol	8 unit	6,000,000	APBD Kota		8 unit	6,000,000
1	05	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan		Badan Kesbang Pol	12 orang	90,000,000	APBD Kota		12 orang	90,000,000
1	05	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan kantor		Badan Kesbang Pol	2 orang	15,000,000	APBD Kota		2 orang	15,000,000
1	05	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja		Badan Kesbang Pol	7 unit	50,000,000	APBD Kota		7 unit	50,000,000
1	05	01	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya jasa administrasi umum		Badan Kesbang Pol	15 orang	101,992,000	APBD Kota		15 orang	101,992,000
1	05	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Badan Kesbang Pol	5 jenis	3,000,000	APBD Kota		5 jenis	3,000,000

1	05	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang disediakan			Badan Kesbang Pol	1 unit	3,000,000	APBD Kota		1 unit	3,000,000
1	05	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan			Badan Kesbang Pol	2 exemplar	5,280,000	APBD Kota		2 exemplar	5,280,000
1	05	01	01	16	Pengadaan Meubeluer	Jumlah meubeleu yang diadakan			Badan Kesbang Pol	1 unit	10,000,000	APBD Kota		1 unit	10,000,000
1	05	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah			Badan Kesbang Pol	135 kali	250,000,000	APBD Kota		135 kali	260,000,000
1	05	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun			Badan Kesbang Pol	1 unit	375,000,000	APBD Kota		1 unit	375,000,000
1	05	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan			Badan Kesbang Pol	2 unit	50,000,000	APBD Kota		2 unit	50,000,000
1	05	01	01	28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Badan Kesbang Pol	4 unit	30,000,000	APBD Kota		4 unit	30,000,000
1	05	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			Badan Kesbang Pol	1 unit	5,000,000	APBD Kota		1 unit	5,000,000
1	05	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik			Badan Kesbang Pol	1 unit	25,000,000	APBD Kota		1 unit	25,000,000
1	05	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kondisi baik			Badan Kesbang Pol	1 unit	7,000,000	APBD Kota			7,000,000
1	05	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			Badan Kesbang Pol	1 unit	2,700,000	APBD Kota		1 unit	2,700,000
1	05	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan			Badan Kesbang Pol	47 pasang	25,850,000	APBD Kota		47 pasang	25,850,000
1	05	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan			Badan Kesbang Pol	47 pasang	14,100,000	APBD Kota		47 pasang	14,100,000
1	05	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi			Badan Kesbang Pol	25 orang	46,530,000	APBD Kota		25 orang	47,030,000
1	05	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek			Badan Kesbang Pol	25 orang	40,000,000	APBD Kota		25 orang	40,500,000
1	05	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	43,000,000			100%	45,500,000
1	05	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Badan Kesbang Pol	4 dokumen	25,000,000	APBD Kota		4 dokumen	26,500,000
1	05	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran			Badan Kesbang Pol	1 laporan	1,500,000	APBD Kota		1 laporan	2,000,000
1	05	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			Badan Kesbang Pol	1 laporan	1,500,000	APBD Kota		1 laporan	2,000,000
1	05	01	02	06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monev			Badan Kesbang Pol	2 kali	15,000,000	APBD Kota		2 kali	15,000,000

1	05	01	09	Program Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	615,000,000			100%	631,000,000
1	05	01	09	02 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Tim Pemantau			Badan Kesbang Pol	9 orang	370,000,000	APBD Kota		9 orang	370,000,000
1	05	01	09	03 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah tim kominda dan sekretariat kominda			Badan Kesbang Pol	9 orang	100,000,000	APBD Kota		9 orang	100,500,000
1	05	01	09	04 Pengendalian Kantrantibmas dan Tindak Kriminal	Jasa staf khusus walikota bidang intelejen			Badan Kesbang Pol	1 orang	60,000,000	APBD Kota		1 orang	60,000,000
1	05	01	09	05 Peningkatan Kerjasama Dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tim FKDM			Badan Kesbang Pol	20 orang	25,000,000	APBD Kota		20 orang	30,000,000
1	05	01	09	06 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan	Jumlah rapat tim terpadu			Badan Kesbang Pol	4 kali pertemuan	35,000,000	APBD Kota		4 kali pertemuan	35,500,000
1	05	01	09	07 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta penyuluhan			Badan Kesbang Pol	400 orang	25,000,000	APBD Kota		400 orang	35,000,000
1	05	01	13	Program Peningkatan Demokratisasi Ideologi dan Pembauran	Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Kegiatan FKUB dan FPK	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	160,000,000			100%	160,000,000
1	05	01	13	01 Pemantauan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Perkembangan Aspirasi dan Pendataan Kegiatan Warga Keturunan (Orang Asing)	Jumlah tim pemantau			Badan Kesbang Pol	12 orang	50,000,000	APBD Kota		12 orang	50,000,000
1	05	01	13	02 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragam (FKUB)	Jumlah peserta rapat FKUB			Badan Kesbang Pol	20 orang	50,000,000	APBD Kota		20 orang	50,000,000
1	05	01	13	03 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Di kalangan Masyarakat (FPK)	Jumlah peserta rapat FPK			Badan Kesbang Pol	20 orang	60,000,000	APBD Kota		20 orang	60,000,000
1	05	01	14	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		27 Lembaga/Organisasi	180,000,000			29 Lembaga/Organisasi	195,000,000
1	05	01	14	02 Forum Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta forum			Badan Kesbang Pol	100 orang	75,000,000	APBD Kota		100 orang	75,000,000
1	05	01	14	03 Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan			Badan Kesbang Pol	300 orang	35,000,000	APBD Kota		300 orang	35,000,000
1	05	01	14	05 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta			Badan Kesbang Pol	150 orang	30,000,000	APBD Kota		150 orang	35,000,000
1	05	01	14	06 Evaluasi dan Penelitian Bantuan Keuangan Partai Politik Peserta PEMILU	Jumlah Parpol			Badan Kesbang Pol	14 parpol	40,000,000	APBD Kota		14 parpol	50,000,000
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN										6,233,678,200				6,576,889,800
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1	05			KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	02	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,774,881,700			100%	2,132,843,300
1	05	02	01	01 Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat keluar dan Surat Masuk			palopo	300 Eksamplar	22,673,700	APBD Kota		300 Eksamplar	22,673,700

1	05	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air, listrik, internet yang dibiayai			palopo	10 Rekening	151,392,000	APBD Kota		10 Rekening	181,670,400
1	05	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dibiayai			palopo	13 Unit	16,536,000	APBD Kota		13 Unit	19,843,200
1	05	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa administrasi yang dibiayai			palopo	10 Orang/Bulan	63,360,000	APBD Kota		10 Orang/Bulan	76,032,000
1	05	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang dibiayai			palopo	3 Kantor	17,520,000	APBD Kota		3 Kantor	21,024,000
1	05	02	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Jasa administrasi umum yang dibiayai			palopo	53 Orang/Bulan	300,000,000	APBD Kota		53 Orang/Bulan	432,000,000
1	05	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang dibiayai			palopo	5 bangunan	7,500,000	APBD Kota		5 bangunan	9,000,000
1	05	02	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang dibiayai			palopo	3 Kantor	10,000,000	APBD Kota		3 Kantor	12,000,000
1	05	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibiayai			palopo	72 Eksamplar	5,800,000	APBD Kota		72 Eksamplar	7,000,000
1	05	02	01	16	Pengadaan Meubeluer	Jumlah Pengadaan mebeleur yang			palopo	7 unit	25,000,000	APBD Kota		7 unit	30,000,000
1	05	02	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dibiayai			palopo	45 Kali	150,000,000	APBD Kota		45 Kali	180,000,000
1	05	02	01	19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara yang dibiayai			palopo	25 Peralatan	15,000,000	APBD Kota		25 Peralatan	18,000,000
1	05	02	01	21	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung KAntor Yang dibiayai			palopo	1 bangunan kantor	200,000,000	APBD Kota		1 bangunan kantor	200,000,000
1	05	02	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas jabatan yang			palopo	1 unit	350,000,000	APBD Kota		1 unit	450,000,000
1	05	02	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			palopo	3 unit	21,600,000	APBD Kota		3 unit	21,600,000
1	05	02	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Yang			palopo	4 unit	36,000,000	APBD Kota		4 unit	36,000,000
1	05	02	01	31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dibiayai			palopo	5 Bangunan	25,000,000	APBD Kota		5 Bangunan	30,000,000

1	05	02	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan yang dibiayai			palopo	1 unit	25,000,000	APBD Kota		1 unit	30,000,000
1	05	02	01	35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara yang dibiayai			palopo	25 Unit	6,500,000			25 Unit	7,000,000
1	05	02	01	37	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara yang dibiayai			palopo	50 Peralatan	15,000,000	APBD Kota		50 Peralatan	18,000,000
1	05	02	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang dibiayai			palopo	75 pasang	117,500,000	APBD Kota		75 pasang	117,500,000
1	05	02	01	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan yang			palopo	75 pasang	80,375,000	APBD Kota		75 pasang	80,375,000
1	05	02	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu			palopo	75 pasang	13,125,000	APBD Kota		75 pasang	13,125,000
1	05	02	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dibiayai			palopo	13 orang	100,000,000	APBD Kota		14 orang	120,000,000
1	05	02	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	7,500,000			100%	10,000,000
1	05	02	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dihasilkan			palopo	3 Dokumen	3,500,000	APBD Kota		3 Dokumen	4,500,000
1	05	02	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan dan Semesteran yang dihasilkan			palopo	1 Dokumen	1,500,000	APBD Kota		1 Dokumen	2,500,000
1	05	02	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang dihasilkan			palopo	1 Dokumen	2,500,000	APBD Kota		1 Dokumen	3,000,000

1	05	02	07	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah dan Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	3,582,796,500			100%	3,605,796,500
1	05	02	07	01 Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	Jumlah layanan respon cepat (response time) penanggulangan kejadian kebakaran yang			palopo	50 kejadian	22,000,000	APBD Kota		50 kejadian	28,000,000
1	05	02	07	02 Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang terlayani			palopo	50 kejadian	2,110,269,000	APBD Kota		50 kejadian	2,110,269,000
1	05	02	07	03 Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi yang tertangani			palopo	25 penyelamatan	1,350,000,000	APBD Kota		25 penyelamatan	1,350,000,000
1	05	02	07	04 Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran	Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran Yang dilaksanakan			palopo	28 relawan	85,000,000	APBD Kota		28 relawan	102,000,000
1	05	02	07	05 Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran	Jumlah Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran yang terlayani			palopo	50 kejadian	15,527,500	APBD Kota		50 kejadian	15,527,500
1	05	02	11	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah dan Kesuksesan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	868,500,000			100%	828,250,000
1	05	02	11	01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang dibiayai			palopo	58 Peralatan	180,000,000	APBD Kota		58 Peralatan	180,000,000
1	05	02	11	02 Pemeliharaan dan Rehab Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Rehab sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang dibiayai			palopo	24 unit	170,000,000	APBD Kota		24 unit	129,750,000
1	05	02	11	03 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Warga yang menerima Penyuluhan Pencegahan Bahaya kebakaran yang dibiayai			palopo	500 orang	50,000,000	APBD Kota		1000 orang	50,000,000

1	05	02	11	04	Inspeksi Proteksi Peralatan Pemadam	Jumlah Bangunan yang memiliki peralatan proteksi pemadam			palopo	50 bangunan	18,000,000	APBD Kota		50 bangunan	18,000,000
1	05	02	11	05	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Sdm yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran yang dibiayai			palopo	20 orang	450,500,000	APBD Kota		20 orang	450,500,000
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											5,227,974,000				5,510,618,300
1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1	05				KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	03	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,050,159,000			100%	1,119,326,800
1	05	03	01	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan surat keluar yang dilaksanakan			Kota Palopo	3500 Lembar	28,600,000	APBD Kota		3700 Lembar	31,460,000
1	05	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan setiap bulan			Kota Palopo	3 Rekening	21,780,000	APBD Kota		3 Rekening	23,958,000
1	05	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah izin kendaraan bermotor yang dibayarkan			Kota Palopo	14 Unit	70,075,000	APBD Kota		15 Unit	70,075,000
1	05	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang dibayarkan			Kota Palopo	7 Orang	52,140,000	APBD Kota		8 Orang	57,354,000
1	05	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan			Kota Palopo	60 Jenis	3,050,000	APBD Kota		80 Jenis	3,050,000
1	05	03	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Pegawai yang dibayarkan			Kota Palopo	10 Orang	66,440,000	APBD Kota		11 Orang	73,084,000
1	05	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan Koran/Majalah			Kota Palopo	5 Edisi	5,808,000	APBD Kota		6 Edisi	6,388,800
1	05	03	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah			Kota Palopo	273 Kali	200,000,000	APBD Kota		303 Kali	242,000,000
1	05	03	01	19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Kantor			Kota Palopo	2 Unit	600,000	APBD Kota		4 Unit	1,000,000
1	05	03	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Laptop dan Printer			Kota Palopo	5 Unit	20,000,000	APBD Kota		5 Unit	20,000,000
1	05	03	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan			Kota Palopo	1 Unit	27,500,000	APBD Kota		1 Unit	30,250,000
1	05	03	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan			Kota Palopo	14 Unit	65,436,000	APBD Kota		15 Unit	70,436,000
1	05	03	01	37	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor			Kota Palopo	12 Unit	6,000,000	APBD Kota		15 Unit	7,541,000

[illegible]

1	05	04	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,141,490,000			100%	1,299,500,000
1	05	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar		Jl Pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1.340 Surat	19,000,000	APBD Kota		1.340 Surat	20,900,000
1	05	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening internet, air dan listrik yang dibiayai		Jl Pongsimpin Lorong Opu Toparambean	3 Rekening	70,000,000	APBD Kota		3 Rekening	77,000,000
1	05	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	18 Unit	8,130,000	APBD Kota		18 Unit	12,000,000
1	05	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	12 Orang	70,980,000	APBD Kota		12 Orang	90,000,000
1	05	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	436 Meter	14,600,000	APBD Kota		436 Meter	25,000,000
1	05	04	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah pengelola administrasi umum		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	134 Orang	400,000,000	APBD Kota		134 Orang	404,000,000
1	05	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	20 Buah	4,000,000	APBD Kota		20 Buah	8,000,000
1	05	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran/buku perundang - undangan		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	48 Eksemplar	5,280,000	APBD Kota		48 Eksemplar	6,000,000
1	05	04	01	16	Pengadaan Meubeluer	Jumlah pengadaan mebeleur		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 Unit	7,050,000	APBD Kota		1 Unit	10,000,000
1	05	04	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	60 Kali	165,000,000	APBD Kota		60 Kali	180,000,000
1	05	04	01	19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor yang memadai		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 unit	5,000,000	APBD Kota		1 unit	7,000,000
1	05	04	01	21	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana kantor		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 unit	100,000,000	APBD Kota		1 unit	100,000,000
1	05	04	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	fungsiionalnya kendaraan dinas operasional secara memadai		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	2 unit	37,000,000	APBD Kota		2 unit	50,000,000
1	05	04	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 Unit	9,750,000	APBD Kota		1 Unit	10,000,000
1	05	04	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	10 Unit	69,000,000	APBD Kota		10 Unit	100,000,000
1	05	04	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 Unit	25,000,000	APBD Kota		1 Unit	35,000,000
1	05	04	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kondisi baik		jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	2 Unit	25,000,000	APBD Kota		2 Unit	35,000,000

1	05	04	01	35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor kondisi baik			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	8 Unit	3,400,000	APBD Kota		1 Unit	3,800,000
1	05	04	01	37	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor kondisi baik			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	7 Unit	3,400,000	APBD Kota		1 Unit	3,800,000
1	05	04	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	30 pasang	15,000,000	APBD Kota		30 pasang	20,000,000
1	05	04	01	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	49 pasang	29,400,000	APBD Kota		49 pasang	35,000,000
1	05	04	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Oahraga TRC			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	50 pasang	10,500,000	APBD Kota		50 pasang	12,000,000
1	05	04	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Tenaga kerja yang terlatih dalam pencegahan			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	5 Orang	45,000,000	APBD Kota		5 Orang	55,000,000
1	05	04	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	5,800,000			100%	7,300,000
1	05	04	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan perundang-undangan			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	2 Dokumen	1,200,000	APBD Kota		2 Dokumen	1,500,000
1	05	04	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang dihasilkan			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 Laporan	1,500,000	APBD Kota		1 Laporan	2,000,000
1	05	04	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang dihasilkan			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 Laporan	1,500,000	APBD Kota		1 Laporan	2,000,000
1	05	04	02	05	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal / SOP	Jumlah dokumen yang dihasilkan			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 Dokumen	1,600,000	APBD Kota		1 Dokumen	1,800,000
1	05	04	04		Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah dan Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	389,225,000				430,000,000
1	05	04	04	01	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 tahun	276,925,000	APBD Kota		1 tahun	300,000,000
1	05	04	04	02	Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana	Terpenuhinya bahan baku bangunan untuk korban bencana alam			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 tahun	112,300,000	APBD Kota		1 tahun	130,000,000

1	05	04	08	Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiap-siagaan Terhadap Bencana	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah dan Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	2,117,650,000			100%	2,260,000,000
1	05	04	08	01 Kegiatan Penyusunan Analisis Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 Dokumen	360,000,000	APBD Kota		1 tahun	370,000,000
1	05	04	08	02 Kegiatan Pemantauan, Penyebarluasan dan Pengembangan Sistem Informasi Bencana Alam	Pengurangan Potensi ancaman Bencana dan Resiko Bencana dalam melindungi masyarakat yang terdampak bencana			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 tahun	380,000,000	APBD Kota		1 tahun	390,000,000
1	05	04	08	03 Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 tahun	930,800,000	APBD Kota		1 tahun	1,000,000,000
1	05	04	08	04 Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam	meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang penanggulangan bencana			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	750 Orang	269,600,000	APBD Kota		750 tahun	300,000,000
1	05	04	08	06 Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Bencana Alam	Rehabilitasi Garasi Speedboat			jl pongsimpin Lorong Opu Toparambean	1 kegiatan	177,250,000	APBD Kota		1 kegiatan	200,000,000
DINAS SOSIAL										11,248,410,000				11,777,980,000
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1	06			SOSIAL										
1	06	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,421,560,000			100%	1,477,780,000
1	06	01	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Dan Surat Keluar			Dinas Sosial	800 Surat	57,000,000	APBD Kota		800 surat	62,000,000
1	06	01	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai			Dinas Sosial	4 Rekening	65,000,000	APBD Kota		4 Rekening	70,000,000
1	06	01	01	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara			Dinas Sosial	5 Jasa	15,000,000	APBD Kota		5 Jasa	20,000,000
1	06	01	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di biayai			Dinas Sosial	27 unit	12,000,000	APBD Kota		27 unit	15,000,000

1	06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar			Dinas Sosial	10 orang	70,000,000	APBD Kota		10 orang	75,000,000
1	06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan			Dinas Sosial	625 Meter/persegi	14,280,000	APBD Kota		625 Meter/persegi	15,000,000
1	06	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			Dinas Sosial	15 jenis	3,500,000	APBD Kota		15 jenis	4,000,000
1	06	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan			Dinas Sosial	1 jenis	3,000,000	APBD Kota		1 jenis	3,000,000
1	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan			Dinas Sosial	4 Exemplar	5,280,000	APBD Kota		4 Exemplar	5,280,000
1	06	01	01	17	Penyediaan Bahan Makan dan Minum	Jumlah tamu dinas yang dilayani			Dinas sosial	50 orang	10,000,000	APBD Kota		50 orang	12,000,000
1	06	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas			Dinas Sosial	130 SPPD	185,000,000	APBD Kota		130 SPPD	192,500,000
1	06	01	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi yang dibayar			Dinas Sosial	30 orang	88,000,000	APBD Kota		30 orang	95,000,000
1	06	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan			Dinas sosial	2 Jenis	20,000,000	APBD Kota		2 jenis	20,000,000
1	06	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan			Dinas sosial	10 unit	10,000,000	APBD Kota		10 unit	10,000,000
1	06	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			Dinas Sosial	4 unit	20,000,000	APBD Kota		5 unit	30,000,000
1	06	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik			Dinas sosial	1 unit	25,000,000	APBD Kota		1 unit	25,000,000
1	06	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional Dinas kondisi baik			Dinas sosial	3 unit	25,000,000	APBD Kota		3 unit	25,000,000
1	06	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara			Dinas Sosial	9 unit	2,500,000	APBD Kota		9 unit	2,500,000
1	06	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara			dinas sosial	30 unit	9,000,000	APBD Kota		30 unit	9,500,000
1	06	01	01	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab			Dinas Sosial	2 lokasi	700,000,000	APBD Kota		2 lokasi	700,000,000
1	06	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan			Dinas sosial	55 pasang	35,000,000	APBD Kota		55 pasang	40,000,000
1	06	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi			Dinas sosial	15 orang	17,000,000	APBD Kota		15 orang	17,000,000
1	06	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur / pendamping PMKS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perturan perundang-			dinas sosial	6 orang	30,000,000	APBD Kota		6 orang	30,000,000

1	06	01	02	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	4,500,000			100%	6,000,000
1	06	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan		Dinas Sosial	3 jenis	1,500,000	APBD Kota		3 jenis	2,000,000
1	06	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang dihasilkan		Dinas Sosial	1 laporan	1,500,000	APBD Kota		1 laporan	2,000,000
1	06	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang disusun		Dinas Sosial	1 laporan	1,500,000	APBD Kota		1 laporan	2,000,000
1	06	01	03	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S 3)		100%	195,000,000			100%	200,000,000
1	06	01	03	01	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti yang menerima		Dinas Sosial	50 orang	195,000,000	APBD Kota		50 orang	200,000,000
1	06	01	04	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S 3)		100%	27,450,000			100%	27,450,000
1	06	01	04	01	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang menerima pelayanan		Dinas Sosial	60 orang	27,450,000	APBD Kota		60 orang	27,450,000
1	06	01	05	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Penduduk Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S 3)		100%	95,000,000			100%	95,000,000
1	06	01	05	01	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar di luar panti yang menerima pelayanan		Dinas Sosial	50 orang	95,000,000	APBD Kota		60 orang	95,000,000
1	06	01	06	Program Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penduduk /Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S 3)		100%	61,550,000			100%	61,550,000

1	06	01	06	01	Pelayanan Rehabilitas Sosial Dasar Bagi Tuna Sosial di Luar Panti	Jumlah Tuna Susila di luar panti yang menerima pelayanan			Dinas Sosial	30 orang	61,550,000	APBD Kota		35 orang	61,550,000
1	06	01	07		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasaca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Persentase Penduduk Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S 3)		100%	753,100,000			100%	775,000,000
1	06	01	07	01	Penanganan Masalah - masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah Korban bencana yang tertangani			Dinas Sosial	275 KK	93,100,000	APBD Kota		275 KK	105,000,000
1	06	01	07	02	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre			Dinas Sosial	48 Kelurahan	60,000,000	APBD Kota		48 Kelurahan	70,000,000
1	06	01	07	03	Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana			Dinas Sosial	9 Kecamatan	150,000,000	APBD Kota		9 Kecamatan	150,000,000
1	06	01	07	04	Kelurahan Berketahanan Sosial	Jumlah Kelurahan yang berketahanan			Dinas Sosial	48 Kelurahan	150,000,000	APBD Kota		48 Kelurahan	150,000,000
1	06	01	07	05	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	jumlah warga negara/korban yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana			Dinas Sosial	100 persen	300,000,000	APBD Kota		100 persen	300,000,000
1	06	01	08		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan	Persentase WKSMB yang Menyediakan	Pengembangan SDM, Penanganan	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan		100%	362,100,000			100%	362,100,000
1	06	01	08	01	Perberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Kegiatan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial yang dilaksanakan			Dinas Sosial	10 Kegiatan	62,100,000	APBD Kota		10 Kegiatan	62,100,000
1	06	01	08	03	Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat	Jumlah Daerah rawan konflik yang mendapatkan bantuan			Dinas Sosial	48 Kelurahan	150,000,000	APBD Kota		48 Kelurahan	150,000,000
1	06	01	08	04	Kearifan Lokal	Jumlah Daerah rawan konflik yang mendapatkan bantuan			Dinas Sosial	48 Kelurahan	150,000,000	APBD Kota		48 Kelurahan	150,000,000
1	06	01	09		Program Bantuan Non Tunai	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S 3)		79,45%	90,500,000			79,62%	90,500,000
1	06	01	09	01	Pengawasan, Evaliasi dan Pelaporan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kepada Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang telah mendapatkan			Dinas Sosial	6109 KPM	90,500,000	APBD Kota		6109 KPM	90,500,000

1	06	01	10		Program Pembinaan Penyandang Cacat	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S 3)		2,61%	400,000,000			3,12%	450,000,000
1	06	01	10	01	Pelayanan Rehabilitas Sosial Dasar Bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)	Jumlah orang dengan kecacatan berat (ODKB) yang menerima pelayanan			Dinas Sosial	50 orang	400,000,000	APBD Kota		50 orang	450,000,000
1	06	01	11		Program Pemberdayaan dan Pembinaan Fakir Miskin dan Peyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin dan PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S 3)		79,26%	7,837,650,000			79,41%	8,232,600,000
1	06	01	11	01	Identifikasi dan Pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT)	Jumlah KPM yang terinput dalam aplikasi SIKS NG			Dinas Sosial	5000 KPM	134,000,000	APBD Kota		4000 KPM	134,000,000
1	06	01	11	02	Pemberdayaan dan Pembinaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan pembinaan			Dinas Sosial	217 KUBE	1,093,600,000	APBD Kota		217 KUBE	1,168,600,000
1	06	01	11	03	Program Keluarga Harapan	Jumlah KPM yang mendapat bantuan			Dinas Sosial	3000 KPM	2,000,000,000	APBD Kota		3000 KPM	2,000,000,000
1	06	01	11	04	Pelayanan Rehabilitas Sosial Dasar Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang menerima layanan			Dinas Sosial	100 orang	900,000,000	APBD Kota		110 orang	930,000,000
1	06	01	11	07	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya - upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah KPM penerima RASTRA daerah			Dinas Sosial	4359 KPM	3,710,050,000	APBD Kota		4359 KPM	4,000,000,000
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											77,610,075,974				80,796,091,600
DINAS TENAGA KERJA											1,624,610,000				1,659,540,000
2					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	01				TENAGA KERJA										
2	01	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	421,120,000			100%	443,980,000
2	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar			dinas tenaga kerja	300 lembar	28,100,000	APBD Kota		350 lembar	33,000,000
2	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai			dinas tenaga kerja	4 rekening	28,500,000	APBD Kota		4 rekening	29,500,000
2	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya			dinas tenaga kerja	30 unit	11,400,000	APBD Kota		30 unit	11,400,000

2	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar(orang)			dinas tenaga kerja	19 orang/tahun	105,300,000	APBD Kota		20 orang/tahun	105,300,000
2	01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan kantor yang dibersihkan (kantor)			dinas tenaga kerja	9 Ruangan	8,300,000	APBD Kota		9 Ruangan	8,400,000
2	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan			dinas tenaga kerja	2 komponen	3,150,000	APBD Kota		2 komponen	3,300,000
2	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan			dinas tenaga kerja	4 expl	3,970,000	APBD Kota		4 expl	3,980,000
2	01	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah			dinas tenaga kerja	7 kali	36,850,000	APBD Kota		160 kali	36,850,000
2	01	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah atau jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli			dinas tenaga kerja	2 unit	11,000,000	APBD Kota		1 unit	12,000,000
2	01	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli			dinas tenaga kerja	3 unit	12,500,000	APBD Kota		3 unit	14,000,000
2	01	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik			dinas tenaga kerja	3 unit	21,500,000	APBD Kota		3 unit	22,000,000
2	01	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan dinas operasional yang dibayarkan			dinas tenaga kerja	3 unit	15,150,000	APBD Kota		3 unit	15,150,000
2	01	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara			dinas tenaga kerja	7 unit	1,600,000	APBD Kota		7 unit	1,800,000
2	01	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			dinas tenaga kerja	14 unit	5,000,000	APBD Kota		14 unit	5,500,000
2	01	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek			dinas tenaga kerja	7 kali	63,000,000	APBD Kota		8 kali	72,000,000
2	01	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Jasa Administrasi Umum Yang Dibiayai			dinas tenaga kerja	12 orang	65,800,000	APBD Kota		12 Orang	69,800,000
2	01	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	8,100,000			100%	8,100,000
2	01	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan			dinas tenaga kerja	2 Dokumen	2,300,000	APBD Kota		2 Dokumen	2,300,000
2	01	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang dihasilkan			dinas tenaga kerja	2 Dokumen	3,500,000	APBD Kota		2 Dokumen	3,500,000
2	01	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang disusun			dinas tenaga kerja	1 Dokumen	2,300,000	APBD Kota		1 Dokumen	2,300,000

[illegible]

2	02	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	510,335,000			100%	511,335,000
2	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar		kota palopo	670 Surat	33,500,000	APBD Kota		670 Surat	33,500,000
2	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah air, listrik, internet yang dibiayai		kota palopo	2 Rekening	31,575,000	APBD Kota		2 Rekening	31,575,000
2	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai		kota palopo	4 Unit	1,800,000	APBD Kota		4 Unit	1,800,000
2	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar		kota palopo	10 Orang	69,600,000	APBD Kota		10 Orang	69,600,000
2	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan		kota palopo	155 Meter	8,000,000	APBD Kota		155 Meter	8,000,000
2	02	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja		kota palopo	12 Bulan	6,000,000	APBD Kota		12 Bulan	6,000,000
2	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan		kota palopo	40 Buah/meter	1,000,000	APBD Kota		40 buah/meter	1,000,000
2	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan		kota palopo	36 Eksemplar	3,960,000	APBD Kota		36 Eksemplar	3,960,000
2	02	01	01	17	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah tamu		kota palopo	60 org/kali	2,000,000	APBD Kota		60 org/kali	2,500,000
2	02	01	01	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		kota palopo	50 SPPD	195,500,000	APBD Kota		50 SPPD	195,500,000
2	02	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah atau jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli		kota palopo	1 Unit	4,000,000	APBD Kota		1 Unit	4,000,000
2	02	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli		kota palopo	3 Unit	9,500,000	APBD Kota		3 Unit	10,000,000
2	02	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli		kota palopo	10 Unit	15,000,000	APBD Kota		10 Unit	15,000,000
2	02	01	01	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		kota palopo	1 Gedung	2,000,000	APBD Kota		1 Gedung	2,000,000
2	02	01	01	32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik		Kota Palopo	1 Unit	25,000,000	APBD Kota		1 Unit	25,000,000
2	02	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara		Kota Palopo	5 Unit	1,000,000	APBD Kota		5 Unit	1,000,000
2	02	01	01	37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Kota Palopo	8 Unit	2,400,000	APBD Kota		8 Unit	2,400,000
2	02	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi umum yang dibayar		kota palopo	17 Org	98,500,000	APBD Kota		17 Org	98,500,000

[illegible]

2	03	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	519,880,000			100%	546,960,000
2	03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk & keluar		Kota Palopo	500 Surat	38,000,000	APBD Kota		500 surat	40,000,000
2	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Internet yang		Kota Palopo	5 Rekening	40,020,000	APBD Kota		5 Rekening	45,000,000
2	03	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibiayai		Kota Palopo	20 Unit	4,000,000	APBD Kota		20 Unit	4,000,000
2	03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar		Kota Palopo	11 Orang	50,000,000	APBD Kota		12 Orang	55,000,000
2	03	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang diberikan jasa honorarium		Kota Palopo	1 Orang	7,100,000	APBD Kota		1 Orang	7,500,000
2	03	01	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Jasa untuk PPK, PPHP, Pejabat Pengadaan, operator komputer, sopir, caraka dan penjaga kantor		Kota Palopo	10 Orang	63,000,000	APBD Kota		10 Orang	65,000,000
2	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan		Kota Palopo	10 Jenis	1,500,000	APBD Kota		10 jenis	3,000,000
2	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan Koran		Kota Palopo	3 eksamplar	3,960,000	APBD Kota		3 eksamplar	3,960,000
2	03	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		Luar Kota Palopo	60 kali	220,000,000	APBD Kota		65 Kali	220,000,000
2	03	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		Kota Palopo	4 Buah	4,000,000	APBD Kota		1 buah	5,000,000
2	03	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli		Kota Palopo	3 Buah	10,000,000	APBD Kota		3 Buah	15,000,000
2	03	01	01	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang terpelihara		Kota Palopo	10 m2	10,000,000	APBD Kota		10 m2	10,000,000
2	03	01	01	32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik		Kota Palopo	1 Unit	25,000,000	APBD Kota		1 Unit	25,000,000
2	03	01	01	33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas kondisi baik		Kota Palopo	1 Unit	18,500,000	APBD Kota		1 Unit	18,500,000
2	03	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara		Kota Palopo	9 Unit	1,800,000	APBD Kota		10 Unit	2,000,000
2	03	01	01	37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Kota Palopo	30 Unit	6,000,000	APBD Kota		35 Unit	8,000,000
2	03	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek		Kota Palopo	2 Orang	17,000,000	APBD Kota		2 Orang	20,000,000

2	03	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	6,000,000			100%	7,000,000
2	03	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja yang disusun			Kota Palopo	5 buah	2,000,000	APBD Kota		5 buah	2,000,000
2	03	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semeasteran	Jumlah Dokumen keuangan yang Disusun			Kota Palopo	2 buah	2,000,000	APBD Kota		2 Buah	2,000,000
2	03	01	02	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi yang dilaksanakan			Kota Palopo	4 Kali	2,000,000	APBD Kota		4 Kali	3,000,000
2	03	01	03		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)		91,65	149,500,000			91,70	175,500,000
2	03	01	03	02	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Kelompok lumbung pangan & SKPG yang dipantau serta penyusunan peta FSVA			Kota Palopo	2 Kelompok	15,000,000	APBD Kota		2 Kelompok	20,000,000
2	03	01	03	03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah Data untuk penyusunan pola konsumsi pangan Kota			Kota Palopo	1 Laporan	4,500,000	APBD Kota		1 Laporan	8,500,000
2	03	01	03	04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan makanan Kota Palopo			Kota Palopo	1 Dokumen	8,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	15,000,000
2	03	01	03	05	Penanganan Distribusi dan Akses Pangan	Jumlah data harga dan pasokan pangan			Kota Palopo	4 Kecamatan	6,000,000	APBD Kota		4 Kecamatan	7,000,000
2	03	01	03	06	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengujian sampel pangan segar			Kota Palopo	6 Kali	35,000,000	APBD Kota		8 Kali	40,000,000
2	03	01	03	07	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah Penyuluhan B2SA yang dilaksanakan			Kota Palopo & Luar Kota Palopo	5 Kali	40,000,000	APBD Kota		5 Kali	35,000,000
2	03	01	03	08	Penyusunan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan			Kota Palopo	1 Dokumen	20,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	25,000,000
2	03	01	03	09	Jejaring Keamanan Pangan	Jumlah pertemuan, pemantauan dan pengawasan tim			Kota Palopo	4 Kali	21,000,000	APBD Kota		4 Kali	25,000,000
2	03	01	04		Program Peningkatan Produktifitas Kawasan Hunian dan Lingkungan Pemukiman	Luas Lahan Pekarangan yang Dimanfaatkan	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)		2 Ha	70,457,000			2 Ha	60,457,000
2	03	01	04	01	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah pekarangan dan kelompok yang dimanfaatkan			Kota Palopo	4 Kelompok	30,457,000	APBD Kota		2 Kelompok	30,457,000

2	03	01	04	02	Promosi Pangan Olahan Bebas Pangan Lokal	Jumlah event yang diikuti			Kota Palopo & Luar Kota Palopo	5 Kali	40,000,000	APBD Kota		5 Kali	30,000,000
DINAS PERTANAHAN											10,428,600,000				10,547,500,000
2					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	04				PERTANAHAN										
2	04	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	291,400,000			100%	273,500,000
2	04	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk & surat keluar			Kota Palopo	500 surat	10,000,000	APBD Kota		500 surat	10,000,000
2	04	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai			Kota Palopo	1 rekening	6,600,000	APBD Kota		1 rekening	5,400,000
2	04	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai			Kota Palopo	12 unit	2,600,000	APBD Kota		12 unit	2,320,000
2	04	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar			Kota Palopo	4 orang	40,000,000	APBD Kota		4 orang	40,000,000
2	04	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan			Kota Palopo	300 m2	6,500,000	APBD Kota		300 m2	6,500,000
2	04	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			Kota Palopo	3 jenis	500,000	APBD Kota		3 jenis	500,000
2	04	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah langganan koran / buku perundang - undangan			Kota Palopo	36 exemplar	3,600,000	APBD Kota		36 exemplar	3,600,000
2	04	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas			Kota Palopo	28 sppd	70,000,000	APBD Kota		20 sppd	50,000,000
2	04	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli			Kota Palopo	1 unit	5,700,000	APBD Kota		2 unit	9,300,000
2	04	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik			Kota Palopo	1 unit	10,000,000	APBD Kota		1 unit	10,000,000
2	04	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara			Kota Palopo	2 unit	400,000	APBD Kota		3 unit	600,000
2	04	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara			Kota Palopo	5 unit	1,000,000	APBD Kota		5 unit	1,000,000
2	04	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek			Kota Palopo	1 orang	7,700,000	APBD Kota		1 orang	7,700,000
2	04	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi umum yang dibayar			Kota Palopo	26 orang	126,800,000	APBD Kota		26 orang	126,580,000

[illegible]

2	05	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	2,714,580,774			100%	3,037,080,000
2	05	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola		Jl.Samiun	250 surat	96,434,200	APBD Kota		280 surat	100,000,000
2	05	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar		Jl.Samiun	4 rekening	120,566,574	APBD Kota		4 rekening	135,000,000
2	05	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayarkan		Jl.Samiun	65 stnk	50,700,000	APBD Kota		70 STNK	70,700,000
2	05	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah dokumen keuangan yang tersedia		Jl.Samiun	4 dokumen	165,000,000	APBD Kota		4 dokumen	166,500,000
2	05	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan		Jl.Samiun	2 orang	17,600,000	APBD Kota		2 orang	17,600,000
2	05	01	01	12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik yang tersedia		Jl.Samiun	8 buah	2,700,000	APBD Kota		10 buah	3,000,000
2	05	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	jumlah bahan bacaan koran		Jl.Samiun	4 koran	5,280,000	APBD Kota		4 koran	5,280,000
2	05	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas		Jl.Samiun	59 kali	376,800,000	APBD Kota		70 kali	400,000,000
2	05	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		Jl.Samiun	1 Unit	20,000,000	APBD Kota		-	-
2	05	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan operasional yang tersedia		Jl.Samiun	2 unit	1,250,000,000	APBD Kota		2 unit	1,500,000,000
2	05	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah pengadaan alat kantor		Jl.Samiun	3 unit	16,500,000	APBD Kota		3 unit	17,000,000
2	05	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah pengadaan peralatan kantor		Jl.Samiun	3 buah	12,000,000	APBD Kota		4 buah	36,000,000
2	05	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	jumlah mebeleur yang tersedia		Jl.Samiun	1 buah	15,000,000	APBD Kota		1 buah	16,000,000
2	05	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung yang dipelihara		Jl.Samiun	1 gedung	17,500,000	APBD Kota		1 gedung	17,500,000
2	05	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara		Jl.Samiun	1 unit	25,000,000	APBD Kota		1 unit	25,000,000
2	05	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara		Jl.Samiun	2 unit	10,000,000	APBD Kota		2 unit	10,000,000
2	05	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara		Jl.Samiun	9 unit	2,500,000	APBD Kota		9 unit	2,500,000
2	05	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan kantor yang terpelihara		Jl.Samiun	11 unit	3,500,000	APBD Kota		12 unit	4,000,000
2	05	01	01	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia		Jl.Samiun	85 Buah	13,500,000	APBD Kota		85 Buah	13,500,000
2	05	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	jumlah pakaian olah raga yang tersedia		Jl.Samiun	170 pasang	250,000,000	APBD Kota		170 pasang	250,000,000

2	05	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Jl.Samiun	13 orang	148,000,000	APBD Kota		4 orang	150,000,000
2	05	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	jumlah tenaga adminstrasi dan ASN Pengelola umum			Jl.Samiun	10 orang	96,000,000	APBD Kota		10 orang	97,500,000
2	05	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	37,500,000			100%	37,500,000
2	05	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tingkat pemenuhan dokumen sakiip dan laporan keuangan			Jl.Samiun	2 dokumen	3,500,000	APBD Kota		2 dokumen	3,500,000
2	05	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	jumlah dokumen keuangan semesteran			Jl.Samiun	1 laporan	2,000,000	APBD Kota		1 laporan	2,000,000
2	05	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			Jl.Samiun	1 laporan	2,000,000	APBD Kota		1 laporan	2,000,000
2	05	01	02	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan monitoring,evaluasi dan pelaporan			Jl.Samiun	12 laporan	30,000,000	APBD Kota		12 laporan	30,000,000
2	05	01	03		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya Serta Sustainable	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S 6)		70%	11,945,000,000				12,255,000,000
2	05	01	03	01	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Persampahan	jumlah kebijakan yang tersusun			Jl.Samiun	1 kebijakan	75,000,000	APBD Kota		1 kebijakan	75,000,000
2	05	01	03	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia			Jl. Samiun	50 unit	2,500,000,000	APBD Kota		50 unit	2,500,000,000
2	05	01	03	04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah petugas kebersihan			JL. Samiun	445 Orang	8,000,000,000	APBD Kota		445 orang	8,200,000,000
2	05	01	03	07	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pengelolaan TPS3R bank sampah			JL. Samiun	200 Orang	170,000,000	APBD Kota		10 Orang	180,000,000
2	05	01	03	08	Penyediaan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Jumlah TPA yang dikelola			JL. Samiun	1 TPA	1,200,000,000	APBD Kota		1 TPA	1,300,000,000
2	05	01	04		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya Serta Sustainable	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S 6)		Baik	2,368,670,000			Baik	2,584,570,000
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara				Sangat Baik				Sangat Baik	
2	05	01	04	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	predikat adipura			Jl.Samiun	1 predikat adipura	73,570,000	APBD Kota		1 predikat adipura	83,570,000

2	05	01	04	02	Koordinasi Penilaian Langit Biru	Jumlah Sekolah adiwiyata yang di bina			Jl. Samiun	4 Sekolah	64,000,000	APBD Kota		5 Sekolah	65,000,000
2	05	01	04	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah dokumen mutu baku air dan udara			Jl. Samiun	2 Dokumen	72,000,000	APBD Kota		2 Dokumen	72,000,000
2	05	01	04	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan			Jl. Samiun	7 Pengaduan	30,000,000	APBD Kota		8 Pengaduan	32,000,000
2	05	01	04	07	Koordinasi Penyusunan AMDAL	jumlah koordinasi dokumen AMDAL			Jl. Samiun	1 Dokumen	55,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	55,000,000
2	05	01	04	08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			Jl. Samiun	17 kali	30,000,000	APBD Kota		17 kali	30,000,000
2	05	01	04	09	Pengawasan Limbah B3 dan Limbah B3	Jumlah pengawasan limbah B3			Jl.Samiun	30 usaha	20,100,000	APBD Kota		35 usaha	23,000,000
2	05	01	04	11	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	jumlah keanekaragaman hayati dan SDA yang dikelola			Jl. Samiun	1 lokasi SDA	2,000,000,000	APBD Kota		1 lokasi SDA	2,200,000,000
2	05	01	04	12	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersedia			Jl.Samiun	1 dokumen	24,000,000	APBD Kota		1 dokumen	24,000,000
2	05	01	05		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bidang Penerangan Jalanan Umum	Persentase Luas Wilayah Pemukiman yang Dijangkau Penerangan Jalan Umum (%)	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya Serta Sustainable	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S 6)		72%	11,350,000,000			75%	12,100,000,000
2	05	01	05	01	Penyediaan Jasa Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pengelola PJU			Jl. Samiun	40 orang	8,250,000,000	APBD Kota		65 orang	8,500,000,000
2	05	01	05	02	Pengadaan Listrik Penerangan Jalan Umum	Jumlah jaringan transmisi			Kota Palopo	5 Jaringan	2,000,000,000	APBD Kota		5 Jaringan	2,500,000,000
2	05	01	05	03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum	Jumlah lampu jalan yang			Kota Palopo	3300 lampu	1,100,000,000	APBD Kota		3500 lampu	1,100,000,000
2	05	01	06		Program Pelayanan Pemakaman dan Pengelolaan Pertamanan	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk (per 10.000)	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya Serta Sustainable	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S 6)		1,8	3,390,593,000			1,9	3,400,593,000
2	05	01	06	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	jumlah makam yang terpelihara			Jl. Samiun	15 makam	720,593,000	APBD Kota		15 makam	720,593,000
2	05	01	06	02	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	jumlah kebijakan yang disusun			Jl. Samiun	1 kebijakan	120,000,000	APBD Kota		1 kebijakan	130,000,000
2	05	01	06	03	Penataan RTH	jumlah RTH yang ditata			Jl.Samiun	21 RTH	1,500,000,000	APBD Kota		21 RTH	1,500,000,000
2	05	01	06	04	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang terpelihara			Jl.Samiun	21 RTH	1,050,000,000	APBD Kota		21 RTH	1,050,000,000
2	05	01	7		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup						265,000,000				265,000,000
2	05	01	07	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup				Jl. Samiun		265,000,000	DAK			265,000,000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											2,233,250,000				2,219,500,000
2					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	06				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										

2	06	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,121,200,000			100%	1,168,950,000
2	06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan keluar		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	240 eksamplar	63,500,000	APBD Kota		240 eksamplar	63,500,000
2	06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening Air, listrik dan internet yang dibiayai		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	3 rekening	60,000,000	APBD Kota		3 rekening	60,000,000
2	06	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ Operasional/ jabatan yang dibiayai		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	10 unit	4,500,000	APBD Kota		17 unit	7,250,000
2	06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah jasa administrasi yang dibayar		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	72 orang/tahun	57,700,000	APBD Kota		72 orang/tahun	57,700,000
2	06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	luas kantor yang dibersihkan		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	450 meter	9,500,000	APBD Kota		450 meter	9,500,000
2	06	01	01	11	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	jumlah jasa administrasi yang dibayar		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	9 orang/tahun	60,000,000	APBD Kota		9 orang/tahun	47,500,000
2	06	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang diadakan		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	30 buah	4,000,000	APBD Kota		30 buah	4,000,000
2	06	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	10 buah	12,800,000	APBD Kota		10 buah	12,800,000
2	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	jumlah langganan koran		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	4 eksamplar	6,000,000	APBD Kota		4 eksamplar	6,000,000
2	06	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah tamu dinas yang dilayani		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	120 orang/tahun	4,500,000	APBD Kota		120 orang/tahun	4,500,000
2	06	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah perjalanan dinas		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	140 kali	290,000,000	APBD Kota		140 kali	290,000,000
2	06	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor	luas bangunan kantor dinas		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	10 meter	30,000,000	APBD Kota		10 meter	30,000,000
2	06	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah randis/operasional yang dibeli		dinas kependudukan dan pencatatan sipil	2 buah	45,000,000	APBD Kota		2 buah	45,000,000

2	06	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah atau jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	2 buah	3,500,000	APBD Kota		2 buah	3,500,000
2	06	01	01	27	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	5 buah	100,000,000	APBD Kota		5 buah	130,000,000
2	06	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	1 Unit	30,000,000	APBD Kota		1 Tahun	30,000,000
2	06	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	1 unit	30,000,000	APBD Kota		1 unit	30,000,000
2	06	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas operasional kondisi baik			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	1 unit	23,000,000	APBD Kota		1 unit	23,000,000
2	06	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	13 unit	3,200,000	APBD Kota		13 unit	3,200,000
2	06	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	10 unit	7,000,000	APBD Kota		21 unit	15,000,000
2	06	01	01	38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	10 unit	16,000,000	APBD Kota		10 unit	16,000,000
2	06	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	70 pasang	31,500,000	APBD Kota		70 pasang	31,500,000
2	06	01	01	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja yang diadakan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	70 pasang	31,500,000	APBD Kota		70 pasang	31,500,000
2	06	01	01	48	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri yang diadakan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	70 pasang	31,500,000	APBD Kota		70 pasang	31,500,000
2	06	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	30 pasang	12,000,000	APBD Kota		70 pasang	31,500,000
2	06	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	7 orang	60,000,000	APBD Kota		7 orang	60,000,000
2	06	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	9 kecamatan	70,000,000	APBD Kota		9 kecamatan	70,000,000
2	06	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	9 orang	24,500,000	APBD Kota		9 orang	24,500,000

2	06	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	8,000,000			100%	8,000,000
2	06	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	4 dokumen	3,500,000	APBD Kota		4 dokumen	3,500,000
2	06	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang dihasilkan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	2 dokumen	2,800,000	APBD Kota		2 dokumen	2,800,000
2	06	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang akan disusun			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	1 dokumen	1,700,000	APBD Kota		1 dokumen	1,700,000
2	06	01	03		Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		85%	153,050,000			90%	186,550,000
2	06	01	03	01	Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk	jumlah laporan pelayanan pendaftaran identitas penduduk yang disusun			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	12 buah	30,000,000	APBD Kota		12 buah	30,000,000
2	06	01	03	02	Pelayanan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk	jumlah laporan pelayanan pindah datang penduduk yang disusun			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	12 buah	8,300,000	APBD Kota		12 buah	8,300,000
2	06	01	03	03	Pendataan Penduduk	jumlah laporan pendataan penduduk yang disusun			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	12 buah	8,500,000	APBD Kota		12 buah	8,500,000
2	06	01	03	04	Pelayanan Pencatatan Sipil Kelahiran	Jumlah laporan layanan pencatatan sipil kelahiran yang disusun			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	12 dokumen	12,250,000	APBD Kota		12 dokumen	12,250,000
2	06	01	03	05	Pelayanan Pencatatan Sipil Perkawinan dan Perceraian	jumlah laporan pelayanan pencatatan sipil perkawinan dan perceraian			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	12 buah	11,500,000	APBD Kota		12 buah	12,000,000
2	06	01	03	06	Pelayanan Pencatatan Sipil Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	jumlah sistem informasi kependudukan yang ditangani dan di kelola			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	12 buah	12,000,000	APBD Kota		12 buah	12,500,000
2	06	01	03	07	Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan	Jumlah laporan sistem informasi kependudukan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	12 laporan	15,000,000	APBD Kota		12 laporan	18,000,000

2	06	01	03	08	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	jumlah laporan data kependudukan/tahun			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	12 buah	15,500,000	APBD Kota		12 buah	35,000,000
2	06	01	03	09	Kerjasama dan inovasi Pelayanan Kependudukan	jumlah kerjasama dan inovasi layanan yang dihasilkan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	12 buah	40,000,000	APBD Kota		12 buah	50,000,000
2	06	01	04		Program Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Persentase Keterpenuhan Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	951,000,000			100%	856,000,000
2	06	01	04	01	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	2 kali	30,000,000	DAK		2 kali	35,000,000
2	06	01	04	02	Pelayanan Dokumen Kependudukan	jumlah kegiatan pelayanan keliling yang dilaksanakan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	108 kali	55,000,000	DAK		108 kali	195,000,000
2	06	01	04	03	Penerbitan Dokumen Kependudukan	jumlah dokumen yang diterbitkan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	36000 buah	670,000,000	DAK		36000 buah	430,000,000
2	06	01	04	04	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	jumlah buku yang diterbitkan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	180 buku	29,000,000	DAK		180 buku	29,000,000
2	06	01	04	05	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			dinas kependudukan dan pencatatan sipil	17 kali	167,000,000	DAK		17 kali	167,000,000
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											13,786,980,200				13,788,480,200
2					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	08				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2	08	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	631,960,200			100%	631,960,200
2	08	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk & Keluar			Jln. K.H. Muhamad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@gmail.com	1000 Surat	23,943,000	APBD Kota		1000 Surat	23,943,000

2	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Internet yang Dibiayai			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	3 Rekening	38,985,000	APBD Kota		3 Rekening	38,985,000
2	08	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibiayai			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	103 Unit	26,000,000	APBD Kota		103 Unit	26,000,000
2	08	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	7 Orang	69,805,000	APBD Kota		7 Orang	69,805,000
2	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	1 Orang	9,200,000	APBD Kota		1 Orang	9,200,000
2	08	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	30 Jenis/Unit	1,800,000	APBD Kota		30 Jenis/Unit	1,800,000
2	08	01	01	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Tamu Dinas yang dilayani			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	1500 Kotak	14,950,000	APBD Kota		1500 Kotak	14,950,000
2	08	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	35 Buah	3,500,000	APBD Kota		35 Buah	3,500,000
2	08	01	01	13	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	jumlah jasa administrasi umum yang dibayar			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	17 Orang	110,000,000	APBD Kota		17 Orang	110,000,000
2	08	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah langganan Koran /Buku perundang-undangan			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	4 Exp.	3,500,000	APBD Kota		4 Exp.	3,500,000

2	08	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	116 Orang	170,000,000	APBD Kota		116 Orang	170,000,000
2	08	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah atau Jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	1 Buah	5,000,000	APBD Kota		1 Buah	5,000,000
2	08	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	5 Buah	14,662,500	APBD Kota		5 Buah	14,662,500
2	08	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	35 Unit/set	10,000,000	APBD Kota		35 Unit/set	10,000,000
2	08	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang terpelihara			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	1 Unit	8,625,000	APBD Kota		1 Unit	8,625,000
2	08	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	1 Unit	25,300,000	APBD Kota		1 Unit	25,300,000
2	08	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas kondisi baik			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	5 Unit	31,050,000	APBD Kota		5 Unit	31,050,000
2	08	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	17 Unit	2,300,000	APBD Kota		17 Unit	2,300,000
2	08	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	80 Unit	8,625,000	APBD Kota		80 Unit	8,625,000

2	08	01	01	38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah meubiliar yang terpelihara			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	35 Unit/set	8,750,000	APBD Kota		35 Unit/set	8,750,000
2	08	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	35 Psg	20,000,000	APBD Kota		35 Psg	20,000,000
2	08	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	16 ASN	8,050,000	APBD Kota		16 ASN	8,050,000
2	08	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	16 ASN	17,914,700	APBD Kota		16 ASN	17,914,700
2	08	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	17,940,000			100%	17,940,000
2	08	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen perencanaan			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	5 Laporan	6,555,000	APBD Kota		5 Laporan	6,555,000
2	08	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan semesteran			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	2 Laporan	3,450,000	APBD Kota		2 Laporan	3,450,000
2	08	01	02	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis Realisasi Anggaran			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	2 Laporan	5,750,000	APBD Kota		2 Laporan	5,750,000
2	08	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	laporan Tahunan			Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	1 Laporan	2,185,000	APBD Kota		1 Laporan	2,185,000

2	08	01	03	Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur yang Menggunakan Kontrasepsi (%)	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S 3)		12%	9,343,080,000			15%	9,344,580,000
2	08	01	03	01	Pengendalian dan Pendistribusian Alkon	Jumlah pelayanan KB dan alat kontrasepsi yang dilaksanakan		Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	20 Faskes	9,500,000	APBD Kota		20 Faskes	9,500,000
2	08	01	03	02	Jaminan Pelayanan KB	Jumlah Penggunaan AlaT Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	15 Orang	22,500,000	APBD Kota		15 Orang	22,500,000
2	08	01	03	03	Pembinaan Kesertaan KB	Jumlah Ratio Akseptor KB		Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	48 Klp	45,000,000	APBD Kota		48 Klp	45,000,000
2	08	01	03	04	Advokasi dan Penggerakan	Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	9 Kampung KB	10,580,000	APBD Kota		9 Kampung KB	10,580,000
2	08	01	03	05	Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	Jumlah PKB / PLKB/Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	300 Kader KB	1,550,000,000	APBD Kota		300 Kader KB	1,550,000,000
2	08	01	03	06	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Jumlah penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/Kel.		Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	3 Dokumen	14,000,000	APBD Kota		3 Dokumen	15,500,000
2	08	01	03	07	Pembinaan Teknis Percepatan Penyampaian Laporan Kinerja dan Kegiatan UPTD	Jumlah UPTD yang menyampaikan laporan Kinerja dan Kegiatan		Jln.K.H.Muham mad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@ gmail.com	9 UPTD	103,500,000	APBD Kota		9 UPTD	103,500,000

2	08	01	04	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Dalam BDT yang Mendapatkan Bina Keluarga (%)	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (S 3)		3%	42,500,000			4%	42,500,000
2	08	01	04	01	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		Jln.K.H.Muhamad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@gmail.com	9 Klp	15,000,000	APBD Kota		9 Klp	15,000,000
2	08	01	04	02	Bina Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		Jln.K.H.Muhamad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@gmail.com	18 Klp	13,500,000	APBD Kota		18 Klp	13,500,000
2	08	01	04	03	Bina Ketahanan Remaja	1. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 2. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja / Mahasiswa		Jln.K.H.Muhamad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@gmail.com	9 Klp	14,000,000	APBD Kota		9 Klp	14,000,000
2	08	01	05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana						3,751,500,000				3,751,500,000
2	08	01	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan		Jln.K.H.Muhamad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@gmail.com	9 UPTD	1,736,500,000	DAK		9 UPTD	1,736,500,000
2	08	01	05	02	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	Jumlah pelayanan KB dan alat kontrasepsi yang dilaksanakan		Jln.K.H.Muhamad Hasyim No.7A Telp / Fax (0471) 327005 E-Mail : dppkb2017pb@gmail.com	9/9/20 UPTD/Kampung KB/Faskes	2,015,000,000	DAK		9/9/20 UPTD/Kampung KB/Faskes	2,015,000,000
DINAS PERHUBUNGAN										2,474,514,000				2,483,514,000
2				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	09			PERHUBUNGAN										
2	09	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	830,864,000			100%	831,864,000
2	09	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar		Kantor Dishub	950 Surat	32,500,000	APBD Kota		950 Surat	32,500,000

2	09	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Disediakan Sumber Dayab Air dan Listrik			Kantor Dishub	3 Kantor	66,500,000	APBD Kota		3 Kantor	66,500,000
2	09	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang dibayarkan Surat-Suratnya			Kantor Dishub	16 Kendaraan	16,250,000	APBD Kota		16 Kendaraan	16,250,000
2	09	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan			Kantor Dishub	11 Org	85,628,000	APBD Kota		11 Org	85,628,000
2	09	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor yang dibersihkan			Kantor Dishub	3 Kantor	47,000,000	APBD Kota		3 Kantor	47,000,000
2	09	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Kantor yang disediakan Instalasi Listriknya			Kantor Dishub	3 Kantor	5,000,000	APBD Kota		3 Kantor	5,000,000
2	09	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	Jumlah Terbitan yang disediakan			Kantor Dishub	4 Terbitan	5,280,000	APBD Kota		4 Terbitan	5,280,000
2	09	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi			Kantor Dishub	55 Kali	95,000,000	APBD Kota		12 Bulan	95,000,000
2	09	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan			Kantor Dishub	1 Unit	175,000,000	APBD Kota			175,000,000
2	09	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara			Kantor Dishub	3 Kantor	16,006,000	APBD Kota		3 Kantor	17,000,000
2	09	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara			Kantor Dishub	1 Unit	27,000,000	APBD Kota		1 Unit	27,000,000
2	09	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Operasional yang dipelihara			Kantor Dishub	16 Unit	55,000,000	APBD Kota		16 Unit	55,000,000
2	09	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara			Kantor Dishub	8 Unit	2,000,000	APBD Kota		3 Kantor	2,006,000
2	09	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara			Kantor Dishub	27 Unit	37,500,000	APBD Kota		27 Unit	37,500,000
2	09	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang Ikut Pelatihan			Kantor Dishub	2 Org	27,000,000	APBD Kota		2 Org	27,000,000
2	09	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Tenaga administrasi			Kantor Dishub	26 Org	138,200,000	APBD Kota		26 Org	138,200,000
2	09	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	5,000,000			100%	5,000,000
2	09	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan			Kantor Dishub	1 Laporan	3,800,000	APBD Kota		1 Laporan	3,800,000
2	09	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan			Kantor Dishub	1 Laporan	600,000	APBD Kota		1 Laporan	600,000
2	09	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan			Kantor Dishub	1 Laporan	600,000	APBD Kota		1 Laporan	600,000
2	09	01	03		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)				24,70%	1,152,150,000			25,96%	1,152,150,000
2	09	01	03	01	Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan	Jumlah Kegiatan Pengendalian			Kantor Dishub	365 Kali	635,000,000	APBD Kota		204 Kali	635,000,000
2	09	01	03	02	Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Penerbitan didalam Terminal			Kantor Dishub	281 Kali	251,850,000	APBD Kota		281 Kali	251,850,000

2	09	01	03	03	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	jumlah Uji Kir Angkutan Umum			Kantor Dishub	2000 Unit	117,500,000	APBD Kota		2000 Unit	117,500,000
2	09	01	03	04	Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Laut dan Laik Layar	Jumlah Kapal GT.7 yang Diuji Laik Layar			Kantor Dishub	79 Kapal	74,000,000	APBD Kota		79 Kapal	74,000,000
2	09	01	03	05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Kebutuhan Rambu			Kantor Dishub	110 Rambu	73,800,000	APBD Kota		110 Rambu	73,800,000
2	09	01	04		Program Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)				1.454.415 Orang	43,500,000			1.523.904 Orang	43,500,000
2	09	01	04	02	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas			Kantor Dishub	85 Rambu	29,500,000	APBD Kota		100 Rambu	29,500,000
2	09	01	04	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan			Kantor Dishub	1 Paket	14,000,000	APBD Kota		1 Paket	14,000,000
2	09	01	05		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu (%)				71%	33,000,000			72%	41,000,000
2	09	01	05	01	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu-rambu yang Terpasang			Kantor Dishub	50 Rambu	26,000,000	APBD Kota		52 Rambu	34,000,000
2	09	01	05	02	Sosialisasi dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Peserta Sosialisasi			Kantor Dishub	50 Org	7,000,000	APBD Kota		50 Org	7,000,000
2	09	01	06		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi				100%	410,000,000			100%	410,000,000
2	09	01	06	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat (Situasional)	Jumlah Rambu-rambu yang terpasang			Kantor Dishub	250 Rambu-rambu	410,000,000	DAK		2 Paket	410,000,000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											1,171,950,000				1,196,750,000
2					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	10				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	10	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	509,650,000			100%	528,950,000
2	10	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat dinas			Jl. Andi Mas Jaya	400 surat	19,600,000	APBD Kota		450 surat	23,000,000
2	10	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening Air, listrik dan internet yang dibiayai			Jl. Andi Mas Jaya	4 rekening	40,700,000	APBD Kota		4 rekening	40,700,000
2	10	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/Operasional	Jumlah surat-surat kendaraan dinas yang dibayarkan			Jl. Andi Mas Jaya	4 unit	2,700,000	APBD Kota		4 unit	3,500,000
2	10	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen keuangan			Jl. Andi Mas Jaya	3 dokumen	60,400,000	APBD Kota		3 dokumen	60,400,000
2	10	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibayarkan			Jl. Andi Mas Jaya	1 orang	7,400,000	APBD Kota		1 orang	8,700,000

2	10	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang dibayarkan			Jl. Andi Mas Jaya	10 jenis	2,400,000	APBD Kota		10 jenis	2,400,000
2	10	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Ketersediaan Surat Kabar/Majalah			Jl. Andi Mas Jaya	4 Exp	2,750,000	APBD Kota		4 Exp	2,750,000
2	10	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi/konsultasi ke Luar Daerah			Jl. Andi Mas Jaya	50 orang	94,500,000	APBD Kota		50 orang	94,500,000
2	10	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan			Jl. Andi Mas Jaya	1 unit	17,000,000	APBD Kota		1 unit	19,000,000
2	10	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan			Jl. Andi Mas Jaya	7 unit	15,000,000	APBD Kota		7 unit	15,000,000
2	10	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung diadakan			Jl. Andi Mas Jaya	11 unit	25,000,000	APBD Kota		11 unit	25,000,000
2	10	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan			Jl. Andi Mas Jaya	3 jenis	12,000,000	APBD Kota		3 set	12,500,000
2	10	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara			Jl. Andi Mas Jaya	1 unit	5,000,000	APBD Kota		1 unit	7,000,000
2	10	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara			Jl. Andi Mas Jaya	1 unit	9,000,000	APBD Kota		1 unit	12,000,000
2	10	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara			Jl. Andi Mas Jaya	2 unit	11,000,000	APBD Kota		2 unit	14,000,000
2	10	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara			Jl. Andi Mas Jaya	7 unit	2,100,000	APBD Kota		7 unit	2,500,000
2	10	01	01	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan			Jl. Andi Mas Jaya	38 pasang	13,100,000	APBD Kota		38 pasang	15,000,000
2	10	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan			Jl. Andi Mas Jaya	20 pasang	5,000,000	APBD Kota		20 pasang	6,000,000
2	10	01	01	5	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah tenaga administrasi umum yang dibayarkan			Jl. Andi Mas Jaya	22 orang	130,000,000	APBD Kota		22 orang	130,000,000
2	10	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek			Jl. Andi Mas Jaya	10 orang	35,000,000	APBD Kota		10 orang	35,000,000
2	10	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	5,800,000			100%	5,800,000
2	10	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja			Jl. Andi Mas Jaya	3 dokumen	3,300,000	APBD Kota		3 dokumen	3,300,000
2	10	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan semesteran			Jl. Andi Mas Jaya	1 dokumen	1,250,000	APBD Kota		1 dokumen	1,250,000
2	10	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun			Jl. Andi Mas Jaya	1 dokumen	1,250,000	APBD Kota		1 dokumen	1,250,000

2	10	01	03	Program Pengembangan dan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet			0,10%	564,000,000			0,11%	564,500,000
2	10	01	03	02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah aplikasi yang disediakan		Jl. Andi Mas Jaya	2 aplikasi	550,000,000	APBD Kota		2 aplikasi	550,000,000
2	10	01	03	03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah menara telekomunikasi yang dipantau		Jl. Andi Mas Jaya	25 Menara	6,000,000	APBD Kota		50 orang	6,000,000
2	10	01	03	05 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah dokumen perencanaan yang disediakan		Jl. Andi Mas Jaya	1 dokumen	8,000,000	APBD Kota		1 dokumen	8,500,000
2	10	01	04	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Informasi	Jumlah Produk Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi yang Dibuat (Buah)			2 Buah	52,000,000			2 Buah	57,000,000
2	10	01	04	03 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah alat studio yang diadakan		Jl. Andi Mas Jaya	2 jenis	52,000,000	APBD Kota		2 jenis	57,000,000
2	10	01	05	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			3,45%	40,500,000			3,65%	40,500,000
2	10	01	05	01 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah berita yang disebarakan		Jl. Andi Mas Jaya	450 berita	33,500,000	APBD Kota		450 berita	33,500,000
2	10	01	05	02 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi		Jl. Andi Mas Jaya	750 orang	7,000,000	APBD Kota		750 orang	7,000,000
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									1,660,170,000				1,608,107,000
2				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2	11			KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2	11	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)	100%	882,500,000			100%	829,020,000
2	11	01	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah register surat masuk & keluar		Dinas Koperasi & UKM	3500 Surat	49,500,000	APBD Kota		3500 Surat	49,500,000
2	11	01	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan wifi		Dinas Koperasi & UKM	6 Rekening	95,000,000	APBD Kota		6 Rekening	96,500,000
2	11	01	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah stnk/pajak kendaraan operasional/jabatan yang dibayar		Dinas koperasi & ukm	6 unit	2,500,000	APBD Kota		6 unit	2,500,000
2	11	01	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan		Dinas Koperasi & UKM	12 Orang	86,500,000	APBD Kota		12 Orang	86,500,000
2	11	01	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor		Dinas Koperasi & UKM	2 Orang	15,000,000	APBD Kota		2 Orang	15,000,000
2	11	01	01	10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah tenaga administrasi umum		Dinas Koperasi & UKM	11 Orang	135,000,000	APBD Kota		11 Orang	80,520,000

2	11	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan			Dinas Koperasi & UKM	101 alat listrik	3,000,000	APBD Kota		101 alat listrik	3,000,000
2	11	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Eksmplar media/terbitan			Dinas koperasi & ukm	4 eksmplar	5,500,000	APBD Kota		4 eksmplar	5,500,000
2	11	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah jangka waktu pelaksanaan rapat koordinasi & konsultasi diluar dan dalam daerah			Dinas Koperasi & UKM	125 kali	297,000,000	APBD Kota		125 kali	297,000,000
2	11	01	01	2	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa Komunikasi, Air dan Listrik			Dinas Koperasi & UKM	6 rekening	95,000,000	APBD Kota		6 rekening	95,000,000
2	11	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang tersedia			Dinas Koperasi & UKM	1 unit	9,000,000	APBD Kota		1 unit	9,000,000
2	11	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibutuhkan			Dinas Koperasi & UKM	1 buah	3,500,000	APBD Kota			3,500,000
2	11	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor			Dinas koperasi & ukm	2 unit	3,500,000	APBD Kota		2 unit	19,000,000
2	11	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi			Dinas Koperasi & UKM	1 unit	19,000,000	APBD Kota			2,500,000
2	11	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jangka waktu lamanya perawatan kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan & bahan bakar minyak pejabat eselon.			Dinas Koperasi & UKM	1 unit	3,500,000	APBD Kota		1 unit	3,500,000
2	11	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara/dirawat			Dinas Koperasi & UKM	20 unit	2,000,000	APBD Kota		20 unit	2,200,000
2	11	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat/dipelihara			Dinas Koperasi & UKM	13 unit	3,000,000	APBD Kota		13 unit	3,300,000
2	11	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan perundang-undangan			Dinas Koperasi & UKM	5 Orang	55,000,000	APBD Kota		5 Orang	55,000,000
2	11	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	8,140,000			100%	8,954,000
2	11	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja keuangan			Dinas Koperasi & UKM	2 dokumen	2,940,000	APBD Kota		2 dokumen	3,234,000

2	11	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		Dinas Koperasi & UKM	1 dokumen	2,600,000	APBD Kota	1 dokumen	2,860,000
2	11	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		Dinas Koperasi & UKM	1 dokumen	2,600,000	APBD Kota	1 dokumen	2,860,000
2	11	01	03		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Dikuatkan Dalam Hal Kelembagaan, Permodalan dan Manajemen			5%	502,830,000		5%	503,433,000
2	11	01	03	01	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan UKM	Jumlah koperasi yang didata setiap tahun melalui data ODS		Dinas Koperasi & UKM	290 Koperasi	50,500,000	APBD Kota	290 Koperasi	50,500,000
2	11	01	03	02	Bimbingan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan yang Dilaksanakan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diberi penghargaan sebagai koperasi berprestasi		Dinas Koperasi & UKM	88 Koperasi	7,000,000	APBD Kota	88 Koperasi	7,000,000
2	11	01	03	03	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang masuk dalam penilaian kesehatan		Dinas Koperasi & UKM	292 Koperasi	3,200,000	APBD Kota	292 Koperasi	3,200,000
2	11	01	03	04	Peningkatan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang melakukan kerjasama		Dinas Koperasi & UKM	60 Koperasi	7,600,000	APBD Kota	60 Koperasi	7,600,000
2	11	01	03	05	Pengembangan, Penguatan Perlindungan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang melakukan kerjasama		Dinas koperasi dan ukm	60 koperasi	9,000,000	APBD Kota	60 koperasi	9,000,000
2	11	01	03	06	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi	Jumlah koperasi yang dilatih		Dinas koperasi dan ukm	60 koperasi	6,030,000	APBD Kota	60 koperasi	6,633,000
2	11	01	03	07	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik)	Jumlah kelompok usaha yang mengikuti		Dinas koperasi dan ukm	125 Kelompok Usaha	419,500,000	DAK Non Fisik	125 Kelompok Usaha	419,500,000
2	11	01	04		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase UMKM yang Difasilitasi Dalam Hal Permodalan dan				266,700,000			266,700,000
2	11	01	04	01	Peningkatan Usaha Mikro	Jumlah Data base yang tersedia		Dinas koperasi dan ukm	1 data base	7,000,000	APBD Kota	1 data base	7,000,000
2	11	01	04	02	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	Jumlah ukm yang di movev		Dinas koperasi dan ukm	50 ukm	253,000,000	APBD Kota	50 ukm	253,000,000
2	11	01	04	03	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Jumlah ukm yang difasilitasi		Dinas koperasi dan ukm	150 ukm	6,700,000	APBD Kota	150 ukm	6,700,000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										3,417,610,000			3,419,610,000
2					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
2	12				PENANAMAN MODAL								
2	12	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)	100%	1,348,260,000		100%	1,350,260,000
2	12	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk		jl.k.h.m.hasyim no.05 kota palopo	1.000 Surat	290,500,000	APBD Kota	1.000 Surat	290,500,000

2	12	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening internet, Air dan Listrik			Kota Palopo	3 Rekening	345,160,000	APBD Kota		3 Rekening	345,160,000
2	12	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dibiayai			jl.k.h.m.hasyim no.05 kota palopo	23 Unit	10,600,000	APBD Kota		23 Unit	10,600,000
2	12	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi			jl.k.h.m.hasyim no.05 kota palopo	5 Orang	67,800,000	APBD Kota		5 orang	67,800,000
2	12	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terciptanya keindahan dan kenyamanan kantor			jl.k.h.m.hasyim no.05 kota palopo	3 Orang	110,000,000	APBD Kota		3 Orang	110,000,000
2	12	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penggantian Alat-alat Penerangan yang Rusak			jl.k.h.m.hasyim no.05 kota palopo	35 Buah	8,000,000	APBD Kota		35 Buah	10,000,000
2	12	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Terciptanya aparatur berwawasan luas			jl.k.h.m.hasyim no.05 kota palopo	4 Exp	6,000,000	APBD Kota		4 Exp	6,000,000
2	12	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas			Luar Daerah	50 kali	290,500,000	APBD Kota		50 kali	290,500,000
2	12	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli			jl.k.h.m.hasyim no.05 kota palopo	10 unit	17,600,000	APBD Kota		10 unit	17,600,000
2	12	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli			jl.k.h.m.hasyim no.05 kota palopo	unit 15	16,500,000	APBD Kota		15 unit	16,500,000
2	12	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler yang dibeli			Kota Palopo	10 Unit	8,600,000	APBD Kota		10 Unit	8,600,000
2	12	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan kantor			Kota Palopo	2.456 M2	6,500,000	APBD Kota		2.456 M2	6,500,000
2	12	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik			Kota Palopo	1 Unit	21,000,000	APBD Kota		1 unit	21,000,000
2	12	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional kondisi baik			Kota Palopo	6 Unit	41,500,000	APBD Kota		unit 6	41,500,000
2	12	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			Kota Palopo	40 Unit	5,000,000	APBD Kota		40 Unit	5,000,000
2	12	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara			Kota Palopo	40 Unit	6,500,000	APBD Kota		40 unit	6,500,000
2	12	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek			Luar Daerah	15 orang	15,000,000	APBD Kota		15 orang	15,000,000
2	12	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa Pelayanan administrasi umum			jl.k.h.m.hasyim no.05 kota palopo	6 orang	81,500,000	APBD Kota		6 orang	81,500,000
2	12	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,450,000			100%	1,450,000
2	12	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan			Kota Palopo	2 dokumen	750,000	APBD Kota		2 dokumen	750,000

2	12	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran			Kota Palopo	2 Laporan	350,000	APBD Kota		2 Laporan	350,000
2	12	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun			Kota Palopo	1 Laporan	350,000	APBD Kota		1 laporan	350,000
2	12	01	03		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)				150 Investor	230,000,000			152 Investor	230,000,000
2	12	01	03	01	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/PMDA yang ditinjau			Kota Palopo	950 Dokumen	15,000,000	APBD Kota		750 Dokumen	15,000,000
2	12	01	03	02	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Investasi			Luar Daerah	2 Kegiatan	215,000,000	APBD Kota		2 Kegiatan	215,000,000
2	12	01	04		Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (juta)				491,372,000	1,010,000,000			545,897,000	1,010,000,000
2	12	01	04	01	Kemudahan Pelayanan Perizinan	Jumlah Jasa Administrasi (Fo/Bo) yang dibayarkan			Kota Palopo	20 orang	130,000,000	APBD Kota	Jumlah Jasa Administrasi (Fo/Bo) yang dibayarkan	20 orang	130,000,000
2	12	01	04	02	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian	Jumlah Izin yang diterbitkan			Kota Palopo	15000 Izin	880,000,000	APBD Kota		15000 Izin	880,000,000
2	12	01	05		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)				9 Orang	827,900,000			10 Orang	827,900,000
2	12	01	05	01	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan			Kota Palopo	2 Dokumen	62,700,000	APBD Kota		2 Dokumen	62,700,000
2	12	01	05	02	Penyelenggaraan Perizinan Usaha Tertentu Dalam Rangka Penanaman Modal	Jumlah Izin PMA/PMDN yang dihasilkan			Kota Palopo	980 izin	750,000,000	APBD Kota		980 Izin	750,000,000
2	12	01	05	03	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen			Kota Palopo	2 Dokumen	15,200,000	APBD Kota		2 Dokumen	15,200,000
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAAGA											3,304,660,000				3,987,689,000
2					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	13				KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAAGA										
2	13	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	802,960,000			100%	1,235,819,000
2	13	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar			Palopo	1200 surat	41,000,000	APBD Kota		1200 surat	45,100,000
2	13	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang dibiayai			Palopo	4 Rekening	25,000,000	APBD Kota		4 Rekening	27,500,000
2	13	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan dinas /operasional yang dibiayai			Palopo	5 Unit	3,520,000	APBD Kota		6 Unit	355,520,000
2	13	01	01	07	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibiayai			Palopo	12 Orang	75,500,000	APBD Kota		12 orang	83,050,000

2	13	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan		Palopo	12 Orang	90,200,000	APBD Kota		12 Orang	99,220,000
2	13	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/elektronik yang disediakan		Palopo	5 unit	8,500,000	APBD Kota		5 unit	9,350,000
2	13	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Langganan Koran/buku perundang-undangan		Palopo	2 exp	2,640,000	APBD Kota		2 exp	2,904,000
2	13	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		Palopo	120 Kali	220,000,000	APBD Kota		120 Kali	242,000,000
2	13	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas /Operasional yang diadakan		Palopo	1 Unit	15,000,000	APBD Kota		1 Unit	30,000,000
2	13	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli		Palopo	3 unit	10,000,000	APBD Kota		3 unit	11,000,000
2	13	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dibeli		Palopo	3 unit	15,400,000	APBD Kota		2 unit	16,940,000
2	13	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeler yang dibeli		Palopo	15 unit	20,000,000	APBD Kota		5 unit	13,915,000
2	13	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara		Palopo	300 m2	15,000,000	APBD Kota		300 m2	16,500,000
2	13	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan dalam keadaan baik		Palopo	1 unit	25,000,000	APBD Kota		1 unit	27,500,000
2	13	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam keadaan baik		Palopo	5 unit	25,000,000	APBD Kota		5 unit	27,500,000
2	13	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara		Palopo	10 unit	4,500,000	APBD Kota		10 unit	4,950,000
2	13	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		Palopo	15 unit	5,000,000	APBD Kota		15 unit	6,000,000
2	13	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Serta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan		palopo	50 pasang	25,000,000	APBD Kota		50 pasang	25,000,000
2	13	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang disediakan		palopo	50 pasang	25,000,000	APBD Kota		50 pasang	25,000,000
2	13	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		Palopo	2 Orang	15,000,000	APBD Kota		2 orang	16,500,000
2	13	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrsi umum yang dibiayai		Palopo	16 Orang	121,000,000	APBD Kota		16 orang	133,100,000
2	13	01	01	55	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek		Palopo	2 Orang	15,700,000	APBD Kota			17,270,000

2	13	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	12,000,000			100%	13,200,000
2	13	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan			Palopo	3 dok	4,000,000	APBD Kota		3 dok	4,400,000
2	13	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang akan disusun			Palopo	1 laporan	2,000,000	APBD Kota		1 laporan	2,200,000
2	13	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Yang akan disusun			Palopo	1 laporan	2,000,000	APBD Kota		1 laporan	2,200,000
2	13	01	02	05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Money yang disusun			palopo	12 Laporan	4,000,000	APBD Kota		12 laporan	4,400,000
2	13	01	03		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)				71%	1,000,000,000			72%	1,100,000,000
2	13	01	03	01	Pengembangan Kreativitas Pemuda	Jumlah kelompok kreatifitas kepemudaan			Palopo	60 kelompok	180,000,000	APBD Kota		60 kelompok	198,000,000
2	13	01	03	02	Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Jumlah pelopor pemuda yang dibina			Palopo	50 Orang	40,000,000	APBD Kota		40 orang	44,000,000
2	13	01	03	03	Pelaksanaan Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	Jumlah peserta aksi bhakti sosial			Palopo	125 Orang	50,000,000	APBD Kota		125 Orang	55,000,000
2	13	01	03	04	Pendataan Potensi Kepemudaan	Jumlah data yang dihasilkan			palopo	20 data	30,000,000	APBD Kota		20 data	33,000,000
2	13	01	03	05	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina			Palopo	1 Organisasi	700,000,000	APBD Kota		1 Organisasi	770,000,000
2	13	01	04		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda (%)				1,90%	215,000,000			1,95%	236,500,000
2	13	01	04	01	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda	Jumlah peserta pelatihan keterampilan			Palopo	25 Orang	82,500,000	APBD Kota		25 orang	90,750,000
2	13	01	04	02	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan			Palopo	25 Orang	82,500,000	APBD Kota		25 orang	90,750,000
2	13	01	04	04	Bimbingan Teknis Kewirausahaan Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Bimbingan Tekhnis			Palopo	50 Orang	50,000,000	APBD Kota		50 orang	55,000,000
2	13	01	05		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)				40%	760,700,000			41%	836,770,000
2	13	01	05	01	Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	Jumlah orang yang mengikuti olahraga pendidikan dan sentra olahraga			palopo	130 Org	60,000,000	APBD Kota		130 Org	66,000,000
2	13	01	05	02	Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus	Jumlah kegiatan pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus			palopo	4400 Org	200,000,000	APBD Kota		4400 Org	220,000,000

2	13	01	05	03	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Berdedikasi/Berprestasi	Jumlah olahragawan berprestasi			palopo	50 Org	50,000,000	APBD Kota		50 Org	55,000,000
2	13	01	05	04	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah olahragawan beebakat yang dibina			palopo	54 Org	149,500,000	APBD Kota		60 Org	164,450,000
2	13	01	05	05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dan Olahraga Prestasi	Jumlah Cabang Olahraga Yang dibina			palopo	2 cabor	50,000,000	APBD Kota		2 cabor	55,000,000
2	13	01	05	07	Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga yang Berlisensi	Jumlah Pelatih, dan tenaga olahraga yang berlisensi			palopo	20 Org	80,000,000	APBD Kota		20 Org	88,000,000
2	13	01	05	08	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Jumlah atlit yang mengikuti event olahraga			palopo	30 Org	50,500,000	APBD Kota		30 Org	55,550,000
2	13	01	05	09	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah orang yang mengikuti olahraga pendidikan dan sentra olahraga			palopo	300 Org	90,700,000	APBD Kota		300 Org	99,770,000
2	13	01	05	10	Pendataan Keolahragaan	Jumlah data yang dihasilkan			palopo	20 data	30,000,000	APBD Kota		20 data	33,000,000
2	13	01	06		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)				68,30%	514,000,000			68,50%	565,400,000
2	13	01	06	01	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pembangunan sarana dan prasana olahraga			palopo	10 Sarpras	415,000,000	APBD Kota		10 Sarpras	456,500,000
2	13	01	06	02	Pengadaan Alat-alat Olahraga	Jumlah Jenis Alat Olahraga Yang diadakan			palopo	2 Jenis	50,000,000	APBD Kota		2 Jenis	55,000,000
2	13	01	06	03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara			palopo	5 Unit	49,000,000	APBD Kota		5 Unit	53,900,000
DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK											677,900,000				735,740,000
2					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	14				STATISTIK										
2	14	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	456,700,000			100%	501,520,000
2	14	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar			kota palopo	900 surat	30,000,000	APBD Kota		900 surat	33,000,000
2	14	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	biaya(rekening/bulan jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai(rekening / bulan)			kota palopo	3 rekening	31,000,000	APBD Kota		3 rekening	34,100,000
2	14	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibiayai (unit)			kota palopo	6 unit	2,500,000	APBD Kota		6 unit	2,750,000

2	14	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan			kota palopo	6 orang	45,800,000	APBD Kota		6 org	50,380,000
2	14	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bangunan kantor yang biaya kebersihanya ditanggung (orang/lokasi)			kota palopo	1 org	8,500,000	APBD Kota		1 orang	8,500,000
2	14	01	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah pengelola administrasi umum			kota palopo	12 orang/dokumen	72,000,000	APBD Kota		12 orang/dokumen	79,200,000
2	14	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan (jenis/ buah/meter)			kota palopo	1 jenis	1,700,000	APBD Kota		1 jenis	1,870,000
2	14	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	jumlah koran yang berlangganan(Eksampler/bulan)			kota palopo	3 koran	5,200,000	APBD Kota		3 koran	5,720,000
2	14	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kali/Tahun)			kota palopo	60 kali	180,000,000	APBD Kota		60 kali	198,000,000
2	14	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan			kota palopo	2 unit	9,000,000	APBD Kota		2 UNIT	9,900,000
2	14	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor			kota palopo	3 unit	12,000,000	APBD Kota		3 UNIT	13,200,000
2	14	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang pemeliharaan dibiayai(unit)			kota palopo	1 unit	8,000,000	APBD Kota		1 unit	8,800,000
2	14	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	jumlah mobil jabatan yang pemeliharaanya dibiayai (unit)			kota palopo	1 unit	15,000,000	APBD Kota		1 unit	16,500,000
2	14	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibiayai			kota palopo	12 unit	2,500,000	APBD Kota		12 unit	2,750,000
2	14	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dibiayai			kota palopo	5 unit	3,500,000	APBD Kota		5 UNIT	3,850,000
2	14	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	jumlah bimtek yang diikuti (kali)			kota palopo	4 kali	30,000,000	APBD Kota		2 kali	33,000,000
2	14	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Peringkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	3,700,000			100%	4,070,000
2	14	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan perencanaan dan kinerja yang dibuat (dokumen /tahunan)			kota palopo	4 kali	2,100,000	APBD Kota		4 kali	2,310,000
2	14	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	jumlah laporan keuangan yang disusun			kota palopo	2 dokumen	800,000	APBD Kota		2 dokumen	880,000
2	14	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun			kota palopo	2 dokumen	800,000	APBD Kota		2 dokumen	880,000

[illegible]

2	16	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhihan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	542,440,000			100%	512,974,000
2	16	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar		Kota Palopo	1300 Surat	12,500,000	APBD Kota		1350 Surat	13,750,000
2	16	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet yang di Biayai		Kota Palopo	4 Rekening	40,140,000	APBD Kota		4 Rekening	44,154,000
2	16	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dibiayai		Kota Palopo	5 STNK	3,000,000	APBD Kota		5 STNK	4,500,000
2	16	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi yang di Bayar		Kota Palopo	14 Orang	60,500,000	APBD Kota		14 Orang	66,550,000
2	16	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor Yang Dibersihkan		Kota Palopo	450 m2	8,000,000	APBD Kota		450 m2	15,000,000
2	16	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki		Kota Palopo	7 Jenis	1,400,000	APBD Kota		5 Jenis	1,500,000
2	16	01	01	11	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Jasa Administrasi Yang dibiayai		Kota Palopo	13 Orang	80,500,000	APBD Kota		13 Orang	88,550,000
2	16	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang diadakan		Kota Palopo	12.20 jenis,buah,mete r	1,500,000	APBD Kota		12.20 jenis,buah,meter	1,650,000
2	16	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan		Kota Palopo	2 Buah	4,000,000	APBD Kota		2 Buah	4,000,000
2	16	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Langganan Koran/Buku Perundang-Undangan		Kota Palopo	4 Eksamplar	4,800,000	APBD Kota		4 Eksamplar	5,760,000
2	16	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas		Kota Palopo	110 SPPD	97,000,000	APBD Kota		127 SPPD	106,700,000
2	16	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang di beli		Kota Palopo	2 Unit	40,000,000	APBD Kota		2 Unit	20,000,000
2	16	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah/Jenis Perlengkapan Kantor yang dibeli		Kota Palopo	3 Jenis	15,000,000	APBD Kota		3 Unit	15,000,000
2	16	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli		Kota Palopo	3 Unit	5,700,000	APBD Kota		3 Unit	6,270,000
2	16	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler yang dibeli		Kota Palopo	20.3 unit,zat	65,000,000	APBD Kota		14 Unit	14,000,000
2	16	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang terpelihara		Kota Palopo	50 m2	7,900,000	APBD Kota		100 m2	8,690,000
2	16	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan/Dinas Kondisi Baik		Kota Palopo	1 Unit	21,000,000	APBD Kota		1 Unit	23,100,000
2	16	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kondisi Baik		Kota Palopo	1 Unit	18,500,000	APBD Kota		1 Unit	20,500,000
2	16	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara		Kota Palopo	11 Unit	2,100,000	APBD Kota		14 Unit	2,310,000

2	16	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara			Kota Palopo	19 Unit	900,000	APBD Kota		21 Unit	990,000
2	16	01	01	38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mubeleur yang terpelihara			Kota Palopo	10 unit	5,000,000	APBD Kota		20 unit	2,000,000
2	16	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) Yang diadakan			Kota Palopo	30 Pasang	15,000,000	APBD Kota		30 Pasang	15,000,000
2	16	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Kota Palopo	2 Orang	10,000,000	APBD Kota		1 Orang	10,000,000
2	16	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Palopo	4 Orang	23,000,000	APBD Kota		4 Orang	23,000,000
2	16	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	3,720,000			100%	4,312,000
2	16	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan			Kota Palopo	4 Dokumen	1,920,000	APBD Kota		1 Laporan	2,112,000
2	16	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan-laporan Yang dihasilkan			Kota Palopo	1 Laporan	900,000	APBD Kota		1 Laporan	1,100,000
2	16	01	02	03	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun			Kota Palopo	1 Laporan	900,000	APBD Kota		1 Laporan	1,100,000
2	16	01	03		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)				100%	3,255,000,000			100%	2,559,500,000
2	16	01	03	01	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naska Kuno	Jumlah Replika Benda-benda Pusaka yang diadakan			Kota Palopo	10 Buah	25,000,000	APBD Kota		10 Buah	25,000,000
2	16	01	03	02	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Bangunan Cagar/Karya Budaya yang dilestarikan			Kota Palopo	3 Buah	900,000,000	APBD Kota		4 Buah	950,000,000
2	16	01	03	03	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Data Bangunan dan Situs Cagar Budaya			Kota Palopo	20 Buah	20,000,000	APBD Kota		20 Buah	22,000,000
2	16	01	03	04	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budayah di Daerah										
					<i>Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah</i>	Jumlah Bangunan Bersejarah yang Diadakan			Kota Palopo	1 Monumen	900,000,000	APBD Kota		1 Gedung	500,000,000
					<i>Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah</i>	Jumlah Papan Nama Situs dan Bangunan Cagar Budaya yang diadakan			Kota Palopo	3 Buah	45,000,000	APBD Kota		3 Buah	60,000,000
					<i>Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah</i>	Jumlah Bagunan Pentas Seni dan Budaya yang diadakan			Kota Palopo	1 Gedung	800,000,000	APBD Kota		1 Gedung	800,000,000

					Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Jumlah barang yang di adakan			Kota Palopo	300 unit,buah	450,000,000	APBD Kota		300 unit,buah	80,000,000
					Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Tim Ahli Cagar Budaya			Kota Palopo	2 Orang	40,000,000	APBD Kota		2 Orang	40,000,000
2	16	01	03	05	Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Kekayaan Budaya	Jumlah Peserta Kegiatan Acara Adat Budaya Daerah			Kota Palopo	100 Orang	75,000,000	APBD Kota		100 Orang	82,500,000
2	16	01	04		Program Pengeloan Keragaman Budaya	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi (Buah)				3 Buah	225,000,000			3 Buah	238,500,000
2	16	01	04	01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah peserta kegiatan pentas seni tradisional dan tari tradisional dalam dan luar daerah			Kota Palopo	150 Orang	45,000,000	APBD Kota		150 Orang	45,500,000
2	16	01	04	02	Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	Jumlah Peserta Seminar Budaya			Kota Palopo	30 Orang	50,000,000	APBD Kota		30 Orang	50,000,000
2	16	01	04	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan	Jumlah Data Seni yang Terdata			Kota Palopo	10 Buah	30,000,000	APBD Kota		10 Buah	33,000,000
2	16	01	04	04	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Peserta Festival Budaya Daerah			Kota Palopo	300 Orang	100,000,000	APBD Kota		300 Orang	110,000,000
2	16	01	05		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu				50 Cagar Budaya	25,000,000			50 Cagar Budaya	30,000,000
2	16	01	05	01	Membangun Kemintraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah	Jumlah Daerah Membangun Kemitraan dalam Pengelolaan Cagar Budaya			Kota Palopo	2 Daerah	25,000,000	APBD Kota		3 Daerah	30,000,000
DINAS PERPUSTAKAAN											1,374,302,000				2,027,851,400
2					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	17				PERPUSTAKAAN										
2	17	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	778,712,000			100%	830,636,400
2	17	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk & Keluar		Jln. Andi Djemma No. 60	700 Dokumen	58,124,000	APBD Kota			705 Dokumen	59,286,000
2	17	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik, TV kabel dan internet yang dibiayai		Jln. Andi Djemma No. 60	5 Rekening	75,226,000	APBD Kota			5 Rekening	89,190,000
2	17	01	01	06	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dibiayai		Jln. Andi Djemma No. 60	5 Unit	14,280,000	APBD Kota			5 unit	14,566,000
2	17	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar		Jln. Andi Djemma No. 60	5 orang	68,140,000	APBD Kota			5 orang	59,303,000

2	17	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor			Jln. Andi Djemma No. 60	1 orang	9,160,000	APBD Kota		1 Tahun	8,323,000
2	17	01	01	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			Jln. Andi Djemma No. 60	7 jenis	1,250,000	APBD Kota		1 Tahun	1,375,000
2	17	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah rekening koran yang berlangganan			Jln. Andi Djemma No. 60	4 Jenis	4,000,000	APBD Kota		4 Jenis	5,493,000
2	17	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang diikuti			Jln. Andi Djemma No. 60	15 Kali	95,000,000	APBD Kota		16 Kali	104,500,000
2	17	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan berupa CCTV dan Sound System			Jln. Andi Djemma No. 60	2 Jenis	35,000,000	APBD Kota		1 Jenis	38,500,000
2	17	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan berupa personal komputer (PC)			Jln. Andi Djemma No. 60	2 Unit	17,500,000	APBD Kota		2 Jenis	19,250,000
2	17	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan berupa sofa, meja kerja dan kursi kerja			Jln. Andi Djemma No. 60	3 Jenis	5,200,000	APBD Kota		25 Unit	5,720,000
2	17	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibiayai			Jln. Andi Djemma No. 60	1 Gedung	10,000,000	APBD Kota		1 Gedung	11,000,000
2	17	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil dinas yang pemeliharaannya dibiayai			Jln. Andi Djemma No. 60	1 Unit	15,000,000	APBD Kota		1 Unit	16,500,000
2	17	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil operasional yang pemeliharaannya dibiayai			Jln. Andi Djemma No. 60	2 Unit	16,608,000	APBD Kota		2 Unit	31,216,000
2	17	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibiayai pemeliharaannya			Jln. Andi Djemma No. 60	11 Unit	2,244,000	APBD Kota		11 Unit	2,468,400
2	17	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibiayai pemeliharaannya			Jln. Andi Djemma No. 60	9 Unit	7,000,000	APBD Kota		13 Unit	11,500,000
2	17	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan			Jln. Andi Djemma No. 60	30 Stel	16,500,000	APBD Kota		35 Stel	18,150,000
2	17	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan			Jln. Andi Djemma No. 60	6 Orang	197,000,000	APBD Kota		7 Orang	201,000,000
2	17	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah sosialisasi yang diikuti			Jln. Andi Djemma No. 60	4 Kali	15,200,000	APBD Kota		4 Kali	15,200,000
2	17	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah peserta bimtek			Jln. Andi Djemma No. 60	2 Orang	25,500,000	APBD Kota		4 Kali	25,500,000
2	17	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Tenaga Pegawai Kontrak yang di Biayai			Jln. Andi Djemma No. 60	7 Orang	90,780,000	APBD Kota		7 Orang	92,596,000

2	18	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	383,830,000			100%	401,530,000
2	18	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar		palopo	200 Surat	21,500,000	APBD Kota		200 Surat	22,500,000
2	18	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Air dan Listrik dan Internet yang dibiayai		palopo	2 Rekening	7,500,000	APBD Kota		2 Rekening	8,500,000
2	18	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang dibiayai		palopo	3 Unit	3,100,000	APBD Kota		3 Unit	3,200,000
2	18	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Yang Di Bayar		palopo	11 Orang	69,000,000	APBD Kota		11 Orang	69,500,000
2	18	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor Yang di Tanggung Biaya Kebersihannya		palopo	1 buah	7,500,000	APBD Kota		1 buah	7,600,000
2	18	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang di Adakan		palopo	3 Jenis	800,000	APBD Kota		3 Jenis	800,000
2	18	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Langgana Koran		palopo	2 Eksemplar	5,280,000	APBD Kota		2 Eksemplar	5,580,000
2	18	01	01	18	Rapat-rapat Kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas		palopo	20 Kali	100,000,000	APBD Kota		20 Kali	100,000,000
2	18	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah atau Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli		palopo	1 Unit	4,500,000	APBD Kota		1 Unit	4,700,000
2	18	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli		palopo	2 Unit	13,000,000	APBD Kota		2 Unit	13,500,000
2	18	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Dibeli		palopo	15 buah	29,500,000	APBD Kota		15 buah	29,500,000
2	18	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara		palopo	1 buah	3,000,000	APBD Kota		1 buah	17,000,000
2	18	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Kondisi Baik		palopo	1 buah	30,000,000	APBD Kota		1 buah	30,000,000
2	18	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Kondisi Baik		palopo	1 buah	15,000,000	APBD Kota		1 buah	15,000,000
2	18	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara		palopo	5 buah	1,500,000	APBD Kota		5 buah	1,500,000
2	18	01	01	37	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara		palopo	5 buah	2,000,000	APBD Kota		5 buah	2,000,000
2	18	01	01	46	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan		palopo	24 stel	12,000,000	APBD Kota		24 stel	12,000,000
2	18	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek		palopo	4 Orang	21,000,000	APBD Kota		4 Orang	21,000,000

2	18	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Jasa Administrasi yang Dibayar			palopo	6 orang	37,650,000	APBD Kota		6 Orang	37,650,000
2	18	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	10,000,000			100%	11,000,000
2	18	01	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan			palopo	3 buah	4,000,000	APBD Kota		3 buah	4,500,000
2	18	01	02	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan yang dihasilkan			palopo	1 buah	3,000,000	APBD Kota		1 buah	3,250,000
2	18	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan yang akan disusun			palopo	1 buah	3,000,000	APBD Kota		1 buah	3,250,000
2	18	01	03		Program Pembinaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku				6%	63,500,000			8%	63,500,000
2	18	01	03	01	Pembinaan Arsip Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan dan Non Pemerintahan	Jumlah OPD, Lembaga Pendidikan dan non Pemerintahan yang dibina Kearsipannya			palopo	10 instansi/lembaga	45,000,000	APBD Kota		10 buah	45,000,000
2	18	01	03	02	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang Kearsipannya			palopo	10 instansi	18,500,000	APBD Kota		10 buah	18,500,000
2	18	01	04		Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang Memiliki Petugas Khusus Pengelola Arsip Terlatih (%)				45%	29,675,000			55%	33,150,000
2	18	01	04	01	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis	Jumlah Arsip yang di tangani dengan Baik			palopo	20 buah	5,775,000	APBD Kota		20 buah	6,150,000
2	18	01	04	02	Pembuatan dan Pengelolaan Layanan Pelayanan dan Pemanfaatan Kearsipan	Jumlah jaringan penyimpan arsip kondisi baik			palopo	1 jaringan	2,900,000	APBD Kota		1 jaringan	3,150,000
2	18	01	04	04	Penyusunan Perda Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Produk Legislasi Daerah Tentang Pengelolaan Kearsipan yang dihasilkan			palopo	1 dokumen	21,000,000	APBD Kota		1 dokumen	23,850,000
URUSAN PILIHAN											58,456,164,250				62,766,969,270
DINAS PERIKANAN											4,919,960,000				5,073,090,000
3					URUSAN PILIHAN										
3	01				KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3	01	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	830,730,000			100%	812,980,000

3	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar		Kota Palopo	1.500 surat	40,000,000	APBD Kota		1.500 surat	41,250,000
3	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon dan internet yang dibiayai		Kota Palopo	4 rekening	49,850,000	APBD Kota		4 rekening	49,850,000
3	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional yang dibiayai		Kota Palopo	39 unit	12,000,000	APBD Kota		39 unit	12,000,000
3	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar		Kota Palopo	13 orang	90,000,000	APBD Kota		13 orang	90,000,000
3	01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	2 orang	12,600,000	APBD Kota		2 orang	12,600,000
3	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penrangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	64 buah	1,500,000	APBD Kota		65 buah	1,500,000
3	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan koran / buku perundang-undangan		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	4 terbitan	6,280,000	APBD Kota		4 terbitan	6,280,000
3	01	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		Kota Palopo	135 kali	330,000,000	APBD Kota		135 kali	335,000,000
3	01	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	4 unit	14,000,000	APBD Kota		2 unit	10,000,000
3	01	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	2 unit	23,000,000	APBD Kota		2 unit	23,500,000
3	01	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	10 unit	16,500,000	APBD Kota		5 unit	16,500,000
3	01	01	01	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	luas gedung kantor yang terpelihara		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	3.976 meter persegi	15,000,000	APBD Kota		3.976 meter persegi	15,000,000
3	01	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dibiayai		kota palopo	1 unit	26,000,000	APBD Kota		1 unit	27,000,000
3	01	01	01	33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara		kota palopo	4 unit	45,000,000	APBD Kota		4 unit	45,000,000
3	01	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	10 unit	3,000,000	APBD Kota		10 unit	3,000,000
3	01	01	01	37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	12 unit	4,600,000	APBD Kota		12 unit	4,600,000
3	01	01	01	45	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin / kartu absensi yang dibeli		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	2 unit	16,000,000	APBD Kota		- -	17,000,000
3	01	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek / diklat		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	3 orang	34,500,000	APBD Kota		2 orang	12,000,000
3	01	01	01	53	Penyediaan Jasa Adminstrasi Umum	Jumlah jasa administrasi umum yang dibiayai		Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	13 orang	90,900,000	APBD Kota		13 orang	90,900,000

3	01	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	5,000,000			100%	5,000,000
3	01	01	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja yang disusun			Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	4 dokumen	1,500,000	APBD Kota		4 dokumen	1,500,000
3	01	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan yang disusun			Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	6 dokumen	1,500,000	APBD Kota		5 dokumen	1,500,000
3	01	01	02	05	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan			Kota Palopo	4 kali	2,000,000	APBD Kota		4 kali	2,000,000
3	01	01	03		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				21,759 Ton	2,062,600,000			23,934 Ton	2,216,610,000
3	01	01	03	01	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir	Jumlah kelompok yang dibina			Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	30 kelompok	24,600,000	APBD Kota		30 kelompok	29,300,000
3	01	01	03	02	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Masyarakat Nelayan	Jumlah kelompok yang didampingi / dikunjungi			Kota Palopo	30 kelompok	950,000,000	APBD Kota		30 kelompok	970,000,000
3	01	01	03	03	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Jumlah sarpras penangkapan ikan yang diadakan			Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur	70 unit	1,009,000,000	APBD Kota		70 unit	1,131,000,000
3	01	01	03	04	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah kawasan yang terpelihara			Kota Palopo	1 kawasan	50,000,000	APBD Kota		1 kawasan	55,000,000
3	01	01	03	05	Kegiatan Updating Data Statistik Kelautan dan Perikanan	Jumlah laporan data statistik yang dibuat			Kota Palopo	4 laporan	29,000,000	APBD Kota		4 laporan	31,310,000
3	01	01	04		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				130,281 Ton	208,655,000			136,795 Ton	268,000,000
3	01	01	04	01	Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah produksi bibit ikan			Kota Palopo	509.867 ekor	52,555,000	APBD Kota		602.155 kelompok	57,000,000
3	01	01	04	02	Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Masyarakat Pembudidaya	Jumlah kelompok yang didampingi / dikunjungi			Kota Palopo	30 kelompok	17,000,000	APBD Kota		30 kelompok	20,000,000
3	01	01	04	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah kelompok yang dibina			Kota Palopo	10 kelompok	19,100,000	APBD Kota		10 kelompok	21,000,000
3	01	01	04	04	Kegiatan Pengembangan Budidaya Rumput Laut	Jumlah produksi rumput laut			Kota Palopo	114.855 ton	120,000,000	APBD Kota		125.959 ton	170,000,000
3	01	01	05		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)				262,006 Ton	111,475,000			262,056 Ton	140,500,000
3	01	01	05	01	Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan hasil perikanan yang dikembangkan			Kota Palopo	2 produk	9,050,000	APBD Kota		2 produk	15,000,000
3	01	01	05	02	Pengembangan dan Penguatan Usaha Produk Olahan Perikanan	Jumlah kelompok yang dibina dan menerima bantuan			Kota Palopo	5 kelompok	18,400,000	APBD Kota		10 kelompok	30,000,000
3	01	01	05	03	Promosi, Pemasaran dan Penguatan Logistik	Jumlah kegiatan pameran / expo yang diikuti			Kota Palopo	5 kali	84,025,000	APBD Kota		5 kali	95,500,000
3	01	01	6		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)				262,006 Ton	1,701,500,000			262,056 Ton	1,630,000,000

3	01	01	03	06	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah kelompok yang menerima bantuan			Kota Palopo	224 unit	858,150,000	DAK		35 unit	780,000,000
3	01	01	04	05	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya	Jumlah kelompok yang diberdayakan			Kota Palopo	15 kelompok	843,350,000	DAK		15 kelompok	850,000,000
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											6,276,011,400				8,265,414,820
3					URUSAN PILIHAN										
3	02				PARIWISATA										
3	02	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,575,410,000			100%	1,813,238,000
3	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar			Jl. balaikota	500 surat	22,500,000	APBD Kota		550 surat	22,250,000
3	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai			Jl. Balaikota No. 1	7 rekening	132,100,000	APBD Kota		7 rekening	142,300,000
3	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di biayai			Jl. Balaikota No. 1	2 Unit	2,000,000	APBD Kota		2 Unit	2,535,000
3	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar			Jl. Balaikota No. 1	15 orang	91,000,000	APBD Kota		15 orang	118,300,000
3	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor yang dibersihkan			Jl. Balaikota No. 1	3500 m2	45,500,000	APBD Kota		3500 m2	59,150,000
3	02	01	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi yang dibayar			Jl. Balikota No. 1	30 Orang	247,000,000	APBD Kota		30 Orang	321,100,000
3	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			Jl. Balaikota No. 1	15 Buah	4,420,000	APBD Kota		15 Buah	5,746,000
3	02	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan			Jl. Balaikota No. 1	7 Buah	13,000,000	APBD Kota		7 Buah	16,900,000
3	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan			Jl. Balaikota No. 1	5 Exemplar	7,150,000	APBD Kota		5 Exemplar	9,295,000
3	02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas			Jl. Balikota No. 1	140 SPPD	540,450,000	APBD Kota		140 SPPD	562,785,000
3	02	01	01	25	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah atau jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli			Jl. Balikota No. 1	2 unit	19,500,000	APBD Kota		2 unit	25,350,000
3	02	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli			Jl. Balikota No. 1	5 unit	245,000,000	APBD Kota		5 unit	260,000,000
3	02	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli			Jl. Balikota No. 1	4 unit	26,000,000	APBD Kota		4 unit	33,800,000
3	02	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang terpelihara			Jl. Balikota No. 1	7000 m2	32,500,000	APBD Kota		7000 m2	42,250,000
3	02	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik			Jl. Balikota No. 1	2 unit	29,900,000	APBD Kota		2 unit	38,870,000

3	02	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara			Jl. Balikpapan No. 1	7 unit	2,080,000	APBD Kota		7 unit	2,704,000
3	02	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			Jl. Balikpapan No. 1	15 unit	5,850,000	APBD Kota		15 unit	7,605,000
3	02	01	01	47	Pengadaan Pakaian kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja yang diadakan			Jl. Balikpapan No. 1	12 pasang	2,340,000	APBD Kota		12 pasang	3,042,000
3	02	01	01	49	Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan			Jl. Balikpapan No. 1	24 pasang	3,120,000	APBD Kota		24 pasang	4,056,000
3	02	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek			Jl. Balikpapan No. 1	7 Orang	39,000,000	APBD Kota		8 Orang	50,700,000
3	02	01	01	53	Pengadaan Bangunan Gedung Lainnya	Jumlah pengadaan bangunan yang diadakan			Jl. Balikpapan No. 1	1 paket	65,000,000	APBD Kota		1 paket	84,500,000
3	02	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	15,400,000			100%	19,510,000
3	02	01	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja yang disusun			Jl. Balikpapan No. 1	4 dokumen	5,000,000	APBD Kota		4 dokumen	6,000,000
3	02	01	02	02	Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan yang disusun			Jl. Balikpapan No. 1	2 laporan	5,200,000	APBD Kota		2 laporan	6,750,000
3	02	01	02	03	Monitoring, evaluasi, kinerja dan keuangan	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi yang dilaksanakan			Jl. Balikpapan No. 1	1 laporan	5,200,000	APBD Kota		1 Laporan	6,760,000
3	02	01	03		Program Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pengunjung Wisata Domestik dan Mancanegara (Orang/Tahun)				102,487 Orang/Tahun	90,000,000			104,025 Orang/Tahun	95,000,000
3	02	01	03	01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan			Jl. Balikpapan No. 1	3 event	90,000,000	APBD Kota		4 event	95,000,000
3	02	01	04		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata (%/Tahun)				1,5%/Tahun	62,650,000			1,5%/Tahun	69,350,000
3	02	01	04	02	Statistik Wisata Terpadu	Jumlah laporan pengembangan destinasi			Jl. Balikpapan No. 1	4 laporan	62,650,000	APBD Kota		4 Laporan	69,350,000
3	02	01	05		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang Dibina (%)				13%	60,800,000			14%	65,040,000
3	02	01	05	01	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang dibina			Jl. Balikpapan No. 1	5 Sektor	60,800,000	APBD Kota		5 Sektor	65,040,000

3	02	01	06	Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pariwisata	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata				100%	4,471,751,400			100%	6,203,276,820	
3	02	01	06	01	Penyediaan Pelayanan Kepariwisata	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan			Jl. Balikpapan No. 1	480 orang/peserta	768,256,800	DAK		480 orang/peserta	1,388,733,840
3	02	01	06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun			Jl. Balikpapan No. 1	1 lokasi	3,703,494,600	DAK		1 lokasi	4,814,542,980
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN											14,898,300,000				16,378,900,000
3				URUSAN PILIHAN											
3	03			PERTANIAN											
3	03	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	5,300,500,000			100%	5,476,100,000
3	03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar			kota palopo	2625 Lembar	94,000,000	APBD Kota		2756 Lembar	110,000,000
3	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Internet yang			kota palopo	38 Rekening	400,000,000	APBD Kota		38 Rekening	414,000,000
3	03	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibiayai			kota palopo	142 unit	40,000,000	APBD Kota		142 unit	40,000,000
3	03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayar			kota palopo	6 orang	49,800,000	APBD Kota		6 Orang	49,800,000
3	03	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor Yang Dibersihkan (m2)			kota palopo	500 m2	30,000,000	APBD Kota		500 m2	35,000,000
3	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Diadakan			kota palopo	18 unit	20,000,000	APBD Kota		18 unit	20,000,000
3	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Koran/Buku Perundang-undangan			kota palopo	4 dokumen	7,000,000	APBD Kota		4 dokumen	7,000,000
3	03	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas			Luar kota palopo	300 Kegiatan	550,000,000	APBD Kota		300 Kegiatan	600,000,000
3	03	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang Dibangun			kota palopo	50 Meter	2,500,000,000	APBD Kota		50 Meter	2,500,000,000
3	03	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Randis/Operasional Yang Dibeli (Unit)			kota palopo	1 unit	200,000,000	APBD Kota		1 unit	200,000,000
3	03	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah atau Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli (Unit)			kota palopo	10 unit	35,000,000	APBD Kota		10 unit	40,000,000
3	03	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dibeli (Unit)			kota palopo	30 unit	30,000,000	APBD Kota		30 unit	50,000,000

3	03	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Dibeli			kota palopo	6 unit	10,000,000	APBD Kota		6 unit	13,000,000
3	03	01	01	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor Yang Terpelihara (m2)			kota palopo	205 m2	50,000,000	APBD Kota		273 m2	60,000,000
3	03	01	01	32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Kondisi Baik			kota palopo	1 unit	21,000,000	APBD Kota		1 unit	21,000,000
3	03	01	01	33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Kondisi Baik			kota palopo	2 unit	28,000,000	APBD Kota		3 unit	30,000,000
3	03	01	01	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara			kota palopo	12 unit	4,400,000	APBD Kota		18 unit	4,600,000
3	03	01	01	37	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara			kota palopo	23 unit	10,500,000	APBD Kota		23 unit	10,900,000
3	03	01	01	41	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang direhab (m)			kota palopo	350 Meter	350,000,000	APBD Kota		350 Meter	350,000,000
3	03	01	01	45	Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah Mesin Absensi yang Diadakan			kota palopo	7 unit	70,000,000	APBD Kota		7 unit	70,000,000
3	03	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan (Stel)			kota palopo	180 Stel	75,500,000	APBD Kota		180 Stel	75,500,000
3	03	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang Diadakan			kota palopo	180 Stel	45,300,000	APBD Kota		180 Stel	45,300,000
3	03	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			kota palopo	10 Orang	15,000,000	APBD Kota		10 Orang	15,000,000
3	03	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi			kota palopo	2 Orang	15,000,000	APBD Kota		2 Orang	15,000,000
3	03	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek			kota palopo	10 Orang	150,000,000	APBD Kota		2 Orang	150,000,000
3	03	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Jasa Administrasi Umum			kota palopo	143 Orang	500,000,000	APBD Kota		143 Orang	550,000,000
3	03	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	8,000,000			100%	9,000,000
3	03	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan			kota palopo	3 dokumen	4,000,000	APBD Kota		3 dokumen	4,500,000
3	03	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang dihasilkan			kota palopo	1 Laporan	1,000,000	APBD Kota		1 Laporan	1,000,000
3	03	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan yang Akan Disusun			kota palopo	1 Laporan	1,000,000	APBD Kota		1 Laporan	1,000,000
3	03	01	02	05	Pengumpulan dan Penyusunan Data Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi kinerja yang dibuat			kota palopo	1 dokumen	2,000,000	APBD Kota		1 dokumen	2,500,000

3	03	01	03	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Angka Cakupan Bina Kelompok Tani (%)				52%	511,500,000			53%	583,500,000
3	03	01	03	01	Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok									
					Pengadaan Pelatihan Pemuda Tani	Jumlah kelompok pemuda tani yang diberi pelatihan		Bara Kelompok Tani Padang Tiku RW.07	1 Kelompok	1,500,000	APBD Kota		1 Kelompok	1,500,000
					PElatihan Peningkatan SDM Petani dan Masyarakat dalam berkebun	jumlah petani yang diberi pelatihan		Wara Barat Kelurahan Padang Lambe	5 klp	10,000,000	APBD Kota		10 klp	50,000,000
					Penyuluhan dan pendampingan kelompok tani	jumlah penyuluhan dan pendampingan yang dilaksanakan		kota palopo	12 kali	275,000,000	APBD Kota		12 kali	300,000,000
3	03	01	03	02	Penyusunan Program dan Kebijakan Kebutuhan Kelompok Tani	Jumlah dokumen program penyuluhan dan kebutuhan kelompok tani		kota palopo	2 dokumen	75,000,000	APBD Kota		2 dokumen	80,000,000
3	03	01	03	03	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	jumlah kelompok tani yang aktif		kota palopo	466 Klp	150,000,000	APBD Kota		466 klp	152,000,000
3	03	01	04		Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil Pertanian	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)			41,887 Ton/Tahun	1,440,000,000			43,981 Ton/Tahun	1,590,000,000
3	03	01	04	01	Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian	Panjang jalan tani yang dibangun		kota palopo	2 Km	600,000,000	APBD Kota		2 Km	650,000,000
3	03	01	04	02	Pengelolaan Pupuk, Pesticida, Alat dan Mesin Pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan		kota palopo	150 unit	280,000,000	APBD Kota		150 unit	300,000,000
3	03	01	04	03	Peningkatan Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pertanian	Luas lahan sawah yang diasuransi		kota palopo	500 Ha	40,000,000	APBN		500 Ha	45,000,000
3	03	01	04	04	Peningkatan dan Pembinaan Produksi/Lahan Pertanian	Luas lahan pertanian yang dibina		kota palopo	10 Ha	300,000,000	APBD Kota		10 Ha	330,000,000
3	03	01	04	05	Pembinaan dan Pengelolaan Perbenihan Serta Perlindungan Usaha Pertanian	Jumlah event promosi yang diikuti		Dalam/Luar Daerah	3 Event	30,000,000	APBD Kota		3 Event	35,000,000
3	03	01	04	07	Pembinaan dan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Persentase Nilai Tambah dan Promosi Produk Pertanian		kota palopo	25 %	70,000,000	APBD Kota		30 %	90,000,000
3	03	01	04	08	Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah Penyuluh yang Ditingkatkan Kapasitasnya		kota palopo	76 Orang	120,000,000	APBD Kota		76 Orang	140,000,000
3	03	01	05		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian			100%	3,942,000,000			100%	4,436,000,000
3	03	01	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana DAK Pertanian yang Diadakan		kota palopo	19 unit	2,942,000,000	DAK		21 unit	3,236,000,000
3	03	01	05	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah Sarana DAK Peternakan yang Diadakan		kota palopo	5 unit	1,000,000,000	DAK		7 unit	1,200,000,000
3	03	01	06		Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Produksi Sektor Perkebunan (Ton/Tahun)			701 Ton/Tahun	1,165,000,000			755 Ton/Tahun	1,185,000,000
3	03	01	06	01	Peningkatan dan Pembinaan Produksi Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang diberi bibit/pupuk/Pestisida		kota palopo	5 Klp	300,000,000	APBD Kota		5 klp	300,000,000
3	03	01	06	02	Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan	Jumlah pengendalian OPT		kota palopo	7 Titik	94,000,000	APBD Kota		1000 pohon	94,000,000

3	03	01	06	03	Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan	Jumlah event promosi yang diikuti			kota palopo	3 Event	50,000,000	APBD Kota		3 Event	70,000,000
3	03	01	06	04	Pengelolaan Lahan Perkebunan	Panjang Jalan Produksi			kota palopo	1 km	721,000,000	APBD Kota		1 km	721,000,000
3	03	01	07		Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Produksi Daging dan Telur Daerah (Ton/Tahun)				5,158 Ton/Tahun	2,531,300,000			5,210 Ton/Tahun	3,099,300,000
3	03	01	07	01	Pembinaan dan Perbibitan Produksi Ternak	Jumlah Ternak Yang Didistribusikan			kota palopo	2324 ekor	525,000,000	APBD Kota		2440 ekor	551,000,000
3	03	01	07	02	Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan	Jumlah Angka Kelahiran			kota palopo	260 ekor	40,000,000	APBD Kota		70 ekor	50,000,000
3	03	01	07	03	Perbibitan dan Perawatan Ternak di UPTD	Jumlah Bibit Ayam Kampung Hasil Penetasan UPTD (ekor/tahun)			UPTD Mancani	131.250 ekor	1,500,000,000	APBD Kota		137.813 ekor	2,000,000,000
3	03	01	07	04	Pembinaan dan Pengelolaan Pakan Ternak	Luas Hijauan Pakan Ternak (Ha)			kota palopo	25.25 Ha	50,500,000	APBD Kota		25.3 Ha	50,600,000
3	03	01	07	05	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Jumlah event promosi yang diikuti			kota palopo	3 Event	111,500,000	APBD Kota		3 Event	124,600,000
3	03	01	07	06	Peningkatan Kesejahteraan Peternakan	Jumlah Ternak yang Diasuransi			kota palopo	200 ekor	8,000,000	APBD Kota		300 ekor	12,000,000
3	03	01	07	07	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pengobatan hewan yang			48 Kelurahan	15.000 ekor	296,300,000	APBD Kota		15.000 ekor	311,100,000
DINAS PERDAGANGAN											30,410,056,850				30,923,900,850
3					URUSAN PILIHAN										
3	06				PERDAGANGAN										
3	06	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	757,000,000			100%	736,144,000
3	06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar			Dinas Perdagangan	4500 Surat/Eksampler	60,750,000	APBD Kota		4500 Surat/Eksampler	60,500,000
3	06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet Yang Dibiayai			Dinas Perdagangan	26 Rekening	109,350,000	APBD Kota		26 Rekening	114,870,000
3	06	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan yang Dibiayai			Dinas Perdagangan	13 unit	5,000,000	APBD Kota		14 unit	5,800,000
3	06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi yang Dibayar			Dinas Perdagangan	16 orang	110,500,000	APBD Kota		16 orang	115,000,000
3	06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor yang dibersihkan			Dinas Perdagangan	1500 M2	12,000,000	APBD Kota		1500 M2	13,500,000
3	06	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Diadakan			Dinas Perdagangan	20 Bahlom	2,000,000	APBD Kota		20 Bahlom	2,100,000
3	06	01	01	13	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Jasa Administrasi yang Dibayar			Dinas Perdagangan	21 orang	115,600,000	APBD Kota		21 orang	118,600,000

3	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Langganan Koran			Dinas Perdagangan	96 Eksampler	4,800,000	APBD Kota		48 Eksampler	4,800,000
3	06	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas			Dinas Perdagangan	50 orang	180,000,000	APBD Kota		51 orang	183,500,000
3	06	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibeli			Dinas Perdagangan	4 unit	40,000,000	APBD Kota		3 unit	17,000,000
3	06	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Dibeli			Dinas Perdagangan	35 unit	40,000,000	APBD Kota		23 unit	17,500,000
3	06	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang Terpelihara			Dinas Perdagangan	376 M3	5,000,000	APBD Kota		408 M3	5,250,000
3	06	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Kondisi baik			Dinas Perdagangan	1 unit	25,000,000	APBD Kota		1 unit	25,000,000
3	06	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kondisi Baik			Dinas Perdagangan	2 unit	15,000,000	APBD Kota		2 unit	18,000,000
3	06	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara			Dinas Perdagangan	10 unit	2,000,000	APBD Kota		15 unit	2,100,000
3	06	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara			Dinas Perdagangan	40 unit	2,500,000	APBD Kota		30 unit	2,624,000
3	06	01	01	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan			Dinas Perdagangan	0 Stel	12,500,000	APBD Kota		0 Stel	12,500,000
3	06	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparat yang Mengikuti Bimtek			Dinas Perdagangan	2 orang	15,000,000	APBD Kota		2 orang	17,500,000
3	06	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	5,800,000			100%	5,800,000
3	06	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang Dihasilkan			Dinas Perdagangan	3 dokumen	2,500,000	APBD Kota		3 dokumen	2,500,000
3	06	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran			Dinas Perdagangan	1 dokumen	1,650,000	APBD Kota		1 orang	1,650,000
3	06	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir			Dinas Perdagangan	1 dokumen	1,650,000	APBD Kota		1 dokumen	1,650,000
3	06	01	03		Program Pembinaan Pedagang	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)				15,30%	28,258,000,000			15,60%	28,288,700,000
3	06	01	03	01	Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah Pedagang yang Dibina			Kota Palopo	818 orang	31,290,000	APBD Kota		702 orang	31,530,000
3	06	01	03	02	Pengelolaan Usaha dan Sarana Perdagangan	Jumlah Pedagang yang Saran Perdagangan Ditangani			Kota Palopo	300 orang	27,000,000,000	APBD Kota		350 orang	27,000,000,000
3	06	01	03	03	Pengendalian Barang dan Kebutuhan Pokok	Jumlah Kegiatan yang			Kota Palopo	2 Keg/kali	91,270,000	APBD Kota		2 Keg/kali	98,260,000
3	06	01	03	04	Promosi Perdagangan	Jumlah Kegiatan			Luar Propinsi dan Dalam Propinsi	3 Keg/kali	51,450,000	APBD Kota		3 Keg/kali	55,000,000

3	06	01	03	05	Pengelolaan Pasar dan Pusat Niaga Daerah	Jumlah UPTD Pasar yang Dikelola			Dinas Perdagangan	2 UPTD	808,990,000	APBD Kota		2 UPTD	828,910,000
3	06	01	03	06	Operasionalisasi Pengelolaan Rumah Pangan	Jumlah Ruko yang di Kontrak/ Sewa per tahun			Kota Palopo	7 Ruko	275,000,000	APBD Kota		7 Ruko	275,000,000
3	06	01	04		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Barang Bersubsidi yang Diawasi (%)				100%	164,000,000			100%	168,000,000
3	06	01	04	01	Perlindungan Konsumen	Jumlah Kegiatan Perlindungan Konsumen yang Dilaksanakan			Kota Palopo	1 Keg	5,500,000	APBD Kota		1 keg	7,500,000
3	06	01	04	02	Pengawasan Barang Beredar	Jumlah dan Jenis Kegiatan			Kota Palopo	3 Jenis	64,000,000	APBD Kota		3 Jenis	62,000,000
3	06	01	04	03	Pengelolaan Tertib Niaga	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Tertib Niaga			Kota Palopo	1 Jenis	9,500,000	APBD Kota		1 Jenis	9,500,000
3	06	01	04	04	Pengelolaan dan Pembinaan Kemeterologian Daerah	Jumlah Kegiatan			Kota Palopo	3 Jenis	85,000,000	APBD Kota		3 Jenis	89,000,000
3	06	01	05		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perdagangan					100%	1,225,256,850			100%	1,725,256,850
3	06	01	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan				Kota Palopo	2 Pasar	1,225,256,850	DAK		2 Pasar	1,725,256,850
DINAS PERINDUSTRIAN											1,237,300,000				1,259,800,000
3					URUSAN PILIHAN										
3	07				PERINDUSTRIAN										
3	07	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	551,300,000			100%	554,800,000
3	07	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	1000 Surat	20,000,000	APBD Kota		1500 Surat	20,000,000
3	07	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang Dibiayai			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	6 Rekening	86,200,000	APBD Kota		6 Rekening	96,200,000
3	07	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	6 Unit	2,000,000	APBD Kota		6 Unit	2,000,000
3	07	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	13 Orang	64,000,000	APBD Kota		13 Orang	64,000,000
3	07	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor yang dibersihkan			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	500 M2	10,000,000	APBD Kota		500 M2	10,500,000
3	07	01	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi umum yang dibayar			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	7 Orang	48,500,000	APBD Kota		7 Orang	48,500,000
3	07	01	01	11	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Pengelola administrasi Pengelola Barang Milik Daerah			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 Orang	8,500,000	APBD Kota		2 Orang	8,500,000

3	07	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	4 M/Bh/Jenis	2,000,000	APBD Kota		4 M/Bh/Jenis	2,000,000
3	07	01	01	14	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubiler yang dibeli		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	14 Unit	15,000,000	APBD Kota		15 Unit	15,000,000
3	07	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Koran/Tabloid Perundang-undangan		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 Exemplar	5,000,000	APBD Kota		2 Terbitan	5,000,000
3	07	01	01	18	Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	40 SPPD	150,000,000	APBD Kota		50 SPPD	150,000,000
3	07	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Randis / Operasional yang dibeli		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 unit	35,000,000	APBD Kota		1 unit	18,000,000
3	07	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dibeli		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	3 unit	10,000,000	APBD Kota		3 unit	10,000,000
3	07	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlatan gedung Kantor yang dibeli		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	6 Unit	15,000,000	APBD Kota		8 Unit	15,000,000
3	07	01	01	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan kerja yang diperbaiki		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	5 Unit	2,600,000	APBD Kota		5 Unit	2,600,000
3	07	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	200 M2	5,000,000	APBD Kota		200 M2	5,000,000
3	07	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas kondisi baik		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	1 Unit	25,000,000	APBD Kota		1 Unit	25,000,000
3	07	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA		3,000,000	APBD Kota			3,000,000
3	07	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	6 Unit	4,500,000	APBD Kota		6 Unit	4,500,000
3	07	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	35 Set	20,000,000	APBD Kota		35 Set	20,000,000
3	07	01	01	52	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti bimtek		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	5 Aparat	20,000,000	APBD Kota		3 Aparat	30,000,000
3	07	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)	100%	5,000,000			100%	5,000,000
3	07	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 Dokumen	500,000	APBD Kota		2 Dokumen	500,000
3	07	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang dihasilkan		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	1 Laporan	1,500,000	APBD Kota		1 Laporan	1,500,000
3	07	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan yang akan disusun		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	1 Laporan	1,000,000	APBD Kota		1 Laporan	1,500,000
3	07	01	02	05	Penyusunan Renja dan Anggaran SKPD	Jumlah laporan renja yang disusun		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 Laporan	1,000,000	APBD Kota		2 Laporan	1,000,000
3	07	01	02	06	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	4 Laporan	1,000,000	APBD Kota		4 Laporan	500,000

3	07	01	03	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Nilai Industri Pengolahan (Milyar/Tahun)				213,3 Milyar/Tahun	267,000,000			227,6 Milyar/Tahun	274,000,000
3	07	01	03	01 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan e-smart dan bimtek pengembangan IPTEK			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	25 IKM	4,000,000	APBD Kota		25 IKM	4,000,000
3	07	01	03	02 Kemampuan Industri Berbasis Teknologi										
				Jumlah Aparatur mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas dan kuantitas Produksi	Jumlah Aparatur mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas dan			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	3 Aparatur/IKM	15,000,000	APBD Kota		4 Aparatur/IKM	20,000,000
				Jumlah Pelatihan Manajemen dan standarisasi sistem produksi	Jumlah Pelatihan Manajemen dan standarisasi sistem produksi			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 Pelatihan	8,000,000	APBD Kota		2 Pelatihan	10,000,000
3	07	01	03	04 Sosialisasi dan Publikasi Data Statistik	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	26 IKM	240,000,000	APBD Kota		26 IKM	240,000,000
3	07	01	04	Program Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)				15%	122,000,000			15,6%	122,000,000
3	07	01	04	01 Pengembangan Industri Pangan dan Kerajinan	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan pengembangan pangan dan			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	40 IKM	4,000,000	APBD Kota		40 IKM	4,000,000
3	07	01	04	02 Pembinaan standarisasi dan Pengendalian Mutu Produk	Jumlah IKM yang di bina			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	20 IKM	28,000,000	APBD Kota		20 IKM	28,000,000
3	07	01	04	03 Layanan Pengembangan Produk IKM	Jumlah IKM yang memanfaatkan sarana UPT IKM Pangan			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 IKM	15,000,000	APBD Kota		2 IKM	15,000,000
3	07	01	04	04 Penyediaan Sarana dan prasarana Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan serta movev bina IKM			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	5 IKM	75,000,000	APBD Kota		5 IKM	75,000,000
3	07	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Potensi Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri (%/Tahun)				5%/Tahun	292,000,000			5%/Tahun	304,000,000
3	07	01	05	01 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Potensi Daerah										
				Jumlah Aparatur yang dilatih (TOT)	Jumlah Aparatur yang dilatih (TOT)			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	5 Aparatur	25,000,000	APBD Kota		6 Aparatur	30,000,000
				Jumlah IKM yang dilatih untuk pengolahan	Jumlah IKM yang dilatih			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	20 IKM	6,000,000	APBD Kota		20 IKM	8,000,000
				Pengelolaan Sentra Industri Pangan (UPT)	Jumlah Produk Sentra Industri			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	3 Komoditi	80,000,000	APBD Kota		3 Komoditi	80,000,000
3	07	01	05	02 Pembinaan Sertifikasi dan Kompetensi Produk										
				Jumlah Sertifikasi Halal untuk IKM	Jumlah Sertifikasi dan pendaftaran Merek untuk IKM			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	5 Sertifikat	25,000,000	APBD Kota		6 Sertifikat	30,000,000
				Jumlah Sosialisasi untuk mendapatkan legalisasi produk	Jumlah Sosialisasi untuk mendapatkan legalisasi produk			Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 Sosialisasi	6,000,000	APBD Kota		2 Sosialisasi	6,000,000

3	07	01	05	03	Penyediaan sarana Informasi dan Promosi Produk IKM					Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	3 Pameran	100,000,000	APBD Kota		3 Pameran	100,000,000
					Jumlah Pemeran Produk IKM	Jumlah Pemeran Produk IKM				Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	1 Aplikasi	25,000,000	APBD Kota		1 Aplikasi	25,000,000
					Jumlah Aplikasi (Profil data base IKM)	Jumlah Aplikasi (Profil data base IKM)				Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 Aparatur	15,000,000	APBD Kota		2 Aparatur	15,000,000
3	07	01	05	04	Pengembangan Kompetensi SDM Industri					Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 IKM	10,000,000	APBD Kota		2 IKM	10,000,000
					Jumlah Aparatur mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah Aparatur mengikuti Pengembangan Kompetensi				Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 IKM	10,000,000	APBD Kota		2 IKM	10,000,000
					Jumlah IKM mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah IKM mengikuti Pengembangan Kompetensi				Jln.Dr Ratulangi Komp KIPA	2 IKM	10,000,000	APBD Kota		2 IKM	10,000,000
DINAS TRANSMIGRASI												714,536,000				865,863,600
3	08				URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI											
3	08	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)			100%	333,536,000			100%	359,863,600
3	08	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar			Jl. Opu Tosapaile	455 Eksamplar	11,000,000	APBD Kota			455 Eksamplar	11,000,000
3	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibayar			Jl. Opu Tosapaile	3 Rekening	17,386,000	APBD Kota			3 Rekening	17,386,000
3	08	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar			Jl. Opu Tosapaile	3 unit	1,800,000	APBD Kota			3 Unit	1,800,000
3	08	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar			Jl. Opu Tosapaile	13 Orang	47,000,000	APBD Kota			13 Orang	67,800,000
3	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan			Jl. Opu Tosapaile	200 m2	6,324,000	APBD Kota			200 m2	6,500,000
3	08	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang di adakan			Jl. Opu Tosapaile	8 Titik	616,000	APBD Kota			8 Titik	677,600
3	08	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Langganan koran/buku perundang-undangan			Jl. Opu Tosapaile	4 Eksamplar	3,100,000	APBD Kota			4 Eksamplar	3,100,000
3	08	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas			Jl. Opu Tosapaile	100 Kali	201,000,000	APBD Kota			100 Kali	202,000,000
3	08	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan			Jl. Opu Tosapaile	1 unit	8,210,000	APBD Kota			1 Unit	12,500,000
3	08	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan			Jl. Opu Tosapaile	1 unit	400,000	APBD Kota			1 Unit	400,000

3	08	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan			Jl. Opu Tosapalle	12 unit	1,500,000	APBD Kota		12 Unit	1,500,000
3	08	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi umum yang dibayar			Jl. Opu Tosapalle	13 Orang	35,200,000	APBD Kota		13 Orang	35,200,000
3	08	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	6,000,000			100%	6,000,000
3	08	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun			Jl. Opu Tosapalle	4 Dokumen	1,875,000	APBD Kota		4 Dokumen	1,875,000
3	08	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran			Jl. Opu Tosapalle	1 Laporan	2,064,000	APBD Kota		1 Laporan	2,064,000
3	08	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			Jl. Opu Tosapalle	1 Laporan	2,061,000	APBD Kota		1 Laporan	2,061,000
3	08	01	03		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luas Kawasan Transmigrasi yang akan Dikembangkan (Ha)				2 Ha	375,000,000			2 Ha	500,000,000
3	08	01	03	04	Perencanaan Teknis satuan Permukiman (RTSP)	Tersedianya dokumen perencanaan Ketramigrasian			Jl. Opu Tosapalle	1 Dokumen	375,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	500,000,000
URUSAN PENUNJANG											56,951,615,183				60,758,411,682
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											3,451,535,000				3,599,147,000
4					URUSAN PENUNJANG										
4	01				PERENCANAAN										
4	01	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,732,595,000			100%	1,778,247,000
4	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar			Palopo	1750 buah	60,000,000	APBD Kota		1750 buah	63,000,000
4	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Telpn, Listrik, Internet yang Dibiayai			Palopo	4 Rek	182,000,000	APBD Kota		4 Rek	182,525,000
4	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang Dibiayai			Palopo	31 Unit	8,350,000	APBD Kota		28 Unit	8,350,000
4	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang Dibiayai			Palopo	7 Orang	55,000,000	APBD Kota		7 Orang	55,000,000
4	01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor			Palopo	3 Orang	101,000,000	APBD Kota		3 Orang	102,200,000
4	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Diadakan			Palopo	50 Buah	4,500,000	APBD Kota		50 Buah	4,500,000

4	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Rekening /Koran yang Berlangganan			Palopo	4 Terbitan	8,500,000	APBD Kota		4 Terbitan	9,000,000
4	01	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas			Palopo	60 SPPD	502,620,000	APBD Kota		60 SPPD	512,672,000
4	01	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Halaman dan Parkiran Kantor			Palopo	160 M2	100,000,000	APBD Kota		- -	100,000,000
4	01	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli			palopo	2 unit	6,000,000	APBD Kota		2 unit	6,000,000
4	01	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan			Palopo	11 unit	50,000,000	APBD Kota		11 Unit	50,000,000
4	01	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang Diadakan			Palopo	10 Unit	15,000,000	APBD Kota		10 Unit	15,000,000
4	01	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang Terpelihara			Palopo	1 Gedung	8,000,000	APBD Kota		1 Gedung	15,000,000
4	01	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Kondisi Baik			Palopo	1 Unit	27,000,000	APBD Kota		1 Unit	29,000,000
4	01	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kondisi baik			Palopo	1 Unit	17,000,000	APBD Kota		1 Unit	20,000,000
4	01	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			Palopo	15 Unit	5,000,000	APBD Kota		26 Unit	5,500,000
4	01	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			Palopo	37 Unit	7,000,000	APBD Kota		37 Unit	8,500,000
4	01	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan			Palopo	70 Pasang	50,000,000	APBD Kota		70 Pasang	52,000,000
4	01	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah pakaian olahraga yang disediakan			Palopo	70 Pasang	30,000,000	APBD Kota		70 Pasang	33,000,000
4	01	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			Palopo	45 Orang	370,000,000	APBD Kota		45 Orang	375,000,000
4	01	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Jasa Administrasi Umum Yang Dibiayai			Palopo	15 Orang	95,625,000	APBD Kota		15 Orang	97,000,000
4	01	01	01	55	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek			Palopo	3 orang	30,000,000	APBD Kota		3 orang	35,000,000
4	01	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Peringkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	11,000,000			100%	13,500,000
4	01	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SAKIP			Palopo	4 Laporan	6,500,000	APBD Kota		4 Laporan	7,000,000
4	01	01	02	03	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan			Palopo	2 Laporan	2,500,000	APBD Kota		2 Laporan	3,500,000

4	01	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan			Palopo	1 Laporan	2,000,000	APBD Kota		1 Laporan	3,000,000
4	01	01	03		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD (%)				100%	742,060,000			100%	796,000,000
4	01	01	03	01	Pembinaan dan Pengembangan Informasi Daerah Berbasis Teknologi	Terisnya format data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)			Palopo	1 Laporan	85,250,000	APBD Kota		1 Laporan	90,000,000
4	01	01	03	06	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen pembangunan pemerintah daerah yang sinergis dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah			Palopo	2 Dokumen	187,000,000	APBD Kota		2 Dokumen	187,000,000
4	01	01	03	07	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang sebagai pedoman RKPD			Palopo	1 Dokumen	136,250,000	APBD Kota		1 Dokumen	140,000,000
4	01	01	03	09	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah laporan LKPJ Walikota (buku)			Palopo	1 Dokumen	59,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	62,000,000
4	01	01	03	10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan APBD, APBN, & DAK yang di monitoring			Palopo	3 Laporan	150,000,000	APBD Kota		3 Laporan	150,000,000
4	01	01	03	11	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Palopo	18 Laporan Pengendalian dan Evaluasi	124,560,000	APBD Kota		18 Laporan Pengendalian dan Evaluasi	167,000,000
4	01	01	04		Program Perencanaan Pengembangan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW				100%	518,780,000			100%	541,400,000
4	01	01	04	01	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan tata ruang			palopo	150 orang	40,000,000	APBD Kota		150 orang	42,000,000
4	01	01	04	02	Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	Jumlah kegiatan koordinasi RTRW			palopo	1 laporan	30,000,000	APBD Kota		1 laporan	32,000,000
4	01	01	04	03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan perencanaan wilayah			palopo	1 laporan	208,540,000	APBD Kota		1 laporan	210,100,000
4	01	01	04	05	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan perumahan kumuh			palopo	1 laporan	97,000,000	APBD Kota		1 laporan	105,000,000

4	01	01	04	06	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi dan sinkronisasi program percepatan sanitasi permukiman			palopo	1 laporan	87,240,000	APBD Kota		1 laporan	92,300,000
4	01	01	04	07	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			palopo	1 dokumen	56,000,000	APBD Kota		1 dokumen	60,000,000
4	01	01	05		Program Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya	Kesesuaian rencana pembangunan dengan SDGS/TPB				100%	447,100,000			100%	470,000,000
4	01	01	05	02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah even pameran yang di ikuti			palopo	1 dokumen	182,000,000	APBD Kota		8 pameran	185,000,000
4	01	01	05	06	Koordinasi penyelenggaraan Program Pengembangan Pelayanan Dasar	jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan program pengembangan pelayanan dasar			palopo	1 dokumen	47,225,000	APBD Kota		1 dokumen	65,000,000
4	01	01	05	07	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target SDGs	Jumlah Dokumen RAD SDGs			palopo	1 laporan	48,200,000	APBD Kota		1 laporan	48,500,000
4	01	01	05	08	Koordinasi Money Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD	Jumlah dokumen LP2KD			palopo	1 laporan	64,800,000	APBD Kota		1 laporan	64,800,000
4	01	01	05	09	Koordinasi Pelaksanaan Pengaruh Sutamaan Gender (PUG), Menuju Kota Layak Anak	Jumlah Dokumen RAD KLA dan Profil Anak			palopo	2 dokumen	83,500,000	APBD Kota		2 laporan	83,700,000
4	01	01	05	10	Penyusunan Basis Data Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum	Jumlah Basis Data Yang Disusun			kota palopo	1 Basis Data	21,375,000	APBD Kota		1 Basis Data	23,000,000
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH											9,747,464,900				9,332,816,925
4					URUSAN PENUNJANG										
4	02				KEUANGAN										
4	02	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	3,136,277,200			100%	2,586,237,204
4	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi surat menyurat			Jl. Andi Djemma	4500 lembar	21,490,000	APBD Kota		4500 lembar	21,704,900
4	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jl. Andi Djemma	5 Rek	520,000,000	APBD Kota		5 Rek	525,000,000
4	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan memiliki izin			Jl. Andi Djemma	55 Unit	25,249,000	APBD Kota		55 Unit	30,453,722
4	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen jada administrasi keuangan			Jl. Andi Djemma	9 Orang	230,837,500	APBD Kota		9 Orang	238,095,875
4	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor			Jl. Andi Djemma	4 Orang	45,000,000	APBD Kota		4 Orang	45,210,000

4	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor		Jl. Andi Djemma	22 Unit	9,485,700	APBD Kota		22 Unit	9,580,557
4	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah literatur dan bahan bacaan		Jl. Andi Djemma	4 Jenis	14,000,000	APBD Kota		4 Jenis	14,140,000
4	02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		Jl. Andi Djemma	160 Keg.	500,000,000	APBD Kota		160 Keg.	505,000,000
4	02	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor		Jl. Andi Djemma	1 Unit	100,000,000	APBD Kota		1 Unit	107,000,000
4	02	01	01	22	Pengadaan Kendaraan Mobil jabatan	Jumlah unit kendaraan mobil jabatan		Jl. Andi Djemma	2 Unit	600,000,000	APBD Kota		-	-
4	02	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional		Jl. Andi Djemma	2 Unit	44,000,000	APBD Kota		-	-
4	02	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor		Jl. Andi Djemma	2 Unit	53,000,000	APBD Kota		2 Unit	54,000,000
4	02	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan		Jl. Andi Djemma	16 Unit	176,000,000	APBD Kota		16 Unit	177,000,000
4	02	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		Jl. Andi Djemma	30 Unit	15,000,000	APBD Kota		30 Unit	19,250,000
4	02	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung yang terpelihara		Jl. Andi Djemma	3 Unit	190,000,000	APBD Kota		3 Unit	190,000,000
4	02	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil dinas/jabatan yang terpelihara		Jl. Andi Djemma	1 Unit	30,000,000	APBD Kota		1 Unit	30,000,000
4	02	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang terpelihara		Jl. Andi Djemma	4 Unit	22,365,000	APBD Kota		4 Unit	22,588,650
4	02	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		Jl. Andi Djemma	45 Unit	10,920,000	APBD Kota		45 Unit	11,029,200
4	02	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Jl. Andi Djemma	600 Unit	31,430,000	APBD Kota		600 Unit	31,744,300
4	02	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga		Jl. Andi Djemma	130 Pasang	19,500,000	APBD Kota		130 Pasang	19,695,000
4	02	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS BPKAD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		Jl. Andi Djemma	4 Orang	24,500,000	APBD Kota		4 Orang	24,745,000
4	02	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jl. Andi Djemma	2 Orang	15,000,000	APBD Kota		2 Orang	20,000,000
4	02	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi umum	Jumlah layanan administrasi umum perkantoran dan administrasi kepegawaian		Jl. Andi Djemma	6 Orang	482,500,000	APBD Kota		6 Orang	490,000,000

4	02	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	13,000,000			100%	13,000,000
4	02	01	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dilaporkan			Jl. Andi Djemma	3 Laporan	7,000,000	APBD Kota		3 Laporan	7,000,000
4	02	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran			Jl. Andi Djemma	1 Laporan	3,000,000	APBD Kota		1 Laporan	3,000,000
4	02	01	02	03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			Jl. Andi Djemma	1 Laporan	3,000,000	APBD Kota		1 Laporan	3,000,000
4	02	01	03		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Regulasi Daerah yang Terkait APBD yang Ditetapkan Sesuai Dengan Target Waktu				100%	5,398,187,700			100%	5,483,579,721
4	02	01	03	01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah dokumen standar belanja			Jl. Andi Djemma	1 Dokumen	70,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	72,100,000
4	02	01	03	02	Penyusunan Standar satuan harga	Jumlah dokumen standar satuan harga			Jl. Andi Djemma	1 Dokumen	120,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	121,000,000
4	02	01	03	05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah dokumen ranperda tentang APBD			Jl. Andi Djemma	1 Dokumen	120,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	122,000,000
4	02	01	03	06	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran APBD			Jl. Andi Djemma	1 Dokumen	37,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	38,000,000
4	02	01	03	07	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD			Jl. Andi Djemma	1 Dokumen	120,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	122,000,000
4	02	01	03	08	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD			Jl. Andi Djemma	1 Dokumen	37,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	38,000,000
4	02	01	03	09	Penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Jl. Andi Djemma	1 Dokumen	173,500,000	APBD Kota		1 Dokumen	173,500,000
4	02	01	03	10	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Jl. Andi Djemma	1 Dokumen	31,760,000	APBD Kota		1 Dokumen	34,260,000

4	02	01	03	12	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Jl. Andi Djemma	22 Laporan	350,000,000	APBD Kota		22 Laporan	355,000,000
4	02	01	03	13	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aparat yang mengikuti Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		Jl. Andi Djemma	49 OPD	110,000,000	APBD Kota		49 OPD	115,000,000
4	02	01	03	14	Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan		Jl. Andi Djemma	49 OPD	83,256,000	APBD Kota		49 OPD	85,000,000
4	02	01	03	15	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan aset/barang milik daerah		Jl. Andi Djemma	1 Dokumen	1,200,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	1,250,000,000
4	02	01	03	16	Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Akuntansi	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD		Jl. Andi Djemma	1 Laporan	450,000,000	APBD Kota		1 Laporan	450,273,000
4	02	01	03	17	Penyelenggaraan administrasi perbendaharaan daerah	Jumlah dokumen administrasi perbendaharaan daerah		Jl. Andi Djemma	49 OPD	781,650,000	APBD Kota		49 OPD	785,000,000
4	02	01	03	18	Penyelenggaraan Pengendalian APBD	Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian APBD		Jl. Andi Djemma	49 OPD	487,000,000	APBD Kota		49 OPD	489,340,000
4	02	01	03	20	Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah aparat yang mengikuti sensus barang milik daerah		Jl. Andi Djemma	1 Laporan	301,000,000	APBD Kota		1 Laporan	301,500,000
4	02	01	03	21	Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Jumlah OPD dan unit kerja yang menerapkan sistim informasi pengelolaan BMD		Jl. Andi Djemma	1 Laporan	96,481,700	APBD Kota		1 Laporan	99,376,151
4	02	01	03	22	Penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen administrasi pengelolaan keuangan daerah OSKPKD/PPKD		Jl. Andi Djemma	1 Laporan	445,700,000	APBD Kota		1 Laporan	446,730,570
4	02	01	03	23	Penyusunan Laporan Aset Daerah	Jumlah dokumen Laporan Aset Daerah		Jl. Andi Djemma	6 Laporan	285,340,000	APBD Kota		6 Laporan	287,000,000
4	02	01	03	25	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS		Jl. Andi Djemma	1 Dokumen	98,500,000	APBD Kota		1 Dokumen	98,500,000
4	02	01	04		Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Anggaran Perangkat Daerah yang Diasistansi (%)			100%	1,200,000,000			100%	1,250,000,000
4	02	01	04	01	Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen RKA OPD yang diasistansi (RAPBD Pokok dan RAPBD		Jl. Andi Djemma	98 RKA	1,200,000,000	APBD Kota		98 RKA	1,250,000,000
BADAN PENDAPATAN DAERAH										6,875,028,500				7,156,408,000

[illegible]

4	02	02	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			Badan Pendapatan Daerah	3 jenis	43,000,000	APBD Kota		3 jenis	47,300,000
4	02	02	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan			Badan Pendapatan Daerah	234 stell	61,000,000	APBD Kota		- -	61,000,000
4	02	02	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			Badan Pendapatan Daerah	40 orang	74,560,700	APBD Kota		45 orang	80,000,000
4	02	02	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi umum	Jumlah jasa administrasi yang dibayar			Badan Pendapatan Daerah	20 orang	710,000,000	APBD Kota		31 orang	712,000,000
4	02	02	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	3,885,000			100%	4,273,500
4	02	02	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan			Badan Pendapatan Daerah	3 dokumen	1,850,000	APBD Kota		3 dokumen	2,035,000
4	02	02	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang dihasilkan			Badan Pendapatan Daerah	1 laporan	1,025,000	APBD Kota		1 laporan	1,127,500
4	02	02	02	03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang disusun			Badan Pendapatan Daerah	1 laporan	1,010,000	APBD Kota		1 laporan	1,111,000
4	02	02	03		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah (Rp/Milyar)				38,9 Milyar/Tahun	4,269,562,800			43,45 Milyar/Tahun	4,398,836,500
						Nilai Retribusi Daerah (Rp/Milyar)				7,88 Milyar/Tahun				8,44 Milyar/Tahun	
						Nilai Lain-Lain Pendapatan Daerah (Rp/Milyar)				139,85 Milyar/Tahun				147,57 Milyar/Tahun	
4	02	02	03	01	Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah revisi perda pajak dan retribusi yang dibuat			Badan Pendapatan Daerah	1 perda dokumen	10,230,000	APBD Kota		1 perda dokumen	11,300,000
4	02	02	03	02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah potensi penerimaan pajak daerah			Badan Pendapatan Daerah	40 Milyar	245,000,000	APBD Kota		45 Milyar	250,000,000
4	02	02	03	03	Pendataan dan Pemeliharaan Data Objek Pajak	Jumlah kecamatan yang dilakukan pemetaan data/peta blok			Badan Pendapatan Daerah	2 kecamatan	793,051,000	APBD Kota		2 kecamatan	872,356,100
4	02	02	03	04	Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan	Jumlah dan jenis pajak yang didata			Badan Pendapatan Daerah	30 jenis	300,000,000	APBD Kota		30 jenis	301,500,000
4	02	02	03	05	Pelayanan Pengaduan Wajib Pajak	Jumlah laporan pengaduan wajib pajak			Badan Pendapatan Daerah	100 laporan	201,000,000	APBD Kota		100 laporan	202,000,000
4	02	02	03	06	Pelayanan Jemput Antar Pajak Daerah	Jumlah target penerimaan pajak hotel dan restoran melalui alat M-Pos			Badan Pendapatan Daerah	1 Milyar	930,500,000	APBD Kota		2 Milyar	935,000,000

4	02	02	03	07	Pengelolaan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah kelurahan yang diterbitkan PBB-P2 dan DHKP			Badan Pendapatan Daerah	48 kelurahan	345,367,800	APBD Kota		48 kelurahan	348,000,000
4	02	02	03	08	Monitoring, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah			Badan Pendapatan Daerah	12 Perangkat Daerah unit	302,000,000	APBD Kota		12 Perangkat daerah unit	302,345,000
4	02	02	03	09	Penyusunan regulasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah perwal/revisi perwal yang dibuat			Badan Pendapatan Daerah	2 perwal dokumen	11,200,000	APBD Kota		2 perwal dokumen	12,000,000
4	02	02	03	10	Penyusunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah sistem informasi yang digunakan			Badan Pendapatan Daerah	1 Sistem Aplikasi	247,914,000	APBD Kota		1 sistem aplikasi	272,705,400
4	02	02	03	12	Pembinaan dan Pengawasan Sumber - Sumber Penerimaan Daerah	Jumlah laporan PAD yang dipantau			Badan Pendapatan Daerah	1600 laporan	850,000,000	APBD Kota		1700 laporan	855,000,000
4	02	02	03	13	Sosialisasi Implementasi Regulasi Pendapatan Daerah	Jumlah regulasi yang disosialisasikan kepada masyarakat			Badan Pendapatan Daerah	2 regulasi peraturan	33,300,000	APBD Kota		1 peraturan	36,630,000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											6,835,360,000				6,860,090,000
4					URUSAN PENUNJANG										
4	03				KEPEGAWAIAN										
4	03	01	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	787,800,000			100%	798,800,000
4	03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar			palopo	400 Eksemplar	97,000,000	APBD Kota		400 Eksemplar	98,000,000
4	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, intenet dan media penyiaran yang dibiayai			palopo	4 Rekening	45,000,000	APBD Kota		4 Rekening	45,100,000
4	03	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai			palopo	16 unit	5,300,000	APBD Kota		16 unit	5,400,000
4	03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelolaan Keuangan yang dibiayai			palopo	9 orang	80,000,000	APBD Kota		9 orang	81,200,000
4	03	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai			palopo	2 orang	110,000,000	APBD Kota		2 orang	115,000,000
4	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang komponen listrik yang diadakan			palopo	1 meter	2,500,000	APBD Kota		1 meter	2,500,000
4	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Rekening Koran yang berlangganan			palopo	4 Eksamplar	8,000,000	APBD Kota		4 Eksamplar	8,100,000
4	03	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti			palopo	32 kali	275,000,000	APBD Kota		32 kali	275,000,000

4	03	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan			palopo	3 unit	36,000,000	APBD Kota		3 unit	37,000,000
4	03	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang pemeliharaan			palopo	1 unit	22,000,000	APBD Kota		1 unit	22,000,000
4	03	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Operasional yang pemeliharaan dibiayai			palopo	1 unit	12,000,000	APBD Kota		1 unit	12,400,000
4	03	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang			palopo	17 unit	7,000,000	APBD Kota		17 unit	7,100,000
4	03	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			palopo	5 unit	11,000,000	APBD Kota		5 unit	11,000,000
4	03	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat			palopo	2 orang	20,000,000				25,000,000
4	03	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Pengelolaan Administrasi umum yang			palopo	15 orang	77,000,000	APBD Kota		15 orang	79,000,000
4	03	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	23,000,000			100%	24,000,000
4	03	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan dan Kinerja yang			palopo	4 dokumen	10,000,000	APBD Kota		4 Dokumen	10,000,000
4	03	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun			palopo	2 buah	10,000,000	APBD Kota		2 buah	10,000,000
4	03	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun			palopo	1 buah	3,000,000	APBD Kota		1 buah	4,000,000
4	03	01	03		Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah				2262 Fungsional	1,019,000,000			2284 Fungsional	1,022,230,000
4	03	01	03	01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Aparatur	Jumlah aparatur yang diadakan			palopo	200 Orang	753,000,000	APBD Kota		3 Jenis	753,000,000
4	03	01	03	02	Kegiatan Pengelolaan Pemberhentian Aparatur	Jumlah Layanan Pemberhentian Aparatur yang Dilaksanakan			palopo	1 Jenis	41,000,000	APBD Kota		1 Jenis	41,000,000
4	03	01	03	03	Kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Layanan Data dan Informasi Kepegawaian			palopo	1 Aplikasi	120,000,000	APBD Kota		5 buahg	121,000,000
4	03	01	03	04	Kegiatan Pelayanan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang dibina			palopo	1 buah	105,000,000	APBD Kota		1 buah	107,230,000

4	03	01	04	Program Pelayanan Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir	Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural			35 Orang	539,670,000			40 Orang	542,670,000
4	03	01	04	01 Kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Mutasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Mutasi Kepegawaian		palopo	1 buah	98,000,000	APBD Kota		1 buah	98,000,000
4	03	01	04	02 Kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Kepangkatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepangkatan		palopo	1 buah	116,000,000	APBD Kota		1 buah	119,000,000
4	03	01	04	03 Kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Pengembangan Karier dan Promosi Aparatur	Jumlah Laporan Pengembangan Karier dan Promosi Aparatur		palopo	1 buah	325,670,000	APBD Kota		1 buah	325,670,000
4	03	01	05	Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			1,1%	4,465,890,000			1,2%	4,472,390,000
4	03	01	05	01 Kegiatan Pembinaan Penjurangan Aparatur	Jumlah Aparatur yang akan mengikuti		palopo	60 orang	2,450,000,000	APBD Kota		60 orang	2,450,000,000
4	03	01	05	02 Kegiatan Pengembangan Sertifikasi Aparatur	Jumlah Aparatur yang akan mengikuti Sertifikasi		palopo	30 orang	1,500,000,000	APBD Kota		30 orang	1,500,000,000
4	03	01	05	03 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	Jumlah aparat yang mengikuti Diklat Fungsional		palopo	86 orang	235,890,000	APBD Kota		86 orang	235,890,000
4	03	01	05	04 Kegiatan Pembinaan dan Pengelola Diklat Teknis	Jumlah aparat yang mengikuti Diklat Teknis		palopo	20 orang	40,000,000	APBD Kota		20 orang	41,000,000
4	03	01	05	05 Kegiatan Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah laporan kasus- kasus pelanggaran disiplin yang diproses dan penilaian kinerja		palopo	12 laporan	160,000,000	APBD Kota		1 orang	165,000,000
4	03	01	05	06 Kegiatan Penghargaan Aparatur	Jumlah Kegiatan Penghargaan Aparatur		palopo	1 kali	80,000,000	APBD Kota		1 kali	80,500,000
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									570,391,000				1,041,458,000
4				URUSAN PENUNJANG									
4	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4	05	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)	100%	415,830,000			100%	639,458,000
4	05	01	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat terlaksana		Jalan A. Sulthani No 02	550 Surat	19,000,000	APBD Kota		600 Surat	22,000,000
4	05	01	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terbayar		Jalan A. Sulthani No 02	1 Rekening	6,600,000	APBD Kota		1 Rekening	9,600,000
4	05	01	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK terbayarkan		Jalan A. Sulthani No 02	6 Unit	3,500,000	APBD Kota		10 Unit	4,200,000

4	05	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan			Jalan A. Sulthani No 02	10 Orang	59,000,000	APBD Kota		11 Orang	66,600,000
4	05	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor yang terbayar			Jalan A. Sulthani No 02	1 Orang	7,100,000	APBD Kota		1 Orang	8,500,000
4	05	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah komponen listrik/penerangan disediakan			Jalan A. Sulthani No 02	22 Unit	1,500,000	APBD Kota		25 Unit	2,500,000
4	05	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Media Cetak yang disediakan			Jalan A. Sulthani No 02	4 Media Cetak	5,280,000	APBD Kota		4 Media Cetak	5,808,000
4	05	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang diikuti			Jalan A. Sulthani No 02	50 Kali	110,000,000	APBD Kota		60 Kali	115,000,000
4	05	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Motor Dinas Operasional yang disediakan			Jalan A. Sulthani No 02	2 Unit	18,000,000	APBD Kota		2 Unit	44,000,000
4	05	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan			Jalan A. Sulthani No 02	2 Unit	4,000,000	APBD Kota		3 Unit	4,500,000
4	05	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor disediakan			Jalan A. Sulthani No 02	9 Unit	21,000,000	APBD Kota		8 Unit	32,000,000
4	05	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang disediakan			Jalan A. Sulthani No 02	4 Unit	3,000,000	APBD Kota		5 Unit	110,000,000
4	05	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor terpelihara			Jalan A. Sulthani No 02	1 Unit	20,500,000	APBD Kota		1 Unit	26,500,000
4	05	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara			Jalan A. Sulthani No 02	1 Unit	25,000,000	APBD Kota		1 Unit	25,000,000
4	05	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara			Jalan A. Sulthani No 02	1 Unit	10,000,000	APBD Kota		1 Unit	15,500,000
4	05	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara			Jalan A. Sulthani No 02	5 Unit	1,250,000	APBD Kota		7 Unit	1,500,000
4	05	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara			Jalan A. Sulthani No 02	15 Unit	5,750,000	APBD Kota		20 Unit	6,500,000
4	05	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Baju Dinas yang disediakan			Kota Palopo	7 Pasang	2,000,000	APBD Kota		40 Pasang	20,000,000
4	05	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus Hari-hari tertentu yang disediakan			Jalan A. Sulthani No 02	35 Pasang	8,750,000	APBD Kota		40 Pasang	11,250,000
4	05	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			Jalan A. Sulthani No 02	2 Orang	8,000,000	APBD Kota		3 Orang	20,500,000
4	05	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Pengelola Administrasi Umum			Jalan A. Sulthani No 02	12 Orang	76,600,000	APBD Kota		12 Orang	88,000,000
4	05	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Peringkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	2,250,000			100%	4,500,000

4	05	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP			Jalan A. Sulthani No 02	4 Dokumen	750,000	APBD Kota		4 Dokumen	1,500,000
4	05	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran			Jalan A. Sulthani No 02	1 Laporan	750,000	APBD Kota		1 Dokumen	1,500,000
4	05	01	02	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun			Jalan A. Sulthani No 02	1 Dokumen	750,000	APBD Kota		1 Dokumen	1,500,000
4	05	01	03		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)				40%	80,311,000			45%	212,500,000
4	05	01	03	01	Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Pemerintahan Umum	Jumlah hasil kelitbangan otda, pemerintahan umum, dan peraturan UU			Kota Palopo	1 Hasil Penelitian	25,000,000	APBD Kota		1 Hasil Penelitian	35,000,000
4	05	01	03	02	Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya Sumber Daya Masyarakat	Hasil Kelitbangan bidang Sosial, Budaya dan Sumber daya masyarakat			Kota Palopo	1 Hasil Penelitian	25,000,000	APBD Kota		1 Hasil Penelitian	35,000,000
4	05	01	03	03	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi	Jumlah hasil litbang pembangunan ekonomi			Kota Palopo	1 Hasil Penelitian	15,000,000	APBD Kota		1 Hasil Penelitian	60,000,000
4	05	01	03	06	Penelitian dan Pengembangan Wilayah dan Fispra	Jumlah hasil kelitbangan bidang wilayah dan sarana			Kota Palopo	1 Hasil Kelitbangan	15,311,000	APBD Kota		2 Hasil Kelitbangan	82,500,000
4	05	01	04		Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah				3%	72,000,000			4%	185,000,000
4	05	01	04	01	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah Regulasi Kelitbangan yang dihasilkan			Kota Palopo	1 Regulasi	10,000,000	APBD Kota		1 Laporan	110,000,000
4	05	01	04	02	Pengembangan Teknopark Sagu dan Pusat Inovasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Teknopark			Kota Palopo	1 Laporan	34,000,000	APBD Kota		1 Laporan	40,000,000
4	05	01	04	06	Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi daerah yang dihasilkan			Kota Palopo	20 Inovasi	28,000,000	APBD Kota		25 Inovasi	35,000,000
INSPEKTORAT											3,407,686,633				4,415,254,195
4					URUSAN PENUNJANG										
4	06				PENGAWASAN										
4	06	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,247,108,333			100%	1,392,716,805
4	06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar			Kota Palopo	650 surat	76,230,000	APBD Kota		680 Surat	80,000,000

4	06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumer Daya Air & Listrik	Jumlah rekening Air, Listrik, Internet yang			Kota Palopo	4 Rekening	128,657,333	APBD Kota		4 Rekening	163,525,000
4	06	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibiayai			Kota Palopo	16 Unit	5,260,000	APBD Kota		16 Unit	7,600,000
4	06	01	01	07	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar			Kota Palopo	2 Orang	78,000,000	APBD Kota		2 Orang	113,534,000
4	06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan			Kota Palopo	3 Orang	26,161,000	APBD Kota		3 Orang	32,077,100
4	06	01	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi yang dibayar			Kota Palopo	6 Orang	273,000,000	APBD Kota		6 Orang	119,523,000
4	06	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			Kota Palopo	5 Jenis	4,000,000	APBD Kota		5 Jenis	5,324,000
4	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran / buku perundang - undangan			Kota Palopo	3 Terbitan	5,300,000	APBD Kota		3 Terbitan	11,180,000
4	06	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan rapat - rapat dan konsultasi			Kota Palopo	50 Perjalanan	255,000,000	APBD Kota		50 Perjalanan	260,000,000
4	06	01	01	21	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang akan dibangun			Kota Palopo	1 Gedung	200,000,000	APBD Kota		1 Gedung	200,000,000
4	06	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang diadakan			Kota Palopo	1 Unit	10,000,000	APBD Kota		1 Unit	27,500,000
4	06	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	5 Unit	2,000,000	APBD Kota		5 Unit	10,000,000
4	06	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah atau jenis peralatan yang diadakan			Kota Palopo	20 Unit	16,500,000	APBD Kota		27 Unit	35,000,000
4	06	01	01	28	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mobeleur Terciptanya Kelancaran kerja			Kota Palopo	100 Unit	18,000,000	APBD Kota		50 Unit	70,000,000
4	06	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah / Luas Gedung Kantor yang di pelihara			Kota Palopo	1 Gedung	9,000,000	APBD Kota		1 Gedung	18,000,000
4	06	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan			Kota Palopo	1 Unit	21,000,000	APBD Kota		1 Unit	33,275,000
4	06	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang di pelihara			Kota Palopo	2 Unit	29,000,000	APBD Kota		2 Unit	49,247,000
4	06	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	27 Unit	4,000,000	APBD Kota		27 Unit	4,840,000
4	06	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			Kota Palopo	31 Unit	8,000,000	APBD Kota		41 Unit	13,310,000
4	06	01	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas			Kota Palopo	65 Pasang	32,500,000	APBD Kota		65 Pasang	32,500,000
4	06	01	01	50	Pelatihan dan Pendidikan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan			Kota Palopo	1 Orang	33,000,000	APBD Kota		1 Orang	35,000,000

4	06	01	01	51	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang - undangan Peningkatan Profesionalisme Aparatur			Kota Palopo	1 Orang	2,500,000	APBD Kota		1 Orang	6,062,705
4	06	01	01	52	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Profesionalisme Aparatur			Kota Palopo	5 Unit	10,000,000	APBD Kota		5 Orang	65,219,000
4	06	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,300,000			100%	3,325,900
4	06	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja			Kota Palopo	3 Dokumen	500,000	APBD Kota		3 Dokumen	1,197,900
4	06	01	02	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan			Kota Palopo	1 Dokumen	500,000	APBD Kota		1 Dokumen	1,064,000
4	06	01	02	06	Penyusunan Angka Kredit JFU dan JFPP	Jumlah Dokumen Angka Kredit JFF			Kota Palopo	2 Dokumen	300,000	APBD Kota		1 Dokumen	1,064,000
4	06	01	03		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan				75%	2,029,278,300			80%	2,861,211,490
4	06	01	03	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan pemeriksaan Kinerja/ reguler SKPD dan Evaluasi Lakip			Kota Palopo	51 LHP	770,000,000	APBD Kota		51 LHP	1,304,100,490
4	06	01	03	02	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda	Jumlah LHP Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda			Kota Palopo	30 LHP	205,000,000	APBD Kota		30 LHP	257,000,000
4	06	01	03	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Reviu			Kota Palopo	26 LHR	346,278,300	APBD Kota		26 LHR	395,000,000
4	06	01	03	04	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah inventarisasi (rekapitulasi) temuan LHP APIP			Kota Palopo	1 Laporan	24,500,000	APBD Kota		1 Laporan	35,000,000
4	06	01	03	05	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Pemutakhiran Data Tk. Kab/KotaPemutakhiran data Tk.Kab/Kota			Kota Palopo	10 Laporan	250,000,000	APBD Kota		10 Laporan	300,500,000
4	06	01	03	06	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Laporan Pengawasan			Kota Palopo	8 LHP	168,500,000	APBD Kota		8 LHP	221,371,000
4	06	01	03	07	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah Laporan Temuan Hasil pengawasan / evaluasi berkala terkait temuan LHP yang telah ditindak lanjuti			Kota Palopo	8 LHP	35,000,000	APBD Kota		8 LHP	53,240,000

4	06	01	03	08	Pemeriksaan Khusus	Jumlah LHP Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait pemeriksaan khusus dan terpadu			Kota Palopo	30 LHP	230,000,000	APBD Kota		30 LHP	295,000,000
4	06	01	04		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Aparatur Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemkot (Level)				Level 3	130,000,000			Level 3	158,000,000
4	06	01	04	01	Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Profesionalisme (JFA dan JFPP) yang terlatih			Kota Palopo	40 Orang	130,000,000	APBD Kota		40 Orang	158,000,000
KECAMATAN WARU											3,166,600,000				3,335,300,000
4					URUSAN PENUNJANG										
4	08				KEWILAYAHAN										
4	08	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	376,200,000			100%	425,200,000
4	08	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk & keluar (surat)			Kecamatan Waru	1500 surat	5,200,000	APBD Kota		1500 Surat	5,500,000
4	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai (rekening)			Kecamatan Waru	21 rekening	55,000,000	APBD Kota		21 rekening	70,000,000
4	08	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai (unit)			Kecamatan Waru	15 STNK	4,300,000	APBD Kota		15 Unit	4,300,000
4	08	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terpenuhinya jumlah jasa administrasi keuangan			kecamatan waru	3 org	75,500,000	APBD Kota		3 org	80,000,000
4	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor			Kecamatan Waru	2 org	15,400,000	APBD Kota		2 org	15,400,000
4	08	01	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	jumlah jasa administrasi umum Persentase Pelayanan umum dan kepegawaiaan yang optimal (%)			kec.waru	9 org	108,300,000	APBD Kota		9 org	108,300,000
4	08	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran/buku perundang-undangan (exemplar)			Kecamatan Waru	12 exp	3,000,000	APBD Kota		12 exp	3,700,000
4	08	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas (SPPD)			Kecamatan Waru	12 bln	87,500,000	APBD Kota		12 bln	110,000,000

4	08	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor			kecamatan wara	1 unit	4,000,000	APBD Kota		1 unit	7,000,000
4	08	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik (unit)			kec.wara	1 unit	17,000,000	APBD Kota		1 unit	20,000,000
4	08	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)			kec.wara	1 unit	500,000	APBD Kota		1 unit	500,000
4	08	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)			kec.wara	1 unit	500,000	APBD Kota		1 unit	500,000
4	08	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	6,000,000			100%	6,000,000
4	08	01	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan			kec.wara	5 laporan	3,000,000	APBD Kota		5 laporan	3,000,000
4	08	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	jumlah dokumen Keuangan			kec.wara	2 dokumen	1,500,000	APBD Kota		2 dokumen	1,500,000
4	08	01	02	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen Keuangan			kec.wara	1 dokumen	1,500,000	APBD Kota		1 dokumen	1,500,000
4	08	01	03		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Serta Pelayanan di Kecamatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	2,784,400,000			100%	2,904,100,000
4	08	01	03	01	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas	jumlah laporan yang di buat, laporan babinsa dan bhabinkamtibmas			kec.wara	12 laporan	37,500,000	APBD Kota		12 bulan	40,000,000
4	08	01	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan			kec.wara	12 laporan	4,600,000	APBD Kota		12 laporan	4,600,000
4	08	01	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Yang di buat,laporan Organisasi Sosial,Keagamaan			kec.wara	12 laporan	5,500,000	APBD Kota		12 laporan	7,500,000
4	08	01	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat	Jumlah Laporan Yang di buat,laporan Musrenbang,Rans tra			kec.wara	12 laporan	4,300,000	APBD Kota		12 laporan	4,300,000
4	08	01	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan Yang dibuat,data penduduk perbulan			kec.wara	12 laporan	4,500,000	APBD Kota		12 laporan	5,700,000

4	08	01	03	42	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Amassangan	Jumlah biaya operasional kelurahan ,laporan jumlah atk, penggandaan, dll yang dibiayai		kel. Amassangan	12 laporan	450,000,000	APBD Kota		12 laporan	460,000,000
4	08	01	03	43	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Boting	Jumlah biaya operasional kelurahan ,laporan jumlah atk, penggandaan, dll yang dibiayai		kel. boting	12 laporan	450,000,000	APBD Kota		12 laporan	455,000,000
4	08	01	03	44	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Dangerakko	Jumlah biaya operasional kelurahan ,laporan jumlah atk, penggandaan, dll yang dibiayai		kel. Dangerako	12 laporan	450,000,000	APBD Kota		12 laporan	457,000,000
4	08	01	03	45	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Lagaligo	Jumlah biaya operasional kelurahan ,laporan jumlah atk, penggandaan, dll yang dibiayai		kel. lagaligo	12 laporan	458,000,000	APBD Kota		12 laporan	490,000,000
4	08	01	03	46	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Tompotikka	Jumlah biaya operasional kelurahan ,laporan jumlah atk, penggandaan, dll yang dibiayai		kel. tompotikka	12 laporan	465,000,000	APBD Kota		12 laporan	470,000,000
4	08	01	03	47	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Pajalesang	Jumlah biaya operasional kelurahan ,laporan jumlah atk, penggandaan, dll yang dibiayai		kel. pajalesang	12 laporan	455,000,000	APBD Kota		12 laporan	510,000,000
KECAMATAN WARA UTARA										3,223,084,150				3,384,273,562
4					URUSAN PENUNJANG									
4	08				KEWILAYAHAN									
4	08	02	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)	100%	417,470,000			100%	482,823,250
4	08	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar		Palopo	770 surat	15,700,000	APBD Kota		770 surat	20,000,000
4	08	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai		Palopo	3 Rek.	15,330,000	APBD Kota	-	3 Rek	16,096,500
4	08	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai		Palopo	4 Unit	1,575,000	APBD Kota		4 Unit	1,653,750
4	08	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar		Palopo	9 Orang	50,640,000	APBD Kota		9 Orang	51,500,000
4	08	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan		Palopo	3 Orang	11,000,000	APBD Kota		3 Orang	12,000,000

4	08	02	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi yang dibayar			Palopo	15 Orang	52,565,000	APBD Kota		15 Orang	60,000,000
4	08	02	01	11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah atau jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli			Palopo	3 Unit	5,250,000	APBD Kota		3 Unit	5,512,500
4	08	02	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			Palopo	10 buah	1,000,000	APBD Kota		10 buah	1,350,000
4	08	02	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan			Palopo	5 buah	990,000	APBD Kota		5 buah	1,039,500
4	08	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran			Palopo	3 Terbitan	2,520,000	APBD Kota		3 Terbitan	2,646,000
4	08	02	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas			Palopo	3 Kali	115,000,000	APBD Kota		3 Kali	117,000,000
4	08	02	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli			Palopo	5 Unit	30,000,000	APBD Kota		8 Unit	45,000,000
4	08	02	01	28	Pengadaan Mebeluer	Jumlah mebeleur yang dibeli			Palopo	10 buah	30,000,000	APBD Kota	-	5 buah	45,000,000
4	08	02	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang terpelihara			Palopo	1 Gedung	2,000,000	APBD Kota		1 Gedung	2,200,000
4	08	02	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara			Palopo	1 Unit	18,000,000	APBD Kota		1 Unit	20,500,000
4	08	02	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			Palopo	2 Unit	3,900,000	APBD Kota		2 Unit	4,000,000
4	08	02	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara			Palopo	5 Unit	1,000,000	APBD Kota		5 Unit	1,000,000
4	08	02	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara			Palopo	7 Unit	1,500,000	APBD Kota		7 Unit	1,575,000
4	08	02	01	41	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang direhab			Palopo	1 Gedung	45,000,000			1 Gedung	58,000,000
4	08	02	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan			Palopo	15 pasang	6,500,000	APBD Kota		15 pasang	8,500,000
4	08	02	01	49	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan			Palopo	15 pasang	5,000,000	APBD Kota		15 pasang	5,250,000
4	08	02	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti			Palopo	3 Kali	3,000,000	APBD Kota		3 Kali	3,000,000
4	08	02	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,500,000			100%	2,250,000
4	08	02	02	05	Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi yang dilaksanakan			Palopo	4 laporan	500,000	APBD Kota		4 laporan	750,000

4	08	02	02	06	Perencanaan dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen kinerja yang disusun			Palopo	5 dokumen	500,000	APBD Kota		5 dokumen	750,000
4	08	02	02	07	Penyusunan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang disusun			Palopo	4 dokumen	500,000	APBD Kota		4 dokumen	750,000
4	08	02	03		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Serta Pelayanan di Kecamatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	2,804,114,150			100%	2,899,200,312
4	08	02	03	01	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas	Jumlah laporan yang dibuat, laporan babinsa dan babinkamtibmas			Palopo	16 Orang	42,000,000	APBD Kota		16 Orang	43,628,000
4	08	02	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Jumlah laporan yang dibuat, laporan PBB, AJB, Ahli waris			Palopo	2 Orang	9,000,000	APBD Kota		2 Orang	10,584,000
4	08	02	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	Jumlah laporan yang dibuat, laporan organisasi sosial, keagamaan			Palopo	3 Orang	9,000,000	APBD Kota		3 Orang	11,876,000
4	08	02	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat	Jumlah laporan yang dibuat, laporan musrenbang, ranstra			Palopo	2 Orang	9,000,000	APBD Kota		2 Orang	10,600,000
4	08	02	03	05	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Batupasi	Jumlah biaya operasional kelurahan, laporan jumlah ATK, penggandaan dll yang dibiayai			Palopo	10 Orang	453,000,000	APBD Kota		10 Orang	455,000,000
4	08	02	03	06	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Penggoli	Jumlah biaya operasional kelurahan, laporan jumlah ATK, penggandaan dll yang dibiayai			Palopo	10 Orang	455,000,000	APBD Kota		10 Orang	460,000,000
4	08	02	03	07	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Sabbamparu	Jumlah biaya operasional kelurahan, laporan jumlah ATK, penggandaan dll yang dibiayai			Palopo	12 Orang	455,638,050	APBD Kota		12 Orang	478,419,953
4	08	02	03	08	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Luminda	Jumlah biaya operasional kelurahan, laporan jumlah ATK, penggandaan dll yang dibiayai			Palopo	12 Orang	455,363,050	APBD Kota		12 Orang	463,381,203
4	08	02	03	09	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Salobulo	Jumlah biaya operasional kelurahan, ATK, penggandaan dll yang dibiayai			Palopo	11 Orang	455,313,050	APBD Kota		11 Orang	472,278,703

4	08	02	03	10	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Pattene	Jumlah biaya operasional kelurahan, ATK, Penggandaan dll yang dibiayai			Palopo	12 Orang	452,000,000	APBD Kota		12 Orang	483,932,453
4	08	02	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan yang dibuat, data penduduk perubahan			Palopo	1 Orang	8,800,000	APBD Kota		1 Orang	9,500,000
KECAMATAN WARU SELATAN											2,197,670,000				2,295,400,000
4					URUSAN PENUNJANG										
4	08				KEWILAYAHAN										
4	08	03	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	282,920,000			100%	304,400,000
4	08	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Surat Menyurat			Kota Palopo	650 surat	8,000,000	APBD Kota		770 surat	9,000,000
4	08	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang dibayai			kota Palopo	5 Rekening	16,700,000	APBD Kota		5 Rekening	18,000,000
4	08	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Kendaraan Dinas/Operasional			kota Palopo	12 Unit	2,800,000	APBD Kota		12 Unit	2,800,000
4	08	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelola Keuangan SKPD			kota Palopo	7 Orang	58,500,000	APBD Kota		7 Unit	65,480,000
4	08	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor			kota Palopo	2 Orang	14,000,000	APBD Kota		3 Orang	16,000,000
4	08	03	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Pengelola Kepegawaian SKPD			kota Palopo	11 Orang	82,320,000	APBD Kota		11 Orang	85,320,000
4	08	03	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Peralatan Kantor			kota Palopo	20 Buah	2,400,000	APBD Kota		20 Buah	2,400,000
4	08	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Peralatan Kantor			kota Palopo	1 Terbitan	1,200,000	APBD Kota		1 Terbitan	1,200,000
4	08	03	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas			Kota Palopo	13 kali	62,000,000	APBD Kota		13 Kali	62,000,000
4	08	03	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Pemeliharaan Sarana Kantor			kota Palopo	1 Unit	2,400,000	APBD Kota		1 Unit	2,400,000
4	08	03	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Mobilitas Kantor			kota Palopo	1 Unit	19,000,000	APBD Kota		1 Unit	20,500,000
4	08	03	01	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas	Saranan Rumah Dinas			kota Palopo	1 Unit	2,000,000	APBD Kota		1 Unit	2,000,000
4	08	03	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Prasarana Kantor			kota Palopo	12 Buah	1,600,000	APBD Kota		12 Buah	1,700,000
4	08	03	01	45	Pengadaan Mesin/kartu absensi	Terciptanya disiplin aparatur			kota Palopo	1 Unit	2,500,000	APBD Kota		1 Unit	7,600,000
4	08	03	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Pegawai			kota Palopo	16 Pasang	7,500,000	APBD Kota		16 Pasang	8,000,000
4	08	03	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	2,250,000			100%	5,000,000

4	08	03	02	05	Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan	Jumlah kegiatan monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan			kota Palopo	4 Kegiatan	750,000	APBD Kota		4 Kegiatan	2,000,000
4	08	03	02	06	Perencanaan dan pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun			kota Palopo	4 Dokumen	750,000	APBD Kota		4 Dokumen	2,000,000
4	08	03	02	07	Penyusunan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen yang disusun			kota Palopo	3 Dokumen	750,000	APBD Kota		3 Dokumen	1,000,000
4	08	03	03		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Serta Pelayanan di Kecamatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,912,500,000			100%	1,986,000,000
4	08	03	03	01	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas	Jumlah Laporan yang dibuat, Laporan BABINSA dan Laporan BABINKAMTIBMAS			kota Palopo	12 Laporan	33,000,000	APBD Kota		12 Laporan	35,000,000
4	08	03	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Jumlah laporan yang dibuat, Laporan AJB, PBB dan Ahli Waris			kota Palopo	12 Laporan	4,500,000	APBD Kota		12 Laporan	4,500,000
4	08	03	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	Jumlah laporan yang dibuat, Laporan Organisasi Sosial, Ranstra dan Keagamaan			kota Palopo	4 Laporan	4,500,000	APBD Kota		4 Laporan	5,000,000
4	08	03	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat	Jumlah Laporan yang dibuat, Laporan Musrenbang, IMB			kota Palopo	4 Laporan	9,000,000	APBD Kota		4 Laporan	9,000,000
4	08	03	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan yang dibuat, Data Penduduk setiap Bulan			Kota Palopo	12 Laporan	6,500,000	APBD Kota		12 Laporan	7,500,000
4	08	03	03	29	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Takkala	Jumlah biaya Operasional, Kelurahan, Laporan Jumlah ATK dll yang dibiayai			kota Palopo	14 Belanja Operasional	465,000,000	APBD Kota		15 Belanja Operasional	485,000,000
4	08	03	03	30	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Songka	Jumlah biaya Operasional, Kelurahan, Laporan Jumlah ATK dll yang dibiayai			Kota Palopo	14 Belanja Operasional	460,000,000	APBD Kota		15 Belanja Operasional	480,000,000
4	08	03	03	31	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Sampoddo	Jumlah biaya Operasional, Kelurahan, Laporan Jumlah ATK dll yang dibiayai			Kota Palopo	14 Belanja Operasional	465,000,000	APBD Kota		15 Belanja Operasional	470,000,000

4	08	03	03	32	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Binturu	Jumlah biaya Operasional, Kelurahan, Laporan Jumlah ATK dll yang dibiayai		kota Palopo	14 Belanja Operasional	465,000,000	APBD Kota		15 Belanja Operasional	490,000,000
KECAMATAN WARA BARAT										2,984,950,000				3,044,450,000
4					URUSAN PENUNJANG									
4	08				KEWILAYAHAN									
4	08	04	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	339,150,000		100%	358,650,000
4	08	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat dinas yang di terbitkan			Kota palopo	4000 Surat	21,000,000	APBD Kota	4000 surat	30,000,000
4	08	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan			Kota palopo	4 Rekening	20,000,000	APBD Kota	4 rekening	20,000,000
4	08	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang di bayarkan pajaknya			Kota palopo	4 unit	2,500,000	APBD Kota	4 unit	2,500,000
4	08	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola jasa adm.keuangan			Kota palopo	8 Orang	59,100,000	APBD Kota	8 Orang	59,100,000
4	08	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas kebersihan			Kota palopo	2 Orang	8,300,000	APBD Kota	2 Orang	8,300,000
4	08	04	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Pengelola administrasi umum			Kota palopo	8 Orang	63,600,000	APBD Kota	8 Orang	73,600,000
4	08	04	01	11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			Kota palopo	4 unit	6,000,000	APBD Kota	4 unit	6,000,000
4	08	04	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia			Kota palopo	45 pcs	3,000,000	APBD Kota	45 pcs	3,000,000
4	08	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang diadakan			Kota palopo	1 unit	2,100,000	APBD Kota	1 Unit	2,100,000
4	08	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangann	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kota palopo	2 Terbitan	2,400,000	APBD Kota	1 Terbitan	2,400,000
					Belanja publikasi dan iklan	Jumlah kegiatan publiikasi			Kota palopo	4 kali kegiatan	2,000,000	APBD Kota	4 kali kegiatan	2,000,000
4	08	04	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah pelaksanaan perjalanan dinas			Kota palopo	8 kali	90,000,000	APBD Kota	8 kali	90,000,000
4	08	04	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan			Kota palopo	3 unit	8,350,000	APBD Kota	3 unit	8,350,000
4	08	04	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang di pelihara			Kota palopo	1 unit	8,000,000	APBD Kota	1 unit	8,000,000

4	08	04	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara			Kota palopo	1 unit	16,500,000	APBD Kota		1 unit	16,500,000
4	08	04	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara			Kota palopo	12 unit	2,800,000	APBD Kota		12 unit	2,800,000
4	08	04	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang di butuhkan			Kota palopo	28 stell	13,500,000	APBD Kota		28 stell	14,000,000
4	08	04	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan			Kota palopo	2 Orang	10,000,000	APBD Kota		2 Orang	10,000,000
4	08	04	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	4,000,000			100%	4,000,000
4	08	04	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan			Kota palopo	6 dok	2,000,000	APBD Kota		7 dok	2,000,000
4	08	04	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran			Kota palopo	3 dok	1,000,000	APBD Kota		3 dok	1,000,000
4	08	04	02	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun			Kota palopo	3 dok	1,000,000	APBD Kota		3 dok	1,000,000
4	08	04	03		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Serta Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	2,641,800,000			100%	2,681,800,000
4	08	04	03	01	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas	Jumlah Petugas Kantrantibmas			Kota palopo	12 orang/tahun	41,400,000	APBD Kota		12 orang/Tahun	41,400,000
4	08	04	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Jumlah Lembaga yang dikoordinir			Kota palopo	13 Lem.Masyaraka t	12,600,000	APBD Kota		13 Lem.Masyarakat	12,600,000
4	08	04	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga masyarakat yang dikoordinir			Kota palopo	3 Lem.Masyaraka t	12,600,000	APBD Kota		3 Lem.Masyarakat	12,600,000
4	08	04	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat	Jumlah lembaga yang di koordinir			Kota palopo	3 Lem.Masyaraka t	12,600,000	APBD Kota		3 Lem.Masyarakat	12,600,000
4	08	04	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengaduan Pelayanan			Kota palopo	10 Pengaduan	12,600,000	APBD Kota		10 Pengaduan	12,600,000
4	08	04	03	12	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Tamarundung	Jumlah Belanja Operasional Kel.Tamarundung			Kel Tamarundung	20 Belanja Operasional	510,000,000	APBD Kota		20 Belanja Operasional	550,000,000
4	08	04	03	13	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Battang	Jumlah Belanja Operasional Kel.Battang			Kota palopo	19 Belanja Operasional	510,000,000	APBD Kota		19 Belanja Operasional	510,000,000
4	08	04	03	14	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Lebang	Jumlah Belanja Operasional Kel. Lebang			Kota palopo	19 Belanja Operasional	510,000,000	APBD Kota		19 Belanja Operasional	510,000,000
4	08	04	03	15	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Battang Barat	Jumlah Belanja Operasional Kel.Battang Barat			Kel Battang Barat	19 Belanja Operasional	510,000,000	APBD Kota		19 Belanja Operasional	510,000,000
4	08	04	03	16	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Padang Lambe	Jumlah Belanja Operasional Kel.Padang Lambe			Kel .padang lambe	19 Belanja Operasional	510,000,000	APBD Kota		19 Belanja Operasional	510,000,000

KECAMATAN WARU TIMUR									3,711,805,000				4,492,648,000
4					URUSAN PENUNJANG								
4	08				KEWILAYAHAN								
4	08	05	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)	100%	393,807,000		100%	431,358,000
4	08	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar		Kecamatan Waru Timur	84 Jenis	21,434,000	APBD Kota	84 Jenis	22,342,000
4	08	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air , Listrik, Internet Yang Dibiayai		Kecamatan Waru Timur	3 Rekening/Bulan	92,000,000	APBD Kota	3 Rekening/Bulan	92,000,000
4	08	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional Yang Dibiayai		Kecamatan Waru Timur	24 Unit	9,120,000	APBD Kota	24 Unit	9,500,000
4	08	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Yang Dibayarkan		Kecamatan Waru Timur	10 Orng/Bulan	25,000,000	APBD Kota	10 Orng/Bulan	25,000,000
4	08	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor yang dibersihkan dan Jumlah tenaga Kebersihan		Kecamatan Waru Timur	1 Orng/Bulan	7,010,000	APBD Kota	1 Orng/Bln	7,710,000
4	08	05	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Jasa Administrasi yang Dibayarkan dan Jumlah kegiatan		Kecamatan Waru Timur	16 Orang	80,878,000	APBD Kota	16 Orang	85,866,000
4	08	05	01	11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Atau Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dibeli		Kecamatan Waru Timur	1 Unit	4,000,000	APBD Kota	1 Unit	4,000,000
4	08	05	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang diadakan		Kecamatan Waru Timur	15 Jenis	3,000,000	APBD Kota	15 Jenis	3,500,000
4	08	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Koran		Kecamatan Waru Timur	3 Exsampler/Bulan	18,000,000	APBD Kota	3 Exsampler/Bulan	18,000,000
4	08	05	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas		Kecamatan Waru Timur	25 Kali	87,000,000	APBD Kota	25 Kali	97,500,000
4	08	05	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dibeli		Kecamatan Waru Timur	1 Set	3,000,000	APBD Kota	1 Set	5,000,000
4	08	05	01	28	Pengadaan Mebeluer	Jumlah Mebeleur yang Dibeli		Kecamatan Waru Timur	6 Unit	7,000,000	APBD Kota	6 Unit	10,000,000
4	08	05	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor yang Terpelihara		Kecamatan Waru Timur	1 Unit	14,265,000	APBD Kota	1 Unit	20,640,000
4	08	05	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara		Kecamatan Waru Timur	1 Unit	19,500,000	APBD Kota	1 Unit	19,500,000
4	08	05	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara		Kecamatan Waru Timur	4 Unit	800,000	APBD Kota	4 Unit	8,800,000
4	08	05	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang Terpelihara		Kecamatan Waru Timur	4 Unit	1,800,000	APBD Kota	4 Unit	2,000,000

4	08	05	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	5,000,000			100%	8,000,000
4	08	05	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja yang Disusun			Kecamatan Wara Timur	3 Laporan	2,500,000	APBD Kota		3 Laporan	4,000,000
4	08	05	02	07	Penyusunan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun			Kecamatan Wara Timur	5 Laporan	2,500,000	APBD Kota		5 Laporan	4,000,000
4	08	05	03		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Serta Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	3,312,998,000			100%	4,053,290,000
4	08	05	03	01	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas	Jumlah Laporan Yang Dibuat , Laporan Babinsa dan Babinkantibmas			Kecamatan Wara Timur	21 Orng/Bulan	50,700,000	APBD Kota		21 Orng/Bln	68,400,000
4	08	05	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Jumlah Pelaporan Yang Dibuat , Laporan PBB, AJB, Ahli Waris			Kecamatan Wara Timur	5 Orng/Bulan	20,000,000	APBD Kota		5 Orng/Bln	24,000,000
4	08	05	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	Jumlah Pelaporan Yang Dibuat, Laporan Organisasi Sosial dan Keagamaan			Kecamatan Wara Timur	5 Orng/Bulan	20,000,000	APBD Kota		5 Orng/Bln	24,000,000
4	08	05	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat	Jumlah Laporan Yang Dibuat, Laporan Musrembang, Renstra			Kecamatan Wara Timur	5 Orng/Bulan	20,000,000	APBD Kota		5 Orng/Bln	24,000,000
4	08	05	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Yang Dibuat, Data Penduduk Perbulan			Kecamatan Wara Timur	5 Orng/Bulan	20,000,000	APBD Kota		5 Orng/Bln	24,000,000
4	08	05	03	48	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Benteng	Jumlah Biaya Operasional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK, Penggandaan dll Yang Di Biyai			Kecamatan Wara Timur	17 Belanja Operasional	450,000,000	APBD Kota		17 Belanja Operasional	550,000,000
4	08	05	03	49	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Surutanga	Jumlah Biaya Operasional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK, Penggandaan dll Yang Di Biyai			Kecamatan Wara Timur	17 Belanja Operasional	460,000,000	APBD Kota		17 Belanja Operasional	550,000,000

4	08	05	03	50	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Pontap	Jumlah Biaya Operasional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK, Penggandaan dll Yang Di Biayai			Kecamatan Wara Timur	17 Belanja Operasional	450,000,000	APBD Kota		17 Belanja Operasional	550,000,000
4	08	05	03	51	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Malatunrung	Jumlah Biaya Operasional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK, Penggandaan dll Yang Di Biayai			Kecamatan Wara Timur	17 Belanja Operasional	451,951,000	APBD Kota		17 Belanja Operasional	559,951,000
4	08	05	03	52	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Salekoe	Jumlah Biaya Operasional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK, Penggandaan dll Yang Di Biayai			Kecamatan Wara Timur	17 Belanja Operasional	457,505,000	APBD Kota		17 Belanja Operasional	559,097,000
4	08	05	03	53	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Salotellue	Jumlah Biaya Operasional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK, Penggandaan dll Yang Di Biayai			Kecamatan Wara Timur	17 Belanja Operasional	453,341,000	APBD Kota		17 Belanja Operasional	559,341,000
4	08	05	03	54	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Ponjalae	Jumlah Biaya Operasional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK, Penggandaan dll Yang Di Biayai			Kecamatan Wara Timur	17 Belanja Operasional	459,501,000	APBD Kota		17 Belanja Operasional	560,501,000
KECAMATAN MUNGKAJANG											2,328,650,000				2,548,546,000
4					URUSAN PENUNJANG										
4	08				KEWILAYAHAN										
4	08	06	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	398,550,000			100%	358,226,000
4	08	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk & Keluar			Kecamatan Mungkajang	1575 Surat	18,500,000	APBD Kota		1654 Surat	19,000,000
4	08	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Internet yang			Kecamatan Mungkajang	3 Rekening	14,000,000	APBD Kota		3 Rekening	14,000,000
4	08	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai			Kecamatan Mungkajang	13 Unit	4,300,000	APBD Kota		13 Unit	4,500,000
4	08	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang dibayar			Kecamatan Mungkajang	6 Orang	50,500,000	APBD Kota		6 Orang	52,400,000
4	08	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dibersihkan			Kecamatan Mungkajang	1 Gedung Kantor	10,000,000	APBD Kota		1 Gedung Kantor	10,000,000
4	08	06	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi yang di biayai			Kecamatan Mungkajang	9 Orang	75,200,000	APBD Kota		9 Orang	75,200,000

4	08	06	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			Kecamatan Mungkajang	35 jenis komponen listrik yang diadakan	3,200,000	APBD Kota		35 jenis komponen listrik yang diadakan	3,200,000
4	08	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan Koran / buku perundang-undangan			Kecamatan Mungkajang	36 Exemplar Koran/Tahun	3,800,000	APBD Kota		36 Exeplar Koran/Tahun	3,800,000
4	08	06	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas			Kecamatan Mungkajang	18 Kali	77,500,000	APBD Kota		19 Kali	78,500,000
4	08	06	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dibeli			Kecamatan Mungkajang	1 Set	27,500,000	APBD Kota		1 Set	27,500,000
4	08	06	01	28	Pengadaan Mebeluer	Jumlah Mebeleur yang Dibeli			Kecamatan Mungkajang	6 Unit	21,500,000	APBD Kota		6 Unit	21,500,000
4	08	06	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang terpelihara			Kecamatan Mungkajang	1 Gedung Kantor	18,150,000	APBD Kota		1 Gedung Kantor	19,280,000
4	08	06	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik			Kecamatan Mungkajang	1 Unit	20,500,000	APBD Kota		1 Unit	25,000,000
4	08	06	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			Kecamatan Mungkajang	12 Unit	800,000	APBD Kota		12 Unit	906,000
4	08	06	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			Kecamatan Mungkajang	8 Unit	3,100,000	APBD Kota		8 Unit	3,440,000
				41	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			Kecamatan Mungkajang	1 unit	50,000,000	APBD Kota			
4	08	06	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	5,800,000			100%	5,800,000
4	08	06	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan			Kecamatan Mungkajang	2 Laporan	1,800,000	APBD Kota		2 Laporan	1,800,000
4	08	06	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Jumlah laporan yang dihasilkan			Kecamatan Mungkajang	2 Laporan	1,200,000	APBD Kota		2 Laporan	1,200,000
4	08	06	02	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan yang akan disusun			Kecamatan Mungkajang	5 Laporan	2,800,000	APBD Kota		5 Laporan	2,800,000
4	08	06	03		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Serta Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,924,300,000			100%	2,184,520,000
4	08	06	03	01	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas	Jumlah laporan yang di buat, laporan babinsa dan babinkamtibmas			Kecamatan Mungkajang	48 Laporan	20,000,000	APBD Kota		48 Laporan	20,500,000
4	08	06	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Jumlah laporan yang dibuat, laporan PBB, AJB, Ahli waris			Kecamatan Mungkajang	48 Laporan	825,000	APBD Kota		48 Laporan	930,000

4	08	06	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	Jumlah laporan yang dibuat, laporan organisasi sosial, keagamaan			Kecamatan Mungkajang	48 Laporan	825,000	APBD Kota		48 Laporan	930,000
4	08	06	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat	Jumlah laporan yang dibuat, laporan musrenbang, Ranstra			Kecamatan Mungkajang	48 Laporan	825,000	APBD Kota		48 Laporan	930,000
4	08	06	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan yang dibuat, Data penduduk perbulan			Kecamatan Mungkajang	48 Laporan	825,000	APBD Kota		48 Laporan	930,000
4	08	06	03	18	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Mungkajang	Jumlah biaya operasional kelurahan, laporan jumlah ATK, penggandaan dll yang dibiayai			Kecamatan Mungkajang	16 Kegiatan	470,100,000	APBD Kota		16 Kegiatan	500,100,000
4	08	06	03	19	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Murante	Jumlah biaya operasional kelurahan, laporan jumlah ATK, penggandaan dll yang dibiayai			Kecamatan Mungkajang	15 Kegiatan	480,700,000	APBD Kota		15 Kegiatan	520,000,000
4	08	06	03	20	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Latuppa	Jumlah biaya operasional kelurahan, laporan jumlah ATK, penggandaan dll yang dibiayai			Kecamatan Mungkajang	15 Kegiatan	460,000,000	APBD Kota		15 Kegiatan	500,000,000
4	08	06	03	21	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Kambo	Jumlah biaya operasional kelurahan, laporan jumlah ATK, penggandaan dll yang dibiayai			Kecamatan Mungkajang	14 Kegiatan	490,200,000	APBD Kota		14 Kegiatan	640,200,000
KECAMATAN BARA											2,692,400,000				2,946,400,000
4					URUSAN PENUNJANG										
4	08				KEWILAYAHAN										
4	08	07	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	322,400,000			100%	334,300,000
4	08	07	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar			Kota Palopo	850 surat	10,000,000	APBD Kota		900 surat	11,000,000
4	08	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang harus dibiayai			Kota Palopo	18 rekening	25,000,000	APBD Kota		18 rekening	25,000,000
4	08	07	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang harus dibiayai			Kota Palopo	15 unit	4,000,000	APBD Kota		15 unit	4,400,000
4	08	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi yang harus dibayar			Kota Palopo	6 orang	47,600,000	APBD Kota		6 orang	47,600,000

4	08	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah jasa tenaga kebersihan yang harus dibayar			Kec. Bara Kota Palopo	2 orang	18,500,000	APBD Kota		2 orang	18,500,000
4	08	07	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi yang harus dibayar			Kec. Bara Kota Palopo	10 orang	63,000,000	APBD Kota		10 orang	65,000,000
4	08	07	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik yang diadakan			Kec. Bara Kota Palopo	10 jenis	5,000,000	APBD Kota		10 jenis	4,900,000
4	08	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang diadakan			Kec. Bara Kota Palopo	3 exemplar	14,400,000	APBD Kota		3 exemplar	14,400,000
4	08	07	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas			Kec. Bara Kota Palopo	12 kali	96,600,000	APBD Kota		12 kali	100,000,000
4	08	07	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pelaksanaan Tugas Aparatur dengan optimal			Kec. Bara Kota Palopo	7 unit	5,000,000	APBD Kota		8 unit	5,500,000
4	08	07	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah Gedung /kantor yang terpelihara			Kec. Bara Kota Palopo	2 unit	6,000,000	APBD Kota		2 unit	8,000,000
4	08	07	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil dinas/Operasional yang terpelihara			Kec. Bara Kota Palopo	1 unit	25,000,000	APBD Kota		1 unit	28,000,000
4	08	07	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			Kec. Bara Kota Palopo	4 unit	800,000	APBD Kota		5 unit	500,000
4	08	07	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			Kec. Bara Kota Palopo	7 unit	1,500,000	APBD Kota		8 unit	1,500,000
4	08	07	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	5,000,000			100%	5,000,000
4	08	07	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun			Kec. Bara Kota Palopo	5 laporan	2,500,000	APBD Kota		5 laporan	2,500,000
4	08	07	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun			Kec. Bara Kota Palopo	1 laporan	750,000	APBD Kota		1 laporan	750,000
4	08	07	02	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang tersusun			Kec. Bara Kota Palopo	1 laporan	1,750,000	APBD Kota		1 laporan	1,750,000
4	08	07	03		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Serta Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	2,365,000,000			100%	2,607,100,000

4	08	07	03	01	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas	Jumlah Laporan yang dibuat tentang kemandirian & ketertarikan Masyarakat			Kec. Bara Kota Palopo	4 laporan	31,000,000	APBD Kota		4 laporan	34,100,000
4	08	07	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Jumlah Laporan yang dibuat, Laporan Ahli Waris, PBB, serta Pernyataan Penyerahan Hak			Kec. Bara Kota Palopo	3 laporan	16,000,000	APBD Kota		3 laporan	22,000,000
4	08	07	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan/Laporan yang dibuat terkait organisasi, sosial, dan keagamaan			Kec. Bara Kota Palopo	3 laporan	28,000,000	APBD Kota		3 laporan	30,000,000
4	08	07	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat	Jumlah Laporan Yang dibuat, Terkait Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			Kec. Bara Kota Palopo	4 Laporan	20,000,000	APBD Kota		4 Laporan	25,000,000
4	08	07	03	11	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan	jumlah Laporan yang dibuat terkait pelayanan dan data kependudukan			Kec. Bara Kota Palopo	5 laporan	20,000,000	APBD Kota		5 laporan	21,000,000
4	08	07	03	37	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Temmalebba	Jumlah kebutuhan operasional kelurahan yang dibiayai			Kota Palopo	12 objek belanja	450,000,000	APBD Kota		14 objek belanja	495,000,000
4	08	07	03	38	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Balandai	Jumlah kebutuhan operasional kelurahan yang harus dibiayai			Kota Palopo	12 objek belanja	450,000,000	APBD Kota		14 objek belanja	495,000,000
4	08	07	03	39	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Rampoang	Jumlah kebutuhan Operasional Kelurahan yang harus dibiayai			Kota Palopo	12 objek belanja	450,000,000	APBD Kota		12 objek belanja	495,000,000
4	08	07	03	40	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Tobulung	Jumlah kebutuhan operasional kelurahan yang harus dibiayai			Kota Palopo	12 objek belanja	450,000,000	APBD Kota		12 objek belanja	495,000,000
4	08	07	03	41	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan BuntuDatu	Jumlah kebutuhan operasional kelurahan yang harus dibiayai			Kota Palopo	12 objek belanja	450,000,000	APBD Kota		12 objek belanja	495,000,000
KECAMATAN SENDANA											2,184,260,000				2,376,630,000
4					URUSAN PENUNJANG										
4	08				KEWILAYAHAN										
4	08	08	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	329,560,000			100%	339,930,000
4	08	08	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Surat Dinas yang diterbitkan			Kota Palopo	550 surat	20,000,000	APBD Kota		560 surat	22,000,000

4	08	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, air, dan internet yang dibiayai			Kota Palopo	3 rekening	12,600,000	APBD Kota		3 rekening	13,000,000
4	08	08	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibiayai penerbitan STNKnya			Kota Palopo	4 Unit kendaraan dinas	1,600,000	APBD Kota		4 Unit	1,600,000
4	08	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga jasa administrasi keuangan yang dibayar honoranya			Kota Palopo	7 orang	53,000,000	APBD Kota		7 orang	58,300,000
4	08	08	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli			Kota Palopo	11 Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih	2,200,000	APBD Kota		11 Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih	2,420,000
4	08	08	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah jasa administrasi umum yang dibayarkan			Kota Palopo	45 orang	92,000,000	APBD Kota		45 orang	88,200,000
4	08	08	01	11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan kantor yang diadakan			Kota Palopo	12 unit perlengkapan kantor	4,500,000	APBD Kota		12 unit perlengkapan kantor	4,500,000
4	08	08	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor			Kota Palopo	35 jenis komponen listrik yang diadakan	1,500,000	APBD Kota		40 jenis komponen listrik yang diadakan	2,500,000
4	08	08	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah langganan koran atau buku Peraturan perundang-undangan			Kota Palopo	3 Penerbitan koran yang dibayarkan	3,960,000	APBD Kota		3 Langganan Koran yang dibayarkan	3,960,000
4	08	08	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas yang dibayarkan			Kota Palopo	7 SPPD yang dibayarkan	100,000,000	APBD Kota		7 SPPD	100,000,000
4	08	08	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah units peralatan kantor yang diadakan			Kota Palopo	12 Unit peralatan kantor	3,500,000	APBD Kota		12 unit peralatan kantor	3,500,000
4	08	08	01	28	Pengadaan Meubelur	Jumlah unit meubelair yang diadakan			Kota Palopo	6 unit Meubelair	3,500,000	APBD Kota		6 unit meubelair	3,500,000
4	08	08	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah luas (m2) bangunan gedung kantor yang dipelihara			Kota Palopo	3700 m2	7,500,000	APBD Kota		3700 m2	8,250,000
4	08	08	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibiayai			Kota Palopo	1 Unit kendaraan dinas	20,000,000	APBD Kota		1 unit kendaraan dinas jabatan	22,000,000
4	08	08	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara			Kota Palopo	5 jenis/unit perlengkapan gedung kantor	1,000,000	APBD Kota		6 Unit Perlengkapan kantor	1,200,000
4	08	08	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara			Kota Palopo	5 unit peralatan kantor	2,700,000	APBD Kota		15 unit peralatan kantor	5,000,000
4	08	08	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	5,000,000			100%	5,000,000
4	08	08	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan			Kota Palopo	3 Dokumen perencanaan	2,000,000	APBD Kota		3 Dokumen	2,000,000

[illegible]

4	08	09	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	321,030,000			100%	354,250,000
4	08	09	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar		Kecamatan Telluwanua	1220 Surat	10,000,000	APBD Kota		1305 Surat	11,000,000
4	08	09	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	22,000,000	APBD Kota		1 Tahun	24,200,000
4	08	09	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas terpelihara dengan baik		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	2 Tahun	1,750,000	APBD Kota		2 Tahun	2,500,000
4	08	09	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbitnya dokumen administrasi keuangan		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	7 Personil	60,000,000	APBD Kota		7 Personil	66,000,000
4	08	09	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pegawai Kantor Kecamatan nyaman untuk beraktifitas		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	2 Unit	6,000,000	APBD Kota		2 unit	6,600,000
4	08	09	01	10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Persentase pelayanan umum dan kepegawaian yang optimal		Kecamatan Telluwanua	1 Tahun	55,000,000	APBD Kota		1 Tahun	60,500,000
4	08	09	01	11	Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dapat menunjang kegiatan kantor		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	4 Unit	2,000,000	APBD Kota		4 unit	2,000,000
4	08	09	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kelancaran di dalam beraktifitas		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	2 Rekening	1,000,000	APBD Kota		2 Rekening	1,500,000
4	08	09	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Setiap tamu yang dfatang terlayani dengan baik		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	1,000,000	APBD Kota		1 Tahun	1,500,000
4	08	09	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan para ASN		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	4 Exemplar	5,280,000	APBD Kota		4 Exemplar	5,950,000
4	08	09	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Berkembangnya pengetahuan bagi yang melakukan perjalanan dinas		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	105,000,000	APBD Kota		1 Tahun	110,000,000
4	08	09	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	2 Unit	25,000,000	APBD Kota		2 unit	30,000,000
4	08	09	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan yang siap pakai		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Unit	25,000,000	APBD Kota		1 unit	30,000,000
4	08	09	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dapat menunjang kegiatan kantor		Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	2,000,000	APBD Kota		1 Tahun	2,500,000
4	08	09	02	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	4,000,000			100%	4,500,000

4	08	09	02	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	4,000,000	APBD Kota		1 Tahun	4,500,000
4	08	09	03		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Serta Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	3,249,700,000			100%	3,570,840,000
4	08	09	03	01	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas	Persentase pelaksanaan kegiatan kantramtibmas			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	52,000,000	APBD Kota		1 Tahun	52,500,000
4	08	09	03	02	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan tugas umum pemerintahan			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	20,600,000	APBD Kota		1 Tahun	23,540,000
4	08	09	03	03	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	12,800,000	APBD Kota		1 Tahun	14,900,000
4	08	09	03	04	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan masyarakat			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	5,000,000	APBD Kota		1 Tahun	5,000,000
4	08	09	03	22	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Mancani	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	452,000,000	APBD Kota		1 Tahun	497,200,000
4	08	09	03	23	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Batu Walenrang	Terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang pemerintahan			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	451,100,000	APBD Kota		1 Tahun	496,100,000
4	08	09	03	24	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Maroangin	Terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	452,000,000	APBD Kota		1 Tahun	497,200,000
4	08	09	03	25	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Pentoangan	Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	451,200,000	APBD Kota		1 Tahun	496,100,000
4	08	09	03	26	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Jaya	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	451,000,000	APBD Kota		1 Tahun	496,100,000
4	08	09	03	27	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Salubattang	Terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	451,000,000	APBD Kota		1 Tahun	496,100,000
4	08	09	03	28	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Sumarambu	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat			Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	1 Tahun	451,000,000	APBD Kota		1 Tahun	496,100,000
URUSAN PENDUKUNG											46,100,835,955				48,776,208,630

SEKRETARIAT DAERAH								35,544,917,955				37,571,327,680
5				URUSAN PENDUKUNG								
5	01			SEKRETARIAT DAERAH								
5	01	01	01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)	100%	11,396,788,195		100%	11,193,324,620
5	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim		Kota Palopo	3000 Pucuk Surat	248,543,575	APBD Kota	3000 Pucuk Surat	270,000,000
5	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, dan listrik dan alat komunikasi kantor dan rumah jabatan yang dibayarkan.		Kota Palopo	468 Rekening	1,791,522,620	APBD Kota	470 Rekening	1,875,522,620
5	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Palopo	120 Unit	680,000,000	APBD Kota	120 Unit	680,000,000
5	01	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Pembayaran Pajak dan Retribusi Rujab atau Rumdis Kantor		Kota Palopo	4 Unit	22,500,000	APBD Kota	4 Unit	23,000,000
5	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang Digunakan		Kota Palopo	25 Buah	100,000,000	APBD Kota	25 Buah	110,000,000
5	01	01	07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor		Kota Palopo	7 Orang	65,000,000	APBD Kota	7 Orang	71,500,000
5	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor		Kota Palopo	7 Orang	305,000,000	APBD Kota	7 Orang	305,000,000
5	01	01	09	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Pengelola Administrasi Umum		Kota Palopo	185 Orang	2,802,600,000	APBD Kota	185 Orang	2,802,600,000
5	01	01	17	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan		Kota Palopo	27 Orang	703,850,000	APBD Kota	27 Orang	824,430,000
5	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kota Palopo	500 Kegiatan	1,250,000,000	APBD Kota	500 Kegiatan	1,300,000,000
5	01	01	23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan		Kota Palopo	10 Unit	725,000,000	APBD Kota	5 Unit	95,000,000
5	01	01	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		Kota Palopo	1975 roll/unit/buah/lusin	645,000,000	APBD Kota	1980 roll/unit/buah/lusin	650,000,000
5	01	01	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah units peralatan kantor yang diadakan		Kota Palopo	6 Unit	255,540,000	APBD Kota	6 Unit	255,540,000
5	01	01	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara		Kota Palopo	2 Unit	390,000,000	APBD Kota	2 Unit	400,000,000

5	01	01	01	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Yang di Pelihara			Kota Palopo	2 Unit	200,000,000	APBD Kota		2 Unit	235,000,000
5	01	01	01	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara			Kota Palopo	4 Unit	150,000,000	APBD Kota		4 Unit	165,000,000
5	01	01	01	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara			Kota Palopo	20 Unit	284,000,000	APBD Kota		20 Unit	320,000,000
5	01	01	01	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara			Kota Palopo	31 Unit	320,000,000	APBD Kota		31 Unit	350,000,000
5	01	01	01	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipelihara			Kota Palopo	7 Jenis	80,000,000	APBD Kota		7 Jenis	80,000,000
5	01	01	01	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			Kota Palopo	5 Jenis	76,732,000	APBD Kota		5 Jenis	77,732,000
5	01	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			Kota Palopo	5 Jenis	41,500,000	APBD Kota		5 Jenis	43,000,000
5	01	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan			Kota Palopo	4 Set	190,000,000	APBD Kota		4 Set	190,000,000
5	01	01	01	52	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti			Kota Palopo	100 Peserta	70,000,000	APBD Kota		100 Peserta	70,000,000
5	01	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	180,385,900			100%	200,985,900
5	01	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan			Kota Palopo	6 Dokumen	20,000,000	APBD Kota		6 Dokumen	25,000,000
5	01	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen hasil laporan keuangan tepat waktu dan akuntabel			Kota Palopo	1 Dokumen	126,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	138,600,000
5	01	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kota Palopo	1 Laporan	34,385,900	APBD Kota		1 Laporan	37,385,900
5	01	01	03		Program Tata Laksana Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik	Angka Rata-Rata Kinerja SPM Perangkat Daerah (%) Cakupan Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	475,200,000			100%	721,000,000
5	01	01	03	01	Penataan dan Evaluasi Kelembagaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Di Evaluasi			Kota Palopo	20 Perangkat Daerah	190,000,000	APBD Kota		20 Perangkat Daerah	250,000,000

5	01	01	03	02	Evaluasi Analisis Jabatan	Jumlah Hasil Analisis Beban Kerja			Kota Palopo	155 Dokumen	100,000,000	APBD Kota		155 Dokumen	150,000,000
5	01	01	03	03	Pelayanan Publik dan Abdi Bakti Tani	Jumlah Perangkat Daerah Yang menjalankan Pelayanan Publik dan Penilaian Abdi Bakti Tani			Kota Palopo	40 Perangkat Daerah	90,000,000	APBD Kota		49 Perangkat Daerah	150,000,000
5	01	01	03	04	Evaluasi SOP	Jumlah SOP yang di Evaluasi dari Perangkat Daerah			Kota Palopo	155 Dokumen	80,000,000	APBD Kota		155 Dokumen	150,000,000
5	01	01	03	07	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Jumlah Dokumen LAKIP			Kota Palopo	1 Dokumen	9,200,000	APBD Kota		1 Dokumen	12,000,000
5	01	01	03	53	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang			Kota Palopo	1 Dokumen	6,000,000	APBD Kota		1 Dokumen	9,000,000
5	01	01	04		Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Ketersediaan Dokumen LKPJ dan LPPD Tepat Waktu (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	453,500,000			100%	508,000,000
5	01	01	04	01	Pelaksanaan Penyelesaian Capai Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah Penyesuaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Daerah			Kota Palopo	13 Kegiatan	70,000,000	APBD Kota		12 Kegiatan	77,000,000
5	01	01	04	02	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Kota Palopo	12 Kegiatan	75,000,000	APBD Kota		12 Kegiatan	82,500,000
5	01	01	04	03	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendukung bagi Pengelolaan Keuangan Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan			Kota Palopo	9 Dokumen	60,000,000	APBD Kota		9 Dokumen	60,000,000
5	01	01	04	04	Bimbingan Teknis kepada Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang ikut Bimbingan Teknis			Kota Palopo	100 Aparat	18,500,000	APBD Kota		100 Aparat	18,500,000
5	01	01	04	05	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Kota Palopo	1 Laporan	140,000,000	APBD Kota		1 Laporan	170,000,000
5	01	01	04	06	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan / Dokumen SPM Pemerintah Kota Palopo yang dibuat (buah / tahun)			Kota Palopo	1 Laporan	90,000,000	APBD Kota		1 Laporan	100,000,000
5	01	01	05		Program Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan yang Ditangani (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	6,599,739,400			100%	6,853,724,550

5	01	01	05	01	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah SDM yang dapat meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat			Kota Palopo	450 SDM	301,288,900	APBD Kota		450 SDM	340,000,000
5	01	01	05	02	Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah Unit Lembaga Keagamaan Yang turut mengembangkan Perlindungan Sosial masyarakat Palopo			Kota Palopo	9 Unit	5,102,740,500	APBD Kota		9 Unit	5,218,014,550
5	01	01	05	03	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jumlah Jamaah Haji dan Jamaah Umroh Kota Palopo			Kota Palopo	179 Jamaah Haji	1,145,710,000	APBD Kota		179 Jamaah Haji	1,245,710,000
5	01	01	05	04	Koordinasi Kepemudaan, Keolahragaan, Kesehatan, Pendidikan, dan Budaya	Jumlah Even Kepemudaan Olahraga Kesehatan dan Pendidikan Yang di koordinasikan (Kali pertahun)			Kota Palopo	5 Even	25,000,000	APBD Kota		5 Even	25,000,000
5	01	01	05	05	Koordinasi Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat			Kota Palopo	5 Kegiatan	25,000,000	APBD Kota		5 Kegiatan	25,000,000
5	01	01	06		Program Koordinasi Pengelolaan Perekonomian Daerah	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pengelolaan Perekonomian Daerah (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	435,000,000			100%	505,000,000
5	01	01	06	02	Pemetaan Potensi Ekonomi untuk Mendorong Perkembangan Perekonomian	Persentase Komoditas Barang Bersubsidi yang diawasi (%)			Kota Palopo	1 Kegiatan	150,000,000	APBD Kota		1 Kegiatan	170,000,000
5	01	01	06	03	Inventarisasi dan Pengawasan LKM	Sosialisasi Pengembangan Pasar daerah			Kota Palopo	50 LKM	70,000,000	APBD Kota		50 LKM	70,000,000
5	01	01	06	04	Sosialisasi Pengembangan Pasar Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi			Kota Palopo	210 Peserta	45,000,000	APBD Kota		210 Peserta	45,000,000
5	01	01	06	05	Pendataan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Jumlah sarana dan prasarana perekonomian			Kota Palopo	100 Sarana	50,000,000	APBD Kota		100 Sarana	70,000,000
5	01	01	06	06	Pelaksanaan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jumlah UMKM yang difasilitasi mendapatkan akses keuangan.			Kota Palopo	100 UMKM	120,000,000	APBD Kota		100 UMKM	150,000,000
5	01	01	07		Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pemenuhan 17 Standar LPSE (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		80%	684,517,460			90%	759,517,460
5	01	01	07	02	Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen (Paket) penyelenggara administrasi pengadaan barang dan jasa			Kota Palopo	97 Paket	284,517,460	APBD Kota		97 Paket	304,517,460

5	01	01	07	04	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa			Kota Palopo	12 Dokumen	100,000,000	APBD Kota		12 Dokumen	100,000,000
5	01	01	07	07	Evaluasi Monitoring dan Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Evaluasi Monitoring Pengendalian Barang dan Jasa			Kota Palopo	4 Dokumen	50,000,000	APBD Kota		4 Dokumen	55,000,000
5	01	01	07	08	Peningkatan Sistem Informasi E-Procurement	Jumlah kegiatan/sistem informasi E-Procurement			Kota Palopo	1 Kegiatan	250,000,000	APBD Kota		1 Kegiatan	300,000,000
5	01	01	08		Program Pengelolaan Administrasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Dikoordinasikan (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	175,000,000			100%	195,000,000
5	01	01	08	01	Evaluasi dan Monitoring Pembangunan	Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi pembangunan			Kota Palopo	8 Dokumen	90,000,000	APBD Kota		8 Dokumen	100,000,000
5	01	01	08	03	Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan daerah bidang perencanaan Pengendalian & Pelaporan yang disusun			Kota Palopo	12 Laporan	85,000,000	APBD Kota		12 Laporan	95,000,000
5	01	01	09		Program Pengelolaan Ketatausahaan, Keprotokoleran dan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	4,601,200,000			100%	4,839,000,000
5	01	01	09	10	Penyediaan Fasilitas Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas Kegiatan pemerintahan Daerah Yang Disediakan			Kota Palopo	3 Jenis	60,000,000	APBD Kota		3 Jenis	66,000,000
5	01	01	09	11	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana yang disiapkan Pemerintah			Kota Palopo	1 Jasa	170,000,000	APBD Kota		1 Jasa	200,000,000
5	01	01	09	12	Penyediaan Jasa Keprotokoleran dan urusan dalam	Jumlah Jasa Keprotokoleran dan Urusan Dalam yang Disediakan			Kota Palopo	15 orang	132,000,000	APBD Kota		15 Orang	132,000,000
5	01	01	09	13	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Dialog/audiensi			Kota Palopo	120 Dialog	140,000,000	APBD Kota		120 Dialog	141,000,000
5	01	01	09	14	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah peserta Kunjungan Kerja			Kota Palopo	120 Orang	130,000,000	APBD Kota		120 Orang	200,000,000
5	01	01	09	15	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Orang Koordinasi			Kota Palopo	100 Orang	2,500,000,000	APBD Kota		100 Orang	2,500,000,000
5	01	01	09	16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Jumlah Kunjungan Kerja			Kota Palopo	15 Kunjungan	1,469,200,000	APBD Kota		15 Kunjungan	1,600,000,000
5	01	01	10		Program Pengembangan Pengelolaan Kehumasan	Cakupan Layanan Kehumasan yang Ditangani (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	2,805,159,000			100%	3,380,000,000

5	01	01	10	01	Penyediaan bahan bacaan dan kerja sama media	Tersedianya bahan bacaan dan pelaksanaan kerjasama media			Kota Palopo	50 Media	600,000,000	APBD Kota		50 Media	660,000,000
5	01	01	10	02	Pelaksanaan Peliputan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya peliputan dan pendokumentasian kegiatan kegiatan Pemerintah Kota Palopo			Kota Palopo	200 Kegiatan	500,000,000	APBD Kota		200 Kegiatan	770,000,000
5	01	01	10	03	Pelaksanaan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terpublikasinya beirta penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kota Palopo melalui Media Massa			Kota Palopo	1000 Berita	1,705,159,000	APBD Kota		10000 Berita	1,950,000,000
5	01	01	11		Program Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah	Cakupan Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah yang Dikaji dan Difinalisasi (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	320,000,000			100%	330,000,000
5	01	01	11	01	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah koordinasi dan kerjasama dalam bidang kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha			Kota Palopo	25 Dokumen	70,000,000	APBD Kota		25 Dokumen	75,000,000
5	01	01	11	02	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Kerjasama daerah	Jumlah hasil kualitas dan kuantitas kerjasama antar daerah dan lembaga dalam maupun luar			Kota Palopo	3 Kegiatan	250,000,000	APBD Kota		3 Kegiatan	255,000,000
5	01	01	12		Program Pengelolaan Administrasi Keuangan,Perbendaharaan dan TPTGR	Cakupan Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan TPTGR yang Ditangani (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	125,000,000			100%	137,500,000
5	01	01	12	02	Penanganan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemerintah Daerah	Jumlah penanganan ganti rugi (TP-TGR) pemerintah daerah			Kota Palopo	1 Laporan	125,000,000	APBD Kota		1 Laporan	137,500,000
5	01	01	13		Program Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Cakupan Layanan Produk Hukum Daerah yang Dikaji dan Difinalisasi (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S 7)		100%	1,068,970,000			100%	1,169,970,000
5	01	01	13	01	Penanganan Kasus Pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Tertanganinya Perkara Hukum dan Bantuan			Kota Palopo	3 Kasus	700,000,000	APBD Kota		3 Kasus	770,000,000
5	01	01	13	02	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Aparat Pengawasan Fungsional	Tindak lanjut Hasil Pengawasan internal dan eksternal			Kota Palopo	31 LHP Kota Palopo	7,450,000	APBD Kota		32 LHP Kota Palopo	10,450,000
5	01	01	13	03	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi RANHAM			Kota Palopo	4 Peserta	10,200,000	APBD Kota		4 Peserta	13,200,000

5	01	01	13	04	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan produk hukum daerah kota			Kota Palopo	440 Produk	263,000,000	APBD Kota		450 Produk	273,000,000
5	01	01	13	06	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan yang dipublikasikan			Kota Palopo	9 Dokumen	68,260,000	APBD Kota		10 Dokumen	78,260,000
5	01	01	13	07	Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah			Kota Palopo	1 Dokumen	20,060,000	APBD Kota		1 Dokumen	25,060,000
5	01	01	14		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		60%	6,224,458,000			65%	6,778,305,150
5	01	01	14	01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah pembangunan kelurahan.			Kota Palopo	48 Kelurahan	31,169,000	APBD Kota		48 Kelurahan	34,285,900
5	01	01	14	02	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah peserta dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			Kota Palopo	1043 Peserta	6,043,289,000	APBD Kota		1048 Peserta	6,417,617,900
5	01	01	14	03	Evaluasi Perkembangan dan Pembinaan Inovasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi perkembangannya dan pembinaan inovasi			Kota Palopo	48 Kelurahan	150,000,000	APBD Kota		48 Kelurahan	326,401,350
SEKRETARIAT DPRD											10,555,918,000				11,204,880,950
5					URUSAN PENDUKUNG										
5	02				SEKRETARIAT DEWAN										
5	02	01	01		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	3,571,223,000			100%	3,682,251,450
5	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat			andi baso rahim no. 2 kota palopo	40 persen	67,000,000	APBD Kota		40 persen	67,000,000
5	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan			andi baso rahim no. 2 kota palopo	42 Rek	275,850,000	APBD Kota		42 Rek	280,850,000
5	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang terbayarkan pajaknya			andi baso rahim no. 2 kota palopo	36 Unit	15,750,000	APBD Kota		36 Unit	20,000,000
5	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan yang terpenuhi			andi baso rahim no. 2 kota palopo	20 Orang	336,000,000	APBD Kota		20 Orang	350,000,000
5	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang terpenuhi			andi baso rahim no. 2 kota palopo	12 Orang	56,700,000	APBD Kota		12 Orang	59,535,000

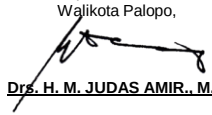
5	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Intasiasi Listrik / Penerangan yang tersedia			andi baso rahim no. 2 kota palopo	30 jenis	5,500,000	APBD Kota		30 jenis	6,050,000
5	02	01	01	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Tugas dan Fungsi Pejabat daerah dan mobilitas kantor	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia			andi baso rahim no. 2 kota palopo	5000 paket	180,000,000	APBD Kota		5000 paket	180,000,000
5	02	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang Tersedianya			andi baso rahim no. 2 kota palopo	20 jenis	4,488,000	APBD Kota		20 jenis	5,161,200
5	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang tersedia			andi baso rahim no. 2 kota palopo	27 jenis	230,000,000	APBD Kota		27 jenis	253,000,000
5	02	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi regional dan nasional yang di ikuti			andi baso rahim no. 2 kota palopo	30 Kegiatan	630,000,000	APBD Kota		30 Kegiatan	750,000,000
5	02	01	01	25	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi			andi baso rahim no. 2 kota palopo	10 jenis	15,000,000	APBD Kota		10 jenis	15,750,000
5	02	01	01	27	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD			andi baso rahim no. 2 kota palopo	10 jenis	45,885,000	APBD Kota		10 jenis	52,767,750
5	02	01	01	31	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara			andi baso rahim no. 2 kota palopo	5 unit	55,000,000	APBD Kota		5 unit	60,500,000
5	02	01	01	32	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Yang terpelihara			andi baso rahim no. 2 kota palopo	4 Unit/Kendaraan	84,000,000	APBD Kota		4 Unit/Kendaraan	88,200,000
5	02	01	01	33	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /operasional yang terpelihara			andi baso rahim no. 2 kota palopo	4 Unit/Kendaraan	57,750,000	APBD Kota		4 Unit/Kendaraan	60,637,500
5	02	01	01	35	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara			andi baso rahim no. 2 kota palopo	56 jenis	13,750,000	APBD Kota		56 jenis	15,750,000
5	02	01	01	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara			andi baso rahim no. 2 kota palopo	23 jenis	10,000,000	APBD Kota		23 jenis	20,000,000
5	02	01	01	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di rehab			andi baso rahim no. 2 kota palopo	2 Paket	200,000,000	APBD Kota		2 Paket	88,000,000
5	02	01	01	46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakian dinas yang tersedia			andi baso rahim no. 2 kota palopo	126 Pasang	166,000,000	APBD Kota		126 Pasang	181,500,000
5	02	01	01	52	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti			Kota Palopo	30 kegiatan	412,000,000	APBD Kota		30 kegiatan	412,000,000

5	02	01	01	53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Pengelola administrasi umum yang terbayarkan			andi baso rahim no. 2 kota palopo	105 Orang	655,550,000	APBD Kota		105 Orang	655,550,000
5	02	01	01	56	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD	Jumlah anggota DPRD terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan yang terpenuhi			andi baso rahim no. 2 kota palopo	25 Orang	55,000,000	APBD Kota		25 Orang	60,000,000
5	02	01	02		Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		100%	1,950,000			100%	2,110,000
5	02	01	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM) Yang			andi baso rahim no. 2 kota palopo	6 dok	550,000	APBD Kota		6 dok	605,000
5	02	01	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran			andi baso rahim no. 2 kota palopo	2 dok	300,000	APBD Kota		2 dok	350,000
5	02	01	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang			andi baso rahim no. 2 kota palopo	8 dok	550,000	APBD Kota		8 dok	605,000
5	02	01	02	05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah Jenis Dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, RKA-P, DPA dan DPPA yang			andi baso rahim no. 2 kota palopo	6 dok	550,000	APBD Kota		6 dok	550,000
5	02	01	03		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		Ada	6,982,745,000			Ada	7,520,519,500
5	02	01	03	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Pembahasan ranperda dan raperda inisiatif			andi baso rahim no. 2 kota palopo	22 perda	1,037,015,000	APBD Kota		22 perda	1,055,716,500
5	02	01	03	02	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	jumlah bimtek /wordshop yang di ikuti oleh anggota DPRD yang terfasilitasi, jumlah penyediaan tenaga ahli fraksi			andi baso rahim no. 2 kota palopo	20 kali	4,778,560,000	APBD Kota		20 kali	5,136,416,000
5	02	01	03	03	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja yang di ikuti oleh Anggota DPRD			andi baso rahim no. 2 kota palopo	20 kali	21,000,000	APBD Kota		20 kali	23,100,000
5	02	01	03	05	Penyusunan Profil Kinerja DPRD atau laporan hasil kinerja Akhir Tahun DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kinerja tahunan DPRD yang tersusun			andi baso rahim no. 2 kota palopo	2 dok	2,100,000	APBD Kota		2 dok	2,310,000

5	02	01	03	06	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna Istimewa yang terlaksana			andi baso rahim no. 2 kota palopo	45 kali	103,400,000	APBD Kota		45 kali	113,740,000
5	02	01	03	07	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah	Jumlah peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang di sosialisasikan kepada Masyarakat			andi baso rahim no. 2 kota palopo	3 kali	30,000,000	APBD Kota		3 kali	35,000,000
5	02	01	03	08	Kegiatan Reses	Jumlah Fasilitas Hasil reses DPRD (POKPIK) Yang di akomodir dalam RKPD			andi baso rahim no. 2 kota palopo	3 kali	1,010,670,000	APBD Kota		3 kali	1,154,237,000
5	02	01	04		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S 8)		Ada	424,210,000			Ada	459,631,000
5	02	01	04	01	Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD	persentase fasilitasi hasil rapat di tidak lanjut			andi baso rahim no. 2 kota palopo	240 Rapat	44,000,000	APBD Kota		240 Rapat	50,600,000
5	02	01	04	02	Monitoring dan Evaluasi Anggaran	Dokumen rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK dan Data Hasil Monitoring dan Hasil Evaluasi Penggunaan			andi baso rahim no. 2 kota palopo	14 dok	7,000,000	APBD Kota		14 dok	7,700,000
5	02	01	04	03	Pembahasan LKPJ Walikota	Jumlah dokumen catatan dan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah			andi baso rahim no. 2 kota palopo	2 dok	20,000,000	APBD Kota		2 dok	22,000,000
5	02	01	04	04	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	jumlah fasilitasi dengar pendapat yang di terima oleh DPRD			andi baso rahim no. 2 kota palopo	93 kali	46,000,000	APBD Kota		93 kali	52,900,000

5	02	01	04	05	Pembahasan Anggaran Daerah	jumlah dokumen fasilitasi Pembahasan KUA, PPAS APBD dan P APBD yang terfasilitasi dan rekomendasi hasil kajian tenaga ahli yang tersusun			andi baso rahim no. 2 kota palopo	4 dok	40,000,000			4 dok	44,000,000
5	02	01	04	06	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	jumlah rancangan daerah yang disebarluaskan			andi baso rahim no. 2 kota palopo	16 Ranperda	66,510,000	APBD Kota		16 Ranperda	73,161,000
5	02	01	04	07	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi infotorial yang tersedia			andi baso rahim no. 2 kota palopo	3 Media	165,000,000	APBD Kota		3 Media	170,000,000
5	02	01	04	08	Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	persentase hasil rancangan peraturan daerah yang di uji			andi baso rahim no. 2 kota palopo	16 Ranperda	35,700,000	APBD Kota		100 persen	39,270,000
TOTAL											774,835,722,300				824,993,262,037

Palopo, 01 Juli 2019
Walikota Palopo,


Drs. H. M. JUDAS AMIR., M.H

BAB. VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja 2020
1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.98
2	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.39
3	Angka Harapan Hidup	70.34
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64
5	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	81
6	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0
7	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	11.47
8	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	15
9	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.93
10	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	66
11	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	75
12	Level SPIP Daerah (Point)	3
13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	81.12
14	Pertumbuhan PDRB (%)	7.16
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.51
16	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.3
17	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	2.2
18	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.17
19	Kontribusi sektor Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.82

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	7.16
2	Laju inflasi (%/Tahun)	3.3
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.3
	PDRB per Kapita ADHK (Juta/Tahun)	30.84
	Pengeluaran Per Kapita (Juta/Tahun)	17.69
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,866
5	Indeks Gini (Angka)	0.337
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	92.36
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.64
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	271,988
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,829
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	7.64
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.585
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.45
	Indeks Kesehatan	77.53
	Indeks Pendidikan	77.66
	Indeks Pengeluaran	77.45
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	77.98
12	Angka melek huruf (%)	100
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10.39
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.15
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.34
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	1.22
17	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	59.57
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	77.97
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	42.67
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	63.24
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	82.15

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	45.71
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9.51
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	90.47
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	74.76
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	53.86
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	26.65
	<i>Laki – Laki</i>	18.3
	<i>Perempuan</i>	8.35
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	39.91
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.12
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	20.61
28	Opini BPK	WTP
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91.65
30	Penguatan cadangan pangan (%)	87.53
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)	0
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	3
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)	
	Padi	36,040
	Jagung	5,847
	Ubi Kayu	181
	Ubi Jalar	5.27
	Sagu	17
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	3343.53
	Daging (Ruminansia) Ton	252.53
	Daging Sapi (Ton)	252.2
	Daging Kerbau (Ton)	0.33
	Daging Kambing (Ton)	1
	Daging Unggas (Ton)	3091
	Daging Ayam Kampung (Ton)	157
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	2934
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	8,62
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	1814

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	1623
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	45.92
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	145.9
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	3
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	
	Kelapa Dalam	32.88
	Kopi	68
	Kopi Robusta	68
	Kopi Arabika	0.01
	Cengkeh'	132
	Kakao	400
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	2
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.03
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0.19
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.3
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	2
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24.3
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.92
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a
45	Pertumbuhan Industri (%)	5
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	0.25
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	110,650
2	Nilai tukar petani	n/a
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	52
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	98.32
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	78.6
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	1.83
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	19
10	Rasio ketergantungan	47.58

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	Pendidikan	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	100
2	Angka Partisipasi Kasar	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)	
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	5.8
	Tamat SD/ sederajat (%)	11
	Tamat SMP/ sederajat (%)	23
	Tamat SMA (%)	38
	Tamat SMK (%)	4
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	18
	Diploma I/II (%)	0.6
	Diploma III (%)	3
	Diploma IV/S1-S3 (%)	14.1
4	Angka Partisipasi Murni	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	100
5	Angka partisipasi sekolah (%)	
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	1000
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	1000
6	Angka Putus Sekolah:	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0
7	Angka Kelulusan:	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100
8	Angka Melanjutkan (AM):	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100
9	Fasilitas Pendidikan:	
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	100
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	33
	SD/MI (per 10,000)	36
	SMP/ MTS (per 10,000)	26
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	672
	SD/MI (per 10,000)	640
	SMP/ MTS (per 10,000)	731
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.59
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	100
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	100
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	100
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	100
2.	Kesehatan	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	99
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	60
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	9
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	4
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	5
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	5
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	71.8
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	96
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	96.35
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	80.76

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	87.2
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	0
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	8.9
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	210
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	81.3
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	64.15
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	7
26	Angka kejadian Malaria (per 100.000)	14
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (per 100.000)	38
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	2.1
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	100
35	Cakupan puskesmas (%)	133,33
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	75
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	93.1
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	91.6
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	70.3
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	68
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100
42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pekerjaan Umum:	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	64
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	29
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	61
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	1.32
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	-
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	92
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	35
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	25
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	20
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	5
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	72
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	20.5
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	100
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	95
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	4.7
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.8
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.9
3	Penataan Ruang:	
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	3,982
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	76.93
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	52

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a
6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a
7	Ketaatan terhadap RTRW	100
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
1	Rasio rumah layak huni	0.19
2	Rasio permukiman layak huni (%)	95.12
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	91.4
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	97.62
5	Persentase permukiman yang tertata (%)	100
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0.8
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	15
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	5
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	30
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) (Orang/Kelurahan)	1
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	13.13
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100
5	Persentase Penegakan PERDA	100
6.	Sosial	
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	79.26
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	79.45
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	79.45
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	12
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	2.61
Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1	Tenaga Kerja	
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	6.64
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	12.5
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	82
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	6
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	27
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	45
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	1.12
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	1
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	20
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	11
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	14
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	10.3
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	12
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	3.3
4	Rasio KDRT (per 10.000)	3
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	45.71

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	30
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	20
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	30
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	23
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	15
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	
	APM Perempuan pada Tingkat SD	100
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	100
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	81.5
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	79
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	71
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	72
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	43.3
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a
3	Pangan	
1	Ketersediaan pangan utama (%)	11.4
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	2154
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	54
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	88
4	Pertanahan	
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1.8
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	2
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100
5	Lingkungan Hidup	
Kabupaten/Kota		
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P	
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Baik
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	n/a
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	40.2
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	
	<i>Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)</i>	1
	<i>Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)</i>	1
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0
12	Penetapan hak MHA	0
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Belum Ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
	Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	91.75
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	4.77
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	70
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	88.37
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	77.98
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	100
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	100
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.83
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.87
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.8
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	95
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	2.5
4	Persentase LSM aktif (%)	6
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	7
6	Persentase PKK aktif	100
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.29
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	n/a
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	0
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	45
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	78.42
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	n/a
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	7
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	17
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	23
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	37.05
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	82.43
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	66.04
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	49.77
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0.11
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	11
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	27.11
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	9
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	66
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	2.74
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	83.78
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	21
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	84.1
9	Perhubungan	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1,464,415
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	702
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	11.47
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	24.7
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	71
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	22
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1,463,897
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	609,144
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	2,032,555
10	Komunikasi dan Informatika	
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	3.55
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.88
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	80.2
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.1

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.5
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	
1	Persentase koperasi aktif (%)	72
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	30.2
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	100
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	100
12	Penanaman Modal	
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	150
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	491,372
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	9
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	25
13	Kepemudaan dan Olah Raga	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	71
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.9
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	40
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	68.3
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	68.3
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	30
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	8
14	Statistik	
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada
2	Buku "kabupaten/Kota dalam angka"	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada
15	Persandian	
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	76
16	Kebudayaan	
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	15
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	3
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	50
17	Perpustakaan	
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	9.45

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	48
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.21
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1,254
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1,332
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100
18	Kearsipan	
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	20
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	9
Layanan Urusan Pilihan		
1.	Pariwisata	
1	Kunjungan wisata (%)	100
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2
3	PAD sektor pariwisata (%)	4.3
2.	Pertanian	
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	17.43
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	
	Padi	36,040.00
	Jagung	5,847.00
	Ubi Kayu	181
	Ubi Jalar	5.27
	Sagu	17
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)	
	Padi	6,51
	Jagung	7,25
	Ubi Kayu	28
	Ubi jalar	13
	Sagu	0.3
7	Cakupan bina kelompok petani	52

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	100
4	Perdagangan	
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-700,000
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	12
5	Perindustrian	
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	15.3
6	Transmigrasi	
1	Persentase transmigran swakarsa	0
7	Perikanan	
1	Produksi perikanan (%)	100
	Target Produksi Perikanan Daerah (Ton/Tahun)	20041
2	Konsumsi ikan (%)	100
	Target Konsumsi Perikanan Daerah (Kg/Tahun)	63
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	4.9
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	81
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a
7	Nilai tukar nelayan	n/a
Penunjang Urusan		
1.	Perencanaan Pembangunan	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100
2.	Keuangan	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
2	Persentase SILPA	0
3	Persentase SILPA terhadap APBD	2
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	10
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	52
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	48
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	1.95
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	1.1
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	35
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	949
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2262
4.	Penelitian dan pengembangan	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	11
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	40
	Penerapan SIDA:	
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	3
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	36
5.	Pengawasan	
1	Persentase tindak lanjut temuan	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja 2020
2	Persentase pelanggaran pegawai	0.02
3	Jumlah temuan BPK	15
6.	Sekretariat Dewan	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

6.2 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Sesuai Permendagri 100 Tahun 2018, Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.3
Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Palopo Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2017/2018	Target 2020
	Aspek Pelayanan Dasar				
I	SPM Bidang Pendidikan				
	Pendidikan Dasar				
1	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)		%		100
	A	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99.23	100
	B	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	77.89	100
	C	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	106.00	100
	D	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	84.91	100
	E	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99.32	100
	F	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	77.89	100
	Pendidikan Kesetaraan				
2	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		%		100
	A	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.68	100
	B	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1.87	100
	Pendidikan Anak Usia Dini				
3	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		%	75.00	100
II	SPM Bidang Kesehatan				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017/2018	Target 2020
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	92.80	100
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	95.79	100
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98.00	100
	Pelayanan kesehatan balita			
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	62.51	100
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
5	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.52	100
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
6	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%		100
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
7	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%		100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			
8	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%		100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus			
9	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%		100
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan			100
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis			
11	Persentase penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	79.93	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	%		100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017/2018	Target 2020
	manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan			
III	SPM Bidang Pekerjaan Umum			
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
1	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	88.63	100
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik			
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%		100
IV	SPM Bidang Perumahan			
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana			
1	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%		100
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah			
2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%		100
V	SPM Bidang Ketentraman dan Keterlibatan Umum			
	Pelayanan ketentraman dan keterlibatan Umum			
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	97.90	100
	Pelayanan informasi rawan bencana			
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%		100
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%		100
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
4	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%		100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017/2018	Target 2020
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
5	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%		100
VI	SPM Bidang Sosial			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti			
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%		100
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%		100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%		100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
4	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%		100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana			
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%		100

BAB. VII P E N U T U P

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo, Penyusunan RKPD Tahun 2020 Kota Palopo disusun dengan mempedomani beberapa dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo 2018-2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019;
- b. Perda Nomor 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

RKPD Tahun 2020 Kota Palopo merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Palopo 2018-2023 sehingga secara efektif pula akan mengakomodir pencapaian tujuan dan sarana pembangunan daerah termasuk strategi, arah kebijakan serta program pembangunan dan program perangkat daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Palopo.

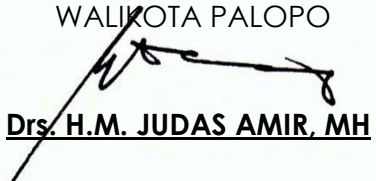
Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2020 ini berorientasi pada proses dengan pendekatan teknokratik, Partisipatif, Politis dan Atas bawah dan bawah atas serta memperhatikan substansi pendekatan holistik-tematik, integrative dan spasial.

Dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional memuat tema, prioritas RKPD dan arah kebijakan serta program prioritas yang sifatnya strategis dan berupa matriks rencana program dan kegiatan prioritas setiap Perangkat Daerah disertai dengan pagu anggaran yang sifatnya indikatif dan menjadi pedoman sinergitas bagi setiap pelaku pembangunan.

Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis Kota Palopo, maka titik berat pembangunan Tahun 2020 diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan dan Derajat Kehidupan Masyarakat, Perbaikan Tata Kelola dan Kualitas Layanan Publik serta Penguatan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antar Prioritas Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Olehnya RKPD Kota Palopo akan menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan public, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan melihat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun ke depan yang diharapkan dapat menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegiatan prioritas, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan; serta menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan umum anggaran dan Prioritas plafon anggaran sementara.

WALIKOTA PALOPO


Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH